

TRANSFORMASI EKONOMI BALI



**PETA JALAN
EKONOMI KERTHI BALI
MENUJU BALI ERA BARU:
HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA**

November 2021



TRANSFORMASI EKONOMI BALI

PETA JALAN
Ekonomi Kerthi Bali
Menuju Bali Era Baru:
Hijau, Tangguh, Sejahtera





Kata Pengantar

Pada tahun 2020-2021 perekonomian Bali mengalami keterpurukan yang mendalam, sebagai dampak Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun juga berdampak negatif pada perekonomian, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat, di mana tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat cukup tinggi. Karena itu Bali memerlukan perhatian khusus agar dapat pulih dengan segera.

Bersamaan dengan itu, Bali perlu melakukan transformasi ekonomi, selain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, juga untuk mengatasi permasalahan yang timbul saat ini, akibat ketergantungan yang tinggi terhadap kegiatan pariwisata, baik domestik maupun internasional. Ketergantungan perekonomian Bali pada sektor pariwisata turut berdampak pada ketahanan ekonomi yang rentan terhadap guncangan eksternal seperti teror, gunung meletus, dan pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Sektor pariwisata yang berkembang sangat pesat di Provinsi Bali, menjadikan sektor lainnya relatif “terabaikan” . Potensi sumber daya lokal seperti tradisi pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kreatif berbasis budaya Bali tidak diupayakan secara optimal.

Dalam upaya mewujudkan tercapainya pemulihan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah menyusun **Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera**. Peta jalan ini disusun berlandaskan kepada Visi Indonesia 2045, dan RPJMD 2018 – 2023 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal Sad Kertih dan semangat ajaran Hindu Tri Hita Karana.

Peta Jalan ini menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang, serta mengakomodasi perubahan kehidupan pasca COVID-19 dalam penataan kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan berbagai sumber daya lokal Bali baik alam, manusia dan budayanya, secara optimal dan berkelanjutan. Perubahan tersebut diantaranya adalah mempecepat otomatisasi dan digitalisasi pada segala aspek aktivitas pembangunan, memperkuat sektor lainnya di luar pariwisata, mengembangkan pariwisata berkualitas serta penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau. Melalui upaya-upaya tersebut, ekonomi Bali diharapkan akan pulih lebih kuat, tidak hanya kembali ke *trajectory* pertumbuhan sebelum COVID-19, namun mampu tumbuh berkelanjutan dan bertransformasi menuju Bali yang lebih hijau, tangguh, dan sejahtera.

Kementerian PPN/Bappenas siap mendukung implementasi **Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh Dan Sejahtera**, dalam kerangka terwujudnya cita-cita Indonesia Maju Tahun 2045 dan mengajak semua agen pembangunan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh budaya, masyarakat luas serta akademisi untuk bersama, mewujudkan Bali Era Baru. Semoga buku ini dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan Provinsi Bali.

Jakarta, November 2021
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa





Kata Pengantar

Om Swastiastu,

Puja pangastuti dan angayubagia, Saya haturkan kehadiran Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kertha waranugraha-Nya, buku ini dapat disusun. Buku "Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera" yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sangat bermanfaat bagi Provinsi Bali sebagai acuan dan pedoman dalam membangun Provinsi Bali untuk mewujudkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

EKONOMI KERTHI BALI ini digali dari keluhuran nilai-nilai kearifan lokal Bali dan wejangan /petuah para Leluhur/Tetua Bali. Leluhur/Tetua Bali mewariskan adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang adiluhung, serta sumber daya manusia (Krama) yang unggul. Alam, Manusia/Krama, dan Kebudayaan Bali yang dikaruniai dan diwariskan ini merupakan potensi dan kekuatan yang sangat besar untuk membangun perekonomian Bali berbasis sumber daya lokal (*genuine Bali*) melalui sektor pertanian, kelautan/perikanan dari hulu sampai ke hilir, serta industri kerajinan rakyat berbasis budaya *branding* Bali, yang didukung oleh pariwisata.

Kami menyadari bahwa selama ini pembangunan pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat berjalan tanpa arah yang tepat, bergeser, bahkan melompat ke sektor pariwisata. Sektor pariwisata Bali sangat dominan dalam perekonomian Bali, namun perkembangan pariwisata ini justru telah mendorong Krama Bali semakin meninggalkan potensi sumber daya lokal, sehingga tradisi pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat berbasis budaya Bali semakin menurun. Berbagai kejadian gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana bukan alam, serta terjadinya Pandemi Covid-19 telah memberikan pembelajaran bagi Kami tentang betapa rentannya gejolak perekonomian Bali yang hanya bertumpu pada satu dominasi sektor pariwisata. Kami berharap buku Peta Jalan yang mengusulkan pemulihan ekonomi sekaligus transformasi ekonomi Bali ini dapat segera Kami implementasikan dalam upaya membangun Bali, terutama menata struktur dan fundamental perekonomian Bali, dengan dukungan penuh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Bali.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memacu Kita semua dalam menata kembali struktur dan fundamental perekonomian Bali secara lebih terarah, menyeluruh, terpadu, seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keorisinilan Bali, dan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital. Keorisinilan sumber daya lokal Bali harus menjadi penggerak utama dalam membangun perekonomian Bali menuju Bali Era Baru.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Bali, November 2021
Gubernur Provinsi Bali,

WAYAN KOSTER





Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya atas tersusunnya Buku **“Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera”**. Penyusunan Peta Jalan ini dilaksanakan sejak April 2021, sebagai upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Bali akibat dampak Pandemi COVID-19 serta transformasi ekonomi Bali untuk mewujudkan Bali Era Baru.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, segenap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali, serta segenap Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Bali atas berbagai dukungan yang diberikan. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Riset dan Inovasi Bali yang telah memfasilitasi berbagai kegiatan diskusi serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan studi ini khususnya melalui serial kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di bulan Agustus – Oktober tahun 2021. Diskusi lintas direktorat di internal Bappenas sangat membantu dalam memperoleh temuan awal studi ini dan kami sangat berterima kasih kepada Kedeputusan dan direktorat yang hadir dan berpartisipasi dalam FGD kami.

Tidak lupa juga rasa terima kasih yang tak terhingga kepada perwakilan pelaku usaha serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang turut berpartisipasi dalam FGD. Melalui kegiatan tersebut, kami memperoleh informasi terkait gambaran sosial dan ekonomi di berbagai sektor dari Petani Muda Keren, Kelompok Tani Ternak Sato Luwih, Bali Sri Organik, PT Bali Maya Permai Food Canning, PT Golden Kirrin Internasional, Agung Bali Collection, Tenun Putri Ayu, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Pupuan, Jamu Bu Desak, CV Prima Indonesia, Asosiasi Tuna Longline II (ATL II), VCO She Demen, Toosi Coffe, PT Bali Turtle Island Development, Kioski Gallery, Lembaga Sertifikasi Profesi – Sekolah Perhotelan Bali, Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, PT Bali Agro Investama, UD. Ari, Pertunenan Srinadi, Cap Menuh, PT Bali Sari, SUNSRI House Of Jewelry, Divadi Furniture, CV Mente Bali Sejahtera (East Bali Cashews), Ketua BPD Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Bali, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ketua DPD SIPCO Bali, idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia), ASEPHI Bali (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia), Gus Teja World Music, Gamedev Bali, KEMBALI Innovation Hub, Indonesian Hotel Manager Association (IHGMA) Bali, Alila Villas Uluwatu, Frie Bali Echo Beach, Hactiv8, dan Desa Wisata Panglipuran.

Masukan dan informasi yang sangat berharga juga kami dapatkan melalui diskusi dengan institusi pemerintahan dan riset yang berkontribusi dalam FGD kami antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, BPS Provinsi Bali. Satgas COVID-19 Bali, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, Kantor Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk, Kantor Kesehatan Pelabuhan Benoa, Bekraf Denpasar (Dharma Negara Alaya Art & Creative Hub Denpasar), BDI Bali (Balai Diklat Industri), Universitas Udayana dan Politeknik Pariwisata Bali.



Tidak lupa untuk saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang belum disebutkan di atas, termasuk kepada tim internal saya yang telah mencurahkan semua upaya di dalam perumusan peta jalan ini. Semoga partisipasi dan kepedulian kita pada pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dapat mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi di Provinsi Bali.

Jakarta, November 2021
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas



Amalia Adininggar Widyasanti

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ucapan Terima Kasih.....	5
Daftar Isi.....	7
Daftar Tabel	9
Daftar Gambar	10
Ringkasan Eksekutif	12
BAB I. PENDAHULUAN.....	21
BAB II. MODAL DASAR, LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BALI..	26
2.1 Modal Dasar.....	26
2.1.1 Modal Dasar Alam.....	26
2.1.2 Modal Dasar Krama (Sumber Daya Manusia) dan Kondisi Demografi	28
2.1.3 Modal Dasar Budaya dan Adat Istiadat	30
2.2 Lingkungan Strategis	31
2.3 Tantangan Pembangunan Bali Ke Depan	33
BAB III. KERANGKA EKONOMI BALI	38
3.1 Kondisi Ekonomi	38
3.2 Identifikasi Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali	42
3.3 Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Bali	43
3.4 Skenario Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Bali.....	49
3.5 Skenario Transformasi Ekonomi Bali.....	52
BAB IV. EKONOMI BALI PULIH DENGAN CEPAT DAN SEHAT	60
4.1 Strategi Utama 1: Pengendalian Pandemi COVID-19 dan Vaksinasi Bali-Wide	62
4.2 Strategi Utama 2: Bantuan Sosial dan Program Padat Karya.....	64
4.3 Strategi Utama 3: Insentif dan Fasilitas Pelaku Usaha	65
4.4 Strategi Utama 4: Peningkatan Citra Bali sebagai Bali Aman COVID-19.....	66
4.5 Strategi Utama 5: Reaktivasi Destinasi Wisata Bali	68
4.6 Strategi Utama 6: Reaktivasi Ekonomi Non-pariwisata	70
4.7 Dana Alokasi Khusus Provinsi Bali TA 2022.....	73
BAB V. BALI ERA BARU: HIJAU, TANGGUH, SEJAHTERA.....	79
5.1 Bali Pintar dan Sehat	80
5.2 Bali Produktif	87
5.3 Bali Hijau	103
5.4 Bali Terintegrasi.....	109
5.5 Bali <i>Smart Island</i>	115
5.6 Bali Kondusif.....	121
BAB VI. PENUTUP	134



Daftar Referensi.....	136
Lampiran I – Quick Wins Pemulihan Ekonomi Bali Jangka Pendek	138
Lampiran II – Skenario Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang Provinsi Bali	163
Lampiran III – Pagu Alokasi DAK Fisik Provinsi Bali TA 2022	164






Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Komposisi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	29
Tabel 3. 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha (% , yoy).....	39
Tabel 3. 2. Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran (% , yoy)	39
Tabel 3. 3. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Datang Langsung ke Indonesia dan ke Bali, tahun 2014-2020.....	40
Tabel 3. 4. Klasifikasi Komoditas Potensial Bali	45
Tabel 3. 5. Proyeksi dan Target Pemulihan Kunjungan Wisman ke Bali.....	50
Tabel 3. 6. Proyeksi Jumlah Kunjungan Wisman Mancanegara ke Bali (2021-2025) dalam Skenario Optimis, Moderat, dan Pesimis	50
Tabel 3. 7. Proyeksi Total Yield dari Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali	51
Tabel 3. 8. Proyeksi Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Bali (2021-2025) dalam Skenario Optimis, Moderat, dan Pesimis	51
Tabel 3. 9. Proyeksi Total Yield dari Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Bali	51
Tabel 3. 10. Sasaran Jangka Panjang Provinsi Bali	53
Tabel 4. 1. Alokasi DAK Fisik TA 2022 Untuk DAK Reguler dan Penugasan	73
Tabel 5. 1. Ekspor Barang Melalui Provinsi Bali.....	110
Tabel 5. 2. APBD Pemerintah Provinsi Bali 2018-2020.....	122
Tabel 5. 3. Penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali	123
Tabel 5. 4. Belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.....	123
Tabel 5. 5. Kriteria UMKM Berdasarkan Modal	126

Daftar Gambar

Gambar 1. 1.	Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan.....	22
Gambar 2. 1	Posisi Provinsi Bali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	26
Gambar 2. 2.	Penggunaan Lahan di Provinsi Bali	27
Gambar 3. 1.	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2020 (% yoy)	38
Gambar 3. 2.	Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2017 – Triwulan III-2021 (% yoy)	38
Gambar 3. 3.	Sebaran Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020 (%yoy).....	40
Gambar 3. 4.	Profil dan Perkembangan UMKM di Provinsi Bali.....	42
Gambar 3. 5.	Hasil Identifikasi Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Bali	42
Gambar 3. 6.	Produktivitas Tenaga Kerja per Provinsi, 2020 (Juta Rp per Tenaga Kerja).....	43
Gambar 3. 7.	Hasil Analisis Pemetaan Komoditas Potensial Sektor Primer Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	44
Gambar 3. 8.	Potensi Pengembangan Industri Komoditas Unggulan Sektor Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan	45
Gambar 3. 9.	Potensi Pengembangan Industri Komoditas Unggulan Sektor Perkebunan dan Hortikultura.....	46
Gambar 3. 10.	Pemetaan Sub-sektor Unggulan Industri Pengolahan Provinsi Bali.....	47
Gambar 3. 11.	Keterkaitan Sektor Industri dengan Sektor Primer dan Sektor Pariwisata	47
Gambar 3. 12.	Pemetaan Penguatan Industri Eksisting Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	48
Gambar 3. 13.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali pada Masa Pemulihan (% yoy)	52
Gambar 3. 14.	Proyeksi Kebutuhan Investasi Tahun 2022-2045 (Triliun Rupiah).....	54
Gambar 4. 1.	Kerangka Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bali.....	60
Gambar 4. 2.	Perumusan Sasaran Strategis, Sub-Sasaran Strategis, dan Strategi Utama/Quick Wins..	62
Gambar 4. 3.	Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi DAK Fisik TA 2022 Provinsi Bali.....	74
Gambar 5. 1.	Jumlah SMK Menurut Jenis Keahlian Provinsi Bali	82
Gambar 5. 2.	Perkembangan Produktivitas Bali 2010-2020 (PDRB per pekerja).....	87
Gambar 5. 3.	Jumlah Usaha dan Sebaran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Bali	90
Gambar 5. 4.	Isu Strategis Subsektor Unggulan Ekonomi Kreatif Bali.....	91
Gambar 5. 5.	Arah Industrialisasi Provinsi Bali yang Bernilai Tambah Tinggi	95
Gambar 5. 6.	Rekomendasi dan Arah Kebijakan Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan Bali.....	98
Gambar 5. 7.	Besarnya Pembangkit Listrik dan Diversifikasi Sumber Energi Listrik.....	103
Gambar 5. 8.	Intensitas Emisi CO2 di Provinsi Indonesia, 2010 & 2020	104
Gambar 5. 9.	Nilai Proyeksi Penurunan Emisi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2045	105
Gambar 5. 10.	Proyeksi Penciptaan Green Jobs dari Transformasi Ekonomi Hijau Provinsi Bali	106
Gambar 5. 11.	Skenario Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon menuju Ekonomi Hijau di Provinsi Bali	106
Gambar 5. 12.	Ekspor Provinsi Bali Berdasarkan Pelabuhan Muat (dalam %).....	109
Gambar 5. 13.	Perkembangan Ekspor Barang Bali: 2010-2020.....	109
Gambar 5. 14.	Perkembangan Ekspor Produk Perikanan (HS 03) Provinsi Bali Berdasarkan Pelabuhan Muat 2010-2018 (dalam juta USD)	110
Gambar 5. 15.	Pergerakan Barang/Kargo Penerbangan Provinsi Bali Tahun 2015-2020 (ribu ton).....	110
Gambar 5. 16.	Perkembangan Ekspor Bali per Bulan (dalam juta USD)	111
Gambar 5. 17.	Palapa Ring Indonesia.....	115
Gambar 5. 18.	Cakupan layanan operator seluler Provinsi Bali.....	116
Gambar 5. 19.	Bitrates map provinsi Bali	116
Gambar 5. 20.	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan lokasi	117
Gambar 5. 21.	East Ventures digital competitiveness index Provinsi Bali	117
Gambar 5. 22.	Matriks analisis shift share dan LQ.....	118
Gambar 5. 23.	Struktur Pendapatan dalam APBD 2019.....	122

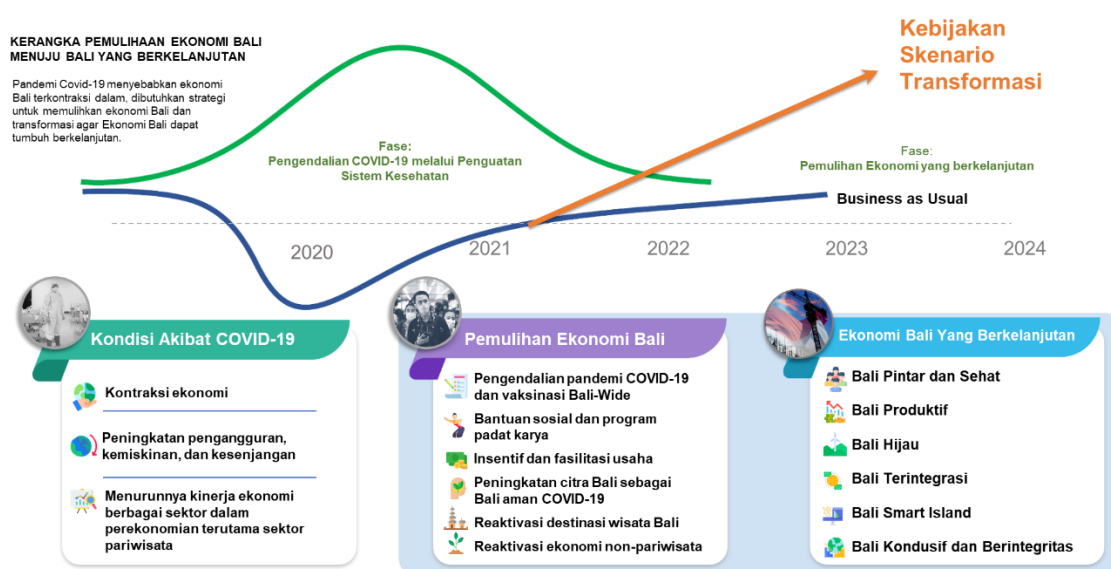


Gambar 5. 24. Persentase PAD Pemerintah Provinsi Bali terhadap APBD dan PDRB	123
Gambar 5. 25. Pertumbuhan Kredit Provinsi Bali.....	124
Gambar 5. 26. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Provinsi Bali.....	124
Gambar 5. 27. Realisasi Investasi Tahunan di Bali (Rp Miliar).....	125
Gambar 5. 28. Negara Asal PMA Bali di Tahun 2020	126
Gambar 5. 29. Indeks Reformasi Birokrasi 2015-2020.....	127
Gambar 5. 30. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Bali.....	128
Gambar 5. 31. Capaian Nilai Indeks Birokrasi Kabupaten/kota di Provinsi Bali.....	128

Ringkasan Eksekutif

Selama Pandemi COVID-19 perekonomian Bali mengalami kontraksi yang terdalam dan pulih paling lambat dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Perekonomian Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata menyebabkan sangat rentan terhadap guncangan kondisi global maupun domestik. Keterpurukan ekonomi Bali akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan aktivitas perekonomian melemah selama masa Pandemi COVID-19 dan sulit untuk bangkit karena struktur perekonomian Bali yang kurang tangguh, sehingga memerlukan intervensi pemerintah segera untuk menata kembali perekonomian Bali melalui transformasi ekonomi. Untuk itu, ekonomi Bali memerlukan dua tahap intervensi, yaitu: (i) Tahap Pemulihan Ekonomi; dan (ii) Tahap Transformasi Ekonomi. Peta jalan ini menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang.

Gambar 1. Kerangka Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bali



Sumber: Bappenas (2021)

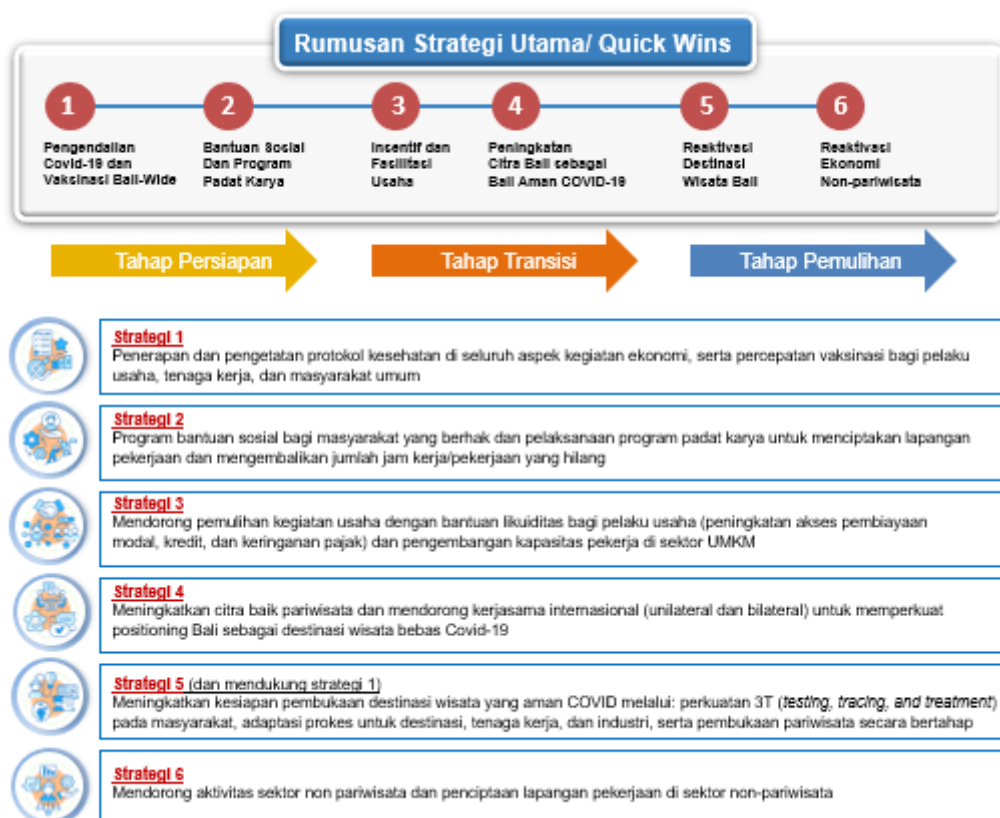
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bali bersama-sama melakukan upaya pemulihan ekonomi sekaligus transformasi ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 memberikan momentum untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki, memperkuat dan mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Bali yang berlandaskan filosofi Alam, Krama dan Budaya Bali. Langkah pemulihan ekonomi bersifat jangka pendek dan harus segera dilakukan terutama untuk mengembalikan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat Bali. Sementara itu, transformasi ekonomi bersifat jangka menengah-panjang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya berbasis kearifan lokal, yang menekankan keharmonisan alam, krama dan budaya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, ekonomi Bali akan tumbuh lebih tangguh (berdikari, bernilai tambah tinggi, berdaya saing dan berdaya tahan) terhadap guncangan. Transformasi ekonomi tersebut sekaligus membangun ekonomi Bali menjadi lebih hijau dan berkelanjutan.

Upaya pemulihan dan transformasi ekonomi Bali berlandaskan kepada Visi Indonesia 2045, dan RPJMD 2018 – 2023 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal Sad Kerthi dan semangat ajaran Hindu Tri Hita Karana. Visi tersebut memiliki arti menjaga

kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi tersebut dicapai melalui pelaksanaan 22 misi pembangunan Provinsi Bali. Adanya pemulihan dan transformasi ekonomi Provinsi Bali diharapkan dapat memulihkan ekonomi Bali sekaligus secara bertahap mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Bali akibat pembangunan di masa lalu. Ke depan pembangunan terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan dan bahagia Bali, namun tidak merusak alam Bali, krama Bali, dan budaya Bali. Pada akhirnya, Provinsi Bali dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia 2045.


Dalam perspektif waktu jangka pendek, pemulihan kegiatan pariwisata tetap menjadi kunci bagi pemulihan perekonomian. Strategi utama untuk pemulihan sektor pariwisata Bali adalah dengan memulihkan citra Bali sebagai tujuan wisata yang kondusif dan aman dari pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bali mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Selanjutnya, dari sisi penawaran intervensi pemerintah diperlukan untuk memperkuat daya tahan pelaku usaha wisata dan sektor lain yang terkait dengan usaha wisata. Sehingga saat pariwisata mulai bergerak kembali, usaha wisata dan sektor terkait lainnya bisa segera dengan cepat merespon perkembangan kegiatan pariwisata.

Gambar 2. Kerangka Strategi Pemulihan Ekonomi Bali



Sumber: Bappenas (2021)

Keputusan Pemerintah untuk membuka penerbangan intenasional ke Bandara Ngurah Rai dari negara-negara tertentu mulai pada tanggal 14 Oktober, menimbulkan optimisme terhadap segera bangkitnya pariwisata dan perekonomian Bali. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi menurunnya jumlah pasien positif COVID-19 baru di Bali, pada tingkatan angka relatif rendah dan tercapainya *Herd Immunity* dimana vaksinasi dosis dua sudah mencapai di atas 80% penduduk.



Berdasarkan proyeksi optimis, kedatangan wisman ke Bali akan kembali kepada tingkat sebelum pandemi COVID-19 (2019) pada tahun 2024. Selanjutnya, agar kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri dapat berkelanjutan, maka upaya pengendalian pandemi COVID-19 utamanya penegakan Prokes, pelaksanaan vaksin, serta kesiapan untuk mengatasi hal tersebut (ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tenaga kesehatan, dan obat-obatan) harus tetap ditingkatkan.

Pemulihan ekonomi Bali memiliki sasaran dan target jangka pendek yang diharapkan bisa segera mendorong pergerakan perekonomian dalam masa pandemi dan segera memulihkan perekonomian saat berakhirnya masa pandemi. Dokumen peta jalan ini mengusulkan 3 (tiga) tahapan terdiri dari 6 (enam) strategi utama atau *quick wins* yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemulihan ekonomi Bali yang terlibat yaitu:

Tahapan Persiapan

1. Memantapkan pengendalian pandemi COVID-19 dan percepatan program vaksinasi. Dengan sasaran utama adalah melakukan adaptasi protokol kesehatan, menuntaskan vaksinasi warga Bali, dan koordinasi peningkatan pengamanan pintu masuk Bali mengikuti protokol kesehatan.
2. Melanjutkan upaya perlindungan daya beli masyarakat Bali terutama yang tidak mampu, melalui program bantuan sosial dan program padat karya.

Tahapan Transisi

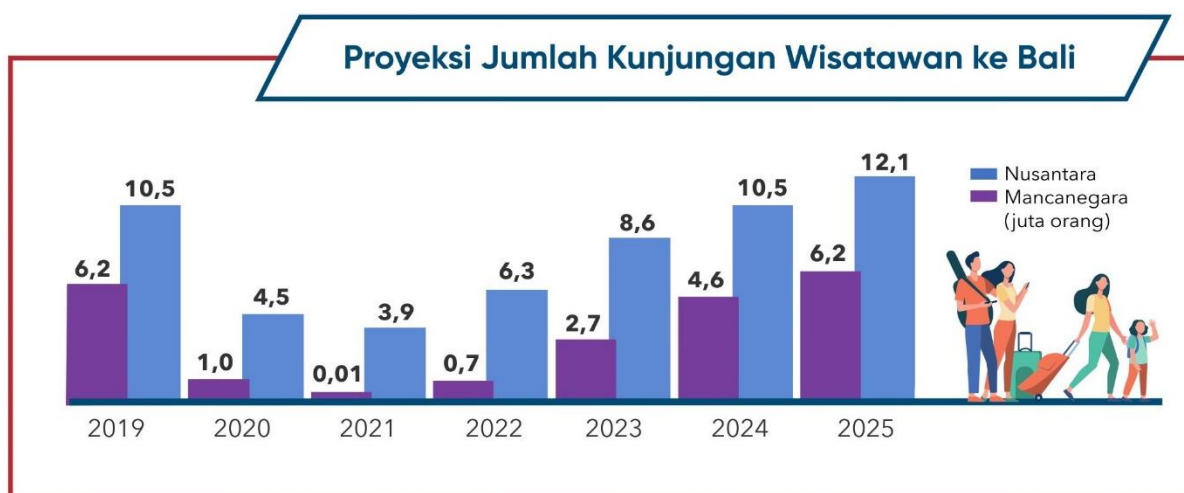
3. Melanjutkan pemberian insentif dan fasilitas kepada pelaku usaha. Dilaksanakan dengan cara restrukturisasi kredit di bawah Rp10 miliar dan fasilitas pembiayaan, insentif perpajakan, bea masuk dan fasilitas ekspor, memberikan kemudahan memulai usaha dan pederhanaan perizinan usaha.
4. Meningkatkan citra Bali untuk memperkuat kepercayaan wisatawan. Membangun citra Bali sebagai destinasi wisata yang sehat dan aman, dan menjadikan Bali sebagai *remote working destination*.

Tahapan Pemulihan

5. Memantapkan pembukaan pariwisata dan meningkatkan kolaborasi antar pihak antara lain melalui kerja sama bilateral dan multilateral, serta menjamin agar aktivitas usaha pariwisata Bali segera bisa berjalan pada masa berakhirnya pandemi.
6. Meningkatkan kegiatan ekonomi non pariwisata antara lain adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan aktivitas sektor pertanian, perikanan dan industri, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif dan mempercepat transformasi digital di Bali.

Berlandaskan keenam strategi tersebut diharapkan implementasi program pemulihan ekonomi Bali akan berdampak pada pemulihan kunjungan wisatawan dengan target optimis, di mana pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan ke Bali relatif sama dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019 (sebelum pandemi). Seiring dengan proyeksi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali ditargetkan akan kembali positif pada tahun 2022, dan pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2024 dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 8,1%.

Gambar 3. Proyeksi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali



Sumber: Bappenas (2021)

Secara bersamaan proses pemulihan ekonomi Bali harus meletakkan kerangka awal proses transformasi ekonomi Bali, sehingga ekonomi Bali lebih tangguh dan beragam, tidak lagi bergantung pada sektor pariwisata. Dari hasil identifikasi sektor unggulan yang dilakukan, sektor primer (pertanian dalam arti luas) memiliki potensi untuk dikembangkan karena merupakan sektor hulu yang menjadi penyedia bahan baku untuk sektor industri berbasis agro dan memiliki peran penting dalam perekonomian. Berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan, sektor primer merupakan sektor kedua dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Provinsi Bali (15,1%, tahun 2020), setelah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (18,4%, tahun 2020). Selanjutnya, subsektor peternakan memiliki keterkaitan ke depan yang tinggi, kontribusi PDRB tertinggi, proporsi penyerapan tenaga kerja tertinggi, serta keunggulan komparatif yang tinggi (subsektor basis). Subsektor lain yang menunjukkan dominasi setelah peternakan adalah subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan semusim dan tahunan, yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan keterkaitan ke depan dan proporsi tenaga kerja yang tinggi. Selain itu, subsektor pertanian tanaman hortikultura semusim, hortikultura tahunan, dan lainnya juga merupakan sektor potensial dari sisi keunggulan komparatif yang tinggi (subsektor basis) dan proporsi tenaga kerja yang tinggi.

Pembangunan Bali ke depan harus bertujuan untuk mempercepat proses transformasi ekonomi Bali, sesuai dengan visi EKONOMI KERTHI BALI MENUJU BALI ERA BARU: HIJAU, TANGGUH DAN SEJAHTERA. Dengan pelaksanaan transformasi tersebut akan terwujud perekonomian Bali yang (1) **Hijau**, yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan; (2) **Tangguh**, yaitu memiliki daya tahan terhadap krisis dan guncangan eksternal, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing; (3) **Sejahtera**, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut, dengan kondisi yang adil dan merata.

Transformasi Ekonomi Bali adalah proses pembangunan ekonomi yang memiliki dampak jangka Panjang, yang mencakup **enam strategi besar** dan dijalankan dengan berbagai program pembangunan, yaitu:

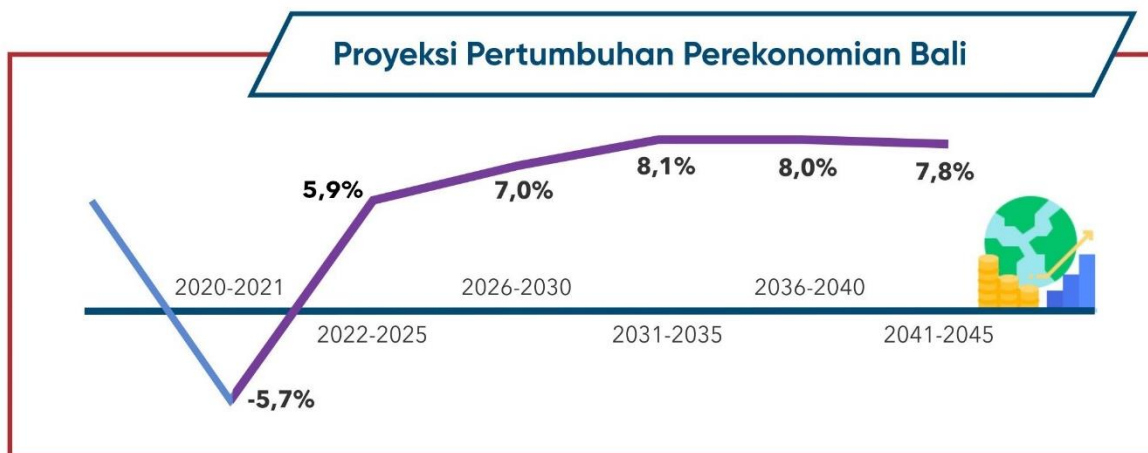
1. **Bali Pintar dan Sehat**, melalui transformasi pembangunan kesehatan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bali. Peningkatan kualitas SDM melalui strategi mewujudkan SDM sehat bergizi, SDM cerdas berkarakter kuat dan SDM yang kreatif dan inovatif.
2. **Bali Produktif**, melalui strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah, modernisasi pertanian, modernisasi kelautan dan perikanan, peningkatan

industrialisasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM dan penguatan sektor pariwisata, produktivitas tenaga kerja Bali akan mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas tahun 2015-2019.

3. **Bali Hijau**, melalui skenario penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ambisius, sehingga tercapai penurunan *Green House Gases* (GHG) di level *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau antara 50.000 sampai 100.000 lapangan pekerjaan baru.
4. **Bali Terintegrasi**, melalui peningkatan sarana dan prasarana konektivitas, pengembangan Bali sebagai hub logistik udara, penguatan kerja sama Bali-Nusra, serta pengembangan skema inovatif pembiayaan infrastruktur.
5. **Bali Smart Island**, melalui penguatan infrastruktur digital (*100% coverage* dan berkualitas), peningkatan SDM trampil digital, pengembangan berbagai pelayanan publik dan swasta secara digital serta digitalisasi perekonomian Bali antara lain digitalisasi start up UMKM dan ekonomi kreatif, dan pengembangan layanan wisata digital.
6. **Bali Kondusif**, melalui penguatan *enabler* atau faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu: aspek keuangan daerah, aspek pembiayaan usaha, dari aspek kemudahan berusaha, dan aspek reformasi birokrasi, serta perbaikan tata kelola dan kelembagaan.

Pelaksanaan strategi transformasi Bali ditargetkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang yaitu sebesar 7,7% pada tahun 2045. Dilihat secara sektoral, transformasi ekonomi ditargetkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Bali hingga 5,4% di tahun 2045. Dengan adanya keterkaitan antara sektor primer dan industri serta pengembangan industri yang hijau dan sirkular yang berorientasi pada pasar domestik dan luar negeri diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor manufaktur Bali mencapai 8,0% pada tahun 2045.

Gambar 4. Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Bali



Sumber: Bappenas (2021)

Transformasi ekonomi hijau di Provinsi Bali ditargetkan dapat menurunkan intensitas emisi Bali hingga 80% pada tahun 2045. Di samping itu, transformasi hijau di Bali juga ditargetkan dapat mempercepat tercapainya sasaran penciptaan *green jobs* sebanyak 50-100 ribu lapangan pekerjaan tetap. Dari sisi kebijakan bauran energi, proporsi listrik yang diproduksi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai lebih dari 50% pada tahun 2045. Peningkatan pengelolaan sampah dengan target 100% terkelola pada tahun 2045.

Gambar 5. Target Indikator Ekonomi Hijau Provinsi Bali Tahun 2045




Sumber: Bappenas (2021)

Dengan pelaksanaan Transformasi Ekonomi tersebut, maka dapat terwujud Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera, sebagaimana tergambar antara lain dalam indikator-indikator sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Beberapa Indikator Bali Era Baru : Hijau, Tangguh dan Sejahtera

INDIKATOR	2020	2028	2045
BALI HIJAU			
1. PDRB Hijau (Triliun Rupiah)	149,0	204,12	885,87
2. Emisi Karbon (Ton CO2)	2.930.755	2.881.888	1.722.490
3. Bauran Energi Terbarukan (%)	0,125	22,961	52,678
4. Kendaraan Listrik (%)	0% motor dan mobil	-	100% motor, 40% mobil
BALI TANGGUH			
1. Produktivitas Tenaga Kerja (juta Rp per tenaga kerja)	60,9	78,1	239,9
2. Pertumbuhan Pertanian (%)	-1,1	4,7	5,4
3. Pertumbuhan Industri (%)	-6,8	7,3	8,0
4. Pertumbuhan PDRB (%)	-9,3	7,5	7,7
BALI SEJAHTERA			
1. PDRB per kapita (USD)	3.747	6.048	26.203
2. Tingkat pengangguran (%)	5,63	1,7	0,5
3. Tingkat kemiskinan (%)	4,45	2,10	0,18
4. Koefisien Gini	0,369	0,361	0,338

Sumber: Bappenas (2021)



Untuk mencapai sasaran jangka panjang pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2045, dibutuhkan investasi sebesar Rp8.939,04 triliun, yang bersumber dari pemerintah dan swasta. Dari total kebutuhan investasi tersebut, sekitar 95,4% – 96,0% dipenuhi oleh swasta, sisanya dipenuhi oleh pemerintah sebesar 4,6% – 4,0%. Kebijakan yang mendukung perbaikan iklim investasi seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, maupun simplifikasi regulasi perlu diutamakan agar sektor swasta dapat memperkuat peranannya dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan uraian strategi pemulihan dan transformasi perekonomian Bali tersebut, maka dokumen peta jalan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh Pemerintah Provinsi Bali beserta segenap OPD Pemerintah Provinsi Bali; Pemerintah kabupaten/kota; Kementerian/Lembaga; dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan untuk pemulihan ekonomi jangka pendek, serta implementasi transformasi ekonomi yang berjangka menengah dan panjang. Dengan demikian, pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan Bali menuju Bali Era Baru.

Pelaksanaan Peta Jalan ini memerlukan orkestrasi lintas sektor, lintas pelaku, lintas wilayah, serta lintas tingkat kewenangan pusat-daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu, **pertama** perlu ada koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan implementasi kebijakan pada seluruh tingkatan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. **Kedua** adalah dukungan pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan yang inovatif, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan. **Ketiga** adalah dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan termasuk reformasi birokrasi Bali untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi di Bali yang kompetitif.



Halaman ini sengaja dikosongkan.



1

Pendahuluan

BAB I. PENDAHULUAN

“Saya percaya semangat kebersamaan dan gotong royong yang diwarisi oleh para pendiri bangsa akan selalu melekat dalam jiwa kita laksana api yang menyala-nyala terutama di saat bangsa dan negara kita menghadapi ujian dan tantangan,”

(Presiden Joko Widodo, Bogor 1 Agustus 2021)

Sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020, jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia terus bertambah pesat. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2020 pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 Oktober 2021¹, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa, dan telah menyebabkan lebih dari 140 ribu kematian. Virus ini telah menyebar ke 34 provinsi di mana DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus terbanyak yaitu 858,3 ribu (20,4%) kasus, diikuti oleh Jawa Barat dengan 703,2 ribu (16,7%) kasus, dan Jawa Tengah dengan 482,4 ribu (11,5%) kasus.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun juga berdampak pada perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07% (yoy)². Pandemi COVID-19 ini mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan PSBB ini membuat aktivitas masyarakat dan ekonomi menjadi terbatas. Konsumsi rumah tangga yang melambat dan perilaku konsumen yang enggan keluar rumah karena adanya pembatasan mobilitas, menyebabkan turunnya permintaan agregat. Akibatnya, aktivitas perusahaan dan pekerja mandiri menurun dan/atau terhenti, menyebabkan turunnya penawaran agregat.

Provinsi Bali merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif paling besar. Selama tahun 2020, Provinsi Bali tumbuh negatif sebesar 9,31%.³ Ekonomi Bali dengan sektor pariwisata sebagai kontributor utama, sangat terdampak akibat adanya pemberlakuan kebijakan PSBB. Hal ini tercermin pada pertumbuhan negatif terdalam yang terjadi pada kelompok lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata utamanya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 31,79%, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat mengalami kontraksi sebesar 27,52%. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen yang membentuk PDRB, kecuali konsumsi pemerintah mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada impor luar negeri sebesar 78,34%; diikuti penurunan ekspor luar negeri sebesar 76,23%; dan penurunan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/investasi) sebesar 12,21%.

Tertekannya pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali akibat pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali mengalami kenaikan, dari 3,61% (September 2019) menjadi 3,78% (Maret 2020), serta meningkat drastis menjadi 4,45% (September 2020) dan kembali naik menjadi 4,53% (Maret 2021). Selanjutnya kenaikan juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu dari 1,57% (Agustus 2019) dan 1,25% (Februari 2020), kemudian melonjak tinggi menjadi 5,63% (Agustus 2020), dan pada bulan Februari 2021 sedikit menurun menjadi 5,42%. Penurunan ekonomi yang signifikan di Provinsi Bali menyebabkan peningkatan kesenjangan pendapatan (indeks Gini) Provinsi Bali pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, dari 0,366 menjadi 0,369.

¹ <https://COVID19.go.id/peta-sebaran-COVID19>, diakses pada 4 Oktober 2021.

² BPS (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. Berita Resmi Statistik.

³ BPS Bali (2021). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. Berita Resmi Statistik.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bali harus bersama-sama melakukan upaya pemulihan ekonomi sekaligus juga transformasi ekonomi. Langkah pemulihan ekonomi bersifat jangka pendek terutama untuk mengembalikan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembalikan daya beli masyarakat Bali yang tertekan akibat kebijakan PSBB. Sementara itu, transformasi ekonomi yang berdampak pada jangka menengah panjang dilakukan berbasis kearifan lokal, yang sangat menekankan keharmonisan alam, krama dan budaya untuk mencapai sejahtera dan bahagia. Dengan demikian, ekonomi Bali akan tumbuh lebih tangguh (berdikari, berdaya saing dan berdaya tahan) terhadap guncangan karena berbasis pada sumber daya lokal bernilai tambah tinggi dengan diversifikasi ekonomi sehingga tidak tergantung hanya kepada sektor pariwisata. Transformasi ekonomi tersebut sekaligus juga membangun ekonomi Bali menjadi lebih hijau dan berkelanjutan.

Upaya pemulihan dan transformasi ekonomi Bali berlandaskan kepada Visi Indonesia 2045, dan RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023, yang diperkaya dengan filosofi juga aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah Bali sebagaimana terungkap dalam berbagai diskusi selama bulan Juni – Oktober 2021. Diskusi-diskusi tersebut memberikan masukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana Bali seharusnya dibangun dalam rangka pemulihan ekonomi dan masa mendatang menuju 2045 setelah terjadinya pandemi COVID-19. Pada intinya, ke depan pembangunan terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan dan bahagia Bali, namun tidak merusak alam Bali, krama Bali, dan budaya Bali.


Visi Indonesia 2045 adalah mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, di mana ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Visi Indonesia 2045 tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan strategi redesain transformasi ekonomi Indonesia yang meliputi (1) pembangunan sumber manusia (SDM) yang berdaya saing; (2) peningkatan produktivitas sektor ekonomi; (3) pembangunan ekonomi hijau; (4) percepatan transformasi digital; (5) penguatan integrasi ekonomi; dan (6) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Di mana keenam strategi utama tersebut didukung oleh upaya penguatan berbagai faktor *enabler* seperti stabilitas ekonomi makro, reformasi birokrasi, stabilitas sistem keuangan, kemudahan berusaha dan pengembangan pasar yang kompetitif.

Gambar 1. 1. Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan

Enam Strategi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia sebagai “game changer” untuk menuju Indonesia Maju:



Sumber: Bappenas (2021)



Sesuai dengan RPJMD 2018 – 2023 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, Visi Provinsi Bali adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal Sad Kerthi.⁴ Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945. Visi tersebut dicapai melalui pelaksanaan 22 misi pembangunan Provinsi Bali. Adanya pemulihan dan transformasi ekonomi Provinsi Bali diharapkan dapat memulihkan ekonomi Bali sekaligus secara bertahap mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Bali akibat pembangunan di masa lalu. Pada akhirnya, Provinsi Bali dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia 2045.

Kementerian PPN/BAPPENAS menyusun PETA JALAN EKONOMI KERTHI BALI MENUJU BALI ERA BARU: HIJAU, TANGGUH DAN SEJAHTERA. Provinsi Bali merupakan provinsi yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, Presiden menugaskan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan dilanjutkan dengan kesepakatan bersama Gubernur Bali menyusun Peta Jalan Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bali. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi Provinsi Bali dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan melakukan transformasi ekonomi di Bali. Selanjutnya di dalam peta jalan juga dijelaskan strategi serta rencana aksi yang perlu dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi di Provinsi Bali.

⁴ Koster, W (2021). Ekonomi Kerthi Bali – Membangun Bali Era Baru

2

Modal Dasar, Lingkungan Strategis dan Tantangan Pembangunan Bali

Modal Dasar, Lingkungan Strategis, dan Tantangan Pembangunan Bali

Modal Dasar

Alam yang Subur & Iklim yang Bagus

Letak & Kondisi Geografi

- Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
- Bali beriklim laut tropis dengan dataran rendah yang landai & rantai pegunungan/perbukitan di tengah pulau.

Sumber Daya Alam

- Kekayaan SDA Bali terkait dengan pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya perikanan.
- Keindahan alam yang luar biasa antara lain meliputi pemandangan indah pantai, bawah laut, danau, gunung, sungai

Produk utama pertanian:

- padi, jagung, kedelai, kopi, coklat, manggis, mangga, pisang.
- peternakan sapi di padang rumput wilayah barat Bali.

Produk utama perikanan:

- rumput laut, kerapu, kerang mutiara, udang, ikan mas & nila, lele, dan garam.

Modal Dasar Demografi (2020)

4,31 Juta Penduduk Bali 2020

1% Pertumbuhan Penduduk/Tahun

2,56 Juta Angkatan Kerja Bali 2020

#5 Provinsi dengan IPM Tertinggi 75,5

Budaya & Adat Istiadat yang Khas

Keunikan budaya Bali menjadikan berbeda dari daerah lain di belahan dunia.

Komunikasi/interaksi budaya Bali dengan budaya luar memberi kreativitas baru di bidang seni.

Tri Hita Karana yang menjunjung keseimbangan dan keharmonisan



Lingkungan Strategis

Lingkungan Strategis Global

Beberapa lembaga dunia memperkirakan ekonomi global akan menguat hingga 5,9% pada tahun 2021.

Pariwisata dunia turut pulih sejalan dengan membaiknya perekonomian dan ter kendalinya pandemi COVID-19.

Pariwisata dunia mengarah kepada pariwisata yang menyesuaikan diri dengan situasi normal baru (*new normal*)

Lingkungan Strategis Nasional



Perkembangan berbagai indikator ekonomi, menunjukkan pemulihan ekonomi nasional menguat.



Ancaman terjadinya kenaikan kasus COVID-19 tetap membayangi.



Redesain transformasi ekonomi dipercepat untuk memperbaiki kelemahan dalam fundamental perekonomian.

Tantangan Pembangunan

Pandemi COVID-19 telah membuka berbagai tantangan pembangunan yang perlu diperbaiki



- Ketergantungan pada pariwisata
- Kesenjangan Bali utara & selatan
- Turunnya fungsi lahan pertanian
- Turunnya jumlah subak
- Kurangnya SDM muda pertanian

- Berkurangnya sumber mata air
- Rusaknya ekosistem perairan
- Belum baiknya penanganan sampah
- Masih rendahnya pendidikan tenaga kerja

BAB II. MODAL DASAR, LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BALI

"Kiranya perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah Keajaiban Modal Alam Dunia..."
(Menko Maritim dan Investasi, World Economic Forum, Davos 2020)

2.1 Modal Dasar

Provinsi Bali atau Bali merupakan sebuah gugusan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam pertambangan yang melimpah, namun alam Bali dianugerahi Hyang Pencipta berupa sumber daya lokal yang kaya, unik, dan unggul, baik di gunung, dataran, dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem. Demikian pula Leluhur/Tetua Bali mewariskan adat tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang adiluhung, serta sumber daya manusia (Krama) yang unggul. Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali yang dikaruniai dan diwariskan ini merupakan potensi dan kekuatan yang sangat besar untuk membangun perekonomian Bali berbasis sumber daya lokal (*genuine Bali*). Hal tersebut dilakukan melalui penguatan sektor pertanian dan kelautan/perikanan dari hulu sampai ke hilir, serta industri kerajinan rakyat berbasis budaya *branding* Bali, yang didukung oleh pariwisata. Banyak daerah di dunia yang memiliki keindahan alam, namun tidak memiliki kekuatan adat dan budaya seperti Bali. Paduan keunggulan modal dasar Bali tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan dunia.

2.1.1 Modal Dasar Alam

a. Letak dan Kondisi Geografi

Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibu kota Bali, Denpasar, terletak di bagian selatan Pulau Bali. Secara astronomis, Bali terletak antara 08°03' 40" – 08°50' 48" Lintang Selatan (LS) dan 114°25' 53" – 115°42' 40" Bujur Timur (BT).⁵ Bali merupakan kesatuan ekosistem pulau kecil yang terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), dan Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Bali memiliki iklim tropis seperti Provinsi lainnya di Indonesia. Secara geografis Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, dan Selat Bali di sebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, dan Selat Lombok di sebelah Timur. Letak wilayah Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Posisi Provinsi Bali di Negara Kesatuan Republik Indonesia



Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2021, BPS (2021)

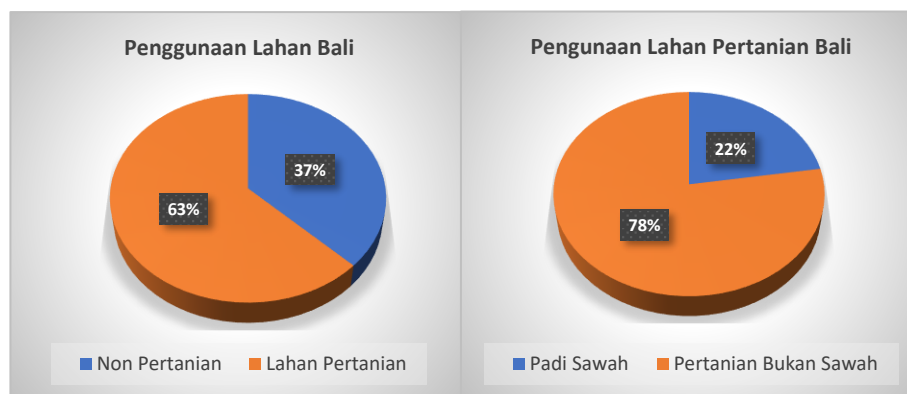
⁵ Luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Bali terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Diantara sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten/kota yang paling luas yaitu 1.364,73 km² sedangkan kabupaten/kota paling kecil adalah Kota Denpasar (127,78 km²). Kabupaten Bangli merupakan kabupaten/kota yang paling tinggi letaknya yaitu 425 meter di atas permukaan laut (mdpl) sedangkan kabupaten/kota paling rendah adalah Kabupaten Jembrana (12 mdpl). Selain paling rendah, Kabupaten Jembrana juga merupakan kabupaten paling jauh dari ibukota provinsi (95,16 km). Ke sembilan kabupaten/kota tersebut mencakup 57 Kecamatan, 716 Desa/Kelurahan, dan 1.493 Desa Adat.

Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi sebagian besar wilayah, dengan total luas ruang daratan kurang lebih 563.666 Ha. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan itu terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Agung (3.142 m) dan Gunung Batur (1.717 m). Selain gunung, Bali juga memiliki empat buah danau di mana Danau Batur adalah danau paling luas di Bali dengan luas mencapai 1.607,5 Ha. Rantai pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah ini secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dari kaki perbukitan dan pegunungan dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Relief yang dikelilingi pantai landai berpasir putih dan lautan biru telah menjadikan Bali sebagai pulau yang terkenal keindahan alamnya.

Ditinjau dari ketinggian tempat, Pulau Bali terdiri dari beberapa kelompok lahan sebagai berikut: (1) Lahan dengan ketinggian 0 - 50 m di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 Ha; (2) Lahan dengan ketinggian 50 - 100 m di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sampai bergelombang dengan luas 60.620,34 Ha; (3) Lahan dengan ketinggian 100 - 500 m di seluas 211.923,85 Ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit; (4) Lahan dengan ketinggian 500 - 1.000 m di atas permukaan laut seluas 145.188,61 Ha; (5) Lahan dengan ketinggian di atas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 Ha.


Gambar 2. 2. Penggunaan Lahan di Provinsi Bali



Sumber: Bappenas (2021)

Secara umum, penggunaan lahan di Bali dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian, dengan total luas sebesar 563.666 Ha (2016). Sebagian besar lahan di Bali digunakan untuk lahan pertanian sebesar 62,71% dan lahan bukan pertanian sebesar 37,29%. Akan tetapi, lahan pertanian yang berbentuk sawah hanya sebesar 22,5% sedangkan sebagian besar berupa lahan pertanian bukan sawah (77,5%). Potensi penggunaan lahan tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi.

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak



mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Suhu di Bali sepanjang tahun 2020 berkisar antara 26,3 – 28,2 dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 78 – 84%. Sedangkan rata-rata curah hujan di Bali berkisar antara 1.390,5 – 3.070,0 mm per tahun.

b. Kekayaan Sumber Daya Alam

Kekayaan sumber daya alam Bali pada dasarnya terkait dengan pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan. Bali tidak banyak memiliki kekayaan tambang seperti minyak bumi dan gas serta tambang mineral. Lahan pertanian di Bali sangat subur karena tersusun atas tanah hasil deposit abu gunung berapi. Lahan pertanian ini dikelola secara tradisional dengan sistem subak yang mengatur pembagian air di sungai-sungai di pulau Bali. Produk dari lahan pertanian ini terutama adalah tanaman pangan padi, jagung dan kedelai. Selain itu Bali juga menghasilkan tanaman perkebunan seperti kopi dan coklat, serta tanaman hortikultura, termasuk buah-buahan seperti manggis, mangga dan pisang. Untuk pengembangan produksi tanaman pangan potensi yang dimiliki berupa lahan dan ketersediaan irigasi di Bali terbatas sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Upaya melalui ekstensifikasi tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang tersedia di Bali. Selanjutnya, padang rumput di wilayah barat Bali merupakan tempat budidaya hewan ternak sapi khas Bali. Sapi Bali ini memiliki keunggulan karena merupakan hasil persilangan dengan banteng, yang memiliki warna khas coklat kemerahan dan memiliki lemak yang sedikit.

Sumber daya alam perikanan di Bali dapat berupa perikanan tangkap air laut dan air tawar serta perikanan budidaya, termasuk rumput laut. Bali memiliki luas wilayah laut 9.634,5 km², dengan panjang garis pantai sepanjang 470 km. Wilayah laut Bali yang luas menjadikan Bali sebagai daerah yang memiliki potensi tinggi di bidang perikanan dan kelautan, dan hasilnya sangat berpotensi untuk diekspor. Untuk perikanan tangkap air laut, potensi terbesar adalah jenis ikan tuna, ikan lemuru dan tongkol. Potensi perikanan budaya ikan laut meliputi pengembangan rumput laut, ikan kerapu dan kerang mutiara. Sementara untuk budidaya tambak adalah untuk pengembangan budidaya udang galah, ikan mas, nila, lele, gurami, dan garam.

2.1.2 Modal Dasar Krama (Sumber Daya Manusia) dan Kondisi Demografi

Bali dihuni oleh Krama Bali yang memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang sangat tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi.⁶ Tata kehidupan Krama Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan Krama Bali sehari-hari sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang metaksu.

Tata cara kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara sakala dan niskala tercantum dalam nilai-nilai Sad Kerthi yaitu enam sumber kesejahteraan/kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari: (1) Atma Kerthi, (2) Danu Kerthi, (3) Wana Kerthi, (4) Segara Kerthi, (5) Jana Kerthi, dan (6) Jagat Kerthi.

Tata cara kehidupan yang bersumber dari sistem nilai itu merupakan warisan dari Para Leluhur/Tetua Bali mengenai cara untuk memelihara/menjaga alam Bali yang bersifat khas/unik, indah, dan suci/metaksu yang dituangkan menjadi nilai-nilai Tri Hita Karana: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/ keharmonisan manusia, yaitu: pertama, keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa;

⁶ Koster, W (2021) Ekonomi (i) Bali

kedua, keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia; dan ketiga, keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan.

Selanjutnya terkait dengan kondisi demografi, pada tahun 2020 penduduk Bali mencapai sekitar 4,317 juta jiwa atau mengalami pertumbuhan sekitar 1,01% per tahun selama periode 2010-2020.

Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Bali tahun 2020 cukup tinggi, mencapai 746,95 jiwa per km². Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kabupaten Buleleng (791.813 jiwa) sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Klungkung (206.925 jiwa). Dari sembilan kabupaten/kota, laju pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi di Kabupaten Buleleng (2,33% per tahun) sedangkan paling rendah bahkan mengalami pertumbuhan negatif adalah Kota Denpasar (-0,81% per tahun). Namun, Kota Denpasar merupakan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki kepadatan penduduk paling padat yaitu 5.676,27 jiwa per km². Sedangkan Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk paling rendah (376,65 jiwa per km²). Angka tingkat kelahiran berdampak pada masih tingginya komposisi penduduk usia anak (0-14 tahun), tabel 2.1 menunjukkan keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di Bali pada tahun 2020.


Tabel 2. 1. Komposisi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	152.328	145.161	297.489
5 – 9	154.047	146.966	301.013
10 – 14	169.386	158.291	327.677
15 – 19	172.435	161.942	334.377
20 – 24	172.259	163.861	336.120
25 – 29	170.136	164.227	334.363
30 – 34	165.910	163.553	329.463
35 – 39	163.466	162.813	326.279
40 – 44	165.686	166.268	331.954
45 – 49	155.547	156.519	312.066
50 – 54	142.750	143.233	285.983
55 – 59	121.724	122.849	244.573
60 – 64	95.146	97.201	192.347
65 – 69	71.556	74.928	146.484
70 – 74	47.024	52.585	99.609
75 +	51.705	65.902	117.607
Jumlah	2.171.105	2.146.299	4.317.404

Sumber: BPS (2021)

Komposisi penduduk Bali menunjukkan penduduk usia produktif pada tahun 2020 mencapai 70,12% (3.027.525 jiwa) sedangkan sisanya adalah penduduk usia non produktif (29,88%). Dari sembilan kabupaten/kota, jumlah rumah tangga paling banyak ada di Kota Denpasar yaitu 292.600 sedangkan paling sedikit di Kabupaten Klungkung (46.200 rumah tangga). Rata-rata jumlah anggota rumah tangga paling banyak ada di Kabupaten Gianyar yaitu 4,59 sedangkan yang paling sedikit di Kota Denpasar (2,48). Secara umum, rata-rata anggota rumah tangga di Provinsi Bali sebesar 3,66, yang menunjukkan tingkat ketergantungan usia non-produktif terhadap usia produktif cukup rendah.

Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa Krama Bali adalah manusia yang unggul yaitu berkualitas dan berintegritas dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Dari sisi kualitas, keunggulan Krama Bali tersebut tercermin dalam potensinya yang luar biasa yaitu jemet (rajin dan tekun), seken, saja, beneh dan luwih, serta undagi (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut Krama Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian



masyarakat dunia. Sedangkan dari sisi integritas, keunggulan Krama Bali tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-harinya yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, dengan ciri yang rendah hati: tragia, ipil-ipil (sedikit demi sedikit tetapi konsisten), lascarya (tulus dan ikhlas), lemuh tusing elung (luwes tetapi tidak mudah patah), dan dabdab (teratur, sopan, dan matang), serta loyal dan berdedikasi tinggi.

Tingkat kualitas krama Bali tersebut bila diukur berdasarkan tingkat pendidikan dan kesehatan, maka krama Bali secara umum relatif baik dibanding banyak daerah lainnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi indeks pembangunan manusia (IPM). Provinsi Bali memiliki IPM nomor lima tertinggi di Indonesia, setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Pada tahun 2020, angka IPM Bali mencapai 75,5. Angka IPM Bali ini terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 74,77 (2018) dan 75,38 (2019). Dalam lingkup nasional, angka IPM Bali selalu ada di atas IPM Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.


Angkatan kerja di Provinsi Bali pada tahun 2020 mencapai 2.567.919 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 94,37% adalah penduduk yang bekerja. Sebanyak 30,71% dari angkatan kerja di Provinsi Bali adalah angkatan kerja yang paling tinggi menamatkan sekolah dasar (SD). Angkatan kerja yang merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi (PT) masing-masing sebesar 13,91%; 33,73%; dan 16,02%. Sektor jasa merupakan lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Bali yaitu mencapai 54,21%. Selanjutnya diikuti oleh dua sektor lainnya, yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 22,51% dan 23,28%.

2.1.3 Modal Dasar Budaya dan Adat Istiadat

Penduduk Bali terdiri dari dua etnis utama, yaitu penduduk asli Bali atau disebut juga Bali Aga (baca: bali age) dan penduduk Bali keturunan Majapahit. Bali memiliki kebudayaan yang khas. kekuatan kebudayaan inilah yang telah membedakan Bali dengan daerah lain di berbagai belahan dunia, yang memiliki keindahan alam. Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaaan (rwa bhineda), yang sering ditentukan oleh faktor ruang (desa), waktu (kala) dan kondisi riil di lapangan (patra). Konsep desa, kala, dan patra menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel, namun selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh kebudayaan luar.

Sejarah menunjukkan bahwa komunikasi dan interaksi antara kebudayaan Bali dan budaya luar seperti India (Hindu), China, dan Barat khususnya di bidang kesenian telah menimbulkan kreatifitas baru dalam seni rupa maupun seni pertunjukkan. Tema-tema dalam seni lukis, seni rupa dan seni pertunjukkan banyak dipengaruhi oleh budaya India. Demikian pula budaya China dan Barat/Eropa memberi nuansa baru pada produk seni di Bali. Proses akulturasi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan adaptif khususnya dalam kesenian sehingga tetap mampu bertahan dan tidak kehilangan jati diri.

Kebudayaan Bali menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi yang tercermin dalam ajaran Tri Hita Karana (tiga penyebab kesejahteraan). Hal tersebut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), hubungan sesama manusia (pawongan), dan hubungan manusia dengan lingkungan (palemahan). Apabila manusia mampu menjaga hubungan yang seimbang dan harmonis dengan ketiga aspek tersebut maka kesejahteraan akan terwujud. Selain nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi, dalam kebudayaan Bali juga dikenal adanya konsep tri semaya yakni persepsi orang Bali terhadap waktu. Menurut orang Bali masa lalu (athita), masa kini (anaghata) dan masa yang akan datang (warthamana) merupakan suatu rangkaian waktu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kehidupan manusia pada saat ini ditentukan oleh hasil perbuatan di masa lalu, dan perbuatan saat ini juga menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Dalam ajaran hukum karma phala disebutkan tentang sebab-akibat dari suatu perbuatan, perbuatan yang baik akan mendapatkan



hasil yang baik. Demikian pula sebaliknya, perbuatan yang buruk hasilnya juga buruk atau tidak baik bagi yang bersangkutan.

Dengan latar belakang tersebut di atas, modal dasar adat dan budaya Bali sangat kuat dan menonjol di dalam mempengaruhi kinerja pembangunan Bali. Adat dan budaya merupakan keseharian hidup manusia Bali. Secara budaya, cara hidup manusia Bali menyatu dengan Alam. Bahwa manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus seirama dengan alam, manusia hidup yang menghidupi, dan manusia hidup harus menghormati alam. Cara hidup manusia Bali yaitu harus memelihara/menjaga kelestarian lingkungan, di mana hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Selanjutnya adat, agama, tradisi, seni, dan budaya menyatu dalam sistem kehidupan yang unik, indah, agung, suci, dan metaksu sehingga menarik perhatian dunia, dan karenanya berkunjung ke Bali.

Bali sejak dahulu memiliki tradisi guyub yang kuat serta sastra, aksara dan literasi, seni dan teknologi yang tinggi. Sejak dahulu kehidupan di Bali berjalan dalam suasana guyub karena cara hidup di desa adat yang diatur dengan awig-awig dan pararem terikat dalam satu kesatuan hidup komunal meliputi: parahyangan, pawongan dan palemahan sehingga masyarakat Bali hidup dalam suasana guyub. Sementara itu Bali juga memiliki tradisi Nyastra, di mana banyak karya sastra yang luhur lahir dari Dharmasunya para kawi. Selanjutnya, Bali memiliki nekara terbesar di dunia: teknologi metalurgi dan seni cetak *artwork* yang tinggi. Bali juga sudah mengenal arsitektur yang mengatur tata letak ruangan dan bangunan yang menyerupai bangunan Feng Shui. Bagi tradisi Bali, arsitektur merupakan ungkapan perlambang komunikatif dan edukatif. Dalam kaitannya dengan pertanian, Bali memiliki sistem pertanian dengan budaya unik bernama subak yang mengatur pengairan dan penanaman di sawah-sawah. Sistem subak sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali mendapat pengakuan dan perlindungan dari UNESCO, sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*).


Kebudayaan merupakan bagian dari keseharian hidup krama Bali, yang dilakukan secara aktif, baik individu maupun kolektif. Oleh karena itu, kebudayaan Bali terus hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Pemimpin dunia memberi julukan atau sebutan untuk Bali yaitu: *The Island of Gods* (Pulau Dewata), *The Island of Thousand Temples* (Pulau Seribu Pura), *The Morning of the World* (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), *The Paradise Island* (Pulau Surga), *The Last Paradise* (Surga Terakhir di Bumi), dan *The Island of Love* (Pulau Cinta).

2.2 Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Global

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 di China telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai penjuru dunia tanpa kecuali. Akibatnya perekonomian global secara keseluruhan pada tahun 2020 anjlok pada tingkat terendah. Pada bulan Mei 2021, tanda-tanda positif pemulihan ekonomi global mengalami momentum penguatan, namun lonjakan kasus COVID-19 di India akibat varian delta yang begitu dramatis dan menjalar ke berbagai belahan dunia tetap menimbulkan bayangan ketidakpastian dan risiko perlemahan ekonomi global datang kembali.

Saat ini, pasar keuangan global cenderung stabil, yang terlihat dari turunnya indeks volatilitas di pasar saham dan pasar obligasi global. Aliran modal ke negara berkembang terus menunjukkan tren positif. Sementara itu di sektor riil, indikator *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur global di bulan Oktober 2021 mencapai 57,2. Ini merupakan angka tertinggi sejak sepuluh tahun terakhir. Di samping itu, harga komoditas global terus menunjukkan tren kenaikan bahkan lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Namun harus diwaspadai bahwa ketidakpastian tetap membayangi harga komoditas dalam jangka menengah.



Beberapa lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 5,6 – 5,9% di tahun 2021 didukung oleh *low base-effect* akibat kontraksi ekonomi di tahun 2020.⁷ Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan akan menuju trajektori normalnya di kisaran 4,4%. Proyeksi ini sangat tergantung pada kemampuan dunia mengendalikan COVID-19 dan keberhasilan dari vaksinasi global.

Sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan terkendalinya wabah COVID-19, maka diharapkan pariwisata dunia akan pulih, namun akan lebih lambat. *The United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) melaporkan kunjungan wisatawan internasional dunia mengalami penurunan sebesar 40,34% pada Januari-Juli 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2020, atau turun sebesar 80,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2019⁸, karena pembatasan perjalanan tetap tinggi akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan wilayah, Asia dan Pasifik terus mengalami penurunan terbesar dengan penurunan kedatangan internasional sebesar 95,27% dalam tujuh bulan pertama tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Turunnya jumlah wisatawan Internasional berdampak pada penurunan pendapatan, dimana nilai pendapatan pariwisata internasional mengalami penurunan sebesar 64% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019⁹.

Seiring dengan peluncuran program vaksinasi, diharapkan aktivitas pariwisata global dapat dimulai kembali dengan lebih aman. Hal tersebut sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai negara dalam kebijakan pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan untuk membantu memulihkan kepercayaan wisatawan. Dalam masa pemulihan dan dalam jangka lebih panjang, maka persaingan antar negara, antar daerah tujuan wisata, akan menjadi sangat ketat. Jumlah wisatawan yang akan bepergian dalam jangka pendek belum tentu akan kembali seperti sebelum pandemi COVID-19, karena pendapatan yang belum sepenuhnya pulih dan masih terdapat kekhawatiran untuk bepergian. Dari sisi penawaran (*supply side*) berbagai daerah tujuan wisata dunia akan berlomba-lomba promosi memberikan tarif yang murah dan kemudahan.

Setelah pandemi COVID-19 pariwisata dunia mengarah kepada pariwisata yang menyesuaikan diri dengan situasi normal baru (*New Normal*). *Mega trends* pariwisata dunia adalah (i) *staycation*, yaitu kegiatan dan hubungan interaktif yang nyaman seperti di rumah (*homy*); (ii) destinasi jarak pendek/dekat; (iii) destinasi yang aman, bersih, sehat dan *secure*; (iv) destinasi yang ketat menjalankan protokol baru dan higienis; (v) pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab; (vi) destinasi yang menonjolkan kearifan lokal dan literasi masa lalu; (vii) destinasi yang menampilkan pengembangan produk yang menciptakan nilai-nilai otentik; (viii) destinasi yang didukung ekosistem digital, serta pariwisata dengan ceruk pasar terbatas (*niche market*); (ix) pariwisata pendidikan; (x) penyembuhan (*medical/healing*) dan kebugaran (*wellness*); serta (xi) pariwisata berwawasan lingkungan (*ecotourism*).

b. Lingkungan Strategis Nasional


Krisis ekonomi akibat wabah COVID- 19 telah membuat banyak sektor terimbas di Indonesia. Sebagian besar aktivitas ekonomi harus terhenti dan dunia usaha terpuruk sangat dalam. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,1%, jauh lebih rendah dari target pertumbuhan sebelum pandemi yaitu sebesar 5,2 – 5,5%.¹⁰ Ini berarti bahwa secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah atau mengalami “kerugian” kurang lebih sebesar Rp 796 – 829 triliun. Penurunan aktivitas ekonomi dialami mayoritas daerah di Indonesia, termasuk Bali. Pada awalnya pada tahun 2021 diharapkan kondisi ekonomi mulai membaik. Namun, meningkatnya kembali kasus pandemi COVID-19 pada bulan Juli menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi berjalan lebih lambat dari perkiraan awal.

⁷ Proyeksi World Bank sebesar 5,6% (*Global Economic Prospects*, Juni 2021); IMF sebesar 5,9% (*World Economic Outlook*, Oktober 2021); dan OECD sebesar 5,7% (*OECD Economic Outlook*, September 2021)

⁸ <https://www.unwto.org/international-tourism-and-COVID-19> diakses 6 November 2021

⁹ <https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance> diakses 6 November 2021

¹⁰ Target pertumbuhan ekonomi 2020 mengacu pada RKP 2019 sebelum pemutakhiran (Perpres Nomor 61 tahun 2019)



Berbagai perkembangan indikator, nasional dan global, menggambarkan adanya momentum pemulihan ekonomi yang menguat, namun ancaman COVID-19 masih membayangi Kondisi ketidakpastian yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 masih akan terus dihadapi oleh Indonesia. Kunci utama adalah disiplin masyarakat untuk tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan dan mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), sebagai hasil proses vaksinasi yang menyeluruh untuk rakyat Indonesia. Selama pandemi masih berlangsung, tingkat ketidakpastian usaha dan perekonomian masih akan tetap tinggi.

Di sisi lain, dampak COVID-19 ini telah semakin membuka berbagai kelemahan dalam fundamental perekonomian Indonesia, yang harus dipercepat upaya memperbaikinya dengan melakukan redesign transformasi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Indonesia memiliki masalah struktural terkait dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi. Karena permasalahan struktural tersebut, Indonesia melakukan upaya transformasi ekonomi nasional di berbagai sektor dan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat fundamental ekonomi nasional, dan pada akhirnya mencapai visi Indonesia Maju Tahun 2045.

Dalam perspektif waktu jangka panjang, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi nasional diarahkan agar harmonis dengan kecenderungan dan perkembangan perekonomian global, yaitu pencapaian SDGs, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Pada periode 2000 hingga sebelum terjadi pandemi, percepatan pertumbuhan ekonomi sebuah negara dipengaruhi oleh keterkaitan negara tersebut dalam jaringan ekonomi global atau dikenal dengan istilah *global value chains* (GVCs). Kini, pemulihan ekonomi global di tengah pandemi dan akibat pengaruh orientasi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dunia memasuki era baru *green growth*. Meningkatnya kesadaran konsumen negara maju dan kepedulian produsennya terhadap teknologi ramah lingkungan membuat semua negara harus memperhatikan aspek lingkungan dalam proses produksi dan produk akhirnya. Indonesia juga melakukan hal serupa dengan menerapkan prinsip ekonomi ramah lingkungan atau ekonomi hijau didukung dengan penerapan teknologi digital di berbagai aspek pembangunan.


2.3 Tantangan Pembangunan Bali Ke Depan

Pembangunan Bali sejak tahun 1980an, secara perlahan telah menjadikan Bali yang pada awalnya bergantung kepada sektor pertanian menjadi salah satu daerah tujuan utama wisata dunia dan nusantara. Sektor pariwisata menjadi sektor andalan perekonomian Bali. Sebagian besar kegiatan sektor ekonomi lainnya yang berkembang di Bali terutama untuk mendukung kegiatan sektor pariwisata. Sebelum pandemi (tahun 2019), kunjungan wisatawan domestik ke Bali mencapai 10,5 juta dan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta. Dengan kondisi kunjungan wisatawan yang normal, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,3%, yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor pariwisata (sektor tersier) pada tahun 2019 mencapai 61% dalam PDRB Bali.

Krisis pandemi COVID-19 yang telah berlangsung setahun lebih telah membuat perekonomian terutama pariwisata Bali terguncang. Sebagai tujuan wisata unggulan mancanegara, perekonomian di Bali lesu sejak tidak ada kunjungan wisatawan. Kinerja pembangunan Bali selama ini secara umum relatif baik dari sisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Namun, pada tahun 2020, Bali mengalami kontraksi ekonomi yang paling dalam dibandingkan provinsi lain di Indonesia, yaitu -9,31%. Kondisi ini terus berlangsung, bahkan diperkirakan akan tetap menurun pada tahun 2021.

Kondisi yang turun signifikan karena pandemi COVID-19, telah mengungkap berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Bali ke depan. Struktur perekonomian Bali perlu diperbaiki dan ditata ulang untuk mewujudkan Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh dan





Sejahtera di berbagai sektor. Permasalahan dan tantangan perekonomian Bali tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor pariwisata telah menjadikan ketahanan ekonomi yang sangat rentan terhadap berbagai peristiwa (seperti teror, gunung meletus, pandemi) yang menimbulkan gejala terhadap ekonomi pariwisata, dan pada akhirnya ekonomi Bali secara keseluruhan. Peralihan kegiatan pertanian ke pariwisata telah menyebabkan secara perlahan Bali meninggalkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki.
- b. Pengembangan pariwisata yang sangat masif dan tidak terkelola dengan baik telah menimbulkan kesenjangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan, yang secara bersamaan meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah tertentu serta meningkatnya urbanisasi.
- c. Berubahnya aspek sosial multikultural dalam masyarakat Bali, seperti masyarakat lebih konsumtif, berkurangnya perhatian terhadap nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal, meningkatnya pengaruh budaya luar, dan melemahnya kohesi sosial. Hal ini berpotensi mengganggu kehidupan bermasyarakat di Bali yang selama ini hidup rukun, damai, dan saling mengedepankan toleransi.
- d. Menurunnya luas dan alih fungsi lahan pertanian yang masif akibat peningkatan pariwisata merupakan tantangan bagi upaya diversifikasi ekonomi, khususnya pembangunan pertanian di Bali.
- e. Menurunnya jumlah subak. Subak merupakan sebuah kekuatan bagi Bali untuk menjaga kelestarian alam, karena dengan adanya subak, akan mengatur sistem pengairan di Bali, sehingga tetap lestari.
- f. SDM pertanian didominasi petani berusia di atas 45 tahun (sebanyak 64,2% berdasarkan SUTAS 2018), sementara pemuda Bali lebih senang bekerja di sektor pariwisata atau sektor lain di perkotaan.
- g. Berkurangnya sumber mata air yang aktif, untuk kebutuhan air minum dan pembangunan pertanian.
- h. Rusaknya ekosistem laut, danau dan sungai yang mengancam keberlanjutan pembangunan.
- i. Belum terkelolanya penanganan sampah dengan baik, berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan merusak keindahan.
- j. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Bali secara umum, sehingga produktivitas tenaga kerja di Bali secara umum rendah.
- k. Lemahnya kapasitas ASN dan kelembagaan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan rencana pembangunan belum efektif mencapai sasaran pembangunan.
- l. Lemahnya keterpaduan dan konektivitas ekonomi Bali secara lokal dan regional sehingga terjadi kesenjangan intra wilayah Bali dan belum termanfaatkannya secara optimal potensi Bali.



Halaman ini sengaja dikosongkan.





3



**Kerangka
Ekonomi
Bali**

Kerangka Ekonomi Bali

Pertumbuhan Ekonomi Bali



Identifikasi Faktor Penghambat



Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi Bali perlu menjadi prioritas pembangunan Bali

Identifikasi Sektor Unggulan

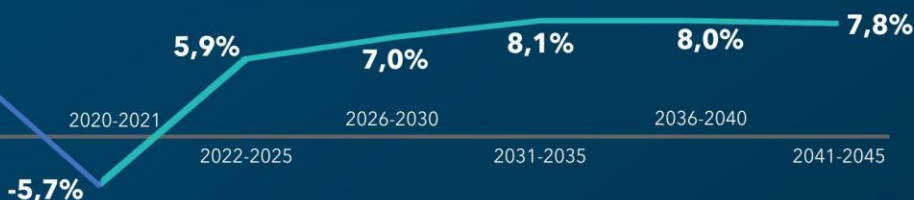
Potensi diversifikasi ekonomi Bali dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi Bali

Sektor Industri
 Industri Makan/Minum
 Industri Kayu
 Industri Barang dari Kayu

Sektor Jasa
 Akomodasi
 Makanan/Minuman
 Jasa Perusahaan

Sektor Pertanian
 Peternakan
 Tanaman Pangan
 Perkebunan

Sasaran Jangka Panjang Ekonomi



Untuk mencapai target Visi Indonesia 2045 dan kembali ke *trajectory* pertumbuhan ekonomi sebelum krisis, Bali perlu tumbuh rata-rata sebesar **7,4%/tahun** selama **2022-2045**

BAB III. KERANGKA EKONOMI BALI

"Kondisi (krisis ekonomi) ini harus cepat diatasi dengan kebijakan khusus yang bersifat spasial untuk Bali, agar pariwisata dan perekonomian Bali tidak semakin terpuruk,"

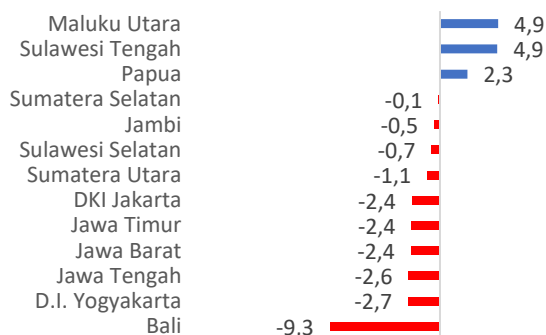
(Gubernur Bali, 11 Juni 2021)

3.1 Kondisi Ekonomi

Ekonomi Provinsi Bali Terkontraksi

Ekonomi Bali mengalami kontraksi paling dalam diantara provinsi lain di Indonesia. Provinsi Bali pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 9,3%, paling dalam di antara provinsi lainnya di Indonesia (Gambar 3.1). Sebelum terjadi COVID-19, rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,3%, lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 5,3%. Setelah terjadi COVID-19, perekonomian Bali mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sejak kuartal pertama tahun 2020 (Gambar 3.2). Kebijakan pembatasan aktivitas di berbagai negara sejak akhir 2019 menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi, bahkan sampai dengan triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami kontraksi. Pada triwulan II-2021, Bali mulai mencatatkan pertumbuhan positif, namun pemulihan masih terbatas jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2020 (% yoy)



Gambar 3. 2. Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2017 – Triwulan III-2021 (% yoy)



Sumber: BPS (2021)

Perekonomian Bali mengalami kontraksi hampir di seluruh sektor selama tahun 2020 dan kembali mengalami kontraksi pada triwulan III-2021. Sektor utama di Bali kembali mencatatkan pertumbuhan negatif pada triwulan III-2021. Terbatasnya mobilitas menyebabkan turunnya kinerja sektor transportasi dan perdagangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Rendahnya sektor transportasi dan perdagangan sejalan dengan penurunan volume kendaraan dan penumpang di penyebrangan Gilimanuk dan Padangbai masing-masing sebesar 32,7% (yoy) dan 16,7% (yoy). Selain itu, terjadi penurunan jumlah keberangkatan penumpang internasional dan volume barang yang dimuat di Bandara Ngurah Rai masing-masing sebesar 88,9% (yoy) dan 71,8% (yoy). Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, kontraksi terjadi akibat penurunan kunjungan wisatawan domestik yang menjadi penopang pariwisata Bali selama pandemi. Di sisi lain, sektor pertanian mengalami kontraksi

akibat penurunan produksi padi, gagal panen pada beberapa komoditas hortikultura, serta penurunan produksi komoditas ternak.

Tabel 3. 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha (% , yoy)

Uraian	2020					2021		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3
Pertumbuhan PDRB	-1,2	-11,1	-12,3	-12,2	-9,3	-9,8	2,9	-2,9
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,2	-2,2	-1,6	-0,5	-1,1	-0,2	0,4	-0,2
Pertambangan dan Penggalian	3,2	-0,1	-8,2	-11,0	-4,3	-7,8	-2,5	0,7
Industri Pengolahan	-7,9	-7,9	-3,8	-7,6	-6,8	-3,1	0,4	-7,3
Pengadaan Listrik dan Gas	8,1	-21,1	-24,0	-27,0	-16,5	-27,0	0,2	2,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,4	-0,1	-1,2	-6,8	-0,6	-7,7	-6,4	-5,7
Konstruksi	2,9	-2,4	-4,7	-5,4	-2,5	-2,8	-0,4	0,8
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,6	-5,8	-10,2	-9,8	-7,0	-7,3	0,1	-1,0
Transportasi dan Pergudangan	-6,3	-39,4	-40,0	-40,0	-31,8	-35,8	2,0	-16,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,4	-33,2	-34,7	-31,8	-27,5	-24,4	4,2	-8,5
Informasi dan Komunikasi	7,2	5,9	6,1	5,4	6,2	5,0	4,0	0,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,4	-7,3	-7,2	-10,2	-4,5	-10,1	2,0	-1,9
Real Estat	3,3	1,7	-1,8	-1,1	0,5	-2,5	1,6	0,5
Jasa Perusahaan	0,2	-4,5	-6,1	-5,7	-4,1	-5,5	1,4	-7,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,5	-0,9	-0,9	-6,2	-0,6	-15,6	17,8	-2,2
Jasa Pendidikan	0,0	0,0	-1,0	-1,3	-0,6	-4,0	2,7	-1,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,9	3,4	0,0	1,2	2,8	0,4	8,9	7,3
Jasa lainnya	-2,7	-7,1	-7,7	-8,2	-6,5	-4,8	4,0	-6,8

Sumber: BPS (2021)

Ekspor mengalami kontraksi yang sangat dalam di tahun 2020, utamanya dikarenakan penurunan kinerja pariwisata. Pada triwulan III-2021, terjadi pemulihan pada komponen ekspor yang didorong oleh ekspor barang, sedangkan ekspor jasa masih belum pulih seiring dengan masih tertutupnya aktivitas pariwisata dari mancanegara. Di sisi lain, terbatasnya mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat PPKM darurat menyebabkan kontraksi pada konsumsi masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga menjadi pendorong utama pertumbuhan dari sisi pengeluaran karena tingginya realisasi belanja barang dan jasa pemerintah daerah. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) juga membantu menopang pemulihan ekonomi Bali sejak Q3-2021 sejalan dengan peningkatan realisasi belanja modal baik APBN maupun APBD.

Tabel 3. 2. Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran (% , yoy)

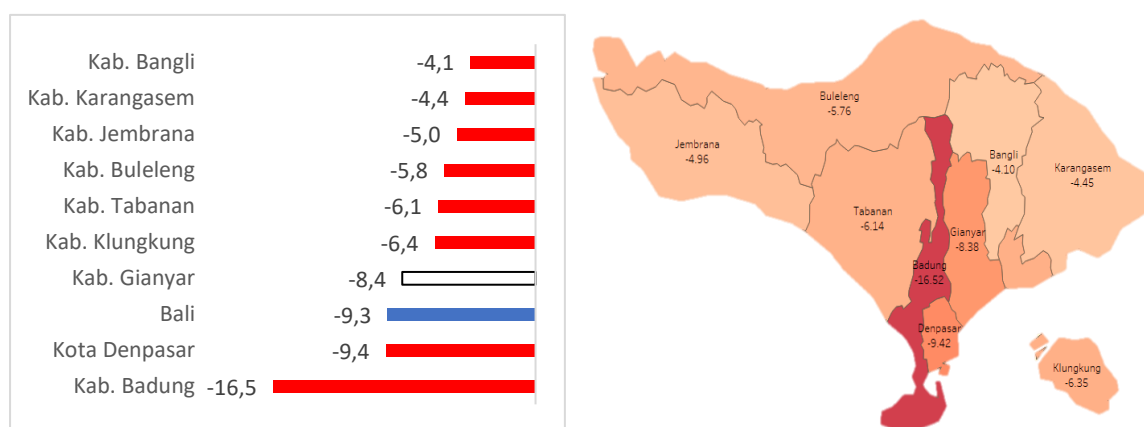
Uraian	2020					2021		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3
Pertumbuhan PDRB	-1,2	-11,1	-12,3	-12,2	-9,3	-9,8	2,9	-2,9
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	1,9	-4,3	-5,4	-6,6	-3,7	-3,7	1,8	-1,0
Konsumsi Pemerintah	-7,5	-2,8	3,5	4,2	0,2	-20,6	11,4	3,7
Investasi (PMTB)	-2,9	-14,6	-17,8	-13,1	-12,2	-8,5	-3,1	1,2
Ekspor Barang dan Jasa	-19,6	-93,7	-94,3	-92,8	-76,2	-91,3	10,8	0,5
Impor Barang dan Jasa	-41,2	-89,5	-93,0	-94,0	-78,3	-92,1	-69,0	-52,0

Sumber: BPS (2021)

Pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami kontraksi. Kabupaten Badung mengalami kontraksi terdalam pada tahun 2020 sebesar 16,5%, disusul Kota Denpasar sebesar 9,4% dan Kabupaten Gianyar sebesar 8,4% (Gambar 3.3). Kontraksi ekonomi yang cukup dalam terkonsentrasi di daerah Bali Selatan mengingat banyaknya lapangan usaha yang mengandalkan pariwisata di daerah tersebut.

daerah tersebut.

Gambar 3. 3. Sebaran Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020 (%oyoy)



Sumber: BPS (2021)

Pandemi COVID-19 Menghantam Pariwisata di Bali

Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) menurun secara drastis sebanyak 82,96% di tahun 2020 dibanding tahun 2019 (Tabel 3.3). Sebelum terjadinya pandemi, Bali menyumbang hampir 40% total wisman yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang berkunjung ke Bali mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan kunjungan mencapai sekitar 6,3 juta pada tahun 2019. Mengingat tingginya ketergantungan kepada wisman, Bali menjadi daerah yang ekonominya paling terdampak pandemi COVID-19. Terhentinya aktivitas pariwisata berdampak pada melemahnya kompetensi SDM pariwisata yang terlatih sehingga berujung pada menurunnya daya saing. Pada akhirnya, sulit bagi industri pariwisata Bali untuk memulai kembali (*re-starting*) aktivitasnya dengan cepat. Hal tersebut tidak hanya merugikan industri pariwisata di Bali, namun juga berdampak negatif terhadap daya saing kepariwisataan Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 3. 3. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Datang Langsung ke Indonesia dan ke Bali, tahun 2014-2020

Tahun	Wisman ke Indonesia	Wisman Datang Langsung ke Bali	Kontribusi Wisman Bali terhadap Indonesia	Pertumbuhan Wisman Bali
2014	9.435.411	3.766.638	39,92%	
2015	10.406.291	4.001.835	38,46%	6,24%
2016	11.519.275	4.927.937	42,78%	23,14%
2017	14.039.799	5.697.739	40,58%	15,62%
2018	15.806.191	6.070.473	38,41%	6,54%
2019	16.106.954	6.275.210	38,96%	3,37%
2020	4.022.505	1.069.473	26,59%	-82,96%

Sumber: Statistik Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Bali (2021)

Sisi permintaan (*demand*) Melemah Akibat Lesunya Pariwisata

Secara umum, aktivitas ekonomi kreatif Bali sangat bergantung pada industri pariwisata terutama bagi seni pertunjukan, kuliner, kriya, dan fotografi. Produsen/seniman masih sangat bergantung pada pemasaran secara langsung yang terkait erat dengan aktivitas pariwisata, dibanding pemasaran secara *online*. Oleh karena itu, kebangkitan pariwisata Bali akan berdampak ikutan positif pada kebangkitan ekonomi kreatif.

Bali memiliki potensi yang besar dalam ekonomi kreatif. Berdasarkan Laporan Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Bali yang dikeluarkan BPS tahun 2017, nilai tambah ekonomi kreatif Bali pada tahun 2017 sebesar Rp24,58 triliun dan berkontribusi sebesar 12,6% pada PDRB total Bali. Berdasarkan sebaran unit usaha, sub-sektor ekonomi kreatif yang memiliki pangsa terbesar adalah kuliner (55,3%), Fesyen (20,2%), dan Kriya (19,3%) dari seluruh jumlah usaha ekonomi kreatif. Dilihat dari pertumbuhannya, sub-sektor ekonomi kreatif yang tumbuh paling tinggi berturut-turut adalah kuliner (8,6%), seni pertunjukan (6,9%) dan fotografi (6,7%).

Sub-sektor kriya yang memiliki potensi ekspor yang tinggi perlu mendapat perhatian karena menunjukkan penurunan. Selama pandemi, sektor kriya mengalami penurunan signifikan akibat berkurangnya penjualan langsung dari wisman dan wisnus yang berkunjung ke Bali. Namun, selama ini, secara struktural daya saing produk kriya (kerajinan dan perhiasan) masih terkendala tingginya biaya logistik yang disebabkan karena terbatasnya akses kargo dan penerbangan langsung dari Bali. Khusus untuk pengrajin perak, terdapat kendala terkait tingginya harga bahan baku. Selain itu, kurangnya literasi dan adaptasi digital menjadi hambatan utama dalam pemasaran dan penjualan produk kriya. Adaptasi teknologi dan akses kepada *marketplace* menjadi sebuah keniscayaan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar.

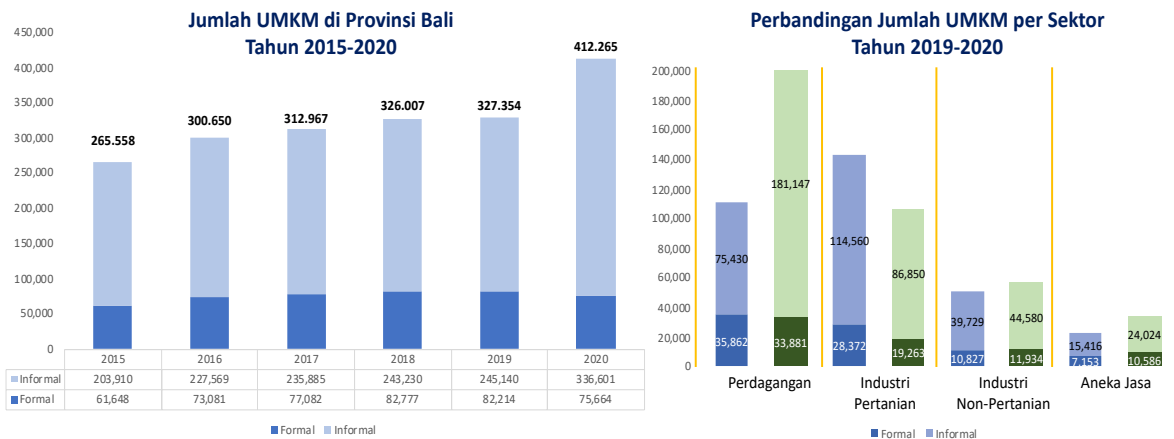
Pada tahun 2019, ekonomi kreatif mencatatkan nilai ekspor sebesar US\$284,8 juta, yang setara dengan 1,45% nilai ekspor ekonomi kreatif nasional dan berpotensi untuk terus meningkat. Ekspor produk ekonomi kreatif Bali tersebut banyak berupa produk kriya, dengan tujuan ekspor Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Eropa, Hongkong, China, dan Thailand. Kerajinan khas Bali memiliki target pasar tersendiri. Selama ini, media pemasaran produk kriya lebih bergantung pada jalur pemasaran *offline* oleh wisman dan wisnus. Beberapa media pameran seperti INACRAFT dan *trade fair* terpaksa berhenti karena pandemi COVID-19. Alternatif kegiatan pameran digital yang dilaksanakan selama pandemi belum berdampak signifikan untuk meningkatkan penjualan produk ekonomi kreatif. Di sisi lain, pasar ritel domestik yang menjadi sasaran utama untuk produk-produk kriya ukuran kecil¹¹ tidak cukup besar untuk menggantikan kehilangan pasar wisman. Sehingga, peranan pasar domestik perlu diperkuat untuk meningkatkan permintaan produk ekonomi kreatif Bali dalam periode krisis COVID-19.

Jumlah UMKM sektor formal mengalami penurunan

Pada tahun 2020, jumlah UMKM sektor formal mengalami penurunan sebesar 8%, sementara sektor informal meningkat sebesar 37% (Gambar 3.4). Sejak pandemi COVID-19, telah banyak UMKM sektor formal yang tutup yang menyebabkan pelaku usaha dan pekerja UMKM sektor formal beralih ke sektor informal. Hal ini terlihat pada tahun 2020, pertumbuhan UMKM Provinsi Bali meningkat secara signifikan yaitu 25,9% (terhadap tahun 2019) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4% - 10%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi di sektor perdagangan sebesar 93,2% (dibandingkan tahun 2019) yang didominasi oleh sektor informal. Tren pertumbuhan yang didominasi oleh sektor informal juga terjadi pada sektor industri non-pertanian dan aneka jasa. Sedangkan jumlah UMKM pada sektor industri pertanian mengalami penurunan sebesar 26%.

¹¹ Produk-produk kriya berukuran kecil dapat berupa cermin kamar tidur, hiasan-hiasan kamar, dan sebagainya

Gambar 3. 4. Profil dan Perkembangan UMKM di Provinsi Bali

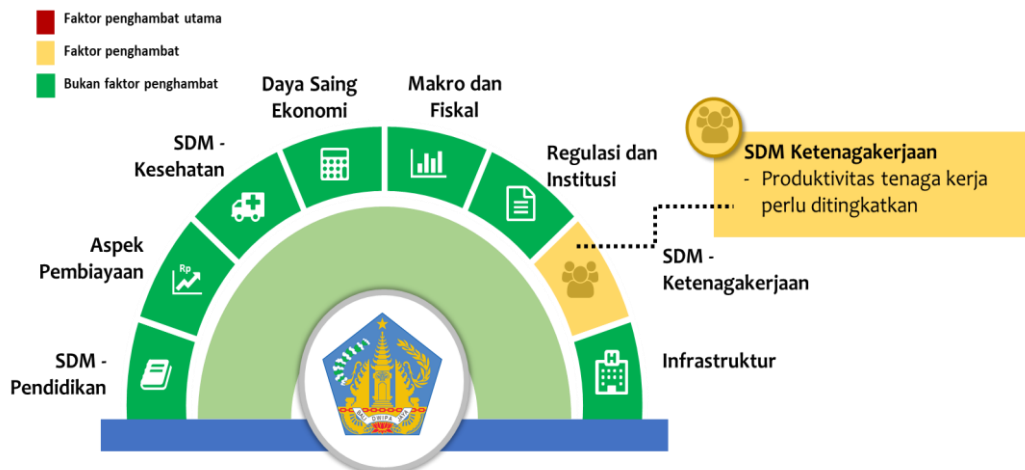


Sumber: Dinas KUKM Provinsi Bali (2021)

3.2 Identifikasi Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Bali perlu diidentifikasi agar menjadi prioritas dalam menentukan kebijakan (Gambar 3.5). Identifikasi faktor tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode *benchmarking* di mana membandingkan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi di Bali dengan provinsi yang memiliki tingkat pendapatan perkapita setara, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Beberapa faktor pertumbuhan ekonomi yang diidentifikasi yaitu (1) Pendidikan, (2) Pembiayaan, (3) Kesehatan, (4) Daya Saing Ekonomi, (5) Makro dan Fiskal, (6) Regulasi dan institusi, (7) Ketenagakerjaan, (8) Infrastruktur.

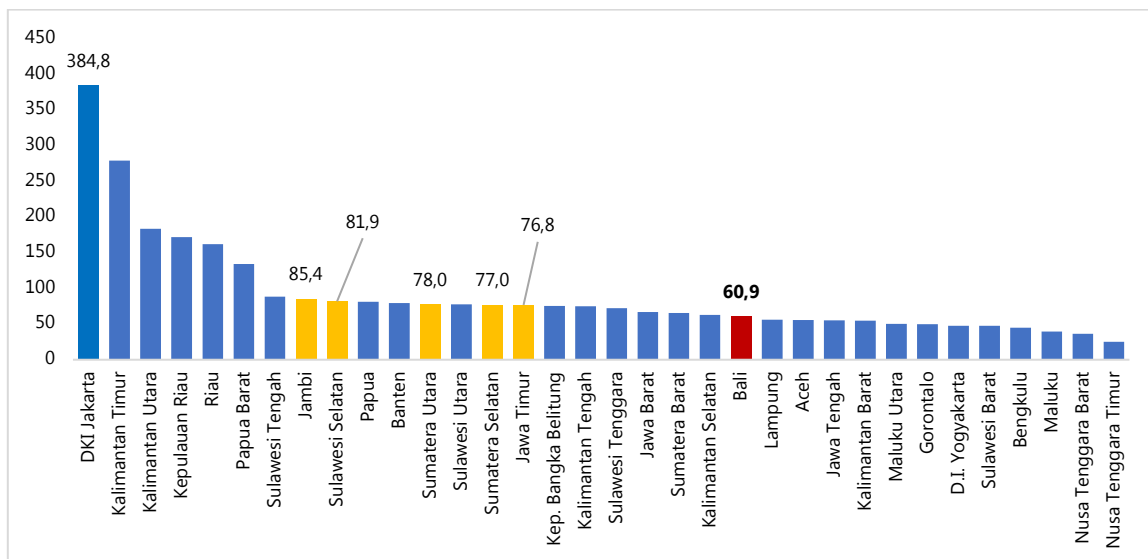
Gambar 3. 5. Hasil Identifikasi Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Bali



Sumber: Analisis Bappenas (2021)

Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa faktor ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan produktivitas total tenaga kerja (nilai tambah per tenaga kerja) Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan daerah sebanding (Gambar 3.6). Produktivitas tenaga kerja provinsi Bali pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 60,9 juta per pekerja, jauh di bawah DKI Jakarta sebesar Rp 384,8 juta per pekerja. Namun, indikator lainnya yang sudah relatif baik seperti aspek pendidikan, pembiayaan, infrastruktur, dan lainnya tetap perlu dipertahankan kualitasnya.

**Gambar 3. 6. Produktivitas Tenaga Kerja per Provinsi, 2020
(Juta Rp per Tenaga Kerja)**



Sumber: BPS via CEIC (2021)

3.3 Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Bali

Bali membutuhkan diversifikasi lapangan usaha untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata. Dalam rangka menetapkan prioritas lapangan usaha yang akan didorong, diperlukan identifikasi sektor unggulan berdasarkan empat metode utama.¹² Dari hasil analisis yang dilakukan, sektor industri dan jasa memiliki keterkaitan tinggi ke depan dan ke belakang, memiliki *output multiplier* tinggi, termasuk sektor basis dalam struktur perekonomian, memiliki pertumbuhan dan kontribusi tinggi, serta penyerapan tenaga kerja tinggi. Sektor industri tersebut diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri kayu dan barang dari kayu, penyediaan akomodasi, penyediaan makan-minum, dan jasa perusahaan. Namun, sektor-sektor tersebut sangat terkait dengan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali. Ke depan, diversifikasi perekonomian diperlukan untuk memperkuat rantai pasok pariwisata maupun non-pariwisata. Oleh karena itu, identifikasi sektor unggulan di setiap rantai keterkaitan tersebut menjadi penting.¹³

Sektor primer (pertanian dalam arti luas) merupakan sektor hulu yang menjadi penyedia bahan baku untuk sektor industri berbasis agro dan memiliki peran penting dalam perekonomian. Berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan, sektor primer merupakan sektor kedua dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Provinsi Bali (15,1%, tahun 2020), setelah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (18,4%, tahun 2020). Selanjutnya, subsektor peternakan memiliki keterkaitan ke depan yang tinggi, kontribusi PDRB tertinggi, proporsi penyerapan tenaga kerja tertinggi, serta keunggulan komparatif yang tinggi (subsektor basis). Subsektor lain yang menunjukkan dominasi setelah peternakan adalah subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan semusim dan tahunan, yang

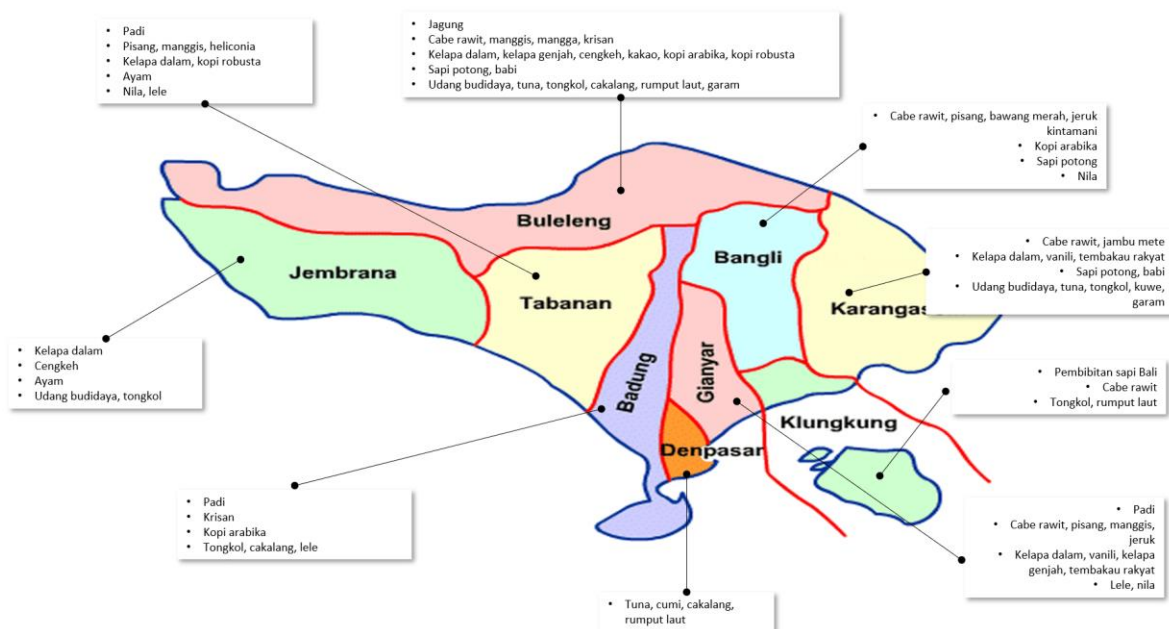
¹² Kriteria sektor unggulan meliputi laju pertumbuhan tinggi, kontribusi terhadap perekonomian tinggi, penyerapan tenaga kerja besar, keterkaitan antar sektor tinggi baik ke depan maupun ke belakang, nilai tambah tinggi. Berdasarkan karakteristik tersebut, identifikasi sektor unggulan dilakukan menggunakan empat metode utama: (1) Analisis Input-Output, untuk memperoleh indeks *backward linkage*, *forward linkage*, dan *output multiplier*; (2) Analisis *Location Quotient* (LQ) untuk membandingkan konsentrasi suatu sektor di tingkat provinsi dibandingkan konsentrasi sektor tersebut di tingkat nasional; (3) Analisis pertumbuhan dan kontribusi PDRB, untuk melihat perbandingan pertumbuhan dan kontribusi nilai tambah (PDRB) lapangan usaha di tingkat provinsi; (4) Analisis tenaga kerja untuk melihat penyerapan tenaga kerja.

¹³ Berdasarkan kerangka analisis ekonomi, dalam rangka mencari potensi komoditas unggulan, sektor primer akan menjadi input bagi sektor sekunder, yang kemudian akan turut menjadi input bagi sektor jasa.

berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan keterkaitan ke depan dan proporsi tenaga kerja yang tinggi. Selain itu, subsektor pertanian tanaman hortikultura semusim, hortikultura tahunan, dan lainnya juga merupakan sektor potensial dari sisi keunggulan komparatif yang tinggi (subsektor basis) dan proporsi tenaga kerja yang tinggi.¹⁴

Dalam rangka peningkatan produktivitas sektor primer Provinsi Bali, dilakukan identifikasi serta analisis spasial terkait komoditas sektor primer yang potensial. Berdasarkan hasil analisis komoditas unggulan, maka yang menjadi komoditas potensial di Bali yaitu (1) tanaman pangan: padi, jagung; (2) perkebunan: kelapa dalam, kelapa genjah, vanili, tembakau rakyat, kopi robusta, kopi arabika, kakao, cengkeh, jambu mete; (3) Hortikultura: cabai rawit, pisang, manggis, mangga, bawang merah, jeruk, jeruk kintamani, heliconia, krisan; (4) Peternakan: bibit sapi, sapi potong, babi, ayam; (5) Perikanan: udang budidaya, tuna, cumi, cakalang, kuwe, tongkol, nila, lele, rumput laut, dan garam. Secara spasial, pemetaan komoditas sektor primer berdasarkan keunggulan di daerah masing-masing untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 3.7.¹⁵

Gambar 3. 7. Hasil Analisis Pemetaan Komoditas Potensial Sektor Primer Kabupaten/Kota di Provinsi Bali



Sumber: Bappenas (2021)

Pemetaan komoditas juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori lainnya. Jika dilihat dari sisi perdagangan, maka komoditas dikelompokkan menjadi komoditas ekspor luar negeri yaitu berdasarkan kombinasi nilai ekspor dan produksi yang memiliki potensi untuk ditingkatkan lebih lanjut. Sedangkan komoditas perdagangan antar wilayah didasarkan pada komoditas yang mendukung perdagangan ke luar Provinsi Bali. Selain analisis perdagangan, komoditas di Bali juga dapat diklasifikasikan ke dalam komoditas tradisional yang merupakan komoditas yang dimiliki oleh sebagian besar rumah tangga di Bali; komoditas bahan baku industri lokal adalah komoditas yang mendukung kebutuhan industri di Bali. Hasil pemetaan berdasarkan masing-masing klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

¹⁴ Berdasarkan analisis komparasi antar subsektor primer menggunakan empat metode utama seperti sebelumnya.

¹⁵ Identifikasi komoditas potensial dilakukan dengan memperhatikan indikator (1) nilai produksi komoditas; (2) produktivitas atau jumlah produksi; dan (3) jumlah rumah tangga usaha di komoditas terkait. Indikator tersebut dipilih karena komoditas potensial yang dikembangkan diharapkan bernilai tinggi seiring dengan tingginya produktivitas/jumlah produksi, serta berdampak pada kehidupan masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Tabel 3. 4. Klasifikasi Komoditas Potensial Bali

Klasifikasi	Komoditas
Komoditas Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> - Padi, Olahan Padi - Kelapa, Vanili, Kakao, Tembakau, Kopi, Cengkeh - Manggis, Pisang, Salak, Mangga, Bawang Merah, Olahan Cabai, Jeruk, Kacang Mete - Tuna, Udang, Tongkol, Cumi, Cakalang, Benih Bandeng, Garam - Sapi Potong, Olahan Ayam
Komoditas Perdagangan Antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Cengkeh - Makanan Ternak - Roti, kue dan mie lainnya
Komoditas Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Padi - Kelapa Dalam - Sapi, Babi
Komoditas bahan baku Industri lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Padi, Jagung - Pisang, Manggis, Cabe Rawit - Kelapa Dalam - Sapi Potong, Babi - Udang Budidaya, Tongkol, Tuna, Nila, Lele

Sumber: Bappenas (2021)

Komoditas unggulan Provinsi Bali, terutama komoditas subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan memiliki potensi peluang di pasar domestik. Berdasarkan Statistik Perdagangan Antar Wilayah Indonesia Tahun 2020, terdapat tujuh provinsi yang memiliki permintaan terhadap tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang cukup tinggi terkait dengan produk unggulan Provinsi Bali. Misalnya, komoditas beras yang tinggi permintaannya dari Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, permintaan komoditas lainnya seperti kopi, kopra, dan ikan beku cukup tinggi dari Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi DKI Jakarta. Potensi permintaan dari ketujuh provinsi tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan produk unggulan Bali di pasar domestik.

Penguatan keterkaitan antara sektor primer dan industri perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah. Meskipun sektor industri hanya berkontribusi sekitar 6% dari total PDRB Provinsi Bali, sektor ini merupakan sektor terbesar ketiga yang menyerap tenaga kerja dan sektor terbesar kedua dari sisi jumlah usaha. Selain itu, sektor industri memiliki keterkaitan tinggi ke depan dan belakang serta memiliki *output multiplier* yang tinggi. Beberapa contoh potensi pengembangan industri dari komoditas unggulan sektor primer dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9.

Gambar 3. 8. Potensi Pengembangan Industri Komoditas Unggulan Sektor Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan

Komoditas Unggulan Sektor Primer	Padi	Jagung	Sapi potong, Babi	Udang Tuna	Tongkol Rumput laut	
Turunan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Beras • Pati Beras • Tepung beras 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepung jagung • Pati jagung (maizena) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawetan daging (beku, kering dan asap) • Olahan daging (sosis, salami, daging ham, abon) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawetan ikan (beku, kering, dan asap) • Aneka olahan ikan 		
Industri yang bisa dikembangkan (RPIP 2020-2040)			<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengasapan / pemanggangan ikan • Industri pembekuan ikan • Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng 		
Industri potensial untuk dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pati beras dan jagung • Industri penggilingan padi dan penyosohan beras • Industri produk roti dan kue • Industri makanan dan masakan olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pati beras dan jagung • Industri produk roti dan kue 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri makanan dan masakan olahan 		<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengasapan / pengeringan biota air lainnya 	
Arahan lokasi yang bisa dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Badung • Kabupaten Tabanan • Kabupaten Jembrana • Kota Denpasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Buleleng 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tabanan • Kabupaten Jembrana • Kabupaten Gianyar • Kabupaten Karangasem 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Jembrana • Kabupaten Badung • Kabupaten Klungkung 		

Keterangan:

📍 lokasi pengembangan berdasarkan Perda 08/2020 tentang RPIP 🟩 lokasi pengembangan potensial

Sumber: Perda 08/2020 tentang RPIP, analisis Bappenas (2021)

Gambar 3. 9. Potensi Pengembangan Industri Komoditas Unggulan Sektor Perkebunan dan Hortikultura

Komoditas Unggulan Sektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> Pisang Manggis Mangga 	<ul style="list-style-type: none"> Cabai rawit 	Kelapa dalam, kelapa genjah	Cengkeh	Vanili	Kakao	Kopi arabika, kopi robusta
Turunan produk	<ul style="list-style-type: none"> Asinan buah-buahan Kaleng buah-buahan Selai Buah Olahan Keripik Minuman Sari Buah Es krim 	<ul style="list-style-type: none"> Aneka Sambal Bumbu masak 	<ul style="list-style-type: none"> Kopra VCO Gula kelapa Kosmetik 	<ul style="list-style-type: none"> Minyak atsiri 	<ul style="list-style-type: none"> Buah vanili kering Flavoring agent Fragrance 	<ul style="list-style-type: none"> Minyak kakao Bubuk Cokelat Permen Cokelat 	<ul style="list-style-type: none"> Kopi OSE Kopi Sangrai Kopi Bubuk
Industri yang bisa dikembangkan (RPIP 2020-2040)	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dalam kaleng 					<ul style="list-style-type: none"> Industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan kakao Industri manisan 	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi
Industri potensial untuk dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan es krim Industri pelumatan buah-buahan Industri manisan 	<ul style="list-style-type: none"> Industri bumbu masak dan penyedap masakan 	<ul style="list-style-type: none"> Industri kopra Industri minyak makan kelapa Industri minyak goreng kelapa 			<ul style="list-style-type: none"> Industri makanan dari cokelat dan kembang gula 	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan kopi dan teh
Arahan lokasi yang bisa dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> Kab. Buleleng, Kab. Karangasem, Kab. Bangli Kab. Gianyar, Kab. Tabanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kab. Klungkung, Kab. Buleleng, Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem 	<ul style="list-style-type: none"> Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Karangasem Kab. Buleleng, Kab. Gianyar 	Kab. Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> Kab. Karangasem Kab. Gianyar 	<ul style="list-style-type: none"> Kab. Jembrana Kab. Buleleng 	<ul style="list-style-type: none"> Kab. Bangli Kab. Tabanan Kab. Buleleng Kab. Badung

Keterangan:

lokasi pengembangan berdasarkan Perda 08/2020 tentang RPIP

lokasi pengembangan potensial

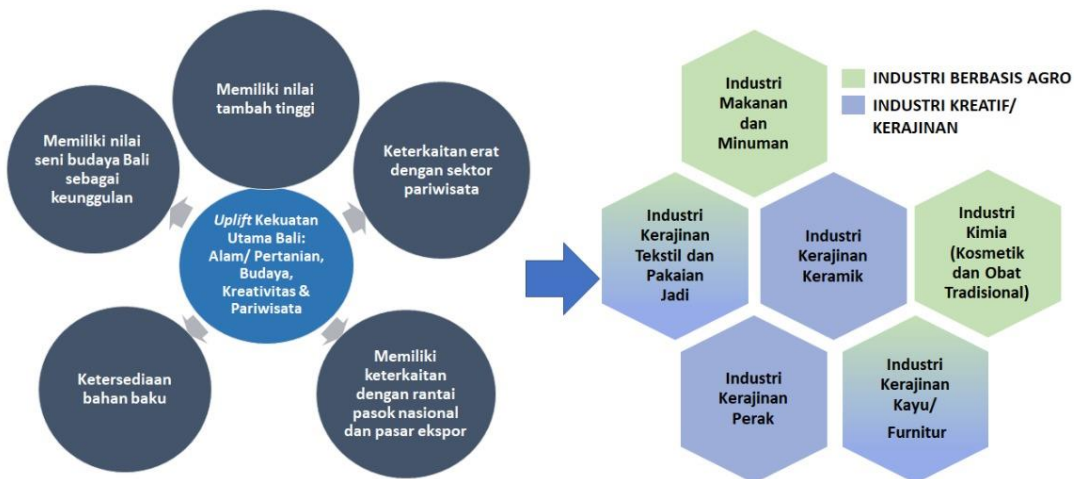
Sumber: Perda 08/2020 tentang RPIP, analisis Bappenas 2021

Selain industri berbasis agro¹⁶, terdapat subsektor potensial lainnya yang dapat dikembangkan di Provinsi Bali, terutama dalam lingkup industri kreatif. Industri unggulan berbasis agro dan kreatif diidentifikasi berdasarkan kekuatan utama Bali, yaitu alam/pertanian, budaya, kreativitas, dan pariwisata. industri agro dan industri kreatif memiliki nilai tambah tinggi, keterkaitan erat dengan sektor jasa (pariwisata), keterkaitan erat dengan rantai pasok nasional dan pasar ekspor, ketersediaan bahan baku, serta memiliki nilai seni budaya Bali. Seiring dengan potensi yang dimiliki industri kerajinan tekstil, kimia (kosmetik dan obat tradisional), kriya, aplikasi, animasi dan *game* serta kerajinan kayu, pemerintah daerah mendukung aktivitas pengembangan sektor tersebut dengan menetapkan Perda Provinsi Bali No. 08/2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040.

industri agro dan industri kreatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor primer dan sektor pariwisata. Sebagian besar bahan baku yang digunakan dalam produksi industri agro dan industri kreatif berasal dari lokal Bali yaitu tanaman pangan, perikanan, hortikultura/perkebunan, dan peternakan. Selain itu, bahan baku lainnya diperoleh dari provinsi lain di Pulau Jawa. Hasil olahan dari industri dipasarkan ke luar negeri (ekspor), Pulau Jawa, dan untuk memenuhi kebutuhan di Bali, yaitu bagi sektor peternakan dan perikanan, industri, dan sektor pariwisata (penyediaan makanan dan minuman dan penyedia akomodasi).

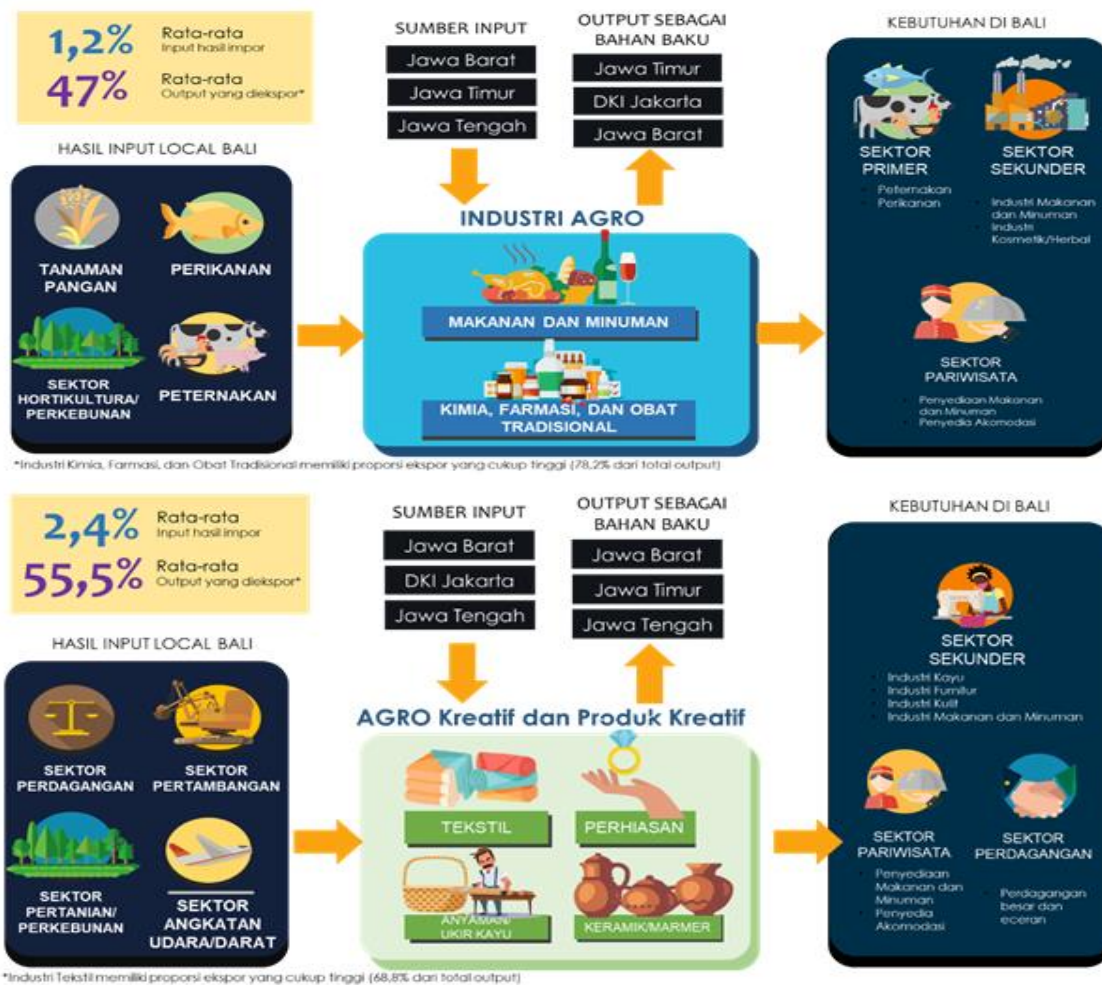
¹⁶ Industri berbasis agro mencakup industri makanan dan minuman, industri kimia (kosmetik dan obat tradisional)

Gambar 3. 10. Pemetaan Sub-sektor Unggulan Industri Pengolahan Provinsi Bali



Sumber: Bappenas (2021)

Gambar 3. 11. Keterkaitan Sektor Industri dengan Sektor Primer dan Sektor Pariwisata

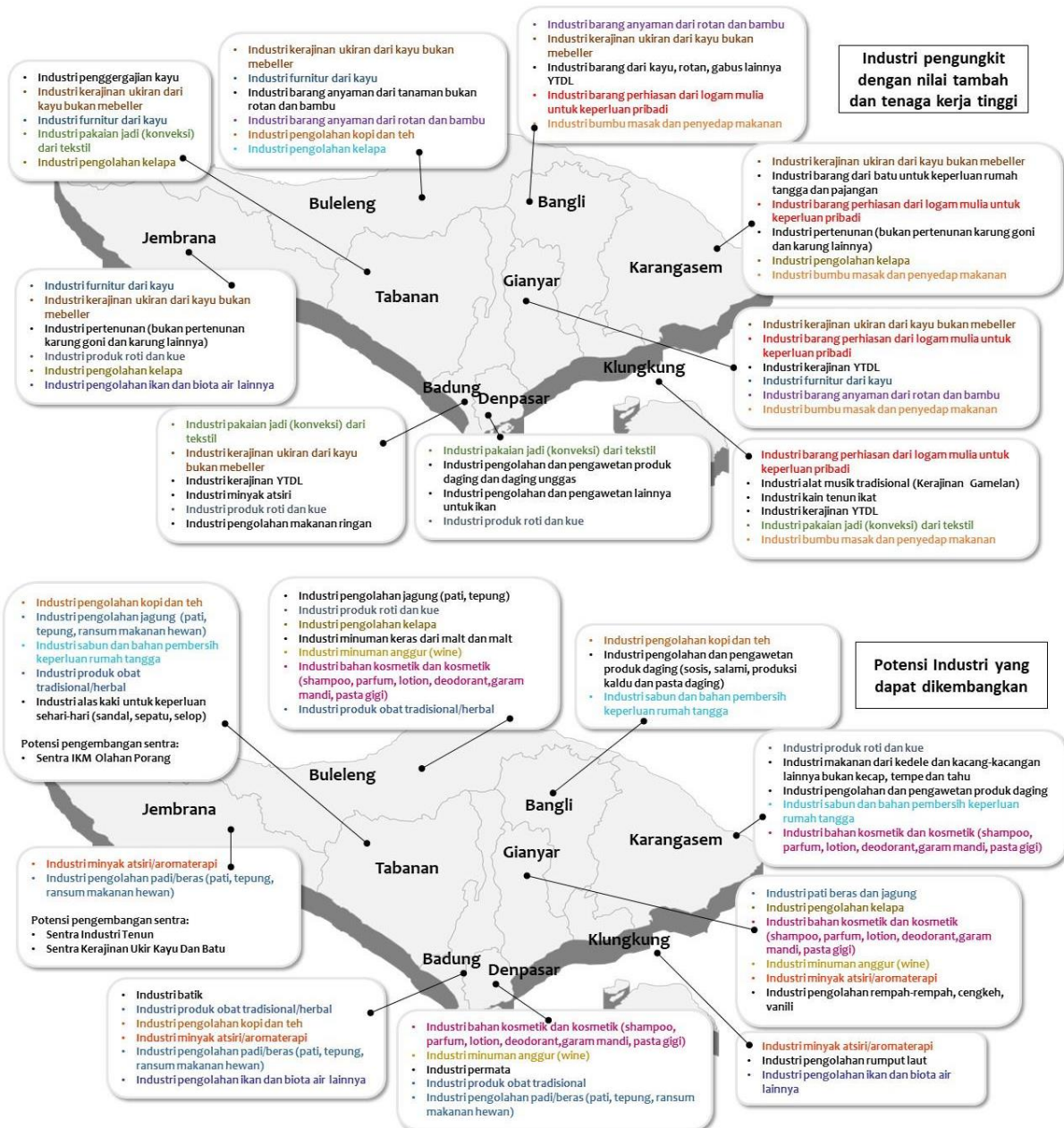


Sumber: IRIO (2016), Analisis Bappenas (2021)

Pengembangan industri pengolahan secara terperinci dalam subsektor dilakukan dengan melihat potensi industri saat ini sebagai pengungkit perekonomian masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan nilai tambah dan tenaga kerja dari industri kecil dan menengah yang


berkembang, industri kerajinan kayu, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kerajinan perhiasan, industri produk roti dan kue merupakan industri pengungkit pada sebagian daerah di Provinsi Bali. Peningkatan skala industri kecil dan menengah eksisting yang potensial dan industri yang dapat mendukung hilirisasi komoditas unggulan menjadi pilihan lainnya dalam pengembangan industri. Selengkapnya, pemetaan industri pengungkit dan potensi yang dapat dikembangkan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali digambarkan dalam Gambar 3.12.

Gambar 3. 12. Pemetaan Penguatan Industri Eksisting Kabupaten/Kota di Provinsi Bali



Sumber: Analisis Bappenas (2021)

Potensi pasar bagi industri komoditas unggulan Provinsi Bali tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi terbuka bagi pasar ekspor, terutama ke negara pasar utama wisatawan. Berdasarkan nilai ekspor Provinsi Bali tahun 2020, mayoritas negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Bali adalah Amerika Serikat untuk produk perikanan, kerajinan kayu, dan tekstil, Jepang untuk produk perikanan, tas dan kerajinan kulit, Australia untuk produk alas kaki, ikan tuna, dan kerajinan, Perancis



untuk produk komponen rumah, furnitur, dan kopi, serta Inggris untuk produk ikan hias, kerajinan logam, dan perak. Ke depannya, ekspor komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan diarahkan utamanya kepada negara importir utama, yaitu China, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Belanda.

3.4 Skenario Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Bali

Pemulihan ekonomi Bali akibat krisis karena pandemi COVID-19 sangat tergantung kepada kecepatan pemulihan pariwisata. Bersama dengan hal itu, program pemulihan ekonomi tersebut harus sudah meletakkan kerangka dasar untuk proses transformasi ekonomi dalam jangka panjang menuju **Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.**

Perumusan program pemulihan pariwisata didasarkan pada 2 (dua) sisi, yaitu sisi permintaan (*demand-side*) dan sisi penawaran (*supply-side*). Dari sisi permintaan, program pemulihan memperhatikan proyeksi kunjungan wisatawan dalam periode 2021-2024 dan juga segmen pasar wisatawan yang potensial untuk berkunjung ke Bali. Sementara itu, intervensi pada sisi penawaran meliputi program untuk memperpanjang daya tahan industri wisata dan pelaku pariwisata.

Terdapat beberapa asumsi yang mendasari penyusunan skenario dan target pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Bali, yaitu:

1. Pemulihan pariwisata bergantung pada kondisi pariwisata internasional. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) memproyeksikan pariwisata akan kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2024-2025. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, Asia-Pasifik menjadi yang paling terdampak dalam hal jumlah kunjungan wisatawan akibat penerapan restriksi pembatasan perjalanan (*travel restriction*) yang relatif lebih ketat.
2. Program vaksinasi COVID-19 dinilai efektif dalam menekan penambahan kasus baru dan mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*).
3. Inisiasi penjalinan kerja sama bilateral dan multilateral terkait kunjungan wisatawan mancanegara (*travel bubble*) dan penerapan kerja sama pariwisata yang resiprokal dengan negara mitra dalam hal pengaturan persyaratan masuk dan izin tinggal wisatawan.
4. Pandemi COVID-19 mengakibatkan menurunnya jumlah penerbangan dan berkurangnya kapasitas bangku (*seat capacity*) penerbangan menjadi sekitar 60% di tahun 2022-2023. Kapasitas bangku dan penerbangan diproyeksikan akan kembali normal di tahun 2024.
5. Khusus wisatawan nusantara, pemulihan pariwisata Bali dipengaruhi oleh Kebijakan PPKM dan persyaratan perjalanan antar provinsi. Kebijakan penurunan tingkat PPKM dan penetapan harga maksimal untuk testing (PCR dan swab-antigen) akan mempercepat pemulihan pariwisata domestik.

Berkaitan dengan pemulihan pariwisata Bali, terdapat tiga skenario pemulihan wisatawan mancanegara ke Bali, yaitu skema optimis, moderat, dan pesimis¹⁷.

- a. **Pada Skenario Optimis**, program vaksinasi *Bali-Wide* ditargetkan selesai¹⁸ di akhir Bulan September 2021 dan pembukaan pariwisata dapat dimulai di pertengahan bulan Oktober 2021¹⁹. Proyeksi berdasarkan skenario ini menghasilkan jumlah kunjungan wisatawan kembali ke tingkat sebelum COVID-19 di tahun 2024.
- b. **Pada Skenario Moderat**, program vaksinasi *Bali-Wide* ditargetkan selesai di Bulan November 2021 dan pembukaan pariwisata dapat dimulai di Triwulan I-2022. Proyeksi berdasarkan

¹⁷ Berdasarkan perkembangan ketika dokumen ini disusun (Oktober 2021), pemerintah mempercepat penyelesaian vaksinasi dosis kedua dan ketiga untuk nakes dan merencanakan pembukaan pariwisata Bali pada pertengahan Oktober 2021. Adapun proyeksi yang paling mendekati kondisi ini adalah Skenario Optimis. Skenario Moderat dan Pesimis disiapkan sebagai langkah preventif apabila kondisi sektor kesehatan mengalami perburukan akibat varian jenis Lambda dan Mu masuk ke Indonesia.

¹⁸ Mencapai target 80% penduduk tervaksinasi

¹⁹ Pembukaan dimulai pada 14 Oktober 2021 yang dimulai dengan 19 negara, namun mengikuti perkembangan yang terjadi setelah penulisan dokumen ini

skenario ini menghasilkan jumlah kunjungan wisatawan kembali ke tingkat sebelum COVID-19 di tahun 2025.

- c. **Pada Skenario Pesimis**, program vaksinasi *Bali-Wide* ditargetkan selesai di Bulan Triwulan I-2022 dan pembukaan pariwisata dapat dimulai di Triwulan III-2022. Proyeksi berdasarkan skenario ini menghasilkan jumlah kunjungan wisatawan kembali ke tingkat sebelum COVID-19 di tahun 2027.

Pembukaan kunjungan wisman ke Bali akan dilakukan secara bertahap melalui tahapan uji coba (*trial*). Pembukaan pariwisata Bali dilakukan dengan kebijakan (i) pembukaan Bandara Ngurah Rai untuk penerbangan internasional, (ii) pembukaan terbatas kepada wisatawan dari negara yang memenuhi persyaratan²⁰, dan (iii) kebijakan PPKM, karantina, dan *testing* COVID-19. Kebijakan-kebijakan tersebut menentukan kerangka waktu pemulihan (kembali ke kondisi tahun 2019) pariwisata Bali dalam tiga skenario optimis, moderat, dan pesimis (Tabel 3.5).

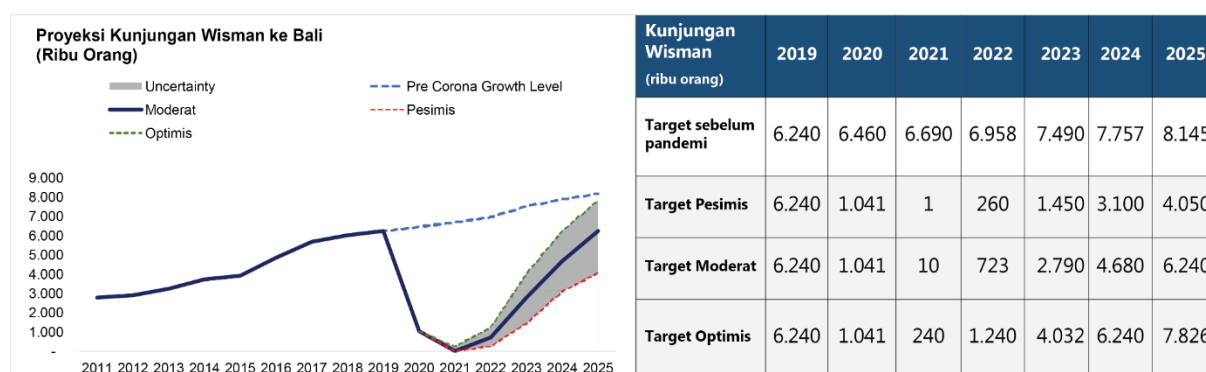
Tabel 3. 5. Proyeksi dan Target Pemulihan Kunjungan Wisman ke Bali

Proyeksi	Optimis	Moderat	Pesimis
Penyelesaian Program Vaksinasi <i>Bali-Wide</i>	Akhir September 2021	November 2021	Triwulan I-2022
Periode Pembukaan Pariwisata	Pertengahan Oktober 2021	Triwulan I-2022	Triwulan II-2022
Kunjungan wisman pulih ke Tingkat Sebelum Pandemi COVID-19	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2027

Sumber: Bappenas (2021)

Dari hasil proyeksi di atas, **faktor penting dalam pemulihan pariwisata di Bali adalah penyelesaian vaksinasi, penurunan kasus harian, dan momentum pembukaan pariwisata**. Berangkat dari hasil proyeksi dalam tiga skenario di atas, proyeksi jumlah kunjungan wisman dapat diproyeksikan. Selengkapnya, perhitungan proyeksi dapat dilihat di Tabel 3.6.

Tabel 3. 6. Proyeksi Jumlah Kunjungan Wisman Mancanegara ke Bali (2021-2025) dalam Skenario Optimis, Moderat, dan Pesimis



Sumber: Bappenas (2021)

Kunjungan wisman akan menghasilkan dampak ekonomi melalui belanja wisatawan saat berkunjung ke Bali. Adapun total belanja wisatawan tergantung kepada jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal (*length of stay/LOS*), dan pembelanjaan wisatawan per hari yang akan menghasilkan penerimaan total (*total yield*) sebagai dampak langsung dari kunjungan wisatawan. Penerimaan total ini akan menghasilkan dampak ekonomi pada sektor-sektor yang lain (*multiplier effect*). Dengan

²⁰ Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

proyeksi tiga variabel tersebut, maka dampak ekonomi yang diperoleh dari wisman adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 7. Proyeksi *Total Yield* dari Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali

Tahun	Belanja /hari (US\$)	LOS (hari)	Jumlah Kunjungan			Total Yield		
			Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis (US\$ 000)	Moderat (US\$ 000)	Optimis (US\$ 000)
2021	145	10,35	1.000	10.000	240.000	1.501	15.008	360.1800
2022	150	10,65	260.000	723.000	1.240.000	415.350	1.154.993	1.980.900
2023	155	10,9	1.450.000	2.790.000	4.032.000	2.449.775	4.713.705	6.812.064

Sumber: Bappenas (2021)

Berdasarkan prediksi *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), **pariwisata domestik akan pulih lebih cepat daripada pariwisata internasional**. Wisatawan nusantara menjadi target paling realistis untuk Bali dalam jangka pendek (2020-2023). Beberapa destinasi utama dan daya tarik pariwisata Bali mulai diarahkan untuk menerima wisatawan nusantara. Kampanye #diIndonesiaAja diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong perjalanan dalam negeri selama pandemi. Kampanye ini bersifat strategis untuk mengajak wisnus merencanakan perjalanan mengeksplorasi keindahan destinasi wisata Indonesia, yang berdampak pada peningkatan pengeluaran wisnus bagi masyarakat lokal. Bappenas memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, seperti yang dipaparkan pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3. 8. Proyeksi Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Bali (2021-2025) dalam Skenario Optimis, Moderat, dan Pesimis

Kunjungan Wisnus (ribu org)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pre-Corona Growth Level	10.545	11.072	11.389	11.600	11.974	12.390	12.654
Target Pesimis	10.545	4.596	3.677	5.515	6.839	8.139	9.115
Target Moderat	10.545	4.596	3.907	6.329	8.639	10.540	12.120
Target Optimis	10.545	4.596	4.045	7.038	10.556	12.937	14.231

Sumber: Bappenas (2021)

Kunjungan wisatawan nusantara akan menghasilkan dampak ekonomi melalui pengeluaran belanja wisatawan saat berkunjung ke Bali. Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal (*length of stay*), dan pembelanjaan wisatawan per hari akan menghasilkan penerimaan total (*total yield*), yang merupakan dampak langsung yang didapatkan dari wisatawan. Penerimaan total ini akan menghasilkan dampak pengganda ekonomi pada sektor-sektor yang lain (*multiplier effect*). Selengkapnya, proyeksi penerimaan total dari kunjungan wisatawan nusantara dapat dilihat di Tabel 3.9.

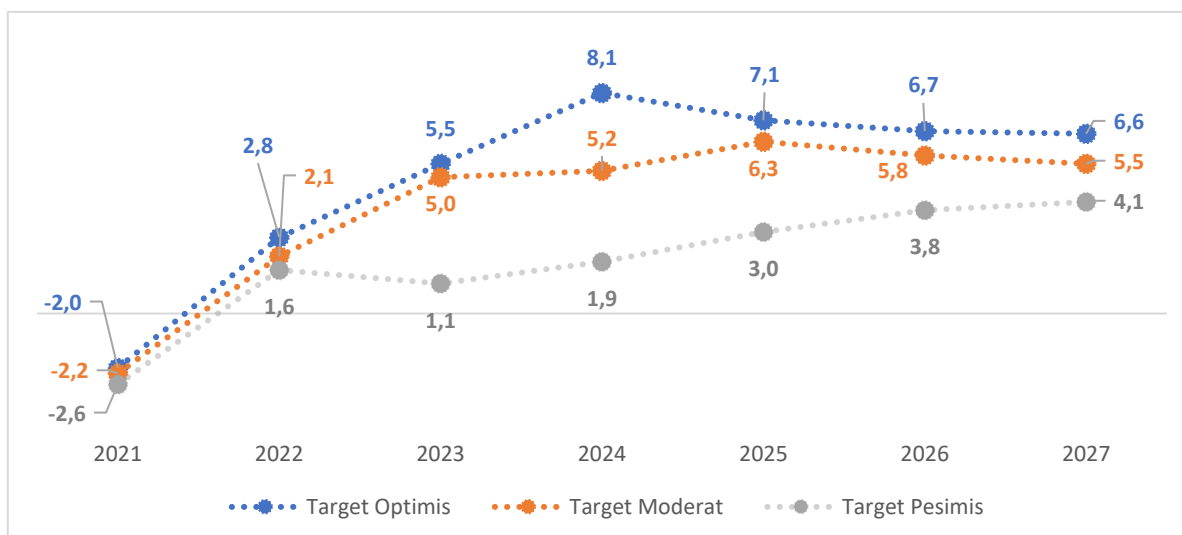
Tabel 3. 9. Proyeksi *Total Yield* dari Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Bali

Tahun	Pembelanjaan/hari (Rp)	LOS (hari)	Jumlah Kunjungan (Perjalanan)			Total Yield		
			Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis (Rp. M)	Moderat (Rp. M)	Optimis (Rp. M)
2021	500.000	4,00	3.677.000	3.907.000	4.045.000	7.353	7.813	8.089
2022	550.000	4,25	5.515.000	6.329.000	7.038.000	12.892	14.793	16.450
2023	600.000	4,50	6.839.000	8.639.000	10.556.000	18.465	23.325	28.502

Sumber: Bappenas (2021)

Seiring dengan proyeksi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diperkirakan akan kembali positif pada tahun 2022. Pada skenario optimis, perekonomian Bali diperkirakan akan kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2024. Sementara, pada skenario moderat dan pesimis, perekonomian Bali diperkirakan akan kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2025 dan 2027.

Gambar 3. 13. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali pada Masa Pemulihan (% yoy)



Sumber: Bappenas (2021)

3.5 Skenario Transformasi Ekonomi Bali

Perumusan Skenario Transformasi Ekonomi Bali didasarkan pada Visi Indonesia 2045²¹, yaitu Indonesia sebagai negara maju dan keluar dari *middle income trap* sebelum tahun 2045. Untuk menuju negara maju, Indonesia harus tumbuh rata-rata 6,0% per tahun. Selain itu, dalam Visi 2045 juga terdapat target pemerataan wilayah, di mana wilayah luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Dengan kondisi tersebut, peranan KTI diperkirakan meningkat menjadi 25,1% dan peranan KBI sebesar 74,9%.²²

Perekonomian Bali perlu tumbuh tinggi agar dapat kembali ke *trajectory* pertumbuhan²³ sebelum krisis COVID-19 untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan dengan skenario *baseline*, di mana Bali tumbuh secara rata-rata sebesar 6,0% per tahun, belum dapat mengembalikan kepada *trajectory* pertumbuhan sebelum pandemi pada tahun 2045. Dengan rata-rata pertumbuhan 7,4%, Bali dapat kembali pada *trajectory* pra-pandemi di tahun 2040.

Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga 8,4% pada tahun 2033, kemudian melambat seiring dengan kondisi demografi Bali menuju *ageing population*. Proporsi penduduk usia produktif di Bali diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif pada periode 2020-2030. Dengan proporsi lansia yang semakin membesar, sedangkan proporsi penduduk usia 14 tahun ke bawah mengecil, Bali diperkirakan akan masuk pada periode

²¹Telah disampaikan oleh Presiden RI pada 16 Agustus 2019

²² Perkiraan Visi Indonesia 2045 Kementerian PPN/Bappenas sebelum pandemi COVID-19

²³ Lihat lampiran II

ageing population mulai tahun 2033. Sehingga, Bali diupayakan mencapai pertumbuhan yang tinggi sebelum memasuki periode *ageing population*.

Diversifikasi ekonomi, penguatan keterkaitan antarsektor agar menciptakan peningkatan nilai tambah, dan pengembangan *quality tourism* menjadi kunci dalam transformasi ekonomi Bali.

Sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh hingga 5,4% melalui strategi modernisasi/digitalisasi pertanian, pengembangan pertanian organik, dan penguatan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor hilir. Keterkaitan antara sektor primer dan industri akan menciptakan nilai tambah yang tinggi sehingga terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 7,1%. Untuk mencapai kontribusi tersebut, sektor industri pengolahan perlu tumbuh hingga 8,0%, dengan didorong oleh pengembangan industri hijau berbasis agro yang berorientasi pada pasar domestik dan luar negeri. Sektor pertanian dan industri pengolahan yang telah berkembang diharapkan turut menunjang kinerja sektor jasa khususnya pariwisata. Selain itu, pariwisata perlu diarahkan kepada *quality tourism*, utamanya yang berbasis *cultural tourism*, *traditional tourism*, *eco-tourism*, *education tourism*, *health tourism* (*medical, healing, wellness*), dan *digital tourism*.

Tabel 3. 10. Sasaran Jangka Panjang Provinsi Bali

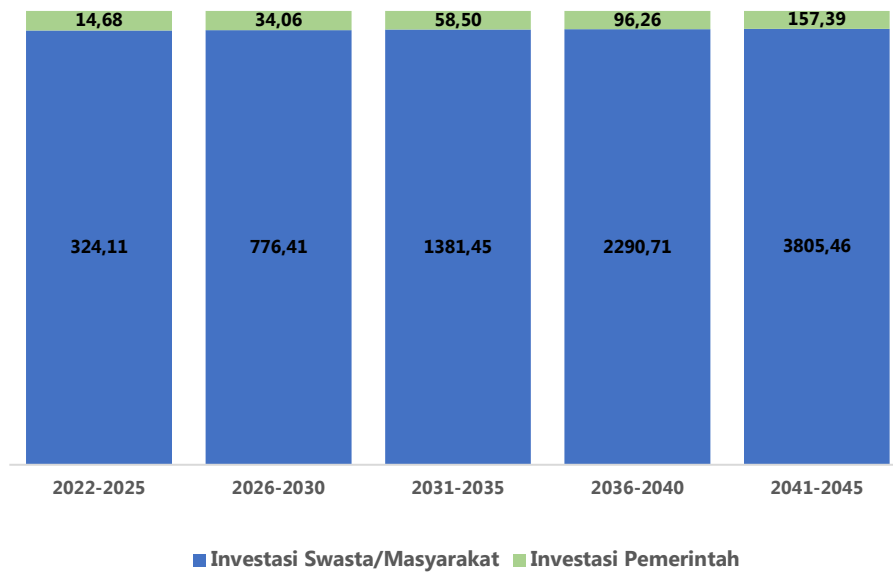
Uraian	Realisasi 2015-2019	2020	2028	2045
Pertumbuhan Ekonomi	6,0	-9,3	7,5	7,7
Pertumbuhan (Produksi)				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,4	-1,1	4,7	5,4
Industri Pengolahan	4,7	-6,8	7,3	8,0
Jasa-Jasa	6,6	-12,2	7,4	8,0
Pertumbuhan (Pengeluaran)				
Konsumsi RT	5,8	-3,6	6,0	6,2
Investasi	6,5	-12,2	7,4	7,9
Ekspor	6,6	-76,2	25,5	9,7
Kontribusi				
Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	14,1	15,1	10,8	8,9
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,2	6,4	6,8	7,1
Kontribusi Jasa terhadap PDRB	69,2	66,5	68,9	69,9
Kontribusi Ekspor Barang terhadap PDRB	4,1	2,9	5,0	7,6
Kontribusi Ekspor Jasa terhadap PDRB	35,3	8,1	24,1	31,0
Kontribusi Investasi terhadap PDRB	30,5	30,2	30,3	32,5

Sumber: Bappenas (2021)

Untuk mencapai sasaran jangka panjang pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2045, dibutuhkan investasi sebesar Rp8.939,04 triliun, yang bersumber dari pemerintah dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, porsi investasi yang perlu dipenuhi dunia swasta (termasuk Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) meningkat dari 95,4% (tahun 2022) menjadi 96,0% (tahun 2045). Adapun kontribusi investasi pemerintah menurun dari 4,6% (tahun 2022) menjadi 4,0% (tahun 2045) terhadap total kebutuhan investasi. Artinya, peranan pemerintah ke depan lebih pada pemberian fasilitasi dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong sektor non-pemerintah untuk bergerak. Kebijakan-kebijakan yang mendukung perbaikan iklim investasi seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, maupun simplifikasi regulasi perlu

diprioritaskan agar sektor swasta dapat memperkuat peranannya dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Gambar 3. 14. Proyeksi Kebutuhan Investasi Tahun 2022-2045 (Triliun Rupiah)



Sumber: Bappenas (2021)



Halaman ini sengaja dikosongkan.





4

**Ekonomi
Bali Pulih
dengan Cepat
dan Sehat**

Rumusan *Quick Wins* Pemulihan Ekonomi Bali Jangka Pendek

1. Tahapan Persiapan

Pengendalian Pandemi COVID-19 dan Vaksinasi *Bali-Wide*

- Adaptasi **Protokol Kesehatan, Kebersihan, dan Keselamatan** dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat
- Pelaksanaan Program **Vaksinasi *Bali-Wide***
- Koordinasi **Peningkatan Keamanan & Kesehatan** Bali



Bantuan Sosial dan Program Padat Karya

- **Bantuan Sosial** kepada **Masyarakat** Bali yang Berhak
- Mendorong Proyek **Pembangunan Padat Karya** dan Rehabilitasi **Sarana Prasarana Desa**



2. Tahapan Transisi

Insentif & Fasilitas Usaha

- **Restrukturisasi** Kredit dan **Fasilitas Pembiayaan**
- Insentif **Pajak, Bea Masuk, dan Fasilitas Ekspor**
- Kemudahan **Memulai** Usaha dan **Izin Usaha**



Peningkatan Citra Bali sebagai Bali Aman COVID-19

- Membangkitkan **Citra Bali** sebagai **Destinasi** Wisata yang **Sehat dan Aman**
- Menjadikan **Bali** sebagai Lokasi **Remote Working** kelas **Dunia**



3. Tahapan Pemulihan

Reaktivasi Destinasi Wisata Bali

- Memastikan **Kesiapan Destinasi & Adaptasi Protokol Kesehatan** untuk Membuka Pariwisata yang Aman
- Pemberian **Insentif** bagi **Ekosistem Pariwisata** (wisatawan & pelaku usaha)
- **Kerjasama Bilateral dan Multilateral** untuk Meningkatkan Pariwisata



Reaktivasi Ekonomi Non-Pariwisata

- **Proyek Infrastruktur** Pendukung Produktivitas Ekonomi
- Meningkatkan Ekonomi **Sektor Pertanian, Perikanan, dan Industri**
- Penyediaan **Tenaga Kerja** yang Berkualitas
- Penguatan **Ekonomi Kreatif**
- **Percepatan** Implementasi **Transformasi Digital**



Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Provinsi Bali



Hibah

- **Hibah MCC** untuk *Eco-Cultural Tourism & Green Transportation*
- **Hibah Singapura** untuk *Green & Circular Economy*

DAK

- **Pembiayaan DAK** untuk Program **TPS3R**



Infrastruktur

- Penyelesaian Pembangunan **Pelabuhan Benoa** (*cruise hub*)
- Pembangunan Fasilitas **Pelabuhan Sanur**
- Pembangunan **Pelabuhan Bias Munjur**
- Pembangunan **Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk-Mengwitani**
- Pembangunan **Jalan Kusamba-Padang Bai**
- Pembangunan Infrastruktur Digital (**Bali 100% Digital Coverage**)
- Pembangunan **Bendungan Sidan dan Tamblang**
- **Penataan Kawasan Kumuh** di Suwung & Kampung Nelayan Kusamba
- Pembangunan **Angkutan Massal** Perkotaan Berbasis Rel/ART dan Jalan (Bus/BRT)
- Pembangunan dan Pengembangan **Sarana/Prasarana Pengolahan Limbah** (SANIMAS Reguler & TPS3R)



Pariwisata

- **Pusat Kebudayaan Bali** di Ulapan & Klungkung
- **Kawasan Khusus Pariwisata** Berbasis **Kesehatan** (Medical Tourism, Healing Tourism, Wellness Tourism)
- **Penguatan Bali** Sebagai Lokasi **Remote Working** Terbaik Indonesia

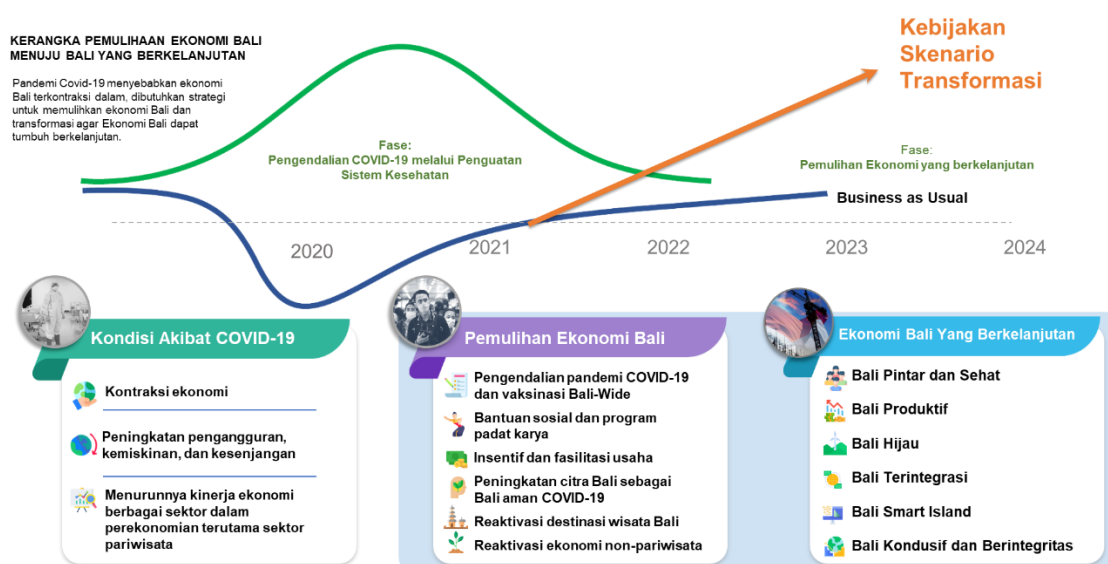
BAB IV. EKONOMI BALI PULIH DENGAN CEPAT DAN SEHAT

"Kita mesti hidup bersama virus atau bakteri ini. Bagaimana caranya, hidup dengan protokol kesehatan, testing tracing yang baik, dan vaksinasi"

(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Kondisi Ekonomi Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19 membutuhkan intervensi kebijakan dan program pemulihan, khususnya terkait dengan pemulihan pariwisata. Seiring dengan pengendalian COVID-19 melalui penguatan sistem kesehatan, pemulihan dan transformasi ekonomi Bali perlu segera dilaksanakan. Melalui intervensi kebijakan pemulihan dan transformasi yang tepat, pemulihan ekonomi diharapkan akan pulih lebih cepat. Selanjutnya, intervensi kebijakan pemulihan dan transformasi diharapkan akan menghasilkan tatanan ekonomi Bali yang berkelanjutan (Gambar 4.1).

Gambar 4. 1. Kerangka Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bali




Sumber: Bappenas (2021)

Program pemulihan Bali diharapkan selesai tahun 2022-2023 seiring dengan keberhasilan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Intervensi dalam bentuk program pemulihan ini ditujukan untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat (*not business-as-usual*). Dengan demikian, perekonomian Bali akan meningkat dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.

Sasaran utama dari program pemulihan ekonomi Bali adalah mempersiapkan perekonomian Bali agar dapat berakselerasi di akhir masa Pandemi COVID-19 dan kembali ke tingkat sebelum pandemi pada tahun 2024. Pemulihan sektor pariwisata juga berarti pemulihan ekonomi Bali. Untuk itu, pariwisata di Bali harus dapat beradaptasi pada masa pandemi dan siap menghadapi perubahan permintaan pasca pandemi (*evolving visitor demand*).²⁴ Saat ini, meskipun belum optimal, pelaku pariwisata harus mempersiapkan diri untuk menangkap momentum pembukaan pariwisata dan tren pariwisata global termasuk kondisi *new normal* sehingga Bali dapat bersaing dengan destinasi pariwisata lainnya di dunia. Oleh karena itu, terkendalinya penyebaran COVID-19 dan pelaksanaan

²⁴ Melalui program *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) dapat meningkatkan tingkat kepercayaan wisatawan dan mengendalikan pandemi



protokol kesehatan selama dan setelah masa pandemi merupakan syarat wajib (*necessary condition*) untuk menggerakkan pariwisata.

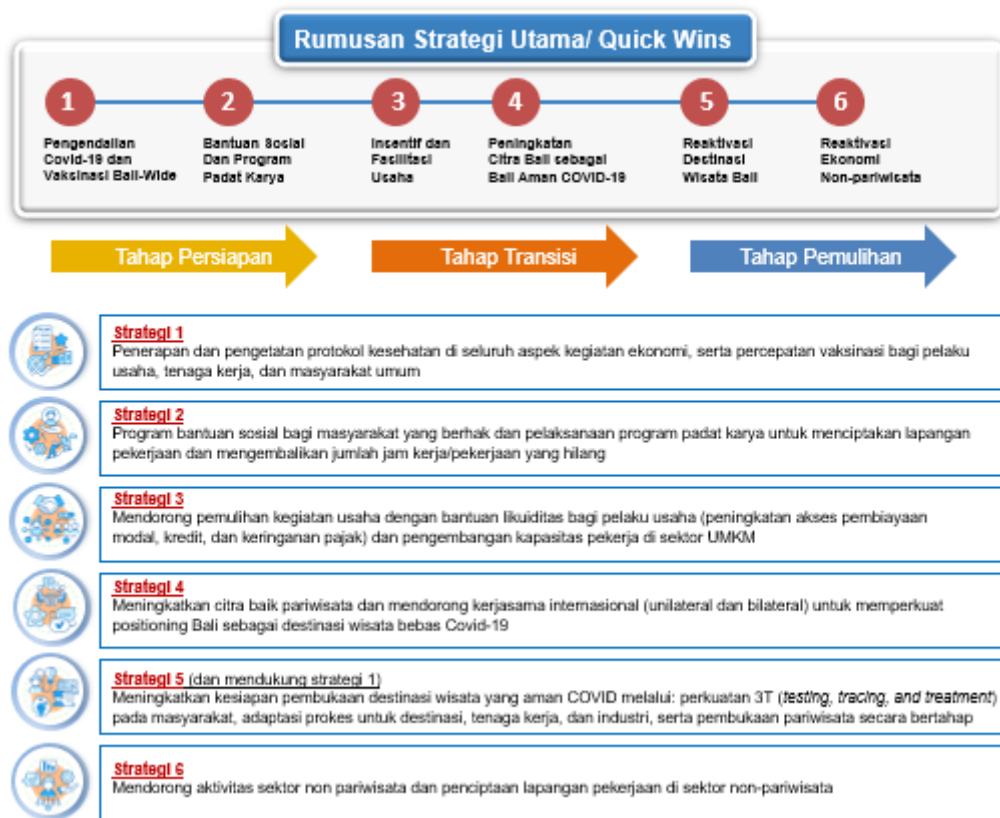
Isu strategis dalam perumusan strategi pemulihan perekonomian Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Belum selesainya pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh masyarakat Bali di mana dosis kedua baru mencapai 79,5% (per 4 Oktober 2021).
- 2) Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan (termasuk oksigen) untuk melakukan penanganan secara cepat pandemi COVID-19 apabila terjadi peningkatan kasus harian yang tinggi.
- 3) Keberlangsungan usaha UMKM Bali terhambat oleh pandemi COVID-19. Jika UMKM Bali berhenti beroperasi, akan sulit bagi Bali untuk bisa mengawali kembali (*re-start*) perekonomian dan kepariwisataan Bali. Dalam hal ini terdapat fenomena pergeseran dari UMKM formal menjadi UMKM informal yang cukup tinggi.
- 4) Perekonomian Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Terpuruknya sektor pariwisata sangat berdampak pada banyak tenaga kerja di sektor ini. Para eks-tenaga kerja di sektor pariwisata membutuhkan alternatif sumber penghasilan.
- 5) Kepercayaan wisatawan untuk kembali berwisata selama masa pandemi relatif rendah. Tidak hanya Bali, namun seluruh destinasi wisata di dunia perlu memiliki citra pariwisata yang sehat dan aman.
- 6) Daya saing pariwisata Bali belum sepenuhnya didukung secara efektif. Potensi Bali sebagai destinasi *remote working* (terutama bagi kaum *digital nomad*) dan destinasi wisata kesehatan belum dikembangkan secara optimal.
- 7) Rendahnya kemampuan penyerapan dan adopsi teknologi informasi dalam desain produk, kemasan dan penampilan, pemasaran, serta penjualan produk ekonomi kreatif dan pariwisata.
- 8) Potensi ekonomi kreatif (ekspor produk ekonomi kreatif) yang besar di Bali belum dikembangkan secara optimal.
- 9) Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin meningkat akibat pandemi COVID-19.
- 10) Daya beli wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mengalami penurunan akibat resesi ekonomi 2020-2021, yang berdampak pada penurunan devisa dan penerimaan pendapatan pariwisata.

Untuk merespon isu-isu strategis perekonomian Bali di atas, dirumuskan sasaran strategis, yaitu: (i) Pengendalian Pandemi; dan (ii) Reaktivasi Ekonomi dan Perlindungan Daya Beli. Dua sasaran strategis ini kemudian dielaborasi menjadi sasaran-sasaran yang lebih rinci dan operasional, sehingga **menghasilkan 5 (lima) sub-sasaran strategis**. Setiap sasaran strategis dielaborasi ke dalam satu atau lebih sasaran strategis (Gambar 4.2). Kelima sub sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan dan memperketat protokol kesehatan di seluruh aspek kegiatan masyarakat, serta mempercepat vaksinasi bagi tenaga kesehatan, tenaga kerja, dan masyarakat umum.
- 2) Mendorong pemulihan kegiatan usaha melalui bantuan likuiditas bagi pelaku usaha (peningkatan akses pembiayaan modal, kredit, dan keringanan pajak), pengembangan kapasitas pekerja di sektor UMKM untuk menjaga lapangan pekerjaan.
- 3) Menciptakan citra baik pariwisata dalam perspektif wisatawan dan mendorong kerja sama internasional (unilateral dan bilateral) untuk memperkuat *image* Bali sebagai destinasi wisata bebas COVID-19.
- 4) Memantapkan reaktivasi destinasi melalui pengetatan protokol kesehatan di seluruh Bali, serta mempersiapkan adaptasi protokol kesehatan untuk destinasi, tenaga kerja, industri dan usaha pendukung.
- 5) Memperkuat pelaksanaan program padat karya sebagai upaya penciptaan lapangan kerja di sektor non-pariwisata bagi masyarakat desa dan para pekerja (termasuk pekerja pariwisata) yang mengalami PHK dan program bantuan sosial bagi masyarakat yang berhak.

Gambar 4. 2. Perumusan Sasaran Strategis, Sub-Sasaran Strategis, dan Strategi Utama/Quick Wins



Sumber: Bappenas (2021)

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Sub-sasaran Strategis, dirumuskan **6 (enam) strategi utama/Quick Wins** sebagai berikut:

- 1) Pengendalian Pandemi COVID-19 dan Vaksinasi *Bali-Wide*
- 2) Bantuan sosial dan Program Padat Karya
- 3) Insentif dan Fasilitas Pelaku Usaha
- 4) Peningkatan Citra Bali Sebagai Bali Aman COVID-19
- 5) Reaktivasi Destinasi Wisata Bali
- 6) Reaktivasi Ekonomi non-pariwisata

Masing-masing strategi utama/Quick Wins dan indikasi program/kegiatan untuk mendukung Quick Wins tersebut dijelaskan secara ringkas di bawah ini. Selanjutnya rincian strategi, sub-strategi, sasaran, program dan kegiatan, kerangka waktu pelaksanaan program, dan penanggung jawab pelaksanaan program diuraikan secara lengkap di lampiran 1.

4.1 Strategi Utama 1: Pengendalian Pandemi COVID-19 dan Vaksinasi *Bali-Wide*

4.1.1 Adaptasi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari

Sasaran: Memperkuat protokol kesehatan di masyarakat secara menyeluruh, sehingga tercipta kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Memperkuat sosialisasi Program 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilitas).
- Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan pedoman kesehatan dan keselamatan terbaru yang mengatur operasi (tata kelola) pelaku usaha dan masyarakat.
- Memperkuat sosialisasi dan pelaksanaan pedoman kesehatan dan keselamatan terbaru kepada pemangku adat dan banjar.
- Memperluas keterlibatan pemangku adat dan banjar dalam tim relawan untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan.
- Meningkatkan edukasi sanitasi yang benar melalui pemasangan iklan layanan masyarakat.

4.1.2 Pelaksanaan Program Vaksinasi *Bali-Wide*

Sasaran: Terciptanya kekebalan kelompok (*herd immunity*) masyarakat di seluruh Bali, yang berarti menciptakan minimal 80% masyarakat Bali sudah memiliki kekebalan terhadap Virus COVID-19 melalui vaksinasi lengkap (*fully vaccinated*). Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Memperkuat sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua hingga mencapai 100% target, termasuk penambahan fasilitas pelayanan kesehatan.
- Mempercepat pemberian vaksinasi dosis ketiga (*booster*) untuk tenaga kesehatan.
- Mengupayakan pemberian vaksinasi dosis ketiga (*booster*) untuk tenaga kerja pariwisata
- Memperkuat vaksinasi sebagai syarat utama mobilitas masyarakat.
- Meningkatkan jumlah tes untuk mempercepat penemuan kasus dan menurunkan *positivity rate*.

Box 4.1 Pelaksanaan Vaksinasi *Bali-Wide*



Provinsi Bali menjadi provinsi terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Menurut data Satgas COVID-19 Bali (per 4 Oktober 2021), Bali telah menyelesaikan 98,3% target vaksinasi pertama (3.341 ribu orang) dan 79,5% target vaksinasi kedua (2.706 ribu orang). Ketersediaan vaksinasi ketiga (*booster*) untuk tenaga kesehatan sudah mencapai 100%, dengan progres penyuntikan telah mencapai 89,35% (32 ribu tenaga kesehatan).

Pelaksanaan vaksinasi perlu diupayakan agar merata di seluruh wilayah Bali. Menurut data Kementerian Kesehatan (per tanggal 5 Oktober 2021), terdapat beberapa Kabupaten yang memiliki tingkat vaksinasi dosis kedua yang belum memenuhi kriteria minimal *herd immunity* yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem.

Sebagai provinsi yang bergantung terhadap sektor pariwisata, pelaksanaan vaksinasi menjadi salah satu prasyarat wajib untuk menciptakan kepercayaan wisatawan datang ke Bali. Dengan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (*herd immunity*), diharapkan pariwisata di Bali dapat dipulihkan sesuai dengan usulan branding *Healthy Bali*, *Feel Safe at Bali*, *Bali COVID-free*, atau *Bali Green Tourism*.

Namun demikian, dalam penyelesaian program vaksinasi masih terdapat beberapa tantangan di lapangan, antara lain: kendala pengiriman dan penyimpanan, jarak waktu antar dosis vaksin, masyarakat dengan komorbid, dan penerimaan vaksin di kalangan masyarakat umum. Komitmen pemerintah pusat dan daerah, dan kesediaan masyarakat untuk divaksin menjadi kunci suksesnya pelaksanaan vaksinasi di Bali.

4.1.3 Koordinasi Peningkatan Keamanan Kesehatan Bali

Sasaran: Terkendalinya pandemi COVID-19 dan terciptanya koordinasi yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Pengendalian penyebaran virus COVID-19 melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan, di mana koordinasi antar pihak yang terlibat memiliki peran penting untuk pencapaian sasaran pengendalian tersebut. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Memperkuat pelaksanaan 3T (*testing, tracing, treatment*) bagi wisatawan dan/atau warga setempat yang terpapar.
- Meningkatkan kapasitas dan tipe Rumah Sakit yang ada saat ini, terutama Rumah Sakit tipe A dan yang menampung pasien khusus COVID-19, yang mencakup: (i) peningkatan jumlah tempat tidur isolasi COVID-19, (ii) penambahan kapasitas ICU, (iii) ketersediaan ruang rawat inap, dan (iv) persediaan oksigen dan obat-obatan.
- Menyediakan rumah karantina/lokasi isolasi terpusat bagi masyarakat Bali (non-wisatawan) dan wisatawan sesuai dengan dokumen protokol penyiapan fasilitas isolasi kolektif yang dikeluarkan Satgas COVID-19 Nasional.
- Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan termasuk tenaga relawan.
- Meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder.
- Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga relawan.
- Meningkatkan kesiapan mendirikan rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan sebagai antisipasi meningkatnya kasus COVID-19 jika diperlukan.
- Meningkatkan ketersediaan oksigen melalui penyediaan isotank dengan kapasitas oksigen yang cukup untuk 15-30 hari ke depan.
- Melakukan *Surveillance Genomic* (penelitian virus mutasi terbaru dari pasien baru yang terpapar) untuk peningkatan pengawasan mutasi virus corona.
- Meningkatkan kapasitas laboratorium PCR dan penambahan shift 24 jam terutama bagi laboratorium rujukan COVID-19.
- Memperluas penggunaan aplikasi terkait *testing-tracing-treatment* yang terintegrasi (Peduli Lindungi).
- Meningkatkan pelacakan kesehatan dan identifikasi lokasi wisatawan di zona hijau (zona aman) dan oranye (zona kurang aman).
- Penapisan berita bohong (*hoax*) atas kasus/informasi COVID-19 dalam kanal berita dan media sosial.
- Mengembangkan database kasus COVID-19 Provinsi Bali yang terkini (*Real Time Monitoring and Regular Cloud Update*).
- Memperluas pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi layanan kesehatan (sistem pendaftaran, layanan *telemedicine*, rekam medis elektronik, sistem pembayaran *online*, e-resep, dan pengiriman obat melalui jasa kurir).

4.2 Strategi Utama 2: Bantuan Sosial dan Program Padat Karya

4.2.1 Bantuan Sosial kepada Masyarakat Bali yang berhak

Sasaran: Mempertahankan daya beli masyarakat. Pandemi menyebabkan dampak yang lebih berat pada masyarakat miskin. Karena itu bantuan sosial kepada masyarakat miskin tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan daya beli mereka. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Mempercepat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penyaluran program-program perlindungan sosial.
- Memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

- Memperkuat program bantuan sosial tunai untuk siswa sekolah swasta tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa dan mahasiswa, serta Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Calon Mahasiswa Tidak Mampu (Bidikmisi).
- Meningkatkan kepesertaan kartu Pra-Kerja.

4.2.2 Mendorong proyek pembangunan padat karya dan rehabilitasi sarana prasarana desa

Sasaran: Meningkatkan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat pedesaan. Strategi yang dijalankan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Percepatan pembangunan proyek infrastruktur seperti: Bendungan Sidan dan Tamblang, pengamanan pantai, konservasi pantai, air baku, irigasi, jalan strategis, serta jalan dan jembatan akses simpul/transportasi.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan padat karya (jalan desa, jembatan, desa wisata), seperti: Peningkatan Jalan Lingkar Nusa Penida (Berlokasi di 5 Desa, yaitu Desa Sakti, Bunga Mekar, Batumadeg, Batukandik, dan Sekartaji) dan pembangunan sarana dan prasarana desa wisata di kab. Jembrana, Tabanan, Klungkung, dan Buleleng.

4.2.3 Meningkatkan Proyek Infrastruktur Pendukung Produktivitas Ekonomi

Sasaran: menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama masyarakat lokal dan para tenaga kerja yang terdampak akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Strategi yang dijalankan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Pembangunan angkutan massal perkotaan berbasis rel/ART dan jalan (bus/BRT).
- Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Benoa (*cruise hub*).
- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sanur.
- Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul.
- Pembangunan jalan bebas hambatan Gilimanuk-Mengwitani.
- Pembangunan Jalan Kusamba – Padang Bai.
- Pengembangan TPS 3R komunal di tingkat kecamatan dan desa.
- Penataan kawasan kumuh di Suwung dan Kampung Nelayan Kusamba.
- Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah seperti program air limbah domestik rumah tangga (SANIMAS Reguler) dan Tempat Pengumpulan Sampah (TPS3R).
- Perkuatan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus untuk sarana prasarana sanitasi.
- Pemberdayaan masyarakat di daerah Sarbagita untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang memiliki nilai tambah dan inklusif.
- Revitalisasi dan optimalisasi TPS 3R untuk mendukung Pergub Bali no. 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber atau program “Desa bersih tanpa mengotori desa lain” .
- Pelatihan pengolahan limbah rumah tangga melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- Fasilitasi usaha industri padat karya dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang berorientasi ekspor.
- Menyusun Masterplan Persampahan yang berkelanjutan untuk provinsi.

4.3 Strategi Utama 3: Insentif dan Fasilitas Pelaku Usaha

4.3.1 Restrukturisasi Kredit dan Fasilitas Pembiayaan

Sasaran: Pelaku Usaha mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sektor keuangan. Melalui bantuan tersebut, diharapkan pelaku UMKM, petani, dan nelayan debitur perbankan mendapatkan keringanan sehingga pelaku usaha yang terdampak tetap dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan dukungan pendanaan dari sektor finansial bagi para pelaku usaha pariwisata
- Melanjutkan penerapan kebijakan POJK 48/2020 sebagai dasar restrukturisasi kredit bagi UMKM, petani, dan nelayan dengan pinjaman dibawah Rp 10 Miliar, melalui perpanjangan

tenor, pengurangan tunggakan pokok dan bunga bank, fasilitasi kredit, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

- Peningkatan penyaluran kredit dengan suku bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak
- Peningkatan penyaluran kredit melalui Program KUR dan UMi Sistem Klaster²⁵ dan UMi bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor produktif (sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan pariwisata).
- Peningkatan fasilitasi dan penyaluran Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi usaha mikro.
- Peningkatan fasilitasi dan pendampingan Transformasi Formal Usaha Mikro melalui relawan pendamping UMKM

4.3.2 Insentif Perpajakan, Bea Masuk, dan Fasilitas Ekspor

Sasaran: Pelaku usaha yang terdampak dapat menjalankan usaha dengan beban biaya yang lebih ringan. Dalam kondisi usaha yang tertekan selama masa pandemi, insentif dan fasilitas yang diberikan dapat menurunkan biaya dan mencegah kebangkrutan dunia usaha. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah mengusulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Perpanjangan pemberian insentif perpajakan dunia usaha yang terukur dan terarah, seperti PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, dan pengurangan Angsuran PPh 25 dengan merujuk pada Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2022 Kementerian Keuangan.
- Kebijakan relaksasi pajak/diskon PBB-P2 terkait lahan/tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi usaha.
- Keringanan/pemutihan denda dan perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan.
- Pemberian insentif bahan baku untuk penanganan pandemi dan sektor terdampak pandemi COVID-19 dalam kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) tahun 2022.²⁶

4.3.3 Kemudahan Memulai Usaha dan Izin Usaha

Sasaran: Meningkatkan jumlah usaha baru, mempermudah izin usaha, dan melindungi operasionalisasi usaha yang telah ada. Adaptasi dan munculnya usaha baru dipengaruhi oleh respon pelaku usaha terhadap krisis akibat COVID-19 maupun iklim usaha yang berkembang, utamanya pelaksanaan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).²⁷ Strategi-strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Percepatan penerapan UUCK yang konsisten dalam penyederhanaan proses administrasi/birokrasi pendaftaran dan pengurusan izin usaha.
- Penguatan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU Cipta Kerja.

4.4 Strategi Utama 4: Peningkatan Citra Bali sebagai Bali Aman COVID-19

4.4.1 Membangkitkan Citra Bali sebagai Destinasi Wisata yang Sehat dan Aman

Sasaran: Meningkatnya kepercayaan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui peningkatan dan pengembangan kesiapan sektor pariwisata. Sasaran ini dapat tercapai dengan strategi sebagai berikut:

²⁵ KUR Sistem Klaster adalah pembiayaan untuk kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, bahan baku lokal, memberdayakan masyarakat lokal, juga menggunakan teknik tradisional dalam kegiatan produksinya.

²⁶ Usulan terhadap Kemenkeu tentang detail jenis barang yang memerlukan diskresi khusus, misalnya untuk industri kreatif atau masukan dari K/L terkait.

²⁷ Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional secara bersyarat, di mana UUCK masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan tersebut. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut.

- Mengampanyekan jargon khusus yang mudah diingat dan mampu menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. (Misal: *Healthy Bali*, *Feel Safe at Bali*, *Bali COVID-Free*, *Bali Green Tourism*, dll.).
- Memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan secara menyeluruh dalam setiap aktivitas ekonomi.
- Memperkuat kerja sama antara sektor pariwisata dan kesehatan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan wisatawan.

Box 4.2 Perbaikan Pengamanan Pintu Masuk Bali



Wisatawan Bali masuk melalui beberapa pintu masuk utama yaitu Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bai, dan Pelabuhan Benoa. Untuk tujuan pengendalian penyebaran virus COVID-19 pengetatan pengamanan di pintu masuk Bali harus dilaksanakan. Seluruh pihak yang berkepentingan harus menjalankan perannya untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, sehingga tercipta pengendalian dan pengamanan dari penyebaran COVID-19 sejak di titik masuk kedatangan wisatawan ke Provinsi Bali. Sebagai

salah satu titik utama masuknya wisatawan, Bandara Ngurah Rai telah melengkapi diri dengan prosedur keamanan dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah baik. Implementasinya didukung oleh tim pengawas bandara, Tim KKP, dan Tim Satgas COVID di sejumlah titik kedatangan maupun keberangkatan penumpang. Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan sejumlah rambu petunjuk (*signage*) yang mempermudah dalam menjelaskan prosedur kedatangan dan keberangkatan bagi penumpang ditambah prosedur tambahan untuk verifikasi dokumen kesehatan. Peralatan pemeriksa kesehatan seperti *termo scanner*, *X-Ray automated tray return system*, *autogate passport* (imigrasi), *boarding pass scanner*, dan penyemprotan disinfektan sudah cukup memadai. Gerbang keberangkatan dan kedatangan operasional serta jumlah gerai penyewa (*tenant*) dilakukan pengurangan. Selain pengamanan penumpang, protokol bagi para pegawai bandara dan *tenant* juga mendapatkan penanganan khusus. Bila terdapat kasus positif COVID-19, tim segera berkoordinasi dengan tim Satgas COVID bandara dan melaporkan kepada tim Satgas COVID Provinsi Bali.

Sementara itu, terkait kedatangan penumpang di Pelabuhan Gilimanuk, belum cukup menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di pelabuhan keberangkatan, dilakukan pengecekan sertifikat vaksin dan *testing* COVID-19 (*Antigen*). Penumpang yang tidak memenuhi persyaratan tidak diperkenankan naik ke atas kapal. Terdapat tim gabungan pengawas pelabuhan, tim KKP, tim BPTD, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta Polda yang melaksanakan *screening* dan *monitoring* penumpang dalam penerapan protokol kesehatan.

Namun, sejak diberlakukannya PPKM darurat, ditemui permasalahan di lapangan. Pada pagi hari pukul 07.00 WITA (pengamatan dilakukan pada 16 Agustus 2021) seringkali terjadi penumpukan kendaraan pribadi dan angkutan umum, sehingga menyulitkan proses pengecekan kesehatan di pintu keberangkatan maupun kedatangan. Selain itu, masih ditemukan penumpang yang diizinkan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk dengan hasil swab antigen positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengetatan di Pelabuhan Ketapang sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19.



Beberapa upaya perbaikan untuk pengetatan protokol kesehatan yang masih harus dilakukan, antara lain: (i) Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk membutuhkan tambahan personel di jam-jam tertentu untuk menghindari pelanggaran protokol kesehatan, (ii) Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk membutuhkan

penambahan peralatan *screening* seperti *thermo gun* dan *thermo scanner*; (iii) Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk membutuhkan perbaikan rambu petunjuk bagi penumpang kendaraan pribadi dan pejalan kaki di pintu kedatangan/keberangkatan.

Sumber: Kunjungan Lapangan Tim Transformasi Ekonomi Bali Kementerian PPN/Bappenas (2021)

- Meningkatkan pemberitaan positif tentang citra serta promosi wisata.
- Meningkatkan kerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kemudahan berwisata (Misal: Implementasi e-visa dan mempermudah proses imigrasi bagi wisatawan khusus (*digital nomad, medical tourism*)).
- Meningkatkan keamanan di sejumlah destinasi wisata populer.
- Berkolaborasi dengan para *influencer* (misal: selebriti dan *content creator*) untuk memasarkan pariwisata Bali secara digital.
- Mengembangkan diversifikasi jenis pariwisata. Misalnya, wisata SAVE (*Scientific, Academic, Voluntarism, dan Educational*), wisata kesehatan (*medical, healing, wellness*), *slow tourism*, dan *virtual tourism* untuk meningkatkan minat pengunjung setelah pandemi.

4.4.2 Menjadikan Bali sebagai Lokasi *Remote Working*²⁸ Berkelas Dunia

Sasaran: Menjadikan Bali sebagai lokasi *remote working* terbaik di Indonesia dan lokasi kerja *digital nomad* terbaik di dunia. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Mempromosikan pelaksanaan *Work from Bali* (WFB) untuk institusi pemerintah/BUMN/perusahaan swasta.
- Memperbanyak pertemuan Kementerian/Lembaga di Bali secara *hybrid*²⁹.
- Meningkatkan kualitas jaringan internet.
- Memberikan kemudahan khusus dalam hal peraturan (visa, IMEI, aturan izin tinggal karantina, dan lain-lain) bagi para *remote worker*.

4.5 Strategi Utama 5: Reaktivasi Destinasi Wisata Bali

4.5.1 Memastikan Kesiapan Destinasi Wisata dan Tuan Rumah KTT G-20 Tahun 2022

Sasaran: Menciptakan destinasi wisata yang memenuhi standar protokol Kesehatan, Mempertahankan status zona hijau Bali, dan Menyukseskan penyelenggaraan KTT G-20 Tahun 2022. Pencapaian sasaran tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan strategi:

- Memperkuat penerapan CHSE secara menyeluruh: Menerbitkan panduan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikasi; Mempersingkat waktu penerbitan dan perpanjangan sertifikat CHSE; Memberikan insentif untuk pelaku usaha pemegang sertifikat CHSE; Menyusun skema akreditasi dan sertifikasi CHSE mandiri (SNI CHSE); Memperkuat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CHSE oleh pemerintah Kabupaten/Kota; Memastikan atraksi dan amenities pariwisata mengikuti standar CHSE; dan Memperluas penerapan CHSE di titik masuk Bali, terutama di pelabuhan dan bandara, terkait kedatangan penumpang mancanegara, domestik, dan pengangkutan barang.
- Memperkuat pemeriksaan kesehatan dan protokol kesehatan di titik masuk jalur darat, laut, dan udara melalui pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Hal tersebut dilakukan dengan menambah alat *thermogun dan thermo scanner*, serta tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk, menambah papan petunjuk navigasi bagi pengguna kendaraan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, dan menyesuaikan protokol penerimaan wisatawan *cruise* dengan standar internasional.
- Mensyaratkan Asuransi COVID-19 bagi wisatawan mancanegara.

²⁸ *Remote Working* merupakan praktik seorang karyawan yang bekerja di luar lingkungan tempat organisasi biasa beroperasi. Hal ini dapat dilakukan di rumah atau di lokasi lain, contohnya Bali.

²⁹ Penyelenggaraan acara yang dilakukan secara *hybrid* menggabungkan pertemuan tatap muka dan pertemuan secara virtual (*on-line*). Pertemuan secara langsung (tatap muka) yang dimaksud akan diselenggarakan di Bali.

- Membuka Bali sebagai pintu masuk internasional untuk *essential business* dan *charter flight* untuk wisatawan mancanegara.
- Memperketat penapisan wisatawan³⁰ yang berasal dari negara yang memenuhi persyaratan.
- Mempersiapkan Bali sebagai tuan rumah KTT G-20 Tahun 2022, antara lain meliputi pembentukan panitia nasional serta pembangunan sarana dan prasarana terkait KTT G-20.

4.5.2 Pembukaan Bali yang Aman untuk Wisatawan

Sasaran: Meningkatkan jumlah wisnus dan wisman yang berkunjung ke Bali secara berkelanjutan serta meningkatkan pariwisata ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.

- Pengadaan tes PCR bagi wisatawan yang berkunjung ke dan dari Bali (berupa penawaran paket *bundling* dengan akomodasi/penurunan harga/subsidi).
- Mendorong kerja sama antara perusahaan penerbangan (*Airline*), agen perjalanan (*travel agent*), pengusaha hotel & restoran untuk memberikan program diskon kunjungan ke Bali di atas 5 (lima) hari atau rentang waktu tertentu yang paling efektif.
- Mengusulkan pemberian insentif bagi pelaku usaha hotel yang mempekerjakan kembali tenaga kerja kontrak (pemberlakuan jam kerja penuh). Misal: pemberian uang makan/transportasi bagi tenaga kerja.
- Mempromosikan pelaku usaha hotel dan akomodasi lain yang mendukung konsep *zero waste* dan *circular economy*.

4.5.3 Kerja sama Bilateral dan Multilateral Melalui Kebijakan dalam Pembukaan Pariwisata

Sasaran: Membuka kembali pariwisata Indonesia dengan sejumlah negara mitra

- Meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait untuk melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dalam upaya percepatan pembukaan pariwisata.
- Melakukan negosiasi dengan negara-negara mitra agar dapat bekerja sama untuk meningkatkan arus wisatawan kedua belah pihak.

Box 4.3 *Sandbox* untuk Reaktivasi Pariwisata



Semenjak diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, terdapat potensi kerugian yang sangat besar yang dialami oleh Bali akibat penurunan aktivitas pariwisata. Kontribusi devisa pariwisata Bali pada tahun 2019 mencapai USD 9,3 miliar yang berkontribusi kepada 28,9% dari total devisa nasional, menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian Bali.

Mulai 14 Oktober 2021, pintu masuk bagi turis asing ke Bali telah dibuka melalui penerbangan internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan kewajiban 5 (lima) hari karantina bagi wisatawan yang masuk dari luar Indonesia. Dengan adanya pembukaan ini diharapkan aktivitas pariwisata di Bali dapat segera pulih dan menggerakkan sektor perekonomian lain di Bali.

Sebagai langkah pendukung pemulihan pariwisata dan mengantisipasi peningkatan kasus positif COVID-19, penerapan *Sandbox* dapat menjadi alternatif kebijakan sebagai *pilot project* yang memungkinkan wisatawan asing untuk dapat mengunjungi Bali tanpa harus karantina. Kebijakan ini **mengusulkan satu kawasan terintegrasi yang dirancang secara khusus bagi wisatawan asing** untuk dapat menikmati liburan di tempat yang telah ditentukan sebagai pengganti karantina. Proyek

³⁰ Menyaring kriteria wisatawan yang diizinkan untuk mengunjungi Indonesia. Larangan masuk bagi wisatawan dari daerah kasus positif COVID-19 yang tinggi.

Sandbox salah satunya telah dilaksanakan di Phuket, Thailand, sejak **1 Juli 2021** dan dianggap berhasil. *Sandbox* diharapkan mampu mendatangkan wisatawan mancanegara yang tidak ingin tersita waktu terlalu lama di karantina dan tidak kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi secara umum.

Implementasi ide Bali *Sandbox* ini memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara, antara lain:

1. Wisatawan tidak perlu melakukan karantina tetapi harus tinggal di sebuah kawasan terpusat Bali setidaknya selama 5 (lima) hari;
2. Wisatawan harus sudah menerima vaksinasi di negara asalnya, setidaknya 14 hari setelah dosis vaksin lengkap (*fully vaccinated*);
3. Dibuka untuk beberapa negara tertentu saja;
4. Mereka harus membawa hasil PCR Negatif yang diambil dalam waktu 72 jam sebelum kedatangan;
5. Mensyaratkan Asuransi COVID-19 bagi wisatawan;
6. Setelah masuk ke Bali *Sandbox*, wisatawan harus mengambil satu tes lagi selama mereka tinggal di wilayah *Sandbox* (hari terakhir);
7. Wisatawan juga harus menginstal aplikasi PeduliLindungi ke ponsel mereka untuk pelacakan kesehatan dan identifikasi lokasi. Pelacakan dilakukan selama wisatawan berada di Bali;
8. Lokasi inap harus di hotel di Zona Oranye *Sandbox*, ditetapkan oleh pemerintah; seluruh staf/naker harus divaksinasi COVID-19 dan tinggal di dalam asrama dan tidak diperkenankan pulang ke rumah keluarga masing-masing, tanpa ada screening COVID ulang.
9. Apabila telah menyelesaikan kewajiban 5 hari, selanjutnya diperbolehkan mengunjungi destinasi lain yang ada di Bali dan Indonesia.

Dengan mekanisme *Sandbox* yang memberikan pilihan bagi wisatawan untuk tinggal selama 5 (lima) hari dalam suatu kawasan dengan "tanpa merasa dikarantina", diharapkan Bali dapat menghadirkan opsi pariwisata baru yang aman di tengah pandemi. Pihak pengelola kawasan *Sandbox* dapat berkolaborasi dengan pelaku usaha maupun pelaku usaha kreatif untuk menghadirkan atraksi dan amenities di kawasan tersebut, sehingga kawasan *Sandbox* ini juga dapat menjadi sumber penghasilan baru. Keterlibatan dan peran aktif antara pemerintah, pihak pengelola kawasan, tenaga kerja parekraf, dan dukungan masyarakat umum menjadi kunci keberhasilan *pilot project Sandbox* Bali.

Lebih lanjut, jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Bali dalam proses pembukaan sektor pariwisata dan berujung pada penutupan pariwisata sementara, program Bali *Sandbox* dapat menjadi alternatif kebijakan untuk meneruskan pembukaan pariwisata di tengah pandemi. Dengan menunjuk wilayah tertentu sebagai destinasi wisata, disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sektor pariwisata Bali diharapkan dapat tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19.

Sumber: Bappenas (2021)

4.6 Strategi Utama 6: Reaktivasi Ekonomi Non-pariwisata

4.6.1 Reaktivasi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Industri Bali

Sasaran: Memberi dukungan dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal dan eks pekerja sektor lainnya yang beralih profesi ke sektor pertanian, perikanan dan industri. Upaya tersebut dilakukan sekaligus dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sasaran tersebut bisa dicapai dengan strategi:

- Pembangunan sarana dan prasarana pertanian: Pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier termasuk optimalisasi Subak, pembangunan embung pertanian, dan pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam).
- Pengembangan usaha desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.
- Pembangunan sarana dan prasarana perikanan: Pembuatan tambak/kolam ikan/keramba, rehabilitasi sarana dan prasarana konservasi Nusa Penida, pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), *Cold Storage*.
- Peningkatan usaha perikanan: Pemberdayaan nelayan tangkap ikan, pemberdayaan budidaya ikan (udang dan nila), dan pengelolaan dan pemeliharaan terumbu karang.
- Pengelolaan dan pemeliharaan budidaya *Mangrove* (Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM)): Pengembangan kompetensi penerima program PKPM dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan budidaya mangrove, pemanfaatan dan pengolahan hasil tanaman budidaya *Mangrove* yang berpotensi menjadi bahan pangan dan menjadi kawasan objek wisata, serta peningkatan produktivitas tambak yang berkelanjutan dalam kawasan *Mangrove*.
- Pengoptimalan keberadaan Persemaian Permanen di Suwung: Pemetaan lokasi penanaman dan kelompok masyarakat penerima; penyediaan dan distribusi bibit sesuai dengan lokasi penanaman, dan pendampingan untuk meningkatkan keberhasilan penanaman dalam peningkatan tutupan hutan dan kesejahteraan masyarakat.
- Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya hutan dan danau bagi masyarakat: Penguatan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penguatan pelaksanaan Perhutanan Sosial, dan penguatan Pengelolaan Danau Prioritas Nasional (Danau Batur).
- Penguatan pelaksanaan reforma agraria: Penataan Penguasaan dan Pemilihan TORA (termasuk pelepasan Kawasan Hutan) dan pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA.
- Pembangunan sarana dan prasarana peternakan: Pembangunan kandang peternakan hewan, pembangunan kandang peternakan unggas, pembangunan Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas, serta sarana bidang kesehatan hewan.
- Peningkatan produksi dan kualitas Sapi Bali melalui inisiasi *triple helix* dan program hijauan pakan ternak.
- Pembangunan dan pemeliharaan tanaman perkebunan dan hortikultura: Pemeliharaan kebun sumber benih/peremajaan/perluasan/intensifikasi, prasarana perbenihan hortikultura, kawasan hortikultura dan florikultura, sarana pascapanen tanaman perkebunan, sarana pengolahan tanaman perkebunan, sarana pengolahan hortikultura, prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, area penanganan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman pada Tanaman Perkebunan, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) hortikultura.
- Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas tanaman perkebunan, serta fasilitasi pembinaan kelembagaan pengawasan benih dan usaha produksi.
- Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM yang mencakup sarana dan prasarana produksi.
- Peningkatan kapasitas UKM melalui: Sertifikasi UKM, pelatihan meningkatkan kapasitas tenaga kerja UKM/*Start-up*, peningkatan kompetensi bidang usaha produktif pada UKM, dan pelatihan pada usaha mikro berbasis kompetensi.
- Pengembangan usaha ekonomi desa terintegrasi dengan BUMDes.
- Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar melalui realisasi Dana Alokasi Khusus Pasar Tematik Pariwisata.

4.6.2 Penyediaan tenaga kerja yang berkualitas

Sasaran: Meningkatkan keahlian tenaga kerja dalam pemenuhan kebutuhan sektor non pariwisata dalam jangka pendek.

- Perluasan kegiatan diklat dan sertifikasi tenaga kerja industri pengolahan.
- Perluasan Pelatihan Kewirausahaan.
- Penguatan Pelatihan-Sertifikasi-Penempatan (Diklat 3-in-1).
- Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan pemagangan di Perusahaan Dalam Negeri.

- Bantuan Pengembangan BLK Komunitas.
- Fasilitasi proses percepatan administrasi visa dan izin tinggal bagi tenaga ahli asing yang terlibat langsung dengan proyek hibah atau kerja sama luar negeri yang sedang berjalan.

4.6.3 Reaktivasi Ekonomi Kreatif

Sasaran: Memperkuat permintaan produk/jasa dan meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif. Strategi yang bisa dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

- Fasilitasi peningkatan kualitas desain dan kemasan produk: Produk kuliner difokuskan agar tahan lama, higienis, dan siap untuk pengiriman jarak jauh dan produk kriya difokuskan agar produk dapat berdimensi kecil dan ringan (*non-bulky*), melalui desain yang berestetika tinggi, mengadopsi tema terkini, dan mengekspos kearifan lokal Bali.
- Meningkatkan ekspor bumbu Bali melalui program "*Indonesia Spice Up the World*".
- Mempermudah proses sertifikasi produk kuliner Bali (utamanya BPOM, Halal MUI, dll).
- Pembinaan dan fasilitasi kepada para pelaku seni untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan secara virtual.
- Mendorong pemberian order/pesanan pentas virtual atau atraksi langsung dari pemerintah pusat/daerah/ BUMN/swasta kepada para pelaku seni pertunjukan dan musik, serta produk ekonomi kreatif lainnya (seperti ayam betutu kaleng, kopi kintamani, sambal bali, kain bali, kerajinan perak & kayu, dan lain-lain).
- Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk bekerja sama dengan pelaku *e-commerce* melalui skema Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mengadakan *special flash sale* produk ekonomi kreatif Bali.
- Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- Penguatan kapasitas dan pameran pelaku ekraf melalui kegiatan Kreasi Indonesia.
- Penguatan kapasitas pelaku ekraf melalui bimbingan teknis, pendampingan dan inkubasi bisnis.

4.6.4 Pembangunan Infrastruktur dan Adopsi Teknologi Digital (*Bali-wide 100% Digital Coverage dan Berkualitas*)

Sasaran: Tercapainya cakupan infrastruktur digital 100% di Bali dan berkualitas. Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan ekonomi digital bagi pelaku kreatif untuk meningkatkan keterjangkauan produk kreatif kepada masyarakat/pasar yang lebih luas. Tercapainya adopsi teknologi untuk pengembangan desain produk, kemasan dan penampilan, pemasaran, dan penjualan produk barang dan jasa UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

- Pembangunan infrastruktur TIK.
- Penyediaan fasilitas dan/atau infrastruktur pasif untuk pembangunan infrastruktur TIK.
- Kemudahan perizinan dan/atau dukungan sarana/prasarana pendukung pembangunan infrastruktur TIK.
- Kebijakan keringanan sewa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) untuk mendukung pembangunan infrastruktur TIK.
- Pemberian hak perlintasan (*Right of Way/RoW*) untuk jaringan internet serta/atau optik.
- Kemudahan akses terhadap gedung dan kawasan untuk pembangunan infrastruktur TIK.
- Pengawasan terhadap biaya retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Pengawasan tarif sewa dan/atau penggunaan asset milik Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku atau harga yang wajar.
- Fasilitasi, pembinaan, dan optimalisasi usaha kecil dalam memasarkan produk usaha melalui pemasaran digital (*digital marketing*) dan *e-marketplace*³¹ (melalui media sosial, *content marketing*, *Google search engine position*, *e-marketing*, dan lain-lain) dan optimalisasi pasar *online* atau *marketplace* (seperti *Made in Bali*) bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk karyanya. Membantu usaha kecil di Bali dalam memasarkan produk usaha melalui digital

³¹ melalui media sosial, *content marketing*, *Google search engine position*, *e-marketing*, dan lain-lain

marketing (melalui media sosial, *content marketing*, *Google search engine position*, *e-marketing*, dan lain-lain).

- Mendorong penguatan *aggregator* atau *online trading house* untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan ekspor.
- Mendorong penguatan pemasaran digital/branding produk Bali melalui program Bangsa Buatan Indonesia di platform *e-commerce*.
- Digitalisasi sektor pertanian untuk peningkatan produktivitas
- Perkuatan data dan Informasi terkait ekspor dalam bentuk penyediaan referensi produk ekspor dan informasi dari *market intelligence*.
- Meningkatkan akses permodalan bagi *start up*.

4.7 Dana Alokasi Khusus Provinsi Bali TA 2022

Arah kebijakan umum DAK Fisik Tahun 2022 difokuskan untuk mempertajam kegiatan sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meringankan dampak pandemi COVID-19; melanjutkan penguatan atas upaya pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah; percepatan pencapaian target prioritas nasional melalui DAK Fisik penugasan berbasis tematik termasuk pada destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah; mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya; dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan.

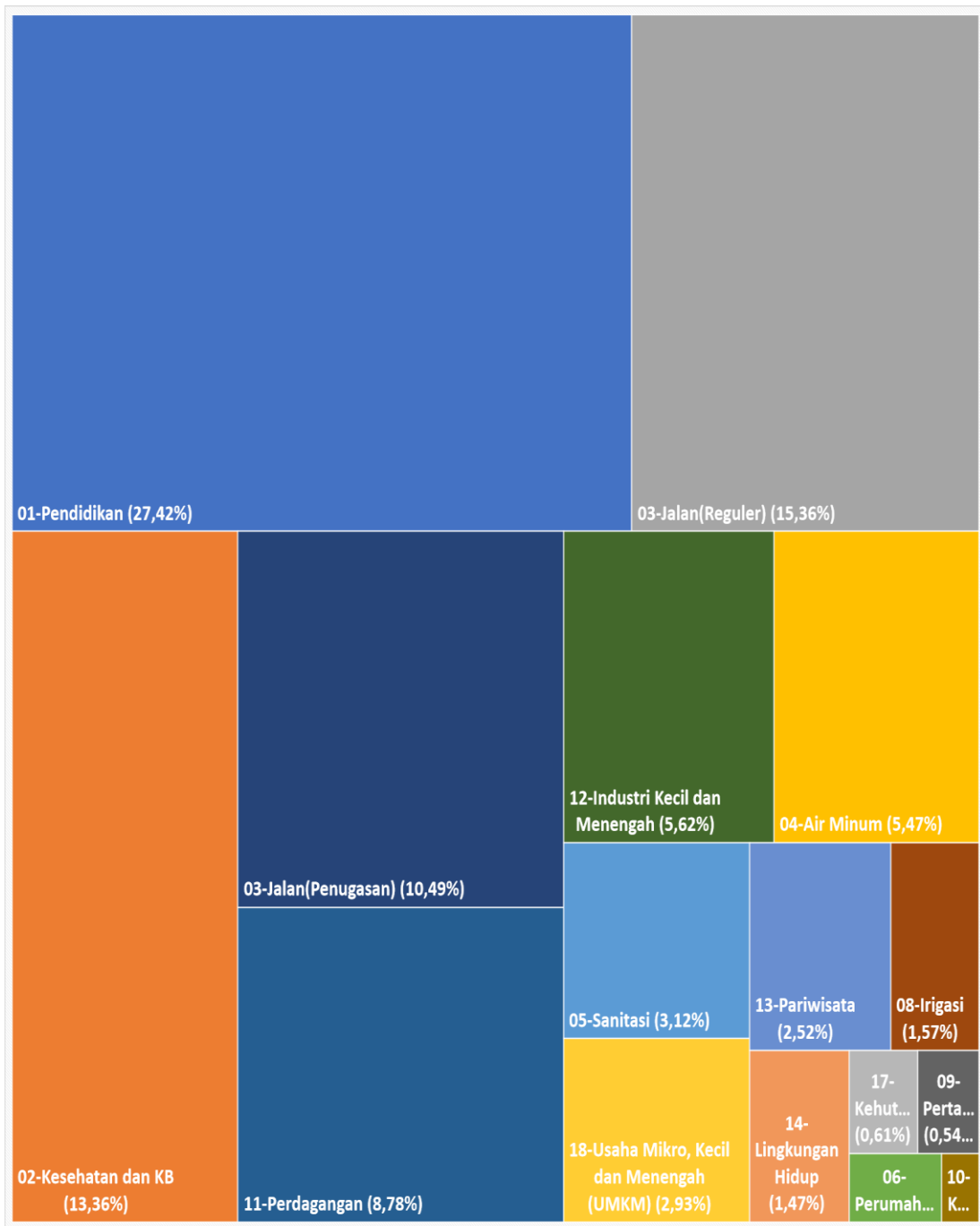
Pada Tahun 2022, Provinsi Bali memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar total Rp 854,5 miliar, baik reguler maupun penugasan, yang tercakup dalam sejumlah bidang, dan tersebar seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Secara umum alokasi DAK kepada Provinsi Bali dan 9 kabupaten/kota ditunjukkan dalam Tabel 4.1. Berdasarkan bidang DAK Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.3. Penjelasan lebih rinci berdasarkan sektoral kepada tiap-tiap kabupaten/kota yang mendapatkan DAK pada tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran III.

Tabel 4. 1. Alokasi DAK Fisik TA 2022 Untuk DAK Reguler dan Penugasan

Provinsi Bali			
Kabupaten/Kota	DAK Reguler	DAK Penugasan	DAK Total
Provinsi Bali	50.304.265.000	32.628.997.000	82.933.262.000
Kab. Badung	19.648.727.000	11.340.973.000	30.989.700.000
Kab. Bangli	111.442.549.000	-	111.442.549.000
Kab. Buleleng	68.380.245.000	27.168.987.000	95.549.232.000
Kab. Gianyar	54.105.637.000	99.920.903.000	154.026.540.000
Kab. Jembrana	68.512.926.000	39.254.610.000	107.767.536.000
Kab. Karangasem	42.662.081.000	20.223.206.000	62.885.287.000
Kab. Klungkung	42.617.427.000	21.658.838.000	64.276.265.000
Kab. Tabanan	59.149.062.000	44.581.850.000	103.730.912.000
Kota Denpasar	40.913.582.000	-	40.913.582.000
Total	557.736.501.000	296.778.364.000	854.514.865.000

Sumber: Bappenas (2021)

Gambar 4. 3. Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi DAK Fisik TA 2022 Provinsi Bali



Sumber: Bappenas (2021)



Halaman ini sengaja dikosongkan.



A woman with long blonde hair, wearing a blue floral dress, is seen from the back, reaching up to touch a woven basket hanging from a rack. The shop is filled with various handicrafts, including woven baskets, hats, and other items. The background is a dark blue overlay with white geometric patterns.

5

Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera

Strategi Transformasi Ekonomi Bali

Bali Pintar dan Sehat



- SDM **Sehat Bergizi**
- SDM **Cerdas Berkarakter Kuat**
- SDM **Inovatif dan Kreatif**

Bali Produktif



- **Produktivitas** Tenaga Kerja Menuju **Pekerja Kelas Menengah**
- **Modernisasi Pertanian** menuju Bali Organik
- **Industri Hijau** Bernilai Tambah **Tinggi** & Berorientasi **Ekspor**
- Pariwisata **Berkualitas** dan **Berkelanjutan**
- **Ekonomi Kreatif Berdaya Saing** dengan Pasar yang Luas
- **Ekosistem UMKM** Tangguh dan Berorientasi Ekspor

Bali Hijau



- Pengembangan **Energi Bersih** (Bauran Energi Terbarukan)
- Transformasi **Pengelolaan Sampah**
- Transportasi **Ramah Lingkungan**
- Penanganan Dampak **Perubahan Iklim**
- Pengembangan **Blue Economy**

Bali Terintegrasi



- Peningkatan **Sarana/Prasarana Konektivitas**
- Pengembangan Bali Sebagai **Logistik Hub Udara**
- Integrasi Ekonomi **Bali-Nusa Tenggara-Jawa Timur**

Bali Smart Island



- Peningkatan **Literasi Digital** dan **Kompetensi SDM**
- Peningkatan Kualitas **Infrastruktur Digital**
- Penguatan Praktik Digital pada **Dunia Usaha & Pelayanan Publik**
- Destinasi **Start-Up Global**

Bali Kondusif



- Penguatan **Keuangan Daerah**
- Penguatan Dukungan **Lembaga Keuangan**
- Perbaikan **Kemudahan Berusaha**
- Reformasi **Birokrasi** dan **Kelembagaan**

Indikator Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera

	Indikator	2020	2028	2045
Bali Hijau	PDRB Hijau (Rp triliun)	149,0	204,12	885,87
	Emisi Karbon (ton CO2)	2.930.755	2.881.888	1.722.490
	Bauran Energi (%)	0,125	22,961	52,678
	Kendaraan Listrik (%)	0% motor & mobil	-	100% motor 40% mobil
Bali Tangguh	Produktivitas (Rp juta/tenaga kerja)	60,9	78,1	239,9
	Pertumbuhan Pertanian (%)	-1,1	4,7	5,4
	Pertumbuhan Industri (%)	-6,8	7,3	8,0
	Pertumbuhan PDRB (%)	-9,3	7,5	7,7
Bali Sejahtera	PDRB per Kapita (USD)	3.747	6.048	26.203
	Pengangguran (%)	5,63	1,7	0,5
	Kemiskinan (%)	4,45	2,10	0,18
	Koefisien Gini	0,369	0,361	0,338

BAB V. BALI ERA BARU: HIJAU, TANGGUH, SEJAHTERA

Tugas besar bangsa kita saat ini adalah bagaimana kita sukses menghadapi atau melakukan containment terhadap COVID-19. Kemudian kita melaksanakan pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi. Yang penting, redesain transformasi ekonomi kita letakkan sebagai sebuah dasar yang kokoh agar kita tidak bermimpi, tapi bisa menjemput kenyataan Menuju Indonesia Emas 2045”

(Menteri PPN/Bappenas, 4 Agustus 2021)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap pembangunan di Provinsi Bali yang rentan terhadap guncangan di sektor pariwisata. Oleh karena itu, selain strategi pemulihan juga diperlukan strategi transformasi ekonomi agar Provinsi Bali mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Strategi transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Bali supaya lebih terdiversifikasi dan tidak tergantung hanya kepada pariwisata serta membangun **EKONOMI KERTHI BALI** menuju **BALI ERA BARU** yang **HIJAU, TANGGUH DAN SEJAHTERA** sekaligus mendukung tercapainya Visi Indonesia 2045.

Strategi transformasi ekonomi menuju Bali era baru yang hijau, tangguh dan sejahtera meliputi beberapa agenda transformasi yaitu:

1) Bali Pintar dan Sehat

Manusia adalah pelaku sekaligus penerima manfaat utama dalam proses pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM adalah tujuan akhir dari pembangunan. Dengan demikian transformasi ekonomi Bali memerlukan SDM yang pintar dan sehat agar pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Bali Produktif


Peningkatan produktivitas berperan penting untuk mencapai perekonomian yang mampu tumbuh tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada seluruh sektor (*within sector*), diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Pada dasarnya Provinsi Bali memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja dan diversifikasi sektor ekonomi. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan dengan melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja, modernisasi pertanian, industrialisasi, penguatan pariwisata, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif.

3) Bali Hijau

Transformasi ekonomi Bali perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya alam Bali dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi mendatang, yang diwujudkan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, pemanfaatan transportasi yang ramah lingkungan, memperbaiki pengelolaan sampah dan limbah berbahaya, melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta menerapkan pembangunan *blue economy*.

4) Bali Terintegrasi

Terciptanya integrasi ekonomi internal Bali dan antara Bali dengan wilayah lain merupakan komponen penting dalam transformasi ekonomi Bali. Integrasi ekonomi dapat membantu upaya diversifikasi ekonomi serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan



internasional. Hal tersebut dicapai dengan memperkuat konektivitas internal Bali dan antara Bali dengan luar negeri dan kawasan lain seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan bagian timur Jawa Timur, serta penguatan Bali sebagai bagian dari rantai pasok domestik dan global.

5) Bali Smart Island

Digitalisasi di berbagai bidang tidak bisa dihindari di masa depan karena sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk akselerasi peningkatan ekonomi, termasuk bagi Bali yang memiliki potensi di pariwisata. Digitalisasi berpotensi mendorong inovasi, menghasilkan efisiensi ekonomi dan lingkungan, serta meningkatkan produktivitas, termasuk di sektor pariwisata (OECD, 2017). Kondisi tersebut sejalan dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) Provinsi Bali di sektor pariwisata. Digitalisasi di Bali menuju *Bali Smart Island* dicapai dengan mempercepat pembangunan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas SDM digital, mempercepat pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekosistem digital termasuk regulasi dan kebijakan yang mendukung.

6) Bali Kondusif

Untuk melaksanakan berbagai agenda transformasi ekonomi Bali dengan baik, diperlukan kondisi Bali yang kondusif. Hal tersebut diupayakan melalui penguatan berbagai faktor pengungkit (*enabler*) di antaranya penguatan keuangan daerah, peningkatan pembiayaan inovatif, perbaikan kemudahan berusaha, serta percepatan reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam bab ini selanjutnya dijelaskan lebih terperinci gambaran umum kondisi Bali termasuk permasalahan, sasaran, dan strategi untuk setiap agenda transformasi.


5.1 Bali Pintar dan Sehat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bali yang selama ini meningkat cukup tinggi, akibat pandemi COVID-19 mengalami perlambatan pada tahun 2020.³² Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2020 adalah sebesar 75,50 atau meningkat 0,12 poin dibanding tahun 2019 sebesar 75,38. Berdasarkan dimensinya, realisasi IPM tersebut terdiri atas umur harapan hidup 72,13, harapan lama sekolah sebesar 13,33, rata-rata lama sekolah 8,95, dan pengeluaran per kapita 13,929 juta. IPM Bali tersebut berstatus tinggi, jauh di atas IPM Indonesia yang mencapai 71,94 pada tahun 2020. Perkembangan IPM Bali menunjukkan tren positif naik walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan. Perlambatan IPM pada 2020 dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat COVID-19, yang digambarkan oleh komponen rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) yang tercatat sebesar Rp13,93 juta rupiah menurun Rp217.000 dari tahun sebelumnya. Sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Kinerja IPM antara kabupaten/kota di Bali, menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi. Berdasarkan kabupaten/kota, IPM tertinggi berada di Denpasar dengan besaran 83,93, kemudian diikuti Badung sebesar 81,6. IPM terendah berada di Karangasem yang sebesar 67,35. Kabupaten lainnya berstatus tinggi (Gianyar, Tabanan, Buleleng, Jembrana dan Klungkung) dan sedang (Bangli). Meskipun demikian disparitas IPM antara Denpasar dan Karangasem saat ini sudah semakin kecil dibanding pada saat tahun 2010.

Kinerja pembangunan kesehatan di Bali pada umumnya sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Umur harapan hidup di Bali sudah di atas rata-rata nasional, yaitu **pada tahun 2020 mencapai 72,13 tahun dibanding nasional 71,47 tahun.** Saat ini akses layanan kesehatan dan ketersediaan

³² Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan kondisi penduduk saat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



infrastruktur layanan kesehatan Provinsi Bali sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Bali telah mencapai 95,6% dan berdasarkan data Potensi Desa (PODES) 2018, hanya 1,4% desa di Provinsi Bali yang memiliki akses sulit ke RS dan mayoritas pelayanan dapat diakses dengan transportasi darat.

Kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan di Bali cukup baik, ditunjukkan oleh: (i) Puskesmas tersebar merata di berbagai kabupaten/kota dan mayoritas terakreditasi, hanya 1 Puskesmas di Provinsi Bali yang belum terakreditasi (Kab. Karangasem); (ii) Mayoritas RS sudah terakreditasi KARS Paripurna (Bintang 5) dan 2 RS di Provinsi Bali sudah terakreditasi internasional standar JCI yaitu RSUP Sanglah (milik Kemkes) dan RS Siloam Bali; (iii) Provinsi Bali memiliki rasio tempat tidur RS sebesar 1.72 TT /1000 penduduk (lebih besar dari rasio nasional 1.33/1000); (iv) Lebih dari 50% RS di Bali dimiliki oleh swasta yang juga menunjukkan ketertarikan investor untuk penyediaan fasilitas layanan kesehatan swasta di Bali.

Selanjutnya dari aspek ketenagaan, tingkat ketersediaan dokter spesialis terutama di Kota Denpasar tergolong tinggi namun masih ada kesenjangan terutama di wilayah Kab. Karangasem. Hanya 2 RS (16,7%) di Bali belum memenuhi standar 7 dokter spesialis.

Meskipun secara umum hasil pembangunan kesehatan di Bali sudah baik, namun beberapa hal masih membutuhkan perbaikan. Beban penyakit sebagian besar di Bali adalah penyakit tidak menular dengan persentase tertinggi disebabkan oleh stroke dan *ischemic heart diseases* (IHD). Beban penyakit menular terbesar masih disebabkan oleh TBC walaupun tingkat kecepatan peningkatan beban penyakit tertinggi adalah HIV. Selanjutnya, Angka Kematian Bayi (AKB) Bali masih tinggi dan di atas rata-rata nasional serta stagnan selama 2012-2017. Demikian pula, persentase bayi usia kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif masih jauh di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Bali berada di peringkat pertama tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dan Bali memiliki cakupan kunjungan K4 tertinggi ke-4 dari seluruh provinsi di Indonesia.

Selain faktor kesehatan, kualitas SDM juga ditentukan oleh tingkat pendidikan, di mana kualitas SDM di Bali masih perlu terus ditingkatkan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Bali menandakan adanya rendahnya kualitas tenaga kerja di Bali. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Bali masih jauh di bawah rata-rata produktivitas nasional. Hal ini tergambar dari mayoritas tenaga kerja di Bali berpendidikan SMP ke bawah yaitu sebesar 57,2%. Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2020 untuk tingkat SMA/SMK yang mencapai 82,96% dan perguruan tinggi yang mencapai 28,67% masih relatif rendah. APS di tingkat kabupaten/kota tingkat pendidikan tinggi di Bali masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2020, 39,06% untuk Kota Denpasar dan 8,99% untuk Kabupaten Karangasem.

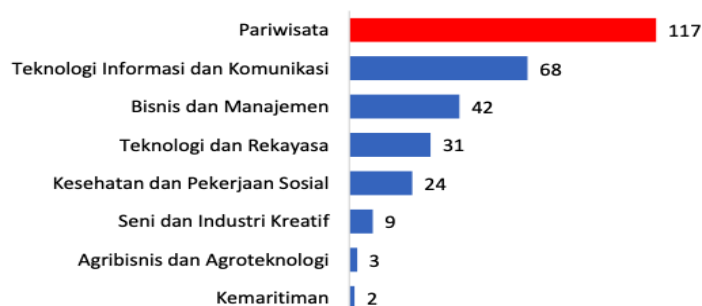
Selanjutnya, partisipasi pendidikan PAUD di Bali, yang sangat penting untuk mewujudkan fondasi kecerdasan anak untuk masa depan Bali, pada tahun 2020 hanya mencapai 31,81% di bawah rata-rata nasional 37,52%. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini, terbatasnya jumlah lembaga layanan PAUD yang umumnya terdapat di daerah perkotaan dan kurang menjangkau masyarakat pedesaan, serta terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata berdampak pada tingginya fokus pendidikan pada pariwisata, dan rendahnya kesiapan pendidikan untuk melakukan diversifikasi keterampilan. Gambar 5.1 menunjukkan SMK di Bali didominasi oleh SMK jurusan pariwisata, yaitu sebanyak 117 SMK, dengan rincian 80 SMK berstatus swasta dan 37 SMK berstatus negeri. Jumlah siswa SMK paling banyak juga berada di bidang pariwisata dengan total 57,946 siswa. Pendidikan tinggi vokasi juga masih didominasi oleh pariwisata dan perhotelan sehingga terdapat celah (*gap*) antara bidang ilmu pendidikan tinggi dengan bidang pekerjaan lulusan pendidikan tinggi. Di Bali, hanya 6,6% (550 dari 8.363) lulusan Ilmu Pertanian yang bekerja di sektor pertanian, >70% bekerja pada kelompok semi dan tidak terampil. Hampir 40% lulusan Ilmu Teknik/Rekayasa tersebar di sektor perdagangan, reparasi dan perawatan mobil/sepeda motor, industri pengolahan, dan konstruksi. Hampir separuh lulusan bekerja



pada kelompok pekerjaan terampil. Jumlah lulusan Ilmu Pertanian mulai meningkat, tapi kemudian turun di 2020.

Gambar 5. 1. Jumlah SMK Menurut Jenis Keahlian Provinsi Bali



Sumber: Dapodik, 2021

Kualitas perguruan tinggi di Bali masih perlu ditingkatkan lagi. Universitas Udayana adalah perguruan tinggi negeri terbaik di Bali, namun peringkatnya di dunia berdasarkan *Webometrics* adalah 4136 pada tahun 2021 atau ranking 45 dari 100 universitas Indonesia yang masuk peringkat dunia. Perguruan tinggi lain yang masuk peringkat *Webometrics* adalah Institut Seni Indonesia Denpasar, pada peringkat 5465. Di sisi kebutuhan tenaga kerja, hasil pendidikan perguruan tinggi di Bali, belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi Bali ke depan, yang dikembangkan tidak hanya untuk pariwisata. Selanjutnya, Bali sesungguhnya mempunyai potensi untuk mengembangkan wisata pendidikan, karena kondisi lingkungan yang mendukung, kesiapan infrastruktur digital dan akses penerbangan internasional yang mudah. Sehingga Bali bisa mengundang universitas terkemuka di dunia untuk membuka universitas di Bali.

Riset dan inovasi menjadi faktor penting dalam upaya pengembangan ekonomi Bali ke depan, namun seperti halnya tingkat nasional, jumlah dan kualitas SDM yang melakukan riset dan inovasi di Bali masih terbatas. Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya dukungan pendidikan dan latihan, serta minimnya sarana prasarana penting seperti laboratorium dan peralatannya. Pembiayaan dan insentif untuk riset juga perlu ditingkatkan. Kerja sama antara perguruan tinggi di Bali dengan perguruan tinggi lain di Indonesia dan luar negeri, dalam rangka riset juga masih terbatas, meskipun banyak hal yang berpotensi untuk dikerjakan samakan.

Salah satu kendala lain dalam pengembangan riset dan inovasi di Bali dan umumnya di Indonesia adalah terlindunginya hasil riset dan inovasi serta kemudahan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³³ Dengan pengembangan sistem HKI diharapkan akan berkembang pula SDM, terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif. Dengan melihat potensi ekonomi kreatif yang tinggi di Bali, seperti hasil kriya (patung, ukiran kayu, barang suvenir), seni lukis, dan seni tari maka Kekayaan Intelektual (KI) Komunal ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan lain-lain) dan KI Personal (paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman) mempunyai potensi yang tinggi di Bali. Hilangnya perlindungan ataupun sulitnya untuk memperoleh HKI, akan memberikan disinsentif SDM Bali untuk berkreasi atau melakukan kegiatan riset dan inovasi. HKI juga turut mendukung perekonomian terutama untuk sektor ekraf dan UMKM.

Berdasarkan kondisi SDM Bali saat ini terkait dengan kesehatan, pendidikan serta kapasitas riset dan inovasi dalam pengembangan SDM, maka diperlukan strategi transformasi agar SDM Bali yang lebih unggul dan berdaya saing dapat segera tercapai. Berikut strategi-strategi transformasi yang diperlukan:

³³ HKI merupakan hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. SDM Sehat Bergizi

Tujuan pembangunan kesehatan Bali dalam jangka panjang adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk Bali agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yaitu SDM Sehat dan Bergizi sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduk Bali hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang modern, kuat dan tangguh.

Sementara itu, sasaran pembangunan kesehatan Bali yang akan dicapai pada jangka menengah adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi *under-nutrisi* pada balita. Hal tersebut dicapai melalui: (i) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*); dan (ii) mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.


Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Bali adalah sebagai berikut.

Menurunkan AKI dan AKB yang masih tinggi dan stagnan di Bali serta menurunkan *stunting* adalah prioritas dalam pembangunan kesehatan di Bali. Untuk mengatasi hal tersebut diperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat melalui peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta termasuk persalinan, pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir (antara lain imunisasi bayi baru lahir), peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian; pemerataan penyediaan ambulans desa untuk mencegah tiga terlambat; dan perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (*Universal Child Immunization*) sampai level desa; penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan *wasting*; penguatan sistem *surveilans* gizi; serta pendampingan balita untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan stimulasi perkembangan yang adekuat;

Secara umum ketersediaan fasyankes dasar di Bali sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Namun masih ada daerah yang masih tertinggal karena itu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemerataan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan. Hal tersebut dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKRTL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik masih terkendala (DTPK), dan penyempurnaan standar pelayanan kesehatan di berbagai fasyankes.

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pelayanan kesehatan di Bali ke depan harus diperkuat menuju digitalisasi pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan, perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, penerapan sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan); digitalisasi pelayanan kesehatan dengan perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online serta perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying health care*) dan gugus pulau. Demikian pula untuk penyediaan obat dan alkes dapat diterapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi kejadian penyakit menular (PM) yang masih tinggi (TBC dan HIV) serta penyakit tidak menular (PTM) yang meningkat (Jantung, stroke, dll) di Bali, harus diperkuat upaya



pengecahan dan pengendalian penyakit baik PM maupun PTM serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat misalnya ketika menghadapi Pandemi seperti COVID-19. Hal tersebut dilaksanakan melalui perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPM bidang kesehatan; penguatan sanitasi total berbasis masyarakat; peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis; Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat; peningkatan kemampuan daerah termasuk SDM.

Kualitas tenaga kesehatan di Bali masih perlu ditingkatkan, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan nasional juga untuk memenuhi standar wisatawan mancanegara. Untuk meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar dilakukan pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar; peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional khususnya di Bali untuk penurunan kematian maternal, kematian bayi, *stunting*, dan pengendalian penyakit; pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi; peningkatan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan *reward* yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan dan pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar, dan memberikan kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kesehatan yang ingin bekerja di Bali melalui lulusan dalam negeri maupun WNI dan WNA lulusan luar negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan wisman.

Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat Bali. Melalui pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal 10% dari APBD; mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta.


Manajemen pembangunan kesehatan di Bali masih harus terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; melakukan pendampingan perbaikan tata kelola untuk pencapaian target nasional dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan; integrasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; serta penguatan manajemen kesehatan di kabupaten/kota dalam kerangka otonomi pembangunan kesehatan.

Bali mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pusat layanan Kesehatan unggulan Nasional maupun Internasional serta destinasi wisata berbasis kesehatan, seperti *medical tourism*, *healing tourism* dan *wellness tourism*. Terkait hal ini langkah awal adalah memetakan lokasi pengembangan wisata medis di Bali dan mengembangkan alternatif wisata *healing* dan *wellness*/kebugaran di wilayah berpotensi di Bali seperti Canggu dan Ubud, selaras dengan pusat perhotelan dan digital nomad. Terkait *medical tourism*, maka jumlah RS yang telah berstandar internasional (saat ini ada 2) harus segera ditambah. Karena itu, perlu ditingkatkan upaya mengundang dan memfasilitasi kehadiran pendidikan tinggi di bidang kesehatan dan RS berstandar internasional untuk melakukan investasi atau bekerja sama dengan pihak di dalam negeri.

b. SDM Cerdas Berkarakter Kuat

Tujuan pembangunan pendidikan di Bali adalah mewujudkan SDM yang unggul yang cerdas berkarakter kuat, yang memiliki kompetensi global, bernalar kritis dan kreatif serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan falsafah Tri Hita Karana.

Sedangkan sasaran pembangunan pendidikan di Bali dalam jangka menengah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang pendidikan, meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, menguatnya karakter peserta didik, meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan serta meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Mempercepat peningkatan angka partisipasi PAUD sangat penting dalam membangun fondasi untuk menciptakan kecerdasan anak di Bali, di mana kecerdasan anak 50% terbentuk pada usia dini atau 0-6 tahun. Hal tersebut dilakukan dengan: memperkuat sosialisasi kepada masyarakat pentingnya PAUD; meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik; membangun komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD; menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD, termasuk mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD; menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (*crowdfunding*).


Mempercepat penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Bali. Hal tersebut dilakukan dengan memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, khususnya untuk tingkat SMA/SMK; mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas sekolah yang rusak; membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri; mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) di Bali dan pelaksanaan program *retrieval* untuk anak putus sekolah.

Partisipasi pendidikan tinggi di Bali yang masih rendah (khususnya Kabupaten Karangasem, Bangli, Tabanan, Klungkung dan Jembarana) dan tidak merata perlu diatasi segera dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi Bali masa depan. Hal tersebut dicapai dengan mengupayakan peningkatan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi; meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, antara lain dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai *platform* pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh; meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi terutama di Kabupaten Karangasem; serta menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah.

Untuk meningkatkan ketersediaan SDM yang lebih produktif dan memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi Bali di masa mendatang perlu dipercepat peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan. Hal tersebut dilakukan dengan mempercepat pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak serta mengembangkan Balai Guru Penggerak (*Center of Excellence*) dan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG); melaksanakan redistribusi guru secara lebih merata sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan; mengutamakan pemanfaatan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas. Sementara itu untuk penguatan proses pembelajaran dilakukan upaya mendorong guru untuk mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (*teaching*) menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (*learning*).

Mempercepat digitalisasi pendidikan di Bali untuk meningkatkan dan pemeratakan akses dan mutu pendidikan di Bali. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran; memberikan dukungan ke Bali untuk mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dan menyediakan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar, menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (*preloaded*) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet; menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong *peer-review* praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; serta menyediakan platform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah,





Sebagai daerah yang banyak dikunjungi masyarakat internasional baik sebagai wisman maupun sebagai peserta konferensi/eksibisi/seminar/pelatihan, Bali harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan menambah jumlah perguruan tinggi di Bali yang mencapai tingkat dunia. Hal tersebut diwujudkan dengan mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi agar fokus sebagai universitas berbasis riset (*research university*), universitas berbasis pembelajaran (*teaching university*), atau universitas berbasis kejuruan (*vocational university*); meningkatkan kualitas dosen dengan meningkatkan pendidikan/pelatihan di dalam dan luar negeri; meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah; mendukung perguruan tinggi di Bali sebagai *Centers of Excellence* misalnya untuk pariwisata, kesehatan atau seni; meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan; meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (*Top 100 QS/THES*) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian; mengundang masuknya universitas kelas dunia memiliki cabang di Bali, seperti yang saat ini sudah terjadi di kawasan Kura-kura Island (*Tsing Hua University*); dan mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;

Percepatan perbaikan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi vokasi di Bali berdasarkan kebutuhan lapangan kerja dan meningkatkan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. Hal tersebut dilaksanakan dengan memastikan keterlibatan DU/DI dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI dan memenuhi kebutuhan industri 4.0; memfasilitasi *exchange of information* dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui *platform* yang dapat digunakan seluruh peserta didik; meningkatkan jumlah SMK/perguruan tinggi vokasi non pariwisata, sesuai dengan kebutuhan diversifikasi ekonomi Bali; melaksanakan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (i) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (ii) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (iii) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja; menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI; serta mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi.

Sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia yang menghadapi serbuan berbagai budaya asing, Bali harus mampu mempertahankan budaya dan nilai-nilai tradisi Bali termasuk *Tri Hita Karana* sebagai modal dasar pembangunan Bali di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang serta membangun SDM Bali yang berkarakter. Untuk itu pendidikan di Bali harus disertai dengan pembelajaran nilai-nilai tradisi serta penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal; pengelolaan cagar budaya yang lebih baik; penguatan inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya; melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern; dan mendukung pembangunan pusat-pusat seni dan budaya Bali, termasuk Pusat Kebudayaan Bali yang akan dibangun di Klungkung.

c. SDM Inovatif Dan Kreatif

Kemampuan riset dan inovasi di berbagai bidang perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi di Bali dalam rangka mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Bali. Hal tersebut dicapai dengan meningkatkan kapasitas SDM peneliti melalui penyediaan beasiswa pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan; meningkatkan ketersediaan anggaran termasuk untuk sarana prasarana penelitian terutama di perguruan tinggi dan lembaga

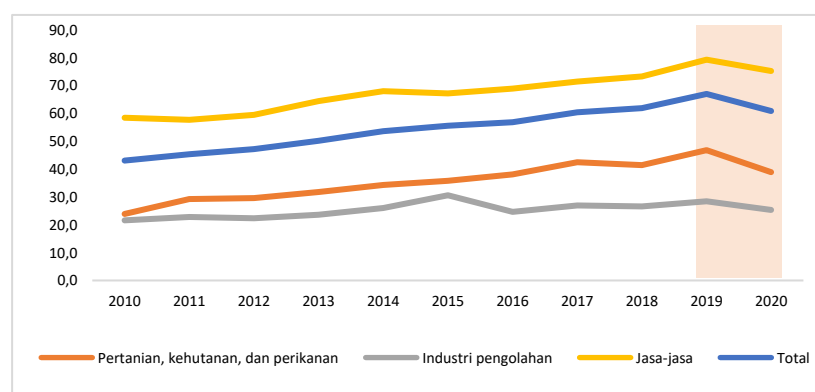
penelitian baik dari dana pemerintah atau kerja sama dengan DU/DI; menciptakan iklim riset dan inovasi yang kondusif; memberikan insentif kepada dosen dan peneliti Bali untuk menghasilkan penelitian (produk dan jasa) yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI (riset terapan dan inovasi); memfasilitasi kemudahan perolehan paten dan HKI lainnya; mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang; mendorong aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat; dan mengundang lembaga-lembaga riset internasional atau universitas riset terkemuka di dunia membuka cabangnya di Bali.

Penguatan HKI untuk mendukung peningkatan riset dan inovasi terutama sektor ekraf dan UMKM dan pada akhirnya mendukung perekonomian Bali. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan sosialisasi pentingnya HKI kepada pelaku ekraf dan UMKM; fasilitasi skema pembiayaan dan pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual; fasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran dan pemanfaatan HKI, dan perlindungan hasil kreativitas pelaku ekraf yang berupa KI. Untuk UMKM diberikan dukungan berupa pendaftaran KI secara online, insentif tarif pendaftaran dan pemeliharaan untuk UMKM, penyelesaian dokumen pendaftaran tepat waktu, layanan pasca registrasi, dan penyederhanaan syarat pendaftaran.


5.2 Bali Produktif

Peningkatan produktivitas merupakan salah satu kunci dalam transformasi ekonomi karena dapat menggeser struktur perekonomian Bali ke arah ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Namun, tantangan yang dihadapi Provinsi Bali saat ini adalah masih rendahnya tingkat produktivitas dibandingkan provinsi lainnya dengan tingkat pendapatan per kapita yang sebanding, seperti Jambi, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Dilihat per sektor ekonomi, produktivitas di sektor industri pengolahan yang merupakan sektor penyumbang nilai tambah tinggi memiliki produktivitas yang paling rendah di antara sektor lainnya. Lebih lanjut, dampak COVID-19 menyebabkan tren peningkatan produktivitas di semua sektor menurun (Gambar 5.2).

Gambar 5. 2. Perkembangan Produktivitas Bali 2010-2020 (PDRB per pekerja)




Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak tenaga kerja beralih ke sektor dengan produktivitas yang lebih rendah. Berdasarkan data Sakernas BPS Agustus 2020, tenaga kerja di Provinsi Bali yang sebelumnya terkonsentrasi pada sektor-sektor jasa pendukung pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan-minum, transportasi dan pergudangan) beralih ke sektor pertanian seiring dengan pembatasan mobilitas di dalam negeri dan ditutupnya aktivitas pariwisata dari luar negeri. Sebanyak 91 ribu tenaga kerja meninggalkan sektor akomodasi makan-minum dan 83 ribu tenaga kerja masuk ke sektor pertanian.



Dengan melihat pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Bali, meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, serta adanya potensi pertanian yang besar, sektor ini perlu dioptimalkan dalam rangka mendukung upaya diversifikasi dan transformasi ekonomi.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3, sektor pertanian merupakan sektor kedua dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Provinsi Bali (15% pada tahun 2020), serta memiliki keterkaitan kuat dengan sektor industri. Keterkaitan yang erat dengan sektor lain dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi membuat sektor ini krusial untuk dikembangkan demi peningkatan taraf hidup masyarakat Bali. Namun, masih terdapat kendala-kendala mendasar yang perlu diatasi agar terjadi transformasi ke arah sektor pertanian yang modern dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Minimnya tenaga kerja usia produktif dan berpendidikan tinggi yang bekerja di sektor pertanian.** Berdasarkan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Bali, 68,5% petani berusia lebih dari 45 tahun. Selain itu, data Sakernas mencatatkan bahwa pada tahun 2020, hanya 1,8% tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Hanya 6,6% lulusan pendidikan tinggi bidang Ilmu Pertanian yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lebih dari 70% lulusan Ilmu Pertanian bekerja pada kelompok semi dan tidak terampil.
- b. **Investasi di sektor pertanian masih rendah.** Investasi di sektor pertanian cenderung kurang menarik bagi investor dibandingkan dengan sektor jasa (hotel dan restoran), yang tercermin dari rendahnya realisasi PMA dan PMDN untuk sektor pertanian. Pada tahun 2019, *share* PMDN sektor pertanian di Provinsi Bali tercatat sebesar 3,6%, sementara PMA tercatat sebesar 1,6%. Lebih lanjut, kredit sektor pertanian di Provinsi Bali tercatat hanya sebesar 2,5% PDRB, jauh lebih rendah dibandingkan kredit sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar 18% PDRB.
- c. **Minimnya penggunaan teknologi, mekanisasi, serta infrastruktur sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya.** Berdasarkan data SUTAS tahun 2018, sebanyak 90,5% rumah tangga perkebunan dan 81,4% rumah tangga peternakan tidak menggunakan teknologi pertanian, yang tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hanya rumah tangga perkebunan di Kabupaten Buleleng yang sudah menggunakan mekanisasi (traktor, alat panen, mesin pengangkut buah dalam kebun, mesin pemindah buah hasil panen ke truk) yaitu sebanyak 9,4% rumah tangga. Daerah perkotaan seperti Denpasar sudah memanfaatkan teknologi selain mekanisasi saja (benih bersertifikat, pengemasan dan penyimpanan entres tanaman perkebunan, teknik perbanyakan vegetatif), sebanyak 11,9% rumah tangga. 81,3% rumah tangga usaha budidaya hortikultura tidak menggunakan teknologi pertanian, hanya Kabupaten Bangli yang memiliki tingkat mekanisasi yang tinggi (penggunaan traktor/*cultivator*, *transplanter*, *weeder*, pompa air, dan *reaper*), yaitu sebanyak 41,4% rumah tangga. Kabupaten Badung memiliki teknologi selain mekanisasi saja (benih bersertifikat, hidroponik, kultur jaringan) yang paling tinggi yaitu sebanyak 5,5% rumah tangga. Subsektor tanaman pangan memiliki tingkat mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi saja paling tinggi di antara subsektor lainnya, terutama di Kabupaten Badung dan Jembrana.
- d. **Rendahnya keahlian (*skill*) kewirausahaan petani, peternak, dan nelayan.** Kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan di Bali pada umumnya dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, dan terdapat beberapa komoditas yang dikaitkan dengan budaya seperti kelapa dalam, sapi, dan babi. Sehingga, kegiatan tersebut, termasuk kepemilikan hewan ternak dipandang hanya sebagai aset pribadi/keluarga, bukan sebagai komoditas potensial untuk dikembangkan sebagai bisnis. Sementara itu, para petani, peternak, dan nelayan di Bali sebagian besar berusia di atas 50 tahun, hanya sedikit yang masih berusia muda, akibatnya motivasi untuk meningkatkan keahlian kewirausahaan menjadi rendah.
- e. **Belum terkaitnya rantai pasok komoditas dari hulu hingga hilir yang berdampak pada nilai tambah rendah dan tidak kompetitifnya produk pertanian.** Komposisi ekspor Provinsi Bali sangat bergantung pada ekspor jasa terutama pariwisata (84,3%) dibandingkan ekspor



barang (15,7%). Komposisi ekspor barang sendiri hanya 11,8% berasal dari produk pertanian dan 17,6% dari industri makanan yang terkait erat dengan sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebesar 98,2, termasuk kedalam kelompok 10 terendah dari 34 provinsi. Sementara, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Bali juga tercatat cukup rendah di bawah 100, yaitu sebesar 98,8 pada tahun 2019. Rata-rata upah sebulan pekerja formal di sektor pertanian rendah, yaitu sebesar 1,4 juta rupiah, di bawah sektor industri (2,1 juta rupiah) dan jasa (3,1 juta rupiah).

- f. **Luas lahan pertanian yang semakin menurun.** Pada tahun 2010, luas lahan sawah Provinsi Bali mencapai 81.425 Ha, kemudian menurun hingga 70.996 Ha pada tahun 2019. Kabupaten Tabanan sebagai produsen padi terbanyak di Provinsi Bali merupakan salah satu kabupaten yang mengalami penyusutan lahan sawah terbesar. Sementara itu, tekanan terhadap konversi lahan pertanian di Bali terus meningkat akibat meningkatnya kebutuhan untuk perumahan dan kegiatan pariwisata.

Sektor pertanian memiliki peranan penting bukan saja sebagai sektor primer, melainkan juga sebagai *input* bagi sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan struktur penyediaan dan penggunaannya, sektor industri makanan dan minuman memiliki keterkaitan ke belakang (memerlukan *input*) terbesar dengan berbagai subsektor pertanian. Secara berurutan, subsektor pertanian dengan keterkaitan terbesar terhadap sektor industri pengolahan yaitu pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan semusim dan tahunan, serta perikanan.

Tidak hanya berpotensi memberikan nilai tambah tinggi melalui hilirisasi sektor primer, sektor industri pengolahan juga memiliki peran dalam mendukung sektor pariwisata. Berdasarkan penjabaran pada Bab 3, pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Bali dapat diarahkan pada industri agro dan industri kreatif. Namun, pengembangan sektor industri masih mengalami tantangan utama yang mencakup ekosistem industri yang kurang mendukung, keterbatasan keragaman subsektor industri yang berkembang, keterbatasan sumber daya manusia di bidang industri, dan keterbatasan keterlibatan dalam pasar ekspor.

Ekosistem industri pengolahan di Provinsi Bali saat ini belum dapat mendukung berkembangnya usaha. Dari sisi perizinan, pelaku usaha mengalami kesulitan akses informasi dalam proses pendaftaran izin usaha sehingga hanya sedikit usaha yang terdaftar secara formal. Industri berskala kecil dan menengah mendominasi sektor industri. Sementara itu, hanya sedikit industri besar dan sedang yang berkembang, namun lokasi industri terkonsentrasi di Kota Denpasar (IBS, 2018). Permasalahan lain yang dihadapi pelaku usaha industri adalah beban biaya sewa tanah dan gedung yang cukup tinggi akibat tingginya harga tanah serta terbatasnya lahan bagi industri. Sementara itu, terbatasnya akses terhadap fasilitas pembiayaan bagi industri kecil berdampak pada rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sehingga industri sulit berkembang.

Keragaman subsektor industri yang berkembang terbatas pada industri makanan dan minuman, terutama olahan sederhana. Mempertimbangkan ketersediaan bahan baku pangan di Bali, industri makanan dan minuman berkembang dengan beragam produk seperti kopi, kacang mente, kakao, *wine*, dan buah-buahan. Kemudahan perolehan bahan baku pangan membantu dalam menekan biaya input sehingga industri makanan dan minuman dapat berkembang dan memberikan nilai tambah yang cukup tinggi. Namun, biaya untuk belanja teknologi terbilang rendah. Hal ini mengindikasikan penggunaan teknologi yang rendah terutama untuk melakukan inovasi. Sementara itu, akses pada bahan baku yang terbatas bagi industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi seperti perhiasan dan tekstil menyebabkan nilai tambah yang diberikan relatif rendah.

Ketersediaan sumber daya manusia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri. Hal ini disebabkan upah sektor industri pengolahan tergolong lebih rendah dibandingkan sektor lainnya, sehingga sumber daya manusia yang unggul lebih memilih untuk bekerja di sektor pemerintahan,



pengadaan air, perdagangan, dan konstruksi. Selain itu, ketersediaan program studi sekolah vokasi dan lembaga pelatihan terkait industri pengolahan masih sangat terbatas.

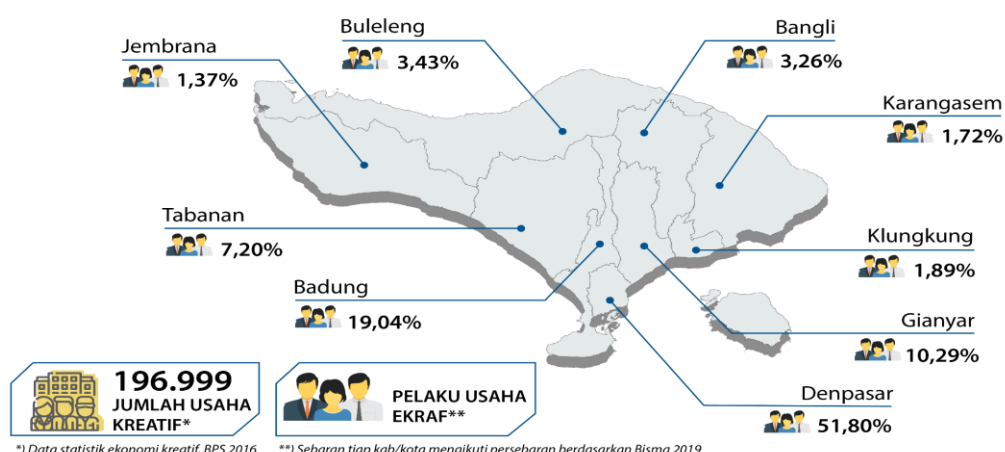
Kontribusi industri pengolahan dalam pasar ekspor masih terbatas. Potensi pasar ekspor bagi produk industri pengolahan cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pelaku industri Bali. Hal ini ditunjukkan dengan terbatasnya produk yang diekspor langsung dari Bali, antara lain ikan tuna segar, perhiasan, dan tekstil. Pemanfaatan pelabuhan laut yang relatif rendah dan ketidakpastian waktu pengiriman menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi. Berdasarkan temuan lapangan, pelaku industri mengirimkan produk yang akan diekspor melalui pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur.

Pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian Provinsi Bali, masih memiliki permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi. Perkembangan wisatawan di Bali selama 20 tahun terakhir masih mengandalkan *mass tourism* dan tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik. Hal ini menyebabkan perluasan kawasan perkotaan yang tidak terkontrol (*urban sprawl*), permasalahan sampah, air bersih, dan kemacetan. Perencanaan yang kurang baik ini menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Bali, khususnya antara Bali Utara dan Bali Selatan. Beberapa destinasi pariwisata dibangun tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah. Perkembangan pariwisata selama ini didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang kualitasnya masih terbatas.

Ekonomi kreatif mempunyai potensi besar ditinjau dari jumlah pelaku usaha yang mencapai 196.999 pelaku dan tersebar di 9 kabupaten/kota (Gambar 5.3). Namun demikian ekonomi kreatif masih menghadapi beberapa kendala utamanya perluasan pasar dan kompetensi SDM. Subsektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah: (i) fesyen; (ii) kuliner; (iii) kriya; (iv) seni pertunjukan; (v) fotografi; (vi) film, animasi, video; (vii) pengembangan aplikasi; dan (viii) pengembangan gim. Kendala yang dimiliki oleh setiap subsektor tersebut bervariasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.4.

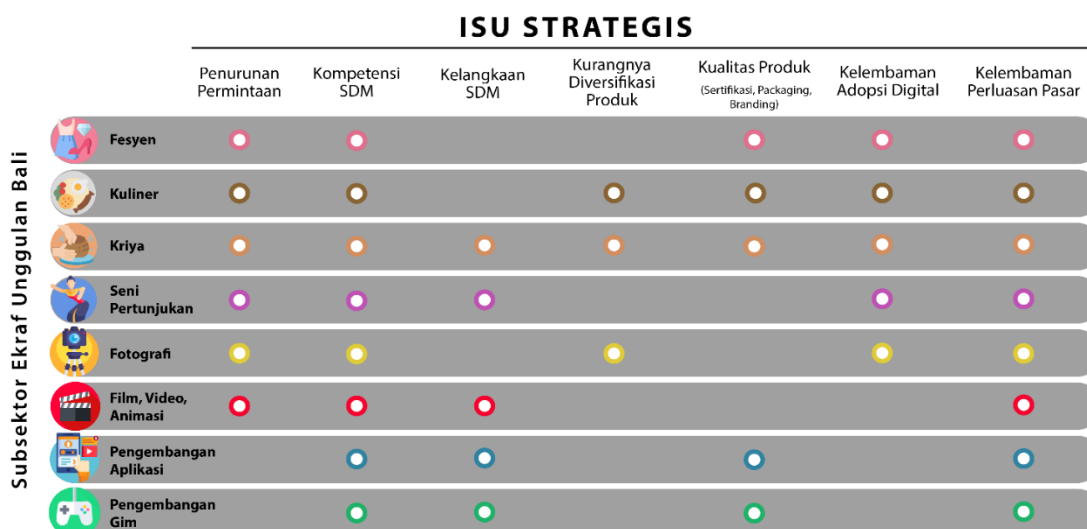
Kompetensi SDM dan kelambanan perluasan pasar menjadi isu umum yang dialami oleh semua subsektor unggulan ekonomi kreatif. Transformasi digital yang saat ini sedang berlangsung tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM. Akibatnya, pelaku ekonomi kreatif banyak kehilangan peluang peningkatan transaksi melalui *platform* digital. Selama ini akses pasar yang mudah pada saat kondisi normal telah mengurangi motivasi pelaku usaha untuk memperluas pasar di luar Bali. Namun demikian, pandemi menyebabkan terhentinya kedatangan wisatawan yang berdampak pada penurunan penjualan produk ekonomi kreatif secara signifikan. Untuk itu, perluasan pasar melalui *platform* digital menjadi sebuah alternatif solusi bagi pelaku ekraf dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan tingkat penjualan.

Gambar 5. 3. Jumlah Usaha dan Sebaran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Bali



Sumber: Sebaran Ekonomi Kreatif, BPS (2016)

Gambar 5. 4. Isu Strategis Subsektor Unggulan Ekonomi Kreatif Bali




Sumber: Bappenas (2021)

Sebagaimana provinsi lain di Indonesia, permasalahan utama pengembangan UMKM di Bali adalah mayoritas UMKM tidak memiliki legalitas usaha. Lebih dari 90% usaha mikro kecil (UMK) non-pertanian Provinsi Bali termasuk usaha ekraf belum berbadan usaha. Hal tersebut menyulitkan para pelaku usaha termasuk usaha menengah untuk mengurus perizinan, mengakses fasilitas pembiayaan formal, dan mendapatkan program bantuan pemerintah. Berdasarkan survei dari *World Bank Enterprises Survei* (WBES), beberapa faktor penyebab rata-rata UMKM di dunia belum berbadan hukum adalah: (i) Tidak memiliki informasi tata cara pengurusan perizinan usaha; (ii) Kompleksitas proses dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran usaha; (iii) Biaya pendaftaran yang tinggi; (iv) Kekhawatiran terhadap beban pajak; (v) Kekhawatiran terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang ketat; dan (vi) Persepsi bahwa manfaat yang diperoleh lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan.

Di Indonesia jumlah UMKM informal yang tinggi utamanya disebabkan karena adanya persepsi kekhawatiran biaya tambahan yang muncul akibat berbadan usaha dan bukan disebabkan oleh kendala biaya pendaftaran yang tinggi. Meskipun begitu, kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan untuk mengurangi biaya pendaftaran usaha di berbagai wilayah daerah masih belum optimal untuk meningkatkan pertumbuhan formalitas usaha secara signifikan. Bukti empiris menunjukkan bahwa teori *rational exit* dan *dual economy* dapat menjelaskan tingginya jumlah UMKM yang belum memiliki legalitas usaha (informal). Teori yang pertama menyatakan bahwa perusahaan keluar dari sektor formal jika biaya dari berbadan usaha lebih tinggi dari manfaatnya dan teori yang kedua menjelaskan bahwa usaha informal merupakan dampak dari kemiskinan dan terdapat perbedaan konsumen yang dilayani antara usaha formal dan informal mengingat rendahnya produktivitas usaha informal untuk dapat bersaing di sektor formal.

Informasi terkait kepastian manfaat berbadan usaha, regulasi yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi UMKM untuk berbadan usaha lebih besar dan kentara dibandingkan tidak berbadan usaha menjadi prioritas utama dengan mempertahankan strategi untuk mengurangi biaya pendaftaran usaha untuk memastikan rendahnya biaya yang dikeluarkan selama proses pendaftaran usaha.



Dengan masih banyaknya badan usaha yang berstatus informal³⁴ termasuk UMK non-pertanian, sebagian besar UMKM belum pernah menerima kredit dari lembaga keuangan formal.

Strategi peningkatan produktivitas sektor ekonomi Bali untuk menghasilkan produk yang berdaya saing adalah:

a. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah

Tujuan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Bali adalah meningkatkan kapasitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah. Dalam jangka panjang, tenaga kerja Bali di sektor pertanian, jasa, dan industri diharapkan dapat memiliki produktivitas tinggi dan keahlian yang dibutuhkan di masa depan.

Dalam jangka menengah, dibutuhkan dukungan terhadap SDM Bali untuk calon tenaga kerja yang sedang menempuh pendidikan dan yang sudah ada dalam pasar kerja. Tenaga kerja di sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang perlu mendapatkan peningkatan keahlian (*upskilling*) dan *reskilling*. Pendidikan vokasi harus dikembangkan dalam rangka melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan berproduktivitas tinggi. Selain itu, Bali perlu mewujudkan sistem informasi tenaga kerja yang modern sehingga mekanisme penyerapan tenaga kerja menjadi efektif dan efisien.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran peningkatan produktivitas tenaga kerja di Bali adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pengajaran, ketersediaan anggaran, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, dan kapasitas peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan BLK Komunitas perlu dijadikan pusat pelatihan tenaga kerja yang andal, berkualitas, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Pemerintah perlu memperbarui kurikulum pelatihan BLK UPTD yang sesuai dengan tuntutan masa depan yang serba digital dan gaya hidup ramah lingkungan, antara lain pelatihan kemampuan digital serta instalasi dan perbaikan panel solar. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi BLK Komunitas di Bali serta mengevaluasi kendala dari 7 (tujuh) BLK Komunitas yang sudah ada di Bali.


Pembangunan sistem informasi tenaga kerja Bali yang modern dan terintegrasi penting untuk segera diwujudkan. Perlu ada data dan informasi mutakhir tenaga kerja di Bali, termasuk informasi mengenai lowongan untuk pencari kerja. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan analisis *skill-gap* mengenai kondisi tenaga kerja di Bali, seperti jumlah tenaga kerja yang *under-* atau *over-qualified*. Harapannya, ke depan dapat terbentuk sistem informasi dan analisis pasar kerja yang handal yang mampu menjalankan 4 fungsi utama: (i) bimbingan karir, (ii) pencarian dan pencocokan kerja, (iii) analisis dinamika pasar kerja, dan (iv) penyedia data program pasar kerja aktif pemerintah seperti pelatihan dan JKP.

b. Modernisasi Pertanian Menuju Bali Organik

Modernisasi pertanian diperlukan agar terjadi peningkatan nilai tambah ekonomi Bali yang lebih produktif. Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab III, produktivitas rendah adalah salah satu faktor penghambat pertumbuhan Provinsi Bali.³⁵ Peningkatan nilai tambah di sektor primer bertujuan untuk menghasilkan produk berkualitas dan bernilai tambah tinggi sebagai input untuk sektor sekunder. Peningkatan produktivitas sektor primer dan sekunder akan bermuara pada peningkatan kualitas dan

³⁴ Kelayakan kredit, pengelolaan dan pencatatan keuangan, agunan, serta pemanfaatan teknologi yang masih rendah merupakan hambatan terbesar dari sisi permintaan pembiayaan UKM.

³⁵ Produktivitas diukur sebagai besaran nilai tambah per tenaga kerja, sehingga peningkatan produktivitas terkait langsung dengan peningkatan nilai tambah.



produktivitas di sektor tersier. Melalui strategi modernisasi pertanian, diharapkan pertumbuhan sektor pertanian akan selalu meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 5,8% pada tahun 2036-2040.

Modernisasi pertanian juga menjadi penting dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi terhadap guncangan dan mampu beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan modernisasi pertanian, pendekatan holistik perlu diutamakan untuk menciptakan keberlanjutan. Kebijakan yang diterapkan perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya (modal sosial, ekonomi, teknologi, dan material), memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal yang ramah lingkungan, mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal yang mampu membuka ruang kolaborasi antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, serta didasari oleh informasi terkait potensi, peluang, dan profil risiko dalam seluruh rantai produksi. Kearifan lokal perlu menjadi dasar dalam mengembangkan sistem dan teknologi yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan modernisasi pertanian adalah sebagai berikut:


Meningkatkan SDM pertanian yang cerdas dan unggul sehingga dapat berdampak pada peningkatan keahlian serta pemanfaatan IPTEK dari SDM di sektor primer. Peningkatan kualitas SDM pertanian dapat dilakukan melalui (i) fasilitasi dukungan riset dan inovasi; (ii) peningkatan jumlah SMK dan pendidikan tinggi vokasi di bidang pertanian modern; (iii) pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi pertanian berbasis *experience-based learning* yang mendukung modernisasi pertanian dan pertanian organik; serta (iv) perluasan pusat pelatihan pertanian swadaya (P4S) yang dilakukan oleh masyarakat melalui kolaborasi dengan asosiasi pertanian yang telah berkembang yang terintegrasi dengan BLK (BLK UPTD dan BLK Komunitas).

Penguatan aspek pembiayaan di sektor pertanian baik melalui pembiayaan konvensional maupun non-konvensional (*fintech*). Rendahnya kredit di sektor pertanian menandakan bahwa aspek pembiayaan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sektor pertanian yang berdaya saing. Pengembangan usaha pertanian memerlukan dukungan aspek pembiayaan seperti biaya memulai usaha, biaya untuk memperoleh benih dan mesin produksi, biaya pengolahan, serta biaya mendapatkan sertifikasi produk pertanian yang cukup tinggi. Untuk itu, dilakukan langkah-langkah (i) optimalisasi KUR untuk sektor pertanian, antara lain dengan meningkatkan alokasi dan penyederhanaan proses pemberian KUR; (ii) peningkatan pembiayaan pertanian dari lembaga keuangan digital; (iii) pendampingan untuk memfasilitasi akses ke lembaga keuangan formal; dan (iv) mendorong pengembangan asuransi pertanian.

Penguatan petani dan institusi pertanian. Untuk dapat bertransformasi ke arah pertanian modern, dibutuhkan pelaku tani (petani, peternak, nelayan) yang memiliki kemampuan wirausaha dan bisnis yang mumpuni, serta diperkuat oleh institusi-institusi pertanian yang mendukung. Dibutuhkan upaya-upaya strategis yang meliputi (i) mendorong pembentukan lembaga korporasi petani, peternak, dan nelayan dengan menganut sistem pertanian terintegrasi (simatri); (ii) pendampingan pelaku usaha tani untuk meningkatkan keahlian (*skill*) kewirausahaan, utamanya terkait manajemen perusahaan dan pemasaran hasil pertanian; (iii) pendampingan untuk memperoleh sertifikasi mutu termasuk *fair trade*; (iv) penyusunan mekanisme insentif untuk transisi ke pertanian organik dan pertanian modern; (v) digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi; (vi) penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor; (vii) memperkuat *market intelligence* untuk percepatan penetrasi pasar produk pertanian ke luar negeri; serta (viii) penguatan kelembagaan Subak untuk peningkatan produksi pertanian.

Peningkatan daya saing melalui pengembangan teknologi dan inovasi pertanian. Peningkatan mekanisasi dan teknologi pertanian yang modern akan turut meningkatkan kapasitas serta kualitas produk pertanian sehingga daya saing akan meningkat. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah





strategis berupa (i) Pendampingan dan kolaborasi dengan institusi riset atau lembaga pendidikan tinggi terhadap pelaku usaha tani dalam pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan digitalisasi pertanian; (ii) Diseminasi teknologi pertanian yang langsung mengarah ke petani melalui sekolah lapang, penyuluhan dan pendampingan; (iii) Percepatan program peta komoditas ekspor pertanian guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan potensi ekspor; serta (iv) Penerapan ICT dalam sistem ketelusuran pangan dan pertanian (*traceability*), proses produksi, hingga monitoring dalam memantau risiko proses tanam dan proyeksi pendapatan.

Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Pembangunan infrastruktur sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menghasilkan *multiplier effect* yang lebih besar dalam perekonomian. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain berupa (i) optimalisasi penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang berkualitas; (ii) meningkatkan penyediaan input pertanian organik (termasuk benih, pupuk, pakan mandiri, zat pengatur tumbuh, bio-pestisida, inokulan); (iii) pengembangan kawasan sentra produksi pertanian berbasis digital; (iv) penyediaan kawasan sentra pertanian terpadu; serta (v) pembangunan dan optimalisasi embung, jaringan irigasi, jalan-jalan pertanian serta pergudangan.

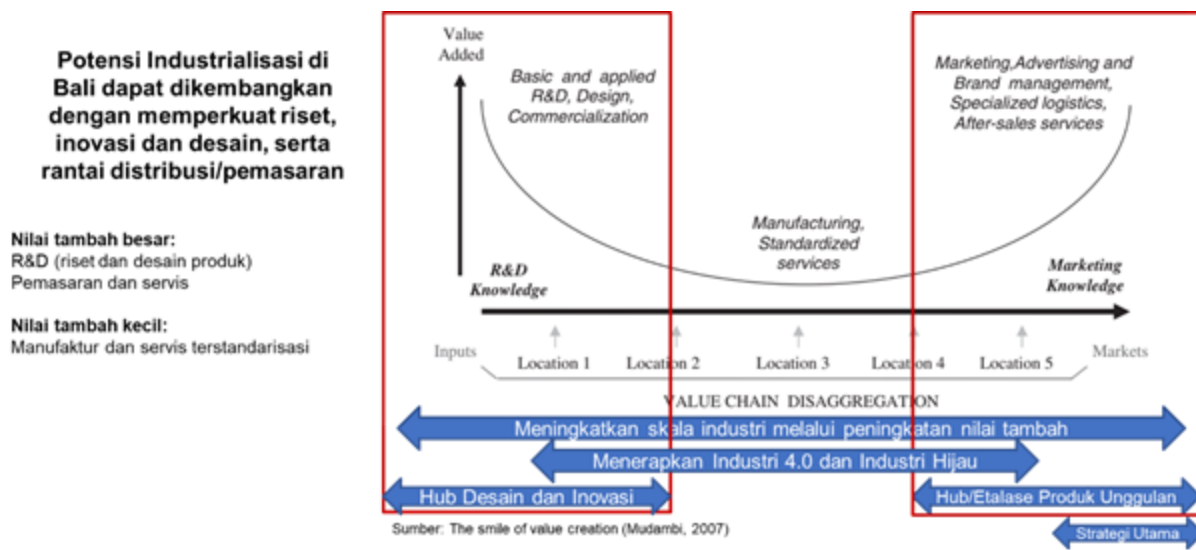
Meningkatkan efisiensi dan nilai tambah komoditas pertanian unggulan melalui sistem yang terintegrasi di sepanjang rantai pasok. Nilai tambah komoditas pertanian unggulan perlu ditingkatkan agar mampu memiliki kualitas tinggi dan berpotensi ekspor, sehingga dibutuhkan pengembangan komoditas primer unggulan dengan pendekatan agribisnis. Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi (i) penyusunan Perda tentang pengembangan komoditas unggulan berbasis pertanian organik di tingkat kabupaten/kota; (ii) pendampingan dan pengawasan (*monitoring*) secara berkala terhadap implementasi Perda tentang pengembangan komoditas unggulan kepada usaha tani; (iii) penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen di tingkat petani/kelompok tani dan pembentukan lembaga pemasaran untuk komoditas primer unggulan; serta (iv) peningkatan kualitas komoditas unggulan sebagai bahan baku produk olahan pangan melalui pembudidayaan benih dan bibit dengan varietas unggul.

Pengelolaan sumber daya pertanian dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian subur kurang diimbangi dengan upaya untuk mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Untuk menjaga daya dukung lahan pertanian di Bali, diperlukan (i) penegakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (ii) Percepatan penyusunan Perda pelaksanaan PP 01/2011; dan (iii) penyusunan mekanisme insentif terkait lahan pertanian berkelanjutan.

c. **Industri Hijau Berdaya Saing dan Berorientasi Ekspor**

Industrialisasi di Bali bertujuan untuk industri hijau dan penguatan rantai nilai sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi dan meningkatkan skala industri. Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab 3, Bali memiliki potensi pada empat aspek, yaitu alam/pertanian, budaya, kreativitas, dan pariwisata. Berdasarkan aspek-aspek tersebut dan mengacu pada konsep *The Smile of Value Creation*, industrialisasi Bali ke depannya akan diarahkan pada penguatan riset, inovasi, dan desain (hub desain dan inovasi), serta rantai distribusi/pemasaran (hub/etalase produk unggulan) terutama bagi pasar ekspor. Penguatan di sisi manufaktur dan servis terstandarisasi akan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dari industri eksisting, serta penerapan industri 4.0 dan industri hijau. Diharapkan arah kebijakan ini dapat mengatasi tantangan yang dihadapi sektor industri di Provinsi Bali saat ini, serta meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Bali dari 6,0% pada tahun 2019 menjadi 7,1% di tahun 2045.

Gambar 5. 5. Arah Industrialisasi Provinsi Bali yang Bernilai Tambah Tinggi



Sumber: *The Smile of Value Creation* (Mudambi, 2007), Bappenas (2021)

Penguatan industrialisasi dilakukan untuk mencapai peningkatan skala industri, nilai tambah, dan ekspor melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan. Pemenuhan tenaga kerja industri dapat dilaksanakan melalui fasilitasi pelatihan, skema magang, pelaksanaan Diklat-Sertifikasi-Penempatan (Diklat 3-in-1) dan penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dengan DU/DI (*link and match program*). Selain itu, menciptakan lulusan vokasi yang terampil di bidang industri dilaksanakan dengan meningkatkan akreditasi serta membuka program studi terkait teknik dan rekayasa, agribisnis dan agroteknologi, serta industri kreatif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi.

Aspek perizinan, pembiayaan, insentif fiskal, dan kolaborasi dalam inovasi menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem industri yang kondusif serta mendorong keragaman subsektor industri pengolahan yang berkembang. Hal tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Mendorong formalisasi usaha industri dengan mempercepat proses perizinan usaha melalui pelayanan terintegrasi OSS Daerah, serta melakukan sosialisasi, pendataan dan bimbingan teknis dalam pendaftaran usaha.
- Memberikan kemudahan akses pembiayaan perbankan maupun alternatif pembiayaan lainnya (*platform fintech*, investasi swasta, afiliasi dengan *offtake*) bagi pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah.
- Mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi, balai penelitian, dan balai industri untuk meningkatkan inovasi dalam rangka diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah produksi.
- Memperkuat rantai pasok industri yang terintegrasi dengan membentuk *aggregator* sebagai penghubung pelaku industri hulu ke hilir dan sebaliknya.

Perluasan pasar ekspor bagi sektor industri pengolahan harus diupayakan mengingat keterbatasan pangsa pasar di dalam negeri. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:

- Pelatihan ekspor seperti penggunaan *marketplace online* bagi pelaku industri.
- meningkatkan kerja sama dengan KBRI dan perwakilan negara lain yang potensial.

- Mendorong pembentukan instansi/unit layanan/BUMD/ Perusda untuk menjalankan peran sebagai *aggregator/trading house* sebagai penggerak ekspor produk industri Provinsi Bali.

Ke depannya, cakupan pengembangan wilayah industri perlu diperluas untuk memanfaatkan potensi di masing-masing wilayah sehingga berdampak pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:

- Pemetaan potensi industri agro dan industri kreatif di setiap kabupaten/kota (Gambar 3.12) agar menjadi fokus dalam pengembangan industri.
- Pengembangan Sentra IKM bagi sektor industri agro dan industri kreatif/kerajinan di setiap kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas industri yang berskala kecil.
- Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng serta pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Jembrana bagi industri unggulan Bali berdasarkan Perda RPIP 08/2020 untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang saat ini terkonsentrasi di wilayah Sarbagita.

d. Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Perkembangan pariwisata mengalami pertumbuhan yang sangat cepat selama empat dekade terakhir di wilayah Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita). Pada tahun 2019, wilayah Sarbagita menyumbang 77,9% dari total nilai tambah pariwisata Bali. Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata yang terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan menyebabkan stagnasi pertumbuhan pariwisata di wilayah Bali lainnya. Di samping itu, pembangunan pariwisata telah menimbulkan permasalahan yang harus dibenahi yaitu:

- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pariwisata.
- Munculnya fenomena perkembangan atau perluasan suatu kawasan perkotaan yang tidak terkontrol dan tanpa perencanaan yang baik (*urban sprawl*).
- Pembangunan hotel, restoran, kafe, dan perumahan secara komersial, pembangunan jalan-jalan akses, yang belum disertai dengan sistem perencanaan kota yang baik telah menimbulkan berbagai permasalahan sampah, air bersih, dan kemacetan.
- Pengembangan destinasi wisata tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung destinasi wisata, sehingga pada musim ramai (*high season*), beberapa destinasi pariwisata di Bali mengalami penumpukan wisatawan (*over tourism*).

Selama pandemi, pemulihan sektor pariwisata penting untuk segera dilakukan. Momentum pandemi COVID-19 ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk *rethinking, redesign, dan restart* pariwisata Bali.

- Rethinking.** Selaras dengan tujuan RPJMN 2020-2024 target utama pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah. Hal ini diwujudkan melalui transisi pariwisata yang berfokus pada kuantitas (*mass tourism*) menuju ke pariwisata berkualitas (*quality tourism*).
- Redesign.** Dalam proses pengembangan pariwisata Bali, terutama selama dan paska pandemi COVID-19, tren berwisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara berubah yaitu: (i) permintaan untuk mengedepankan protokol kesehatan, kebersihan dan keselamatan yang tinggi (*evolving visitor demand*); (ii) pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan (ekonomi, lingkungan, dan budaya) di destinasi pariwisata (*sustainable tourism*); (iii) peningkatan adaptasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman berwisata; (iv) permintaan akan sarana transportasi yang aman antara lain penggunaan kendaraan pribadi atau kebutuhan akan penerbangan langsung; (v) arah pengembangan pariwisata diarahkan menuju Utara dan Timur pulau Bali dengan melihat potensi dan kebutuhan pemerataan pembangunan.

- c. **Restart.** Selama pandemi, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tetap disiapkan untuk menghadapi pembukaan pariwisata Bali yang sesuai dengan kebutuhan kondisi *new normal*.

Pengembangan pariwisata Bali diarahkan untuk mempertahankan identitasnya sebagai destinasi unggulan namun lebih berkualitas yaitu tidak merusak alam, tidak merusak manusia (*krama*) dan tidak merusak budaya. Sesuai dengan prinsip tersebut, pemerintah harus lebih selektif dalam merumuskan bauran kebijakan pengembangan pariwisata untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan berkelanjutan. Untuk itu, dikembangkan *quality tourism* seperti *health tourism (medical, healing, wellness)*, *eco tourism*, *cultural tourism*, *education tourism*, dan *digital tourism*.

Pengembangan pariwisata Bali tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sejalan dengan tujuan program transformasi ekonomi tentang konsep Bali yang terintegrasi, ketimpangan kemajuan antar wilayah di Bali menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan pariwisata, antara lain: (i) Pembangunan infrastruktur yang mendukung destinasi pariwisata potensial khususnya di Bali Utara dan Bali Timur, pembangunan Bandara Bali Utara dan pembangunan jalan di utara dan timur Bali; (ii) Peningkatan investasi atraksi dan amenitas pariwisata di Bali Utara dan Bali Timur; dan (iii) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat serta akademisi dan media/pers (*media engagement*). Dengan demikian, diharapkan dalam jangka menengah-panjang kontribusi pariwisata Bali Utara terhadap pariwisata Bali meningkat dari 14,8% di tahun 2019 menjadi 16,1% di tahun 2030 dan menjadi 20,4% di tahun 2045. Sedangkan kontribusi pariwisata Bali Timur meningkat dari 7,3% (tahun 2019) menjadi 7,6% (tahun 2030) dan mencapai 8,5% (tahun 2045).

Peningkatan pariwisata Bali dan Kawasan sekitar dilakukan untuk mendorong pembangunan Bali dan Nusa Tenggara. Hal tersebut dilakukan dengan: (i) pembuatan alur berwisata (*travel pattern*) dengan tujuan Senggigi, Mataram, Gili Trawangan, Pantai Selatan Mandalika, dan Labuan Bajo untuk peningkatan lama tinggal (*length of stay*), (ii) investasi untuk melengkapi sarana atraksi pariwisata dan untuk memberikan nilai tambah dan penghasilan bagi pelaku usaha dalam alur berwisata, (iii) peningkatan infrastruktur konektivitas yang terdiri dari pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan konektivitas jaringan jalan.

Program penguatan pariwisata ditujukan untuk: (i) Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang relevan dengan kebutuhan kerja (*place-based jobs*); (ii) Menciptakan ekosistem pariwisata dengan konsep manajemen krisis terpadu (*integrated crisis management*) dan kolaboratif multi-pihak; (iii) Memanfaatkan pinjaman/hutang/hibah luar negeri dengan efisien, seperti alokasi dana untuk investasi dalam penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan optimalisasi kebijakan fiskal dalam sektor pariwisata agar tepat sasaran; (iv) Peningkatan lama tinggal dan pengeluaran (*spending*) wisatawan; (v) Peningkatan kenyamanan dan pengalaman wisatawan pada atraksi, aksesibilitas, dan amenitas di destinasi wisata; (vi) Meningkatkan aspek lingkungan keberlanjutan di destinasi wisata; (vii) Menjadikan destinasi wisata Bali yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kelompok (ramah kaum difabel); (viii) Meningkatkan keterikatan (*engagement*) dan kemudahan akses informasi bagi calon wisatawan yang akan berkunjung ke Bali; dan (ix) Menjaga keberlangsungan usaha sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Penguatan SDM Pariwisata Bali ke depan perlu berkualitas, berlandaskan kearifan lokal, dan berkelanjutan, diarahkan untuk: (i) meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan tinggi vokasi, terutama penguatan program studi yang relevan untuk mendukung pariwisata unggulan Bali termasuk mendorong pengembangan KEK pendidikan dan program *sister university* dengan pendidikan menengah atau tinggi di luar negeri; (ii) meningkatkan kerja sama sektor pendidikan dengan pelaku usaha untuk menciptakan program magang berkualitas guna meningkatkan keahlian dan produktivitas; (iii) meningkatkan sertifikasi kompetensi pariwisata dan penguatan kapasitas masyarakat pengelola aset pariwisata daerah, termasuk penguasaan bahasa asing; dan (iv) meningkatkan penguasaan teknologi digital dan pariwisata inklusif untuk meningkatkan kualitas layanan wisata.

e. Ekonomi Kreatif Berdaya Saing dengan Pasar yang Luas

Tujuan pengembangan ekonomi kreatif dalam jangka Panjang adalah menjadikan Bali sebagai hub etalase ekspor produk kreatif dan hub produk digital. Sasaran jangka menengah pengembangan ekonomi kreatif adalah menjadikan produk ekonomi kreatif Bali yang berdaya saing dan memiliki pasar yang luas, di *platform* fisik maupun digital, nusantara maupun mancanegara.


Bali memiliki potensi yang tinggi di dalam produk kreatif yang sudah dikenal dunia atas nilai manfaat, estetika, dan kearifan lokalnya. Hal ini menjadi salah satu potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi Bali. Sejalan dengan arah pembangunan industrialisasi yang mengacu *high value added* dalam konsep *The Smile of Value Creation* yang dibahas sebelumnya, subsektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan dalam pengembangan adalah: (i) fesyen; (ii) kuliner; (iii) kriya; (iv) seni pertunjukan; (v) fotografi; (vi) film, animasi, video; (vii) pengembangan aplikasi; dan (viii) pengembangan gim. Arah pengembangan di setiap subsektor unggulan ekonomi kreatif Bali disesuaikan dengan masing-masing karakteristiknya yang disampaikan dalam Gambar 5.7. Langkah strategis untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui: (i) penguatan akses permodalan; (ii) peningkatan kompetensi dan ketersediaan SDM ekonomi kreatif; (iii) penguatan pemasaran produk kreatif berorientasi ekspor; (iv) penguatan infrastruktur dan teknologi penunjang ekonomi kreatif; dan (v) perluasan Hak kekayaan Intelektual (HKI) pelaku kreatif dan kelembagaannya.

Gambar 5. 6. Rekomendasi dan Arah Kebijakan Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan Bali



Sumber: Bappenas (2021)

Penguatan akses permodalan bagi usaha ekonomi kreatif menjadi prasyarat pelaku usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan ekspor produk kreatif. Mayoritas usaha ekonomi kreatif Bali masih didominasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sebanyak 95% pelaku usaha kreatif belum berbadan usaha (data statistik BPS, 2016). Skala usaha ekonomi kreatif masih terbatas dan membutuhkan bantuan permodalan untuk peningkatan skala usaha guna meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi dan melakukan ekspor. Selain itu, beberapa subsektor ekonomi kreatif



membutuhkan investasi awal yang tinggi seperti pada subsektor film, aplikasi, dan gim. Dukungan penguatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif dapat diberikan melalui: (i) fasilitasi skema kredit perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (ii) pendampingan dan bimbingan teknis kepada bank penyalur KUR; (iii) fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan kepada non-perbankan termasuk *venture capital*; (iv) fasilitasi *link & match* untuk mendapatkan *capital seed* dari investor; dan (v) fasilitasi insentif khusus pemerintah untuk pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif.

Kompetensi dan ketersediaan SDM ekonomi kreatif menjadi persyaratan dasar untuk mampu bersaing di pasar global. Keterbatasan kapasitas SDM kreatif dan jumlah SDM digital (*talent crunch*) perlu diatasi dengan intervensi kebijakan untuk mewujudkan SDM kreatif dan digital yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai aset ekonomi Bali ke depan. Arahan pengembangan SDM kreatif adalah sebagai berikut: (i) penguatan pendidikan menengah dan tinggi vokasi termasuk pendirian SMK/sekolah tinggi vokasi bidang ekonomi kreatif; (ii) fasilitasi dan bimbingan teknis untuk SDM ekonomi digital, seperti pengembang aplikasi, pengembang gim, dan film-animasi-video; (iii) penguatan regenerasi yang berkelanjutan untuk pekerja di subsektor kriya dan seni pertunjukkan; (iv) peningkatan fasilitasi bimbingan dan pelatihan terutama terkait kompetensi pemasaran digital di semua subsektor ekonomi kreatif; (v) peningkatan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif; dan (vi) penguatan acara/*event* pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis kompetisi.

Perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah tinggi dan *global branding* seperti “Made in Bali” atau “Bali Menyapa Dunia”. Penggunaan *branding* produk Bali yang baik dapat memperkuat produk untuk berkompetisi di pasar domestik maupun internasional. Kerja sama antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu dilakukan baik dalam peningkatan kualitas produk maupun perluasan jaringan pasar. Strategi dalam pengembangan dan pemasaran produk kreatif berorientasi ekspor adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan inovasi produk berstandar internasional yang sesuai dengan kearifan lokal Bali dan menggunakan bahan baku lokal; (ii) Memfasilitasi penyelenggaraan atau partisipasi dalam pameran/promosi, di dalam dan luar negeri; (iii) Adaptasi teknologi untuk peningkatan nilai tambah dan perluasan pasar misalnya: *e-commerce*, *Internet of things (IOT)*, dan *non-fungible token (NFT)*; (iv) Memfasilitasi promosi ekspor produk ekonomi kreatif melalui *Indonesia Trade Expo Center* dan *Indonesia Spice Up The World*; (v) Membuat *brand* produk ekraf Bali seperti “Made in Bali”, “Bali Menyapa Dunia”; (vi) Pengembangan *aggregator/online trading house* di Bali sebagai wadah untuk mempertemukan pelaku kreatif, eksportir, dan importir negara pasar; dan (vii) Pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Digital Bali.

Penguatan sarana dan prasarana serta teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif. Untuk menjawab tantangan permintaan ekonomi kreatif yang dinamis perlu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung aktivitas ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir. Sarana dan prasarana fisik maupun digital menjadi salah satu fondasi dalam penciptaan ekosistem tersebut. Strategi penguatan sarana dan prasarana serta teknologi penunjang ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: (i) Memfasilitasi pengembangan pusat kreatif seperti kota/klaster kreatif di Bali; (ii) Penguatan sarana dan prasarana inkubator/akselerator bisnis/*innovation hub*; (iii) Fasilitasi bantuan peralatan/mesin bagi pelaku ekonomi kreatif; (iv) Memfasilitasi pengembangan *platform* sistem informasi ekspor produk ekonomi kreatif; dan (v) Memfasilitasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ekonomi kreatif perlu diperluas dan diperkuat kelembagaannya. Hal tersebut dapat dicapai melalui: (i) Memfasilitasi kemudahan memperoleh HKI bagi pelaku usaha ekraf melalui proses sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan; (ii) Mengembangkan digitalisasi pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif; (iii) Memberikan keringanan beban biaya pendaftaran HKI terutama bagi pelaku usaha kecil dan pelaku usaha kreatif pemula; (iv) Pembentukan satuan tugas penanganan pengaduan pembajakan produk ekonomi kreatif; dan (v) Pengembangan *platform database* dan transaksi lisensi HKI (misal Portamento yang merupakan platform lisensi musik).



f. Ekosistem UMKM Tangguh dan Berorientasi Ekspor

Penguatan UMKM di Bali bertujuan untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh dalam perekonomian Bali serta berorientasi pasar ekspor.

Sementara itu, sasaran penguatan UMKM yang akan dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatkan produktivitas UMKM melalui pengembangan kewirausahaan, meningkatkan akses informasi pembiayaan dan pemasaran, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan jumlah UMKM yang memiliki status badan hukum (formal), memperkuat pemberdayaan UMKM, pengembangan pembiayaan inovatif bagi UMKM, meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi tepat guna, perluasan akses pemasaran UMKM lokal, dan penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu termasuk di dalamnya penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).


Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran penguatan UMKM di Bali adalah sebagai berikut.

Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki status badan hukum (formal). Mendorong UMKM dan usaha Ekraf di Provinsi Bali untuk berbadan usaha merupakan upaya korporatisasi untuk memudahkan pembinaan dan penanganan para pelaku usaha melalui: (i) Memfasilitasi kemudahan memperoleh status badan hukum bagi UMKM melalui proses sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan; (ii) Mengembangkan digitalisasi pendaftaran UMKM ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS); dan (iii) Memberikan keringanan beban biaya pendaftaran untuk legalitas UMKM.

Memperkuat pemberdayaan UMKM di Bali untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM termasuk untuk 'menembus' pasar ekspor. Hal tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (i) Pengembangan pusat dan layanan konsultasi yang dapat dilakukan secara daring dan luring; (ii) Pendampingan usaha yang mencakup manajemen, keuangan, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan SDM usaha; (iii) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan usaha melalui kemitraan dengan swasta dan lembaga internasional; dan (iv) Memperkuat koneksi dan jejaring bisnis yang dilakukan secara rutin untuk mempertemukan antar pelaku UMKM atau pelaku UMKM dengan usaha besar dalam bentuk kegiatan seperti forum, seminar, pelatihan, serta kerja sama usaha.

Pengembangan pembiayaan inovatif bagi UMKM di Bali untuk mendukung pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan melalui: (i) Penguatan literasi keuangan kepada UMKM termasuk pendanaan yang bersumber dari pasar modal; (ii) Fasilitasi skema kredit perbankan bagi pelaku UMKM termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi); (iii) Pendampingan dan bimbingan teknis kepada bank penyalur KUR untuk memastikan implementasi 20% alokasi kredit perbankan umum telah diberikan kepada pelaku UMKM; (iv) Optimalisasi pembiayaan non-bank yang termasuk optimalisasi *leasing*, pembiayaan ekspor UMKM, pembiayaan melalui PNM Mekaar untuk skala mikro, pembiayaan pasar modal, koperasi simpan pinjam, pembiayaan modal ventura, hingga pembiayaan melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD); (v) Fasilitasi *link & match* untuk mendapatkan *capital seed* dari investor; dan (vi) Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan melalui *fintech*.

Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing UMKM. Hal tersebut dilakukan utamanya melalui: (i) Pendampingan dan kolaborasi antara UMKM dengan institusi riset atau lembaga pendidikan tinggi dalam pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan digitalisasi; (ii) Kemitraan dengan usaha besar (*value chain-based partnership*) untuk transfer pengetahuan, manajemen, dan teknologi dalam bentuk kegiatan serial yang berlanjut secara berkala (*incubator program*); dan (iii) Pembangunan rumah produksi bersama berstandar industri pada sentra industri untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis kewilayahan. Selain itu, mengarahkan prinsip



produksi untuk mengadopsi prinsip bisnis yang keberlanjutan (*sustainability*) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan peluang menembus pasar global³⁶.

Perluasan akses pemasaran UMKM lokal untuk mendukung berkembangnya *brand* UMKM di pasar domestik dan pasar global. Strategi yang dapat dilakukan antara lain pelaksanaan pameran produk UMKM melalui: (i) Daring (digitalisasi pameran) untuk memperluas *online marketplace*; (ii) Luring melalui terminal transportasi umum, *rest area*, pusat perbelanjaan, pasar malam, hingga pasar rakyat agar pelaku UMKM dapat bergiliran memamerkan produknya; (iii) Pemerintah daerah Bali bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya untuk menggerakkan konsumen membeli produk UMKM antar daerah untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri; (iv) Memfasilitasi UMKM Bali dalam rantai pasok ekonomi Provinsi Bali.

Sedangkan untuk mendorong UMKM bersaing di pasar global, strategi yang perlu dilakukan antara lain: (i) Kurasi dan standarisasi produk UMKM dengan standar internasional yang telah siap ekspor; (ii) Memanfaatkan pusat layanan konsultasi bagi para pelaku UMKM sebagai *agregator* yang mempertemukan antara UMKM dengan pelaku ekspor; (iii) Memanfaatkan saluran pemasaran ekspor produk UMKM Bali melalui *e-commerce*. Contohnya melalui pemanfaatan kolaborasi antara Shopee dengan Sekolah Ekspor, asosiasi gabungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (SMESCO) dengan menargetkan 500 ribu UMKM menjadi eksportir baru hingga tahun 2030; dan (iv) Kerja sama integrasi penguatan Market Intelligence Ekspor melalui kolaborasi dengan pihak swasta, K/L terkait dan asosiasi hingga pemanfaatan digitalisasi pameran luar negeri untuk mendapatkan informasi negara tujuan ekspor potensial (mis. INACRAFT, *Virtual Trade Fair* Bangkok).

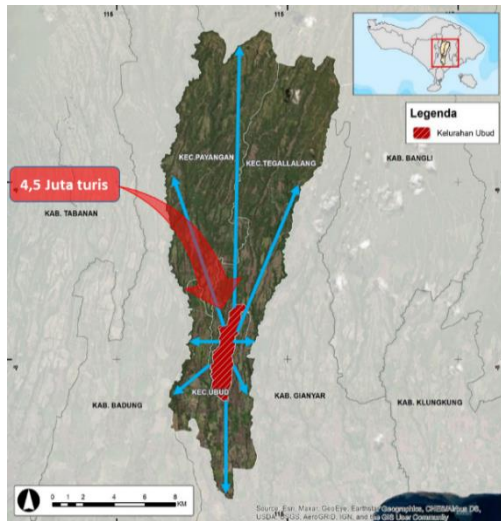
Bentuk dukungan kerja sama lainnya yang dapat dilakukan antara lain: (i) Dukungan sertifikasi dan paten dari pemerintah pusat sebagai opsi bentuk jaminan kualitas; (ii) Dukungan dan dorongan kepada pihak swasta (mis. IKEA) untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha UMKM; dan (iii) Pembuatan hub desain khusus negara tujuan utama ekspor (mis. Amerika Serikat atau Eropa); serta (iv) Berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan produk yang potensial laku di pasar ekspor.

Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu di Bali. Hal tersebut utamanya dilakukan melalui: (i) Peningkatan peran pemerintah daerah melalui optimalisasi PLUT sebagai sentra fasilitasi (Pendampingan, Pelatihan, Pengembangan), melakukan pembinaan kepada UMKM, dan penetapan alokasi ruang dengan tarif khusus bagi pelaku UMKM baik pada wilayah perkantoran, pertokoan, dan sentra industri; (ii) Pembentukan satgas pendamping UMKM yang terdiri dari tim pemerintahan pusat dan daerah yang dapat menjadi katalis keberhasilan program pendampingan untuk mewujudkan ekosistem UMKM terpadu di Provinsi Bali; (iii) Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dapat mendukung terkait konsultasi produk dan pasar pada pasar ekspor; dan (iv) Pembentukan pusat bantuan hukum untuk memberikan bantuan layanan hukum dan pelayanan pengadilan bagi UMKM.

Meningkatkan Peran UMKM di Pasar global melalui ekspor dengan mengusung *tagline* "Bringing Bali Heritage to The World" untuk mempromosikan produk unggulan Bali kepada dunia merupakan strategi yang tepat dilakukan untuk memulihkan UMKM Bali pasca pandemi COVID-19. Dari strategi ini, ke depannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap permintaan lokal sehingga pihak UMKM tidak akan kesulitan memasarkan produknya; Meningkatkan akses terhadap pasar potensi baru di luar negeri dan provinsi yang belum tergal; Dan meningkatkan produktivitas hingga daya saing UMKM Provinsi Bali.

³⁶ Berdasarkan hasil laporan *Global Corporate Sustainability Nielson* pada tahun 2015, sebesar 66 % konsumen secara global rela membayar lebih untuk produk-produk yang berasal dari brand berkelanjutan (baik secara manusia mau pun lingkungan). Hasil survei bagi milenial lebih tinggi, yaitu 73 %. Dikarenakan Bali terkenal akan keindahan alamnya, Bali berpotensi untuk melakukan industri yang bertanggungjawab terhadap manusia dan lingkungan untuk me-approach pembeli (Sumber: KBRI Perancis, Dior Spring Collection di Paris Fashion Week 2021)

Box 5.1 Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulpapan



Berdasarkan arahan revitalisasi destinasi pariwisata Bali dalam RPJMN 2020-2025, telah ditetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Ubud menjadi salah satu destinasi unggulan di Provinsi Bali. Daya tarik dan akomodasi destinasi pariwisata di Kabupaten Gianyar saat ini terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu Ubud, Tegallalang, dan Payangan (Ulpapan).

Dalam perkembangannya, Kawasan Pariwisata Ulpapan telah dihadapkan pada berbagai permasalahan. Perlunya nilai-nilai luhur budaya Ubud dan sekitarnya untuk dipromosikan ke dunia internasional, namun pada satu sisi teridentifikasi juga degradasi nilai kesakralan budaya akibat komersialisasi pariwisata. Ancaman kelestarian budaya dan tradisi lokal menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan pengembangan pariwisata Ubud. Selain itu, indikasi *over-carrying capacity* di pusat kota Ubud, adanya potensi konflik sosial-ekonomi, masalah kemacetan dan penataan lahan parkir, perkembangan desa wisata, serta kesenjangan ekonomi di masyarakat juga menjadi tantangan dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Ulpapan.

Dalam upaya mengatasi isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Kawasan Pariwisata Ulpapan, serta dengan semangat perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS), maka diperlukan penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulpapan (RIT Ulpapan) yang memuat konsep awal dengan fokus pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata di Kawasan Ulpapan dapat menjadi salah satu percontohan untuk perencanaan pariwisata terintegrasi melalui pendekatan pariwisata berkelanjutan, khususnya untuk mendukung Kawasan Ulpapan sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Proses penyusunan RIT Ulpapan telah melibatkan secara aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas dan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Rencana induk tersebut juga disusun atas landasan konsep perencanaan kawasan yang integratif, berkelanjutan, berorientasi global, inklusif, dan memperhatikan kelestarian budaya dan daya dukung lingkungan. Secara garis besar, terdapat tujuh bidang kajian utama dalam Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata Ulpapan, yaitu: (i) **Kajian sosial** dalam menganalisis dinamika sosial yang menghasilkan arahan rekayasa sosial (*social engineering*) yang dapat selaras dengan RIT Ulpapan; (ii) **Kajian budaya** dalam mengidentifikasi hasil kebudayaan yang ada di Ulpapan dan Bali untuk menghasilkan bentuk rekayasa budaya (*cultural engineering*) bagi RIT Ulpapan; (iii) **Kajian lingkungan** yang menilai kemampuan lingkungan menampung aktivitas pariwisata dan pendukungnya untuk menghasilkan arahan penggunaan ruang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan wisatawan dengan tetap berada pada koridor *carrying capacity*; (iv) **Kajian ekonomi** untuk memperoleh gambaran tentang aktivitas ekonomi, termasuk bisnis proses dan hubungan rantai nilai dengan sektor lain; (v) **Kajian zonasi** pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memetakan *supply-demand* pariwisata, penentuan *branding*, penentuan tema pengembangan, visi dan misi pengembangan, serta arahan kegiatan pariwisata di tiap zonasi; (vi) **Kajian kelembagaan** dalam merumuskan model pengelolaan *Destination Management Organization* (DMO – PPP) dengan analisis AHP yang kompleks namun akomodatif; serta (vii) **Kajian infrastruktur dan transportasi** yang fokus pada analisis kebutuhan infrastruktur pendukung yang berlandaskan prinsip berkelanjutan tanpa mengesampingkan pendekatan sosial-budaya. Keseluruhan analisis diatas kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi, kerangka regulasi dan pendanaan.

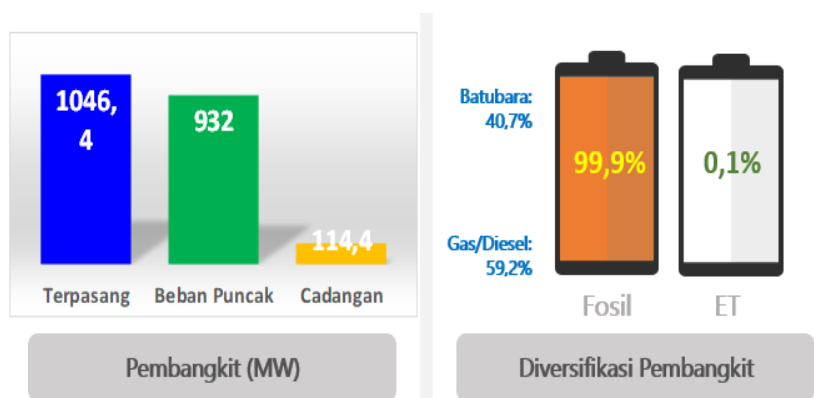
Sumber: Kedeputian Pengembangan Regional, Bappenas (2021)

5.3 Bali Hijau

Dalam mewujudkan Bali Hijau, pemerintah Provinsi Bali menghadapi beberapa tantangan, utamanya emisi energi, sampah dan ekonomi sirkular, serta kenaikan permukaan air laut. Ke depannya, pemerintah Provinsi Bali perlu mengadakan program dan mengarusutamakan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunannya.

Energi dan emisi merupakan dua variabel yang penting dalam konteks pengembangan ekonomi hijau. Penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang menjadi sumber pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu jenis energi yang cukup penting bagi suatu perekonomian adalah penggunaan energi listrik. Secara umum, kondisi kelistrikan di Provinsi Bali sudah cukup baik. Data PLN tahun 2019 menunjukkan bahwa pembangkit listrik di Bali mengalami surplus 0,1 GW, di mana total kapasitas energi terpasang sebesar 1 GW sedangkan kebutuhan pada saat beban puncak hanya 0,9 GW (Gambar 5.7). Selain itu, rasio elektrifikasi di Provinsi Bali pada September 2020 telah mencapai 100%.

Gambar 5. 7. Besarnya Pembangkit Listrik dan Diversifikasi Sumber Energi Listrik

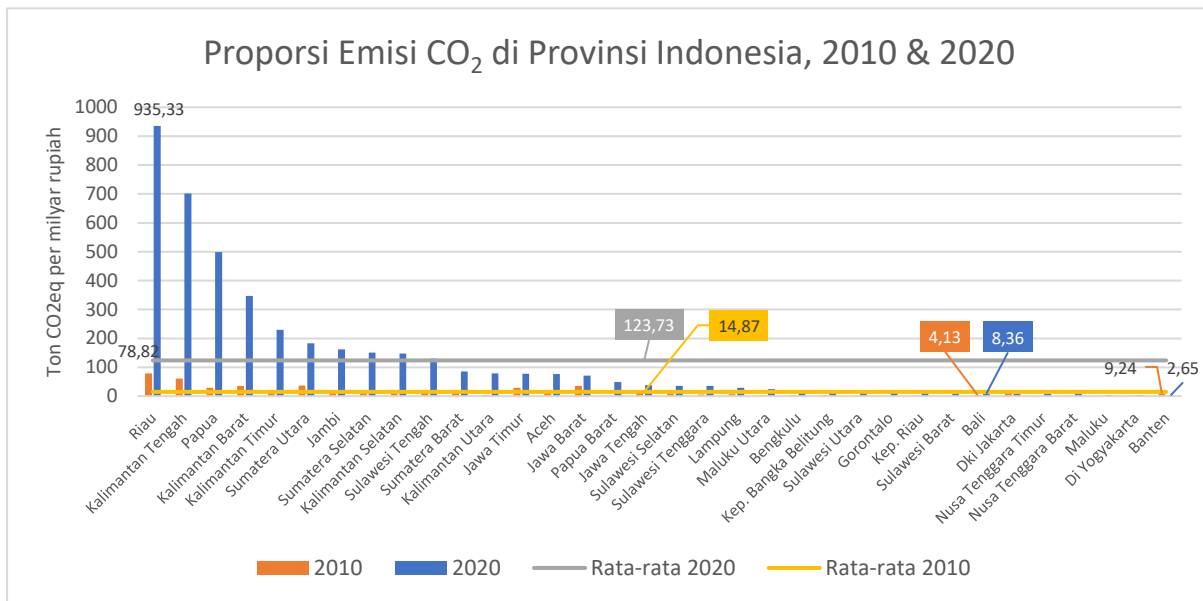


Sumber: Statistik PLN (2019)

Peningkatan konsumsi energi listrik secara signifikan di Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, rata-rata konsumsi energi listrik di Bali relatif tinggi dengan rata-rata pertumbuhan tahunan lebih dari 7% pada periode 2010 hingga 2018, di mana nilainya mencapai 2,5 juta setara barel minyak (SBM). Konsumsi energi listrik tersebut didominasi oleh energi fosil yang mencapai 99,9% (Gambar 5.8). Tren ini berbahaya bagi lingkungan, terutama dalam peningkatan emisi GRK, dalam jangka panjang. Hasil proyeksi dengan model *Long-range Energy Alternatives Planning* (LEAP) menunjukkan Provinsi Bali akan terus mengalami peningkatan emisi GRK hingga tahun 2030 (Bappenas, 2014; Adiputra *et al.*, 2018). Berdasarkan data Aksara Bappenas, intensitas emisi CO₂ di Provinsi Bali berada di peringkat 28 provinsi yang menghasilkan emisi CO₂ paling tinggi (Gambar 5.8). Meskipun demikian, emisi CO₂ di Bali meningkat hingga 102,4% dalam rentang satu dekade terakhir.

Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah tingginya emisi akibat penggunaan energi fosil. Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Bali menyatakan bahwa Provinsi Bali memiliki potensi energi surya sebesar 1,2 GW dan energi angin sebesar 1 GW. Lebih besar lagi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mencatatkan bahwa Bali memiliki potensi EBT hingga 3,73 GW yang terdiri dari potensi panas bumi, angin, laut, bioenergi, hidro, dan surya. Namun, realisasi dari potensi tersebut masih belum optimal. Berdasarkan statistik tahun 2015, penggunaan EBT di Provinsi baru mencapai 0,27% dari total energi. Pemanfaatan EBT saat ini masih sekitar 1%, masih jauh dari target sebesar 11,15% di tahun 2025. Selain itu, penggunaan energi fosil di Provinsi Bali masih tinggi karena ketersediaan infrastruktur dan pasokan (*supply*) EBT masih terbatas. Contohnya, SPBG baru tersedia 1 unit di seluruh Bali.

Gambar 5. 8. Intensitas Emisi CO₂ di Provinsi Indonesia, 2010 & 2020



Sumber: Aksara Bappenas (2020)

Peningkatan emisi GRK di Provinsi Bali tidak hanya disebabkan oleh penggunaan energi fosil saja, namun juga disebabkan oleh peningkatan emisi di laut. Salah satu hal yang mendorong terciptanya emisi di laut adalah menurunnya luas tutupan lahan *mangrove* di Bali. Pada tahun 2020, rasio luas lahan *mangrove* terhadap total luas tutupan lahan di Bali hanya mencapai 0,356% (Bappenas, 2021). Jika terus dibiarkan menurun, kelestarian lingkungan dalam jangka panjang akan terganggu akibat meningkatnya emisi GRK, karena *mangrove* merupakan salah satu media alami yang dapat menyerap karbon.

Bali menghadapi berbagai tantangan iklim, misalnya kenaikan muka laut, yang memiliki potensi kerugian ekonomi. Provinsi Bali mengalami ancaman kenaikan muka laut dengan rata-rata 0,8-1,2 cm per tahun hingga tahun 2024, sehingga berbahaya bagi kapal dengan ukuran kurang dari 10 GT.³⁷ Sedangkan, kapal-kapal nelayan yang digunakan di Bali sebagian besar memiliki ukuran kurang dari 10 GT. Jika terus dibiarkan, kondisi iklim yang memburuk akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah, terutama sektor kelautan dan perikanan.

Provinsi Bali juga menghadapi masalah pengelolaan sampah. Sebagian besar TPA di Provinsi Bali mengalami kelebihan kapasitas, dengan ketinggian timbunan sampah di TPA yang mencapai 15-25 meter berpotensi mengalami longsor. Perkembangan aktivitas ekonomi di Bali, terutama pariwisata, berdampak pada peningkatan sampah. Pada tahun 2018, tiap wisatawan berkontribusi meningkatkan sampah sebanyak 1,7 kg/hari. Mekanisme pengolahan persampahan yang baik diperlukan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari sampah di Provinsi Bali. Khususnya terkait dengan pengurangan sampah plastik, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018, namun *law enforcement* di lapangan perlu diperkuat.

Kebijakan yang Telah Dilaksanakan untuk Mengatasi Emisi GRK

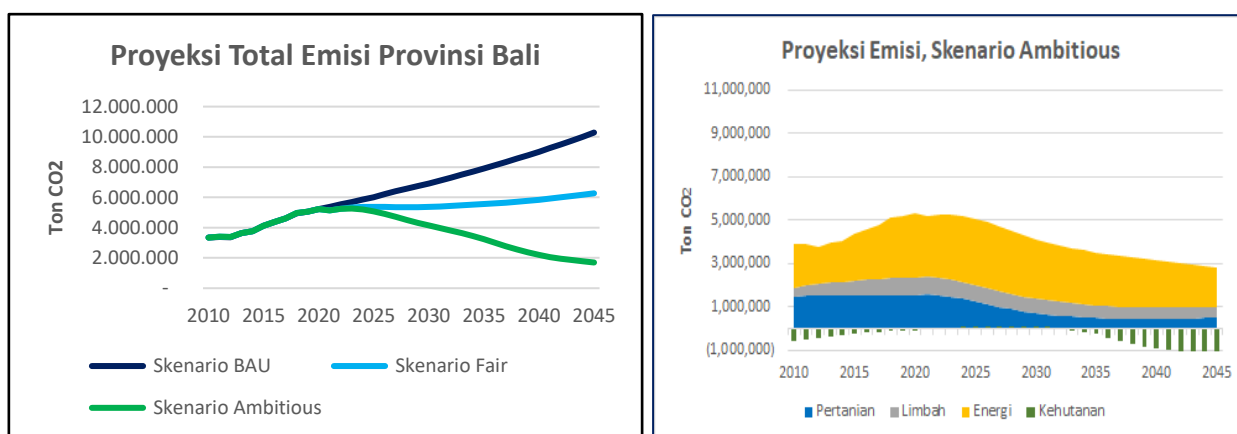
Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan keseriusan dengan mengembangkan berbagai program untuk mewujudkan Bali Hijau, diantaranya mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan penerapan ekonomi sirkular. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah provinsi Bali telah meluncurkan peraturan gubernur (Pergub) Bali terkait Energi Bersih dan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik

³⁷ Proyeksi tim Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas

Berbasis Baterai. Lebih jauh dalam mendukung pembangunan EBT, Disnaker Bali telah melakukan pelatihan EBT terhadap para tenaga kerja di Bali agar penggunaan teknologi EBT dapat dilakukan langsung oleh para tenaga kerja lokal dan menyerap tenaga kerja Bali. Selain itu, berbagai usaha untuk mengembangkan EBT di Bali juga telah mulai dilakukan, seperti membangun Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) sebagai inovasi dalam mengembangkan EBT yang berbasis sampah sekaligus mengatasi permasalahan sampah di Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga telah memiliki program pembangunan industri kendaraan listrik dalam mendorong transportasi bersih. Dari sisi penerapan ekonomi sirkular, beberapa kawasan wisata seperti Kura-kura *Island* dan *resort*/hotel besar seperti Alila telah menerapkan prinsip keberlanjutan (*sustainable*).³⁸

Usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bali belum cukup untuk mempercepat tercapainya transformasi ekonomi hijau Bali. Tingkat emisi di Bali yang terus meningkat menyebabkan transformasi ekonomi hijau sangat diperlukan untuk meminimalisir berbagai kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan. Transisi dari ekonomi konvensional (*brown economy*) menuju ekonomi hijau (*green economy*) tidak memberikan kerugian ekonomi bagi Provinsi Bali. Proyeksi dari Bappenas (2021)³⁹ menunjukkan bahwa transformasi ekonomi hijau di Provinsi Bali dapat menurunkan intensitas emisi Bali sekitar 40-80% pada tahun 2045 dibandingkan dengan skenario BAU (Gambar 5.8). Skenario kebijakan ambisius perlu dilanjutkan hingga tahun 2060 untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, kebijakan-kebijakan kunci dalam proses transformasi perekonomian Bali akan mampu menurunkan emisi dari sektor energi, pengolahan sampah dan limbah, dan pertanian. Sedangkan, sektor kehutanan didorong untuk dapat melakukan sekuestrasi (penyerapan) emisi karbon.

Gambar 5. 9. Nilai Proyeksi Penurunan Emisi di Provinsi Bali Hingga Tahun 2045



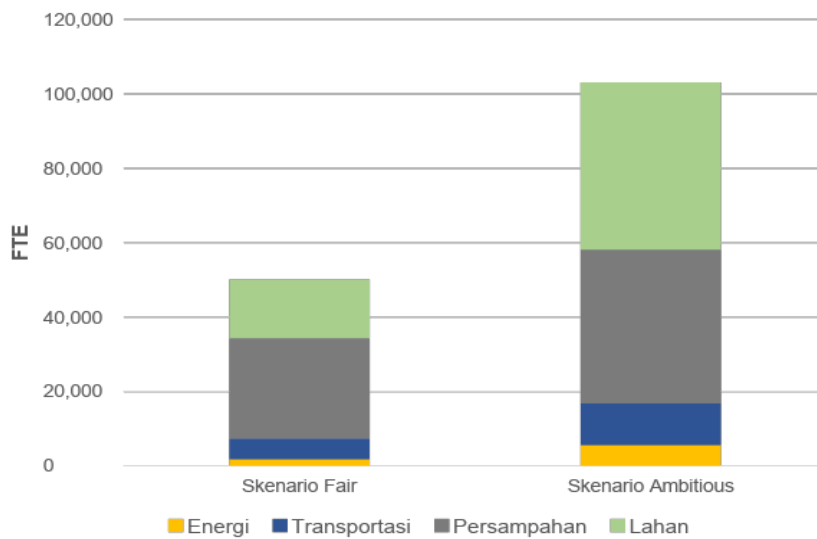
Sumber: Bappenas (2001)

Selain penurunan emisi, transformasi hijau di Bali juga dapat mempercepat tercapainya sasaran penciptaan *green jobs* sebanyak 50-100 ribu lapangan pekerjaan tetap (Gambar 5.10). Penciptaan lapangan pekerjaan baru tersebut didorong oleh: (1) Sektor Energi melalui pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT dan efisiensi penggunaan energi; (2) sektor transportasi melalui pembangunan *charging station* kendaraan listrik; (3) sektor pengelolaan persampahan melalui aktivitas 3R, *composting* sampah, pembangunan TPA, pemasangan fasilitas *methane capture*, dan (4) sektor pertanian melalui rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman *mangrove*, pupuk organik, pakan ternak, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS).

³⁸ Penjelasan yang lebih spesifik mengenai Kura-kura Island dapat dilihat pada box studi kasus di bagian akhir tulisan ini.

³⁹ Proyeksi oleh Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas tahun 2021, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan diskusi dengan berbagai stakeholders terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Bali.

Gambar 5. 10. Proyeksi Penciptaan Green Jobs dari Transformasi Ekonomi Hijau Provinsi Bali



Sumber: Bappenas (2021)


Diperlukan strategi-strategi untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau di Bali. Secara garis besar skenario kebijakan yang akan dijalankan dalam proses transformasi perekonomian Bali menuju ekonomi Bali yang hijau sesuai dengan visi pemulihan dan transformasi ekonomi Bali yaitu, Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera disampaikan dalam gambar 5.11.

Gambar 5. 11. Skenario Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon menuju Ekonomi Hijau di Provinsi Bali

Energi Berkelanjutan, termasuk transportasi	Pengelolaan lahan, termasuk pertanian	Pengelolaan Sampah dan Limbah
<p>Fair</p> <ul style="list-style-type: none"> 84% kapasitas PLT Gas terpasang sebagai pembangkit listrik utama efisiensi energi 1% per tahun 50% motor dan 20% mobil listrik terhadap total kendaraan di Bali 	<p>Fair</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan luas tutupan mangrove seluas 1522 Ha Rehabilitasi mangrove seluas 438 Ha Pemeliharaan luas tutupan hutan seluas 74.000 ha Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 6.000 ha hingga tahun 2030 dan 15.000 ha hingga tahun 2045 Luas LP2B sebesar 88.000 Ha Peningkatan produktivitas melalui SRI, PTT dan penggunaan Varietas Rendah Emisi di 50 % luas sawah Peningkatan supply pupuk organik dengan komposisi 20% sampah organik (TPA) dan 80% pupuk kandang (UPPO) Peningkatan Perbaikan Pakan Ternak hingga 20% Peningkatan UPPO dan BATAMAS hingga 20% 	<p>Fair</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kegiatan 3R sampah di TPS 3R/ TPST sampai 20 % dan komposting sampai 38 % Pengelolaan RDF di TPS dengan kapasitas 400 ton/hari dan TPA 700 ton/hari Perluasan landfill/ TPA 7.8 ha dan target methane capture 30% 70% sampah dikelola dengan baik Pelayanan air limbah 30% dan methane capture anaerob sebesar 50%
<p>Ambisius</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% pembangkit baru yang dibangun setelah 2020 adalah pembangkit EBT 5% peningkatan efisiensi energi per tahun 100% migrasi bahan bakar dari LPG ke listrik di rumah tangga 100% motor dan 40% mobil listrik terhadap total kendaraan di Bali 	<p>Ambisius</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan luas tutupan mangrove seluas 1900 Ha Peningkatan rehabilitasi mangrove seluas 1000 Ha Perluasan tutupan mangrove seluas 100 Ha Pemeliharaan luas tutupan hutan seluas 74.000 ha Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 25.000 ha hingga tahun 2030 dan 44.000 ha hingga tahun 2045 Luas LP2B sebesar 78.000 Ha Peningkatan produktivitas melalui SRI, PTT dan Penggunaan Varietas rendah Emisi di 90% luas sawah Peningkatan supply pupuk organik dengan komposisi 15% sampah organik (TPA) dan 85% pupuk kandang (UPPO) Peningkatan Perbaikan Pakan Ternak hingga 60% Peningkatan UPPO dan BATAMAS hingga 50 % 	<p>Ambisius</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kegiatan 3R sampah di TPS 3R/ TPST sampai 22% dan komposting sampai 40 % Pengelolaan RDF di TPS dengan kapasitas 450 ton/hari dan TPA 800 ton/hari Perluasan landfill/ TPA 12 ha dan target methane capture 35% 100% sampah dikelola dengan baik Pelayanan air limbah 50% dan methane capture anaerob sebesar 100%

Sumber: Bappenas (2021)

Tujuan Pembangunan Ekonomi Hijau Bali dalam jangka panjang adalah menurunkan intensitas emisi di Bali serta mendorong pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang melestarikan lingkungan dan tahan terhadap krisis. Kondisi tersebut akan tercapai apabila ada komitmen yang kuat antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dukungan pemerintah dalam percepatan proyek pembangkit yang ramah lingkungan di seluruh Bali dan



pemberian insentif kepada pihak swasta yang menerapkan prinsip *sustainable tourism* dapat membantu mempercepat tercapainya pembangunan ekonomi hijau di Bali.

Sementara itu, sasaran pembangunan ekonomi hijau dalam jangka menengah adalah pembangunan dan revitalisasi PLT EBT, melaksanakan revitalisasi dan optimalisasi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, membangun infrastruktur penunjang untuk penggunaan transportasi bersih yang ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sektor pertanian, industri, dan pariwisata terhadap kelestarian lingkungan, serta mendorong pelaku usaha untuk menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan usahanya (*blue economy*).

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi hijau di Bali adalah sebagai berikut:

Pengembangan Energi Bersih (Bauran Energi Terbarukan)

Pengembangan energi bersih atau peningkatan bauran energi terbarukan di Bali diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai potensi terkait sumber energi baru terbarukan, baik dari sisi *supply* maupun dari sisi permintaan (*demand*). Strategi ini diharapkan dapat mencapai target tahun 2045 di mana lebih dari 50% listrik di Bali dihasilkan melalui EBT sehingga tingkat emisi dari sektor energi dapat diturunkan secara drastis. Tujuan tersebut dicapai melalui kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menciptakan terobosan EBT dengan memberikan insentif bagi swasta. Selain itu, pemerintah juga perlu memanfaatkan potensi energi surya yang tinggi di Bali dengan mendorong pembangunan PLTS atap. Pemerintah juga perlu membangun dan melakukan revitalisasi PLT EBT (PLTM, PLTS, PLTB, PLTSa, dan PLT *Hybrid*) dan mengganti PLTD yang beroperasi dengan PLT EBT sebagai salah satu sumber alternatif energi listrik di Bali agar peningkatan bauran energi dapat dilakukan secara optimal.

Transformasi Pengelolaan Persampahan


Transformasi pengelolaan persampahan di Provinsi Bali diarahkan untuk mendorong pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta selaras dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Transformasi pengelolaan persampahan di Provinsi Bali memiliki sasaran kuantitatif sebesar 30% dan 70% penanganan sampah yang baik pada tahun 2025.⁴⁰ Transformasi pengelolaan persampahan di Provinsi Bali diarahkan dengan melaksanakan pengumpulan sampah secara terpilah dan terjadwal sesuai dengan Pergub No. 47 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendampingan dan evaluasi TPS 3R di wilayah Sarbagita, pendampingan peningkatan kapasitas Pemda di Sarbagita melalui kegiatan ISWMP, melakukan *landfill mining* untuk mencari lahan dan membangun TPS 3R dan TOSS yang baru untuk mengatasi masalah persampahan yang sangat mendesak.

Pemerintah juga dapat melakukan beberapa strategi berikut untuk meningkatkan pengelolaan persampahan di Bali, yakni mengembangkan desain sistem retribusi persampahan, memperbaiki Peraturan Daerah terkait retribusi sampah di Bali, mengembangkan *food and waste management* dan *food bank system*, memperkuat UMKM bidang pengelolaan sampah melalui skema pinjaman lunak. Selain itu juga dapat dilakukan evaluasi dan kajian kelayakan pengelolaan sampah wilayah Sarbagita menggunakan teknologi *refuse derived fuel* (RDF), serta melaksanakan rencana induk (*masterplan*) persampahan Provinsi Bali untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Transportasi Ramah Lingkungan

Strategi ini ditujukan untuk mendorong penggunaan transportasi yang ramah lingkungan dan mencapai target lainnya pada tahun 2045, diantaranya penurunan permintaan konsumsi BBM menjadi

⁴⁰ Sesuai Pergub No. 95 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yaitu pengurangan sampah



1.727.543 *barrels oil equivalent* (BOE), peningkatan permintaan listrik menjadi 711.560 BOE, penurunan permintaan energi pada subsektor transportasi sebesar 44%, dan peningkatan penggunaan 50-100% sepeda motor listrik dan 20-40% mobil listrik yang beroperasi di Bali. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan listrik yang efisien, perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan masif. Pemberian insentif kepada konsumen dalam bentuk keringanan pajak perlu diterapkan. Untuk menyusun kebijakan yang lebih terencana dan terukur, perlu segera disusun peta jalan transportasi bersih di Bali. Dalam kaitan itu, pembangunan stasiun pengisian perlu dipercepat dan merata di seluruh Provinsi Bali. Selanjutnya, perlu dibangun infrastruktur penunjang BRT dan penambahan jumlah armada BRT (Trans Sarbagita).

Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Strategi penanganan perubahan iklim melalui transformasi hijau pada sektor pertanian, industri dan pariwisata dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor tersebut untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dalam upaya menangani perubahan iklim. Transformasi hijau diharapkan dapat menurunkan emisi sektor pertanian sebesar 80-95% pada tahun 2045 dibandingkan dengan kondisi BAU. Penanganan perubahan iklim melalui transformasi hijau pada sektor pertanian di Provinsi Bali dapat dilakukan dengan meningkatkan keahlian para petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai dengan: (i) memberikan sertifikasi pertanian organik (pelatihan, pra audit, bintek) bagi para kelompok tani; (ii) penguatan implementasi standar bahan pangan organik; (iii) memberikan insentif bagi para kelompok tani yang akan melakukan transisi dari pertanian tradisional ke pertanian organik; dan (iv) mendorong pengelolaan sampah organik terpilah menjadi pupuk organik.

Penanganan perubahan iklim di sektor industri dilaksanakan dengan mendorong pelaku usaha industri menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan menerapkan prinsip berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui: (i) menerapkan Standar Industri Hijau (SIH) pada aspek proses produksi, pengelolaan limbah/emisi, dan manajemen perusahaan; (ii) pengembangan skema insentif dan disinsentif serta pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); (iii) penerapan pada Kawasan Industri diperkuat melalui peningkatan performa manajemen pengelola kawasan, lingkungan, sosial dan ekonomi; dan (iv) penerapan ekonomi sirkular pada proses produksi melalui *Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, dan Renew* (5R).

Penanganan perubahan iklim di sektor pariwisata dapat dilakukan dengan membangun *awareness* dan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan bagi pelaku usaha dan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan: (i) memberlakukan peraturan yang ketat tentang pembuangan sampah; (ii) mengembangkan potensi *eco-tourism* dan pariwisata taman nasional Bali Barat serta desa wisata dengan konsep agrowisata organik; (iii) memperbaiki tata kelola pertanian organik secara menyeluruh sebagai atraksi wisata; dan (iv) memberikan insentif kepada para pelaku pariwisata untuk menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dalam menjalankan usahanya.

Pengembangan *Blue Economy* Bali

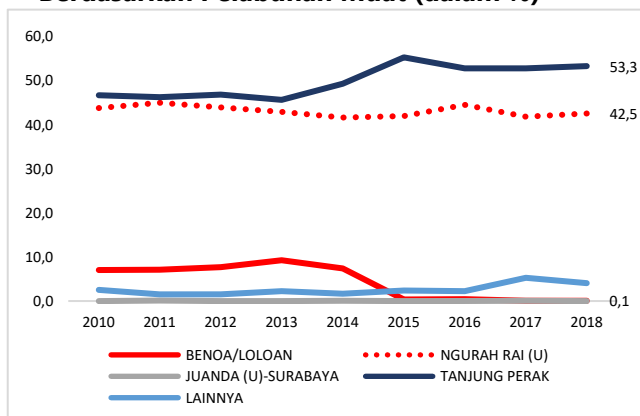
Strategi pengembangan *blue economy* (ekonomi biru) Bali dilakukan untuk mendorong potensi laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali dan sentra penurunan emisi GRK. Potensi ekonomi biru di Bali mencakup berbagai sektor, antara lain: penangkapan dan budidaya ikan, pariwisata bahari, industri olahan hasil laut (olahan ikan, olahan rumput laut, perhiasan, tambang laut), industri galangan kapal, perdagangan dan logistik laut, dan bioteknologi laut. Sektor-sektor tersebut dikembangkan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan produktivitas secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga ekonomi biru dapat menjadi pengungkit diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi Bali dalam jangka menengah dan panjang. Laut dapat menghasilkan emisi GRK yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan jika tidak dimanfaatkan secara baik. Untuk mengurangi emisi karbon di laut, perlu segera dilakukan rehabilitasi *mangrove* seluas 438 Ha hingga 1000 Ha, serta dipertahankan luas tutupan

mangrove seluas 1522 Ha hingga 1900 Ha. Strategi ini diharapkan dalam jangka panjang dapat meminimalisir dan menurunkan emisi karbon di laut sebesar 254-447 ribu ton CO₂e pada tahun 2045.⁴¹ Pengembangan *Blue Economy* juga akan diarahkan pada upaya untuk mendorong pelaku non-pemerintah untuk melakukan aktivitas usaha yang menerapkan konsep *blue economy*.

5.4 Bali Terintegrasi

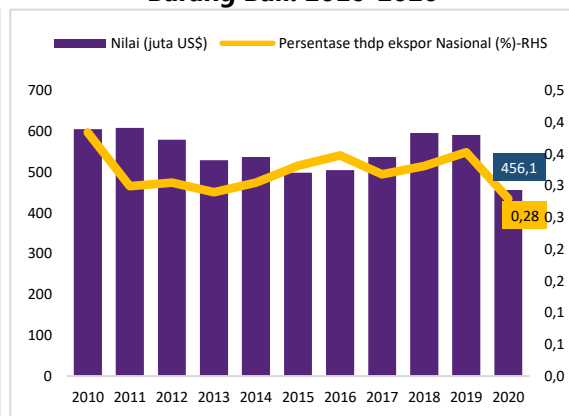
Nilai ekspor barang dari Bali dalam satu dekade terakhir tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana nilainya tidak lebih dari 0,5% total ekspor nasional (Gambar 5.13). Dilihat dari pelabuhan muatnya, pada tahun 2018, 53,3% ekspor Bali dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan sebesar 42,6% dilakukan melalui Bali yaitu melalui Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa (Grafik 5.12). Secara historis, ekspor barang Bali melalui Pelabuhan Tanjung Perak terus mengalami peningkatan. Tren yang sama juga terlihat pada data ekspor yang dilakukan melalui Bandara Ngurah Rai. Sedangkan ekspor melalui Pelabuhan Benoa terus mengalami penurunan. Produk Bali yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Perak adalah produk yang memiliki volume relatif besar (*bulky*) seperti produk kerajinan dari kayu dan produk dengan harga yang relatif murah.

Gambar 5. 12. Ekspor Provinsi Bali Berdasarkan Pelabuhan Muat (dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 5. 13. Perkembangan Ekspor Barang Bali: 2010-2020



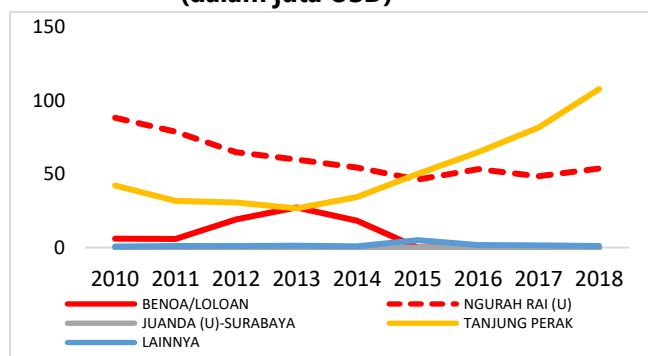
Produk perikanan dan produk kerajinan dari emas dan permata merupakan komoditas ekspor utama Bali dengan *share* masing-masing sebesar 26,8% dan 12,8%. Sebagian besar ekspor produk perikanan Bali dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak dibandingkan dengan di Pelabuhan Benoa. Sejak tahun 2016, ekspor produk perikanan dari Pelabuhan Benoa mengalami penurunan drastis dan hampir tidak ada ekspor yang dilakukan melalui Pelabuhan Benoa (Gambar 5.14). Hal ini disebabkan oleh biaya *handling* yang menjadi dua kali lipat apabila melakukan ekspor dari Pelabuhan Benoa serta jadwal pengangkutan barang yang masih terbatas—pengangkutan kapal sekali dalam seminggu. Sementara itu, ekspor melalui Bandara Ngurah Rai menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Beberapa komoditas yang diekspor melalui jalur udara antara lain produk perikanan, perhiasan/permata dan pakaian jadi. Barang-barang tersebut cenderung memiliki volume yang kecil namun memiliki harga yang relatif mahal.

Berdasarkan data ekspor 2018, Bandara Internasional Ngurah Rai merupakan pelabuhan ekspor terbesar ke-5 di Indonesia. Bandara Internasional Ngurah Rai juga merupakan salah satu bandara dengan jumlah penerbangan internasional terbanyak setelah Bandara Internasional Soekarno Hatta. Jumlah penerbangan internasional dari Ngurah Rai terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 jumlah kedatangan penerbangan internasional sebanyak 36.739 dengan jumlah keberangkatan internasional sebanyak 36.729 penerbangan, masing-masing meningkat sebesar 42,1%

⁴¹ Luas tutupan *mangrove* sebesar 1869-1900 Ha dan rasio luas *mangrove* terhadap luas tutupan lahan di Provinsi Bali sebesar 0,334-0,344% pada tahun 2045.

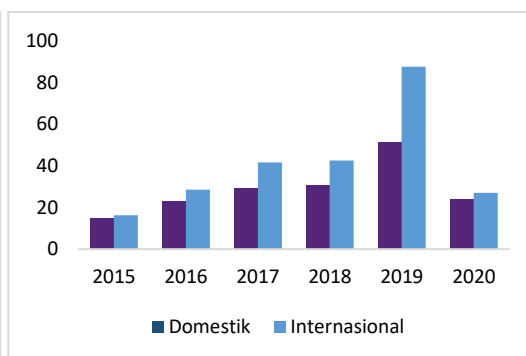
dan 41,8% dibandingkan dengan penerbangan pada tahun 2015. Selain itu, jumlah kargo melalui Bandara Internasional Ngurah Rai mengalami peningkatan sejak tahun 2015 dan tumbuh sebesar 106,4% pada tahun 2019 (Gambar 5.15). Pada tahun 2018, Bandara Internasional Ngurah Rai dapat melakukan ekspor ke 173 negara.

Gambar 5. 14. Perkembangan Ekspor Produk Perikanan (HS 03) Provinsi Bali Berdasarkan Pelabuhan Muat 2010-2018 (dalam juta USD)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 5. 15. Pergerakan Barang/Kargo Penerbangan Provinsi Bali Tahun 2015-2020 (ribu ton)



Selain melakukan ekspor barang yang berasal dari Bali, beberapa barang ekspor dari Bali merupakan barang dari wilayah lain seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kontribusi (*share*) barang ekspor dari wilayah lain terhadap total ekspor yang dilakukan di Bali sebesar 17,4%. Rincian barang ekspor yang berasal dari luar Bali dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 5.1).

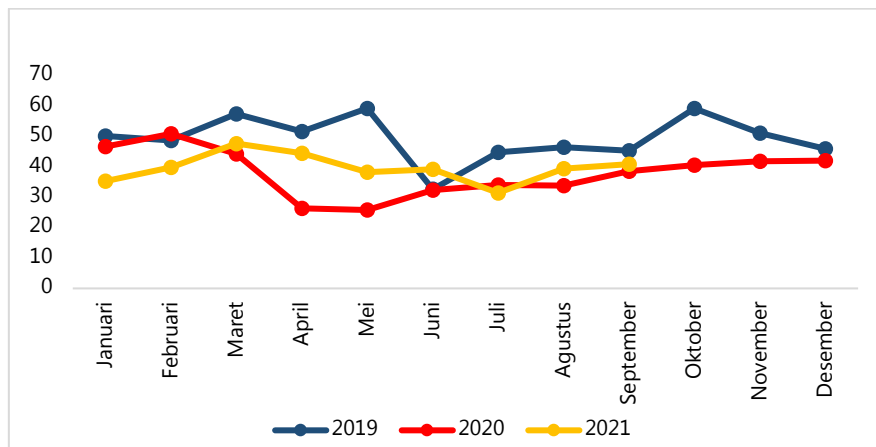
Tabel 5. 1. Ekspor Barang Melalui Provinsi Bali

Provinsi Asal	Share ekspor	
	2010	2018
Bali	82.6	82.6
Jawa Timur	15.4	10.4
NTB	1.7	1.8
Sulawesi Utara	-	1.0
NTT	0.0	0.5
Lainnya	0.3	3.7

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Kinerja ekspor Bali pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, di mana nilai ekspor Bali mengalami penurunan cukup signifikan dari USD590,8 juta atau 0,35% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2019 menjadi USD456.1 juta atau 0,28%. Kegiatan ekspor yang bergantung pada Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Internasional Ngurah Rai mengalami penurunan akibat adanya restriksi perjalanan internasional serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak awal pandemi di Indonesia. Ekspor Bali mengalami kontraksi pada bulan Maret hingga Mei 2020, namun kemudian menunjukkan perbaikan hingga akhir tahun 2020 (Gambar 5.16). Biaya pengiriman barang melalui jalur udara menjadi lebih tinggi sejak penerbangan internasional dari Bandara Internasional Ngurah Rai dihentikan. Akibatnya, biaya dan waktu pengantaran meningkat karena pengiriman barang harus melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Gambar 5. 16. Perkembangan Ekspor Bali per Bulan (dalam juta USD)




Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Bandara Internasional Ngurah Rai dapat menjadi hub logistik udara. Hal tersebut disebabkan Bandara Internasional Ngurah Rai: (i) memiliki jumlah penerbangan internasional yang lebih banyak dibandingkan dengan bandara internasional lainnya di wilayah timur; (ii) memiliki kapasitas bandara yang memungkinkan pesawat besar (*wide body*) untuk mendarat; (iii) memiliki kapasitas pengiriman barang yang berlebih akibat masih terbatasnya produk ekspor dari Bali, sehingga memungkinkan barang dari wilayah lain untuk dimuat dari Bali. Selain itu Bali memiliki potensi untuk mengambil pangsa pasar kargo internasional dari Singapura dan menjadi *hub* kargo udara atau *air transshipment cargo*. Hal ini didukung dengan penerbangan dari Australia/Selandia Baru menuju wilayah Asia Timur seperti Korea, Jepang dan Tiongkok serta ke wilayah Timur Tengah melalui (transit) Bali memiliki waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan dengan transit di Singapura. Berbeda dengan kegiatan ekspor/impor yang memerlukan *clearance* untuk pengeluaran dan pemeriksaan, kargo *transshipment* hanya singgah di bandara, untuk kemudian diberangkatkan kembali. *Transshipment* juga memberikan penciptaan nilai tambah seperti pelabelan, pengemasan, dan kustomisasi sesuai dengan permintaan dari negara tujuan yang dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian Bali.

Perkembangan *e-commerce* yang pesat dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan logistik udara. Berdasarkan data Bank Indonesia pada kuartal IV-2020, total transaksi melalui *e-commerce* di Bali meningkat sebesar 27,61% (qtq) atau 69,84% (yoy). Kebutuhan *e-commerce* terhadap pengiriman barang yang cepat dan aman hingga ke konsumen menyebabkan metode pengiriman melalui udara menjadi pilihan. Selama pandemi COVID-19, permintaan akan kargo udara tidak mengalami penurunan yang signifikan. Data dari 15 bandara PT Angkasa Pura I yang menunjukkan lalu lintas kargo udara tahun 2020 turun sebesar 9,38% menjadi 436.049 ton dari 481.180 ton di tahun 2019. Ke depan, kargo udara diproyeksikan akan terus tumbuh sejalan dengan peningkatan penjualan produk dari Bali baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Beberapa tantangan dan kendala yang perlu diperhatikan dalam pengembangan integrasi ekonomi Bali antara lain:

(1) **Konektivitas yang masih terbatas khususnya untuk konektivitas darat dan konektivitas laut terutama terkait dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.** Konektivitas antar wilayah di Bali masih belum merata dan fokus pada wilayah Bali Selatan. Kondisi beberapa jalan di Bali masih kurang ideal seperti jalan yang menghubungkan antara Bali Utara dan Selatan. Ruas jalan tersebut cenderung sempit dengan lebar bervariasi (maksimum 7 meter), berliku dan terdapat tikungan tajam serta tanjakan dengan tingkat kelandaian 8-12%. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan dan rawan kecelakaan. Sedangkan dari sisi konektivitas laut, Bali telah memiliki 3 pelabuhan utama yang menghubungkan Bali dengan provinsi lainnya yaitu Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang bai dan



Pelabuhan Celukan Bawang. Di samping itu, Bali juga memiliki beberapa pelabuhan lainnya yang perlu dioptimalkan untuk mendukung konektivitas Bali dengan Nusa Tenggara dan Jawa Timur.

(2) **Belum tersedianya bandara di Bali Utara sehingga pembangunan terfokus di Bali Selatan.** Ketersediaan moda transportasi untuk menghubungkan antara Bali Utara dan wilayah lainnya masih terbatas. Saat ini, moda transportasi selain angkutan darat yang tersedia adalah moda transportasi laut melalui pelabuhan Celukan Bawang. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi wilayah Bali Utara tertinggal dibandingkan dengan wilayah Bali Selatan. Tersedianya moda transportasi lain seperti bandara dapat mendorong konektivitas Bali Utara dengan wilayah lainnya dan dapat mendorong pembangunan Bali Utara.

(3) **Ketersediaan infrastruktur penunjang logistik terutama pergudangan belum memadai.** Berdasarkan data Angkasa Pura 1, Bandara Internasional Ngurah Rai memiliki kargo domestik dengan luas sebesar 3.192,7m² dan kargo internasional dengan luas 7.369,2m². Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki satu Kawasan khusus untuk pelayanan kargo yang disebut dengan *cargo village* yang memiliki luas sekitar 19 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa gudang kargo di Bandara Internasional Ngurah Rai masih belum mencukupi dan perlu diperluas untuk menunjang Bali sebagai *hub* logistik udara.

(4) **Ketersediaan lahan pembangunan infrastruktur terbatas.** Harga tanah yang tinggi menjadi salah satu penyebab terkendalanya proses pembangunan infrastruktur jalan di Bali. Beberapa pembangunan proyek infrastruktur pun terhambat proses pembangunannya akibat tidak tercapainya kesepakatan harga tanah.

Tujuan dari integrasi ekonomi Bali dalam jangka panjang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih pemeratakan pembangunan ekonomi, dan menjadikan Bali sebagai *hub* logistik udara. Hal ini juga mendukung upaya diversifikasi ekonomi Bali. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas darat maupun konektivitas laut antara Bali dan wilayah lainnya, terutama Bali dengan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, sasaran integrasi ekonomi Bali dalam jangka menengah adalah tersedianya infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang efisien mendukung perdagangan antara Bali dengan Kawasan Timur Indonesia dan Bali dengan negara mitra dagang utama.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran integrasi ekonomi Bali adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Konektivitas. Pembangunan infrastruktur Bali akan difokuskan untuk meningkatkan efisiensi logistik Bali melalui pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara. Konektivitas dengan struktur yang efisien, handal dan terintegrasi dapat mendukung sistem logistik dan meningkatkan daya saing Bali. Konektivitas antar wilayah di Bali akan fokus pada pengembangan akses darat antar wilayah di Bali dan pengembangan *urban mobility plan* (pengembangan LRT, BRT). Peningkatan konektivitas laut akan dikembangkan dengan pembangunan dan revitalisasi pelabuhan yang menghubungkan Bali dengan wilayah Nusa Tenggara dan Jawa Timur seperti Pelabuhan Padang Bai dan Pelabuhan Gilimanuk.

Pengembangan Bali sebagai *Hub* Logistik Udara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pembangunan terminal kargo, peningkatan kapasitas gudang kargo, dan percepatan implementasi e-logistik Nasional (INALOG). Di samping itu, peningkatan pangsa pasar dan produk potensial ekspor dari wilayah Bali perlu dilakukan untuk mendorong ekspor Bali. Terakhir, pengembangan kerjasama internasional juga perlu dilakukan, terutama dengan mitra dagang utama.

Integrasi Ekonomi Bali - Nusa Tenggara (Nusra) - Jawa Timur (khususnya bagian timur). Nusa Tenggara dan Jawa Timur merupakan wilayah terdekat dengan Bali dan merupakan mitra dagang terbesar Bali. Peningkatan daya saing dan kerjasama wilayah tersebut diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian ekonomi masing-masing wilayah melalui: (i) Perluasan cakupan kerjasama

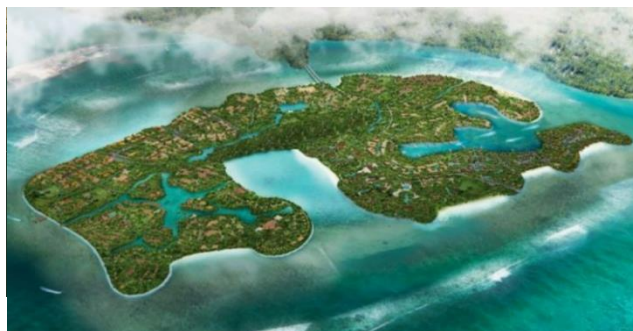
antara Bali-Nusra-Jawa Timur ke produk yang memiliki potensi ekspor tinggi; dan (ii) Pembentukan kelembagaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) seperti Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD/BKSAD), Sekretariat Bersama (Sekber), atau *Regional Management* (RM).

Pengembangan Skema Inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur (khususnya konektivitas). Untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur diperlukan dukungan pembiayaan infrastruktur yang besar. Namun, anggaran pemerintah sangat terbatas untuk dapat membiayai semua proyek pembangunan infrastruktur. PAD Provinsi Bali pun masih terbatas. Oleh karena itu, strategi pembiayaan infrastruktur diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur yang bersifat komersial. Alternatif skema pembiayaan dapat dilakukan dengan dua acara. Pertama, mendorong penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kemitraan pemerintah dengan sektor swasta ditingkatkan untuk membangun infrastruktur melalui beberapa skema seperti *Build, Operate, and Transfer* (BOT), *Build, Operate, and Lease* (BOL), dan *Build, Operate, and Own* (BOO). Kedua, investasi murni sektor swasta atau *Private Financing Initiative* (PFI). Sektor swasta melakukan investasi penuh tanpa dukungan pemerintah untuk proyek yang secara ekonomi dan finansial layak atau *full-cost recovery*.

Box 5.2 Pengembangan Kawasan Unggulan di Bali

Pengembangan Kawasan unggulan ini akan menjadi penggerak transformasi ekonomi Bali yaitu Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera sekaligus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Bali masa depan.

Kawasan Industri Candikusuma di Kab. Jembrana



Pembangunan Kawasan Industri Candikusuma dengan total luas area 108 Ha akan dipergunakan untuk industri motor listrik. Pengembangan kawasan ini telah diatur dalam Perda No. 3 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dan Perda No. 8 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali tahun 2020-2040. Pemerintah provinsi Bali telah

mengalihkan status tanah dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan. Rencana pembangunan mencakup pembebasan lahan, studi kelayakan, AMDAL, pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana, dan prasarana akan dilakukan hingga tahun 2025 sedangkan pengembangan cluster industri akan dilakukan hingga tahun 2045. Manfaat dari pengembangan Kawasan Industri Candikusuma antara lain: (i) menciptakan sekitar 10.000 lapangan pekerjaan; (ii) meningkatkan PDB sektor industri; (iii) meningkatkan pendapatan daerah; (iv) menciptakan kluster pembangkit ekonomi baru selain pariwisata dan pertanian dalam arti luas; dan (v) menumbuhkan iklim investasi.

Kura-Kura Island di Kota Denpasar

Pulau Serangan atau yang dikenal sebagai Pulau Kura-Kura adalah sebuah pulau yang berlokasi sangat strategis yang dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terpadu di Pulau Bali. Pulau ini hanya berjarak 15 menit dari Ngurah Rai International Airport, melalui jembatan yang terhubung dengan *main island* Bali.

Proyek pengembangan kawasan wisata Pulau Serangan dilaksanakan oleh PT BTID (*Bali Turtle Island Development*). Sebagai pengembang, PT BTID mengembangkan pulau menjadi kawasan pariwisata dengan berlandaskan Tri Hita Karana untuk menjadi "*The Happiness Island*". Pengembangan

kawasan ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama saat ini dihuni oleh masyarakat di mana di dalamnya terdapat Pura Sakenan sebagai salah satu pura utama di Bali, serta masjid pertama di Bali sehingga memiliki potensi pengembangan warisan budaya. Bagian kedua adalah kawasan seluas 500 Ha yang saat ini sedang dalam tahap penataan lahan. Kawasan seluas 500 Ha ini akan dikembangkan untuk *eco-tourism*, *edu-tourism*, *medical-tourism*, dan *techno-tourism* dengan mengutamakan jalur non kendaraan bermotor, area hijau, penggunaan energi terbarukan, dan pengolahan limbah yang efektif. Sebagai salah satu pendukung konsep pariwisata berkelanjutan, kawasan Kura-Kura *Island* ini disiapkan untuk menjadi *showcase* pengembangan Bali *Smart Island*.

Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung

Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) telah dimulai pada tahun 2020, dengan tahapan pembebasan lahan, normalisasi Tukad Unda melalui bantuan Kementerian PUPR, serta dilakukannya pematangan lahan dan pembangunan Waduk Muara Unda. Pembangunan kawasan juga dirancang untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor dan banjir aliran lahar. Lokasi lahan dengan memanfaatkan hamparan eks Galian C Gunaksa seluas 334 Ha. Konsep Sad Kerthi dalam *Masterplan* pembangunan PKB antara lain Wana Kerthi (Taman Hutan Raya dan taman rekreasi), Danau Kerthi (Danau Estuary Dam), Jagad Kerthi (panggung terbuka dan pertunjukan lainnya), Jana Kerthi (Pusat Kebudayaan Bali, area pendukung, apartemen dan hotel), Atma Kerthi (Catus Patha) dan Segara Kerthi (laut dan marina). Diperkirakan pembangunan PKB dapat menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja masyarakat lokal Bali.



Pengembangan Kawasan Wisata Medis di Sanur

Sebagai salah satu upaya transformasi ekonomi Bali, pemerintah Provinsi Bali telah menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi Bali. Selanjutnya kebutuhan penduduk Indonesia yang tinggi akan perawatan

kesehatan di luar negeri serta meningkatnya dalam satu decade terakhir wisata kesehatan dari negara-negara maju ke negara-negara sekitar Indonesia seperti India, Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wisata kesehatan dengan standar internasional di Bali. Berdasarkan studi dari Deloitte pada tahun 2019, lebih dari 2 juta pasien WNI berobat ke luar negeri dan mengeluarkan dana kurang lebih USD6 miliar per tahun. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian BUMN Bersama dengan PT Hotel Indonesia Natour (HIN) (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (PPI) (Persero) akan mengembangkan KEK Pariwisata Kesehatan di Sanur (seluas 41,3 Ha) sebagai pusat wisata kesehatan berkelas internasional dan Kawasan *resort* kelas dunia. Secara global, area Sanur sudah terkenal bagi pengunjung lansia terutama yang berasal dari Eropa. Selain itu, peluang bisnis terkait *wellness hospitality* di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya wisatawan asing yang masuk ke Indonesia.

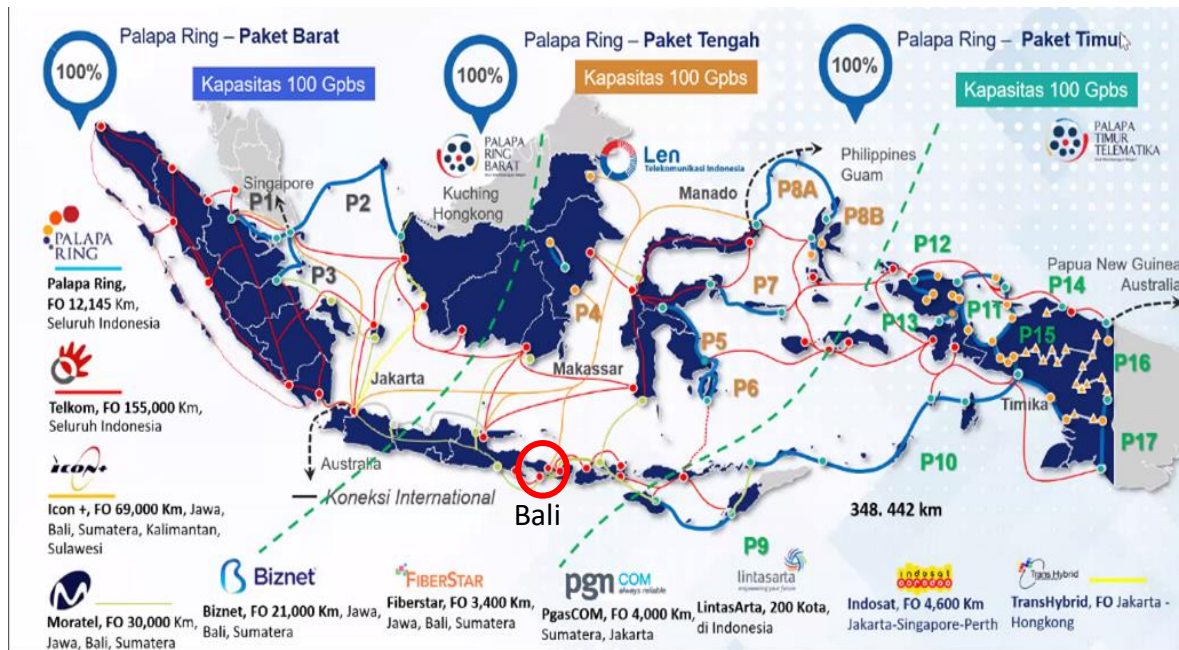
Pengembangan KEK tersebut berpotensi membangkitkan kembali pariwisata Bali dengan cepat, meningkatkan investasi di bidang kesehatan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk Bali di sekitar Sanur. Sejalan dengan inisiasi pembangunan KEK Kesehatan, beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (i) penyederhanaan regulasi untuk tenaga kerja medis; (ii) penguatan ekosistem wisata medis di Indonesia; (iii) kemudahan pendanaan wisata medis; dan (iv) pengadaan lahan untuk wisata medis.

Sumber: Bappenas (2021)

5.5 Bali Smart Island

Pengembangan digitalisasi berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur dan respon masyarakat terhadap proses digitalisasi. Kesiapan Provinsi Bali menuju era digital sudah terlihat dari kesiapan infrastruktur yang tersedia di Bali saat ini dalam mendukung proses transformasi digital. Berdasarkan kondisi saat ini *Fiber Optic Backbone*, Bali telah terhubung dengan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Gambar 5.17).

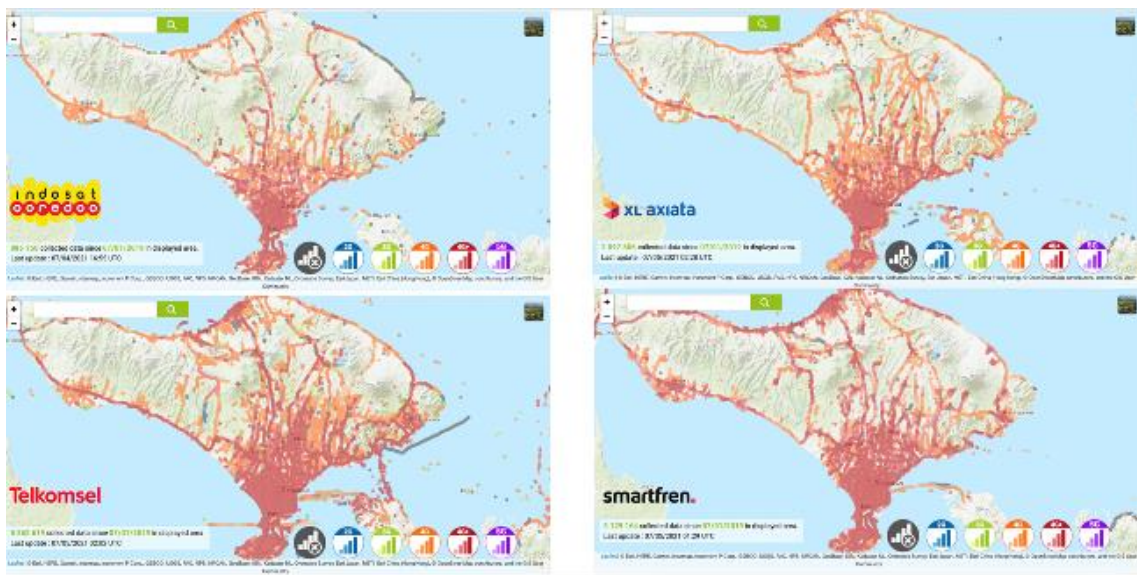
Gambar 5. 17. Palapa Ring Indonesia



Sumber: BAKTI Kemkominfo (2021)

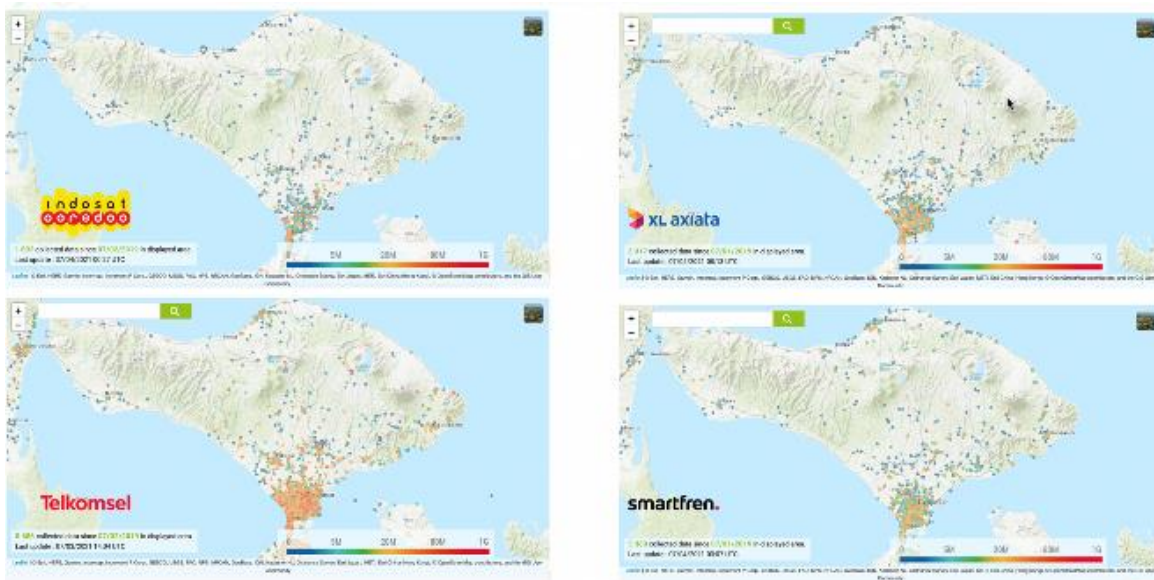
Jaringan internet di Bali sudah baik tetapi belum tercakup 100% dan kualitas koneksi jaringan masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 infrastruktur telekomunikasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) telah tersebar di 540 desa/kelurahan atau sekitar 73,5% dari total desa/kelurahan di Provinsi Bali. Dari 540 desa/kelurahan tersebut, sebanyak 529 desa/kelurahan memiliki sinyal kuat. Hampir 100% desa/kelurahan yang ada di Provinsi Bali telah mendapatkan sinyal 3G dan 4G. Namun, cakupan layanan operator seluler di Provinsi Bali masih terkonsentrasi di wilayah Bali bagian selatan (Gambar 5.18). Sebagai contoh, hampir seluruh desa/kelurahan di kabupaten Gianyar, Badung dan Kota Denpasar memiliki cakupan layanan operator seluler, diukur dari persebaran menara BTS, namun menara BTS baru ada di sekitar 60% desa/kelurahan di kabupaten Bangli dan Tabanan. Kecepatan transfer data pada daerah pedesaan juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan dan masih terkonsentrasi di wilayah selatan (Gambar 5.20). Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya digitalisasi Provinsi Bali.

Gambar 5. 18. Cakupan layanan operator seluler Provinsi Bali



Sumber: nperf.com

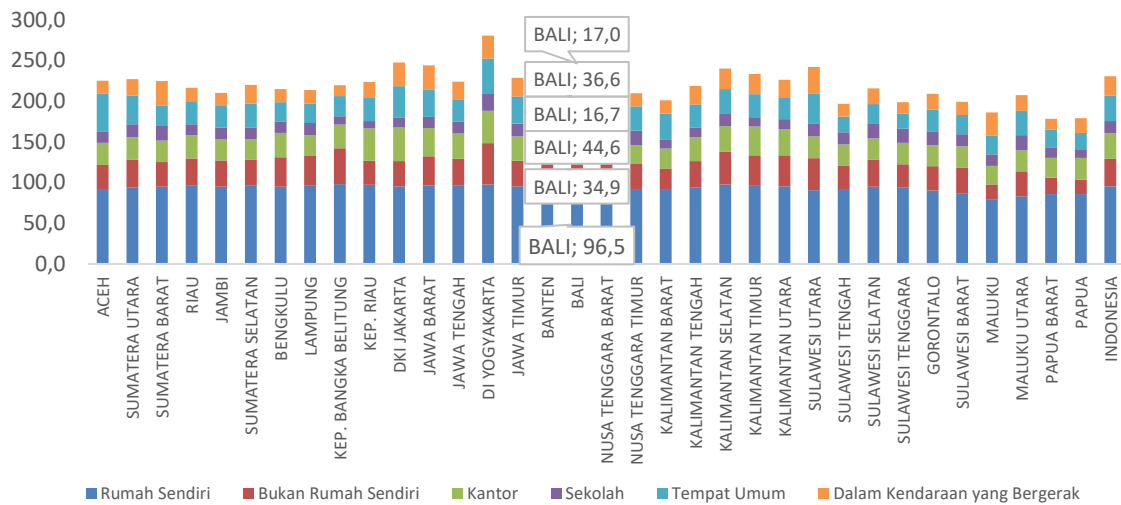
Gambar 5. 19. Bitrates map provinsi Bali



Sumber: nperf.com

Meskipun jaringan infrastruktur sudah baik, akses masyarakat Bali terhadap layanan digital/internet masih relatif kurang. Berdasarkan data BPS, sebesar 80% rumah tangga pernah mengakses internet pada tahun 2019. Namun, jika dilihat berdasarkan individu, 46% penduduk usia 5 tahun ke atas belum pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan lokasi, aksesibilitas internet penduduk yang berusia 5 tahun ke atas masih dilakukan di rumah sendiri sebesar 96% penduduk. Lokasi lain seperti kantor, sekolah, tempat umum dan kendaraan yang bergerak masih relatif kecil (Gambar 5.20). Untuk upaya pemerataan, aksesibilitas masyarakat terhadap aktivitas *mobile*/internet perlu menjadi perhatian khusus. Data BPS pada tahun 2020 menunjukkan baru sekitar 30% penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet di Kabupaten Bangli, Karangasem dan Jembrana. Sedangkan di Kota Denpasar sudah mencapai 74%. Kondisi ini akan menjadi tantangan dalam proses transformasi digital Bali karena proses digitalisasi satu daerah akan berkaitan dengan daerah lainnya.

Gambar 5. 20. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan lokasi

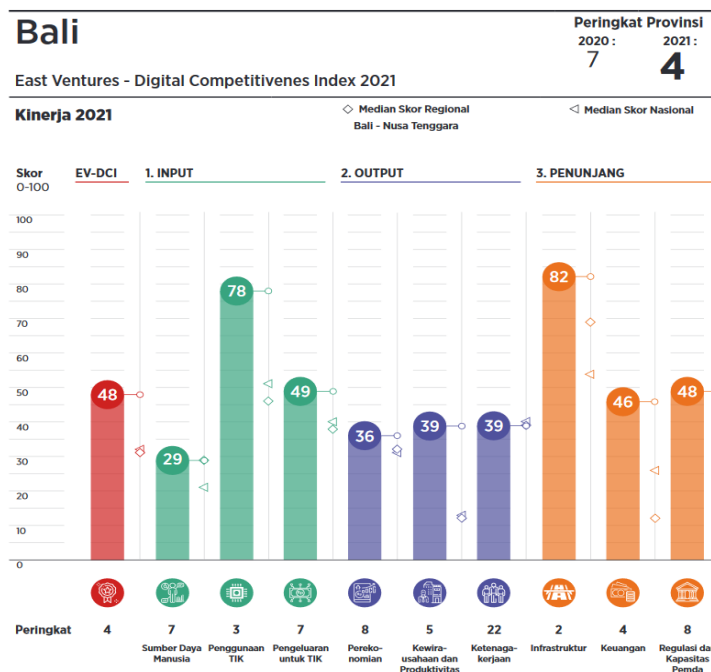


Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Namun, secara keseluruhan digitalisasi Provinsi Bali menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Berdasarkan *East Ventures-digital Competitiveness Index 2021* Provinsi Bali menunjukkan peningkatan skor indeks tertinggi, bahkan berhasil mengungguli peringkat beberapa provinsi di Pulau Jawa. Bali berada di peringkat keempat dengan skor indeks sebesar 47,7 atau naik tiga peringkat dari posisi ketujuh dengan skor 40,6 pada tahun 2020 (Gambar 5.21). Pilar infrastruktur digital di Provinsi Bali memiliki skor tertinggi kedua di level nasional, yaitu sebesar 82,42. Tingginya skor tersebut didukung oleh tingginya proporsi desa yang sudah mendapatkan sinyal 3G dan 4G.

Gambar 5. 21. East Ventures digital competitiveness index Provinsi Bali



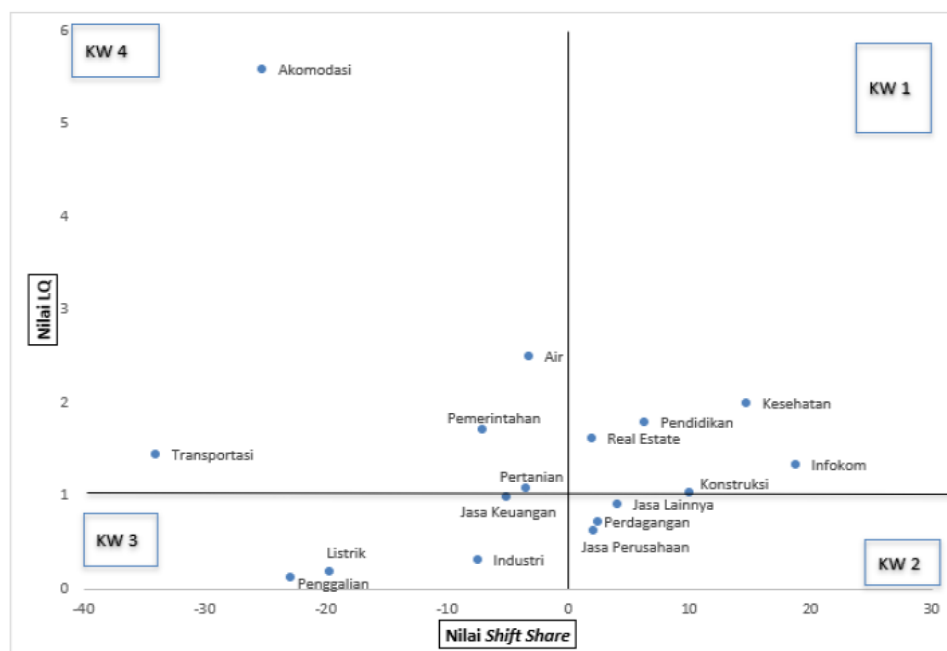
Sumber: East Ventures digital competitiveness index (2021)

Sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif selama pandemi COVID-19 baik di tingkat nasional maupun di Bali. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,96% dan 5% pada triwulan

1 2020 dan 2021. Sektor informasi dan komunikasi berperan penting dalam pengembangan digitalisasi di Provinsi Bali. Berdasarkan pemetaan analisis *shift share* dan *Location Quotient* (LQ), sektor informasi dan komunikasi menduduki kuadran 1 yang artinya sektor tersebut merupakan sektor yang dominan dan harus mendapat prioritas (Gambar 5.22). Hasil analisis tersebut juga didukung oleh hasil analisis I-O 2016 yang menunjukkan nilai *backward* dan *forward linkages* sektor informasi dan komunikasi lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa industri jasa informasi dan komunikasi memiliki daya tarik yang kuat terhadap industri hulu dan memiliki daya dorong yang kuat terhadap industri hilir.


Selama pandemi COVID-19 juga terjadi peningkatan konsumsi melalui perdagangan daring (*e-commerce*). Hal ini mendorong dunia usaha melakukan proses digitalisasi baik dalam pengembangan bisnis seperti *startup*, juga dalam proses pemasaran dan promosi secara daring oleh pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Saat ini Bali telah memiliki *startup* yang mayoritas bergerak di sektor *e-commerce*. Dari 32 *startup* yang ada di Bali, 7 *startup* bergerak di bidang *e-commerce*. Bahkan terjadi peningkatan pergeseran 32.014 usaha *onboarding* ke *e-commerce* selama Januari-Mei tahun 2020. Sejalan dengan kondisi tersebut, data Bank Indonesia menunjukkan peningkatan transaksi *e-commerce* pada triwulan IV 2020 sebesar 26,61% (qtq) atau sebesar 69,84% (yoy). Transaksi *e-commerce* didominasi oleh transaksi non tunai dengan proporsi paling besar yakni menggunakan metode transfer bank sebanyak 38,58% dan *e-money* sebesar 23,60%. Sisi pemasaran dan promosi produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif melalui media daring ini memiliki dampak yang besar terhadap produktivitas, efisiensi, perluasan pasar, serta penguatan kelembagaan.

Gambar 5. 22. Matriks analisis shift share dan LQ



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital ini tidak terlepas dari kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Kondisi di lapangan menunjukkan masih terbatasnya SDM yang adaptif dan handal terhadap perkembangan digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Tempat dan fasilitas untuk mengembangkan keterampilan digital masih relatif terbatas dan minat terhadap jurusan teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sedikit, sehingga SDM belum responsif dalam menghadapi era digital. Di sisi lain struktur penduduk Bali sangat potensial dan dapat menjadi salah satu modal transformasi digital ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan proporsi usia produktif di Bali: proporsi generasi X sebesar 24,50%, generasi milenial sebesar 23,20%, dan generasi Z sebesar 26,10% dari total populasi. Struktur



demografi ini dapat menjadi peluang untuk mempercepat dan memperlancar adopsi teknologi menuju transformasi digital.

COVID-19 ini bisa dijadikan momentum bagi Bali untuk melakukan transformasi digital. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh OECD (2019) yang berfokus pada adopsi teknologi digital pada sektor-sektor yang memiliki potensi. Studi tersebut menunjukkan intensitas digital yang tinggi akan terjadi pada sektor-sektor seperti telekomunikasi, layanan administrasi, periklanan, perdagangan besar dan eceran, seni, hiburan dan rekreasi. Potensi sektoral ini akan mampu mendorong ekosistem inovasi yang mendukung *local champion* dan revolusi 4.0 di Provinsi Bali.

Arah menuju transformasi digital telah didorong oleh pemerintah pusat saat ini melalui berbagai program nasional dalam rangka peningkatan literasi dan kemampuan digital, diantaranya: (i) Gerakan Nasional Literasi Digital; (ii) program *Digital Talent Scholarship*; dan (iii) *Digital Leadership Academy*. Di samping itu, dalam memperkuat daya saing UMKM melalui digitalisasi, pemerintah pusat juga tengah menjalankan beberapa program/kegiatan pengembangan literasi dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM, diantaranya: (i) *UMKM Go Online*; (ii) pelatihan untuk bergabung ke dalam komunitas *e-commerce*; (iii) fasilitas kerjasama pengembangan ekonomi digital di desa; dan (iv) program desa digital.


Di samping itu pemerintah daerah Provinsi Bali dengan bantuan Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Hal ini sejalan dengan keputusan Gubernur Bali Nomor 346/04-E/HK/2021 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pemerintah Provinsi Bali. Pembentukan P2DD merupakan salah satu transformasi struktural yang memanfaatkan momentum disrupsi teknologi saat pandemi COVID-19. Bahkan ekspansi layanan elektronifikasi telah didorong di beberapa sektor usaha yang ada di Bali. Berdasarkan Surat Edaran 3355 tahun 2020 perihal Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, terdapat upaya optimalisasi aktivitas pembayaran nontunai pada 14 sektor usaha.

Tujuan transformasi digital Bali dalam jangka panjang adalah mewujudkan *Bali Smart Island* yaitu dengan memanfaatkan ekosistem digital dalam mendukung pengembangan model bisnis, penciptaan inovasi dan peningkatan konektivitas berbasis teknologi digital pada aktivitas pariwisata, dunia usaha, pelayanan publik dan aktivitas strategis lainnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Untuk itu, Bali diharapkan dapat membangun konsep *smart island* melalui sistem yang terintegrasi dengan komponen kunci yakni: (i) *Smart governance and smart resource management*; (ii) *Smart economy*; (iii) *Smart mobility*; (iv) *Smart environment*; (v) *Smart living and safe islands*; (vi) *smart people*. Dengan demikian tercipta pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berkualitas dengan keunggulan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, mobilitas, energi, lingkungan, sumber daya manusia dan keunggulan dalam tata kelola. Kondisi tersebut akan tercapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam pemanfaatan teknologi digital dan daya dukung infrastruktur digital yang memadai, sehingga memberikan peluang dan aksesibilitas seluas-luasnya bagi seluruh komponen masyarakat untuk mengakselerasi proses digitalisasi di seluruh aktivitas yang dijalankan.

Sementara itu, sasaran transformasi digital Bali yang akan dicapai pada jangka menengah adalah terbentuknya budaya digital yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di setiap aktivitas sektoral, meningkatnya jumlah *startup*, UMKM, dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi digital dalam model bisnis, dan meningkatnya pelayanan pariwisata dan publik lainnya berbasis digital.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran Bali *Smart Island* adalah sebagai berikut:

Peningkatan Literasi Digital dan Kompetensi SDM. Transformasi digital provinsi Bali diarahkan untuk peningkatan literasi digital masyarakat dan memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Ketersediaan SDM yang berkualitas secara memadai merupakan komponen terpenting dalam pengembangan digital. Strategi yang dapat



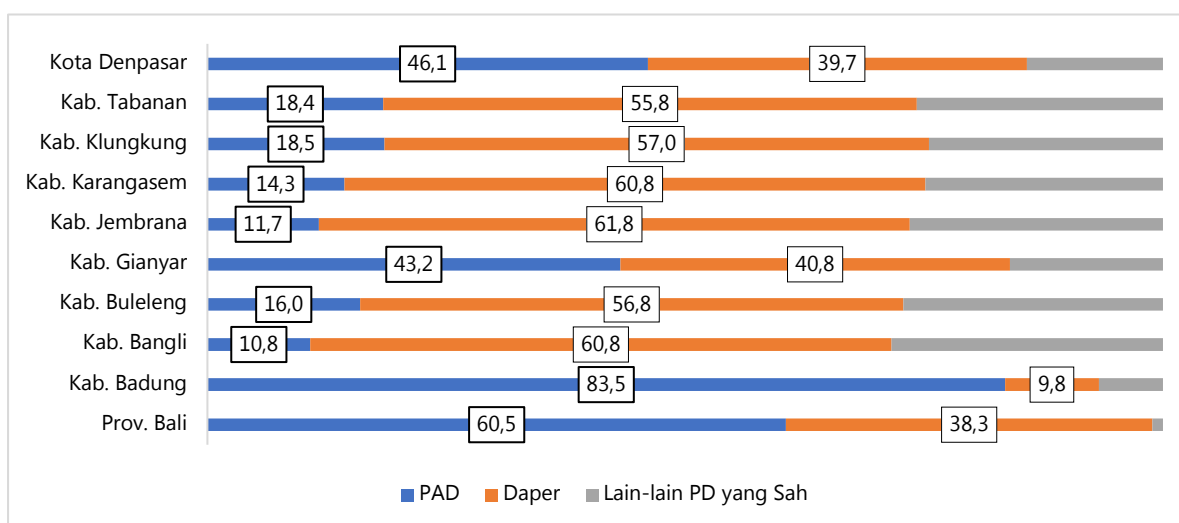
dilaksanakan adalah: (i) memperkuat literasi digital di berbagai jenjang pendidikan; (ii) memperkuat pelatihan digital bagi masyarakat; (iii) memperkuat *digitalisation campaign* dan membangun program pengembangan talenta-talenta muda di bidang digital dan teknologi.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Digital. Dalam mendukung pemanfaatan digital di berbagai bidang, infrastruktur digital harus dipastikan untuk dapat menunjang dan mendukung seluruh aktivitas digital di Bali. Strategi yang dapat dijalankan antara lain adalah: (i) adaptasi pembangunan digital sesuai dengan perkembangan teknologi, mis: saat ini diperlukan perluasan pembangunan menara BTS (4G dan 5G); (ii) perluasan dan perbaikan kualitas akses layanan internet di lingkungan sekolah negeri, kantor pemerintahan, perkantoran, dan layanan publik kesehatan (RS/Puskesmas) serta seluruh desa/kelurahan.

Penguatan Praktik Digital pada Dunia Usaha dan Pelayanan Publik. Peningkatan daya saing pemasaran pariwisata, produk UMKM dan ekraf dapat dicapai melalui beberapa strategi berikut: (i) platform digital pemasaran pariwisata Bali yang terintegrasi dengan sektor transportasi dan akomodasi; (ii) memperkuat literasi digital bagi UMKM; (iii) memperluas kerjasama UMKM dengan perusahaan *e-commerce*; (iv) meningkatkan promosi dan memperluas transaksi produk UMKM dan ekraf melalui katalog digital/virtual; (v) memperkuat akses UMKM dan ekraf terhadap platform digital; (vi) memperkuat inkubator dan ekosistem digital bagi UMKM dan ekraf; dan (vii) memperkuat aspek permodalan bagi UMKM dan pelaku ekraf untuk menjadi *startup* (usaha rintisan). Disamping itu penyelarasan tujuan dari transformasi digital dengan sasaran prioritas pemerintah daerah secara keseluruhan menjadi penting untuk memasukan sistem digital dalam aktivitas lingkup pelayanan publikl melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Strategi untuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah dapat dilakukan melalui: (i) penguatan tata kelola terkait dengan integrasi sistem aplikasi dan penggunaan aplikasi umum berbagai pakai; dan (ii) peningkatan pelayanan administrasi dan publik berbasis elektronik (*e-services*) yang terintegrasi. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Di samping itu digitalisasi pemerintahan daerah juga dapat dilakukan dengan memperluas cakupan penerapan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di berbagai sektor. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah serta mendorong efektivitas pengelolaan dana pemerintah daerah dengan mengedepankan transparansi dan *good governance*.

Destinasi *Startup* Global. *Startup* sebagai faktor kunci dalam ekonomi lokal karena kemampuan pertumbuhannya untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Potensi pertumbuhannya yang tinggi dan dampaknya terhadap ekonomi lokal, maka penting bagi sektor publik dan swasta untuk mendukung internasionalisasi *startup* serta mendorong Bali menciptakan ekosistem yang baik untuk masuknya *startup* global ke Bali. Dalam upaya menjadikan Bali sebagai destinasi *startup* Global, strategi yang dapat dijalankan antara lain adalah; (i) Penguatan ekosistem digital yang mendukung penciptaan inovasi (misal : *coworking space*, *creative hub*, komunitas *startup*, dll); (ii) Penguatan aktivitas mentoring dan inkubasi usaha rintisan untuk memfasilitasi pengembangan ide usaha; (iii) Partisipasi dan penguatan acara kompetisi pemrograman, kompetisi ide usaha rintisan/*startup pitching* serta acara pengembangan *startup* lainnya yang berskala global; (iv) dukungan komunitas *startup* lokal untuk berkolaborasi dengan jaringan *startup* internasional dalam upaya memperkuat inovasi yang diciptakan; (v) membangun *Interlinkage startup* dengan mitra (pengembang) melalui proyek-proyek berbasis teknologi; dan (vi) Peningkatan kemudahan memulai usaha dan perizinan tenaga kerja.

Gambar 5. 23. Struktur Pendapatan dalam APBD 2019



Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah)

Pada sisi belanja APBD Provinsi Bali, selama ini belanja pegawai serta belanja barang dan jasa selalu mendapatkan proporsi yang besar. Di tahun 2019 total belanja pemerintah Bali mencapai Rp 6,52 triliun dengan komposisi belanja pegawai mencapai 24,5%, belanja barang dan jasa mencapai 19,3%, belanja modal 8,5%, dan sisanya sebesar 47,7%.⁴² Akibatnya belanja modal selalu memiliki porsi terkecil berkisar 7,0 – 8,0%, yang menunjukkan kapasitas investasi pemerintah daerah Bali perlu ditingkatkan. Pengelolaan belanja daerah juga belum optimal tercermin dari tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp 830 miliar (Tabel 5.2). Belanja modal sebagai bentuk investasi pemerintah dalam pembangunan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan belanja modal dilakukan untuk menambah aset milik daerah dan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya PAD.

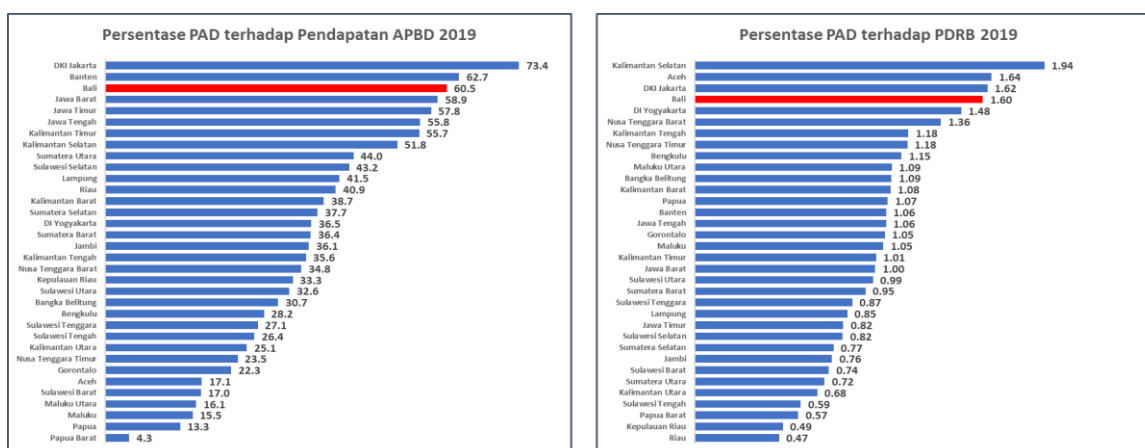
Tabel 5. 2. APBD Pemerintah Provinsi Bali 2018-2020

Uraian	2018			2019			2020		
	APBD	Realisasi	% Real	APBD	Realisasi	% Real	APBD	Realisasi	% Real
Pendapatan Daerah	5,98	6,26	104,7%	6,32	6,65	105,1%	6,61	5,72	86,6%
Pendapatan Asli Daerah	3,35	3,72	111,1%	3,59	4,02	112,1%	3,76	3,07	81,6%
Pajak Daerah	2,97	3,23	108,8%	3,07	3,46	112,9%	3,26	2,61	79,9%
Retribusi Daerah	0,05	0,04	87,2%	0,05	0,03	68,0%	0,05	0,02	38,6%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,14	0,17	122,4%	0,17	0,17	100,1%	0,17	0,18	106,7%
Lain-lain PAD yang Sah	0,19	0,28	143,2%	0,30	0,25	85,4%	0,28	0,27	94,0%
Dana Perimbangan	2,59	2,49	96,4%	2,66	2,55	95,7%	2,79	2,56	92,0%
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,05	0,05	101,1%	0,07	0,07	100,7%	0,06	0,08	150,3%
Belanja Daerah	6,66	6,00	90,0%	6,83	6,52	95,4%	7,28	6,36	87,3%
Belanja Pegawai	1,72	1,59	92,3%	1,75	1,59	91,0%	1,74	1,60	91,9%
Belanja Barang dan jasa	1,23	1,04	84,7%	1,33	1,26	94,9%	1,90	1,60	84,3%
Belanja Modal	0,68	0,44	64,6%	0,78	0,56	70,9%	0,86	0,46	53,0%
Belanja Lainnya	3,03	2,92	96,6%	2,97	3,11	104,7%	2,78	2,70	97,2%
Surplus/Defisit	-0,68	0,26	-38,2%	-0,51	0,13	-24,9%	-0,68	-0,64	94,8%
Pembiayaan Daerah	0,68	0,44	64,6%	0,51	0,70	138,0%	0,68	0,83	123,3%
Penerimaan Pembiayaan	0,68	0,44	64,7%	0,51	0,70	138,0%	0,76	0,83	110,3%
SILPA tahun sebelumnya	0,68	0,40	59,2%	0,51	0,70	137,5%	0,76	0,83	110,2%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,0	0,70		0,0	0,83		0,0	0,19	
Rasio PAD terhadap Belanja APBD (%)	50,2%	62,0%			61,7%			48,3%	
Komposisi Belanja APBD, a.l.									
Belanja Pegawai (%)	25,9%	26,5%		25,6%	24,5%		23,9%	25,1%	
Belanja Barang dan Jasa (%)	18,5%	17,4%		19,4%	19,3%		26,1%	25,2%	
Belanja Modal (%)	10,2%	7,3%		11,5%	8,5%		11,9%	7,2%	
Belanja Lainnya (%)	45,4%	48,7%		43,4%	47,7%		38,2%	42,5%	

Sumber: DJPK Kemenkeu, Realisasi (Bappeda Provinsi Bali, berdasarkan data Diskusi FGD Kemandirian Fiskal dan Perekonomian Daerah Provinsi Bali, 15 Juni 2021)

⁴² Belanja daerah sebesar 47,7% berupa belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lainnya, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

Gambar 5. 24. Persentase PAD Pemerintah Provinsi Bali terhadap APBD dan PDRB



Sumber: Kemenkeu, BPS (diolah)

Di tingkat kabupaten/kota, pandemi COVID-19 berdampak pada penerimaan dan belanja APBD. Penerimaan APBD kabupaten/kota secara kumulatif menurun sebesar 6,2% (yoy) di mana penurunan PAD cenderung paling signifikan yaitu sebesar 22,8% (yoy) (Tabel 5.5). Sementara itu, Belanja APBD kabupaten/kota menurun sebesar 6,8% (yoy), terutama belanja modal yang turun signifikan sebesar 26,9% (yoy) (Tabel 5.3).

Tabel 5. 3. Penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali

Daerah Tingkat II	Realisasi Gabungan Kab/Kota 2019 (Rp Triliun)				Realisasi Gabungan Kab/Kota 2020 (Rp Triliun)				Growth Realisasi Gabungan Kab/Kota 2020 (%)				Pangsa 2020
	PAD	Daper	Lainnya yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Daper	Lainnya yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Daper	Lainnya yang Sah	Total Pendapatan	
Kota Denpasar	1,01	0,87	0,31	2,20	0,73	0,83	0,40	1,96	-27,65%	-4,78%	29,30%	-10,46%	12,34%
Tabanan	0,36	1,07	0,50	1,93	0,31	1,37	0,11	1,79	-11,71%	27,04%	-77,84%	-7,11%	11,24%
Klungkung	0,23	0,69	0,29	1,22	0,22	0,64	0,25	1,11	-1,68%	-7,86%	-17,49%	-9,07%	6,94%
Karangasem	0,23	0,99	0,40	1,63	0,22	0,92	0,34	1,48	-5,94%	-7,04%	-14,95%	-8,85%	9,30%
Gianyar	1,00	0,94	0,37	2,31	0,55	0,86	0,41	1,82	-45,28%	-8,19%	11,93%	-20,99%	11,46%
Badung	2,54	0,39	0,16	3,09	2,04	0,48	1,18	3,70	-19,72%	22,32%	640,58%	19,66%	23,23%
Buleleng	0,36	1,30	0,62	2,28	0,32	1,18	0,51	2,00	-12,85%	-9,46%	-18,58%	-12,48%	12,58%
Bangli	0,13	0,72	0,34	1,18	0,09	0,76	0,11	0,96	-29,78%	5,71%	-66,27%	-18,56%	6,04%
Jembrana	0,13	0,71	0,30	1,15	0,15	0,63	0,31	1,09	10,73%	-10,82%	2,28%	-4,83%	6,85%
Total	5,99	7,69	3,30	16,97	4,63	7,66	3,63	15,92	-22,74%	-0,31%	9,93%	-6,23%	100,00%

Sumber: BPKAD Prov. Bali dalam Laporan Perekonomian Bali oleh Bank Indonesia, 2021

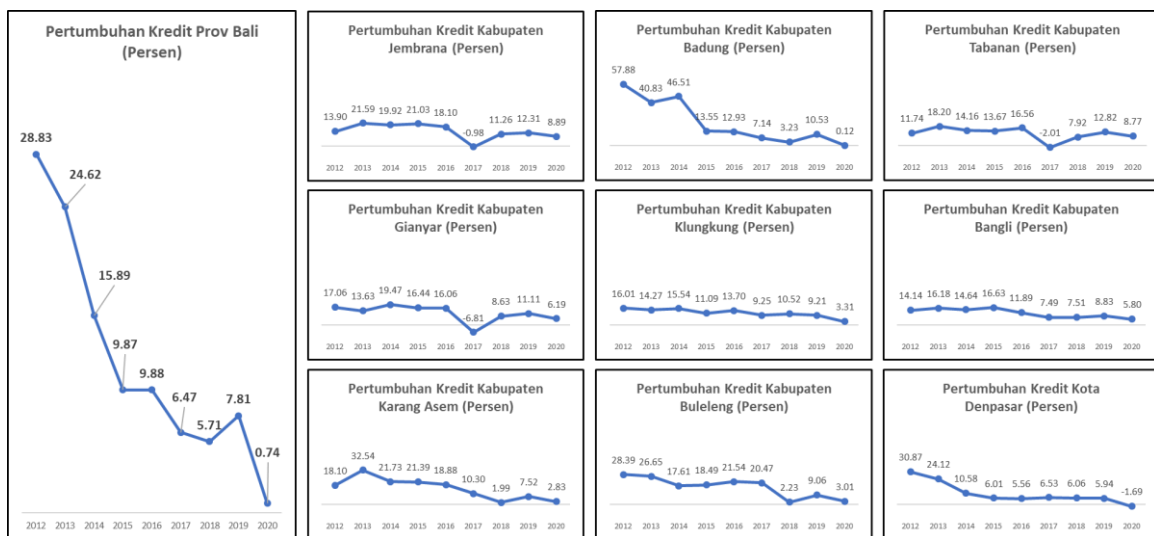
Tabel 5. 4. Belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali

Daerah Tingkat II	Realisasi Gabungan Kab/Kota 2019 (Rp Triliun)					Realisasi Gabungan Kab/Kota 2020 (Rp Triliun)					Growth Realisasi Gabungan Kab/Kota 2020 (%)					Pangsa 2020
	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja	
Kota Denpasar	1,80	0,30	0,00	0,20	2,10	1,59	0,1	0,03	0,16	1,72	-11,4%	-66,1%	42757,1%	-19,3%	-17,9%	12,3%
Tabanan	1,47	0,19	0,00	0,27	1,66	1,34	0,18	0,02	0,23	1,54	-9,0%	-3,8%	28471,4%	-14,5%	-7,2%	11,2%
Klungkung	0,95	0,13	0,00	0,12	1,08	0,84	0,06	0,04	0,12	0,94	-11,2%	-54,3%	57042,9%	0,1%	-12,7%	6,9%
Karangasem	1,29	0,15	0,00	0,19	1,45	1,18	0,08	0,02	0,19	1,28	-8,3%	-47,1%	28471,4%	0,4%	-11,5%	9,3%
Gianyar	1,68	0,25	0,00	0,29	1,93	1,36	0,41	0,06	0,21	1,82	-19,2%	62,9%	85614,3%	-28,3%	-5,8%	11,5%
Badung	2,64	0,60	0,00	0,51	3,23	2,89	0,43	0,01	0,24	3,34	9,7%	-28,0%	14185,7%	-52,9%	3,4%	23,2%
Buleleng	1,72	0,27	0,00	0,25	2,00	1,46	0,26	0,05	0,24	1,77	-15,2%	-4,9%	71328,6%	-5,8%	-11,6%	12,6%
Bangli	0,80	0,15	0,00	0,21	0,95	0,94	0,05	0,03	0,15	1,02	17,7%	-67,1%	42757,1%	-28,2%	7,4%	6,0%
Jembrana	0,80	0,22	0,00	0,14	1,02	0,83	0,08	0,02	0,13	0,94	4,0%	-63,3%	28471,4%	-7,0%	-8,3%	6,9%
Total	13,14	2,26	0,00	2,18	15,42	12,43	1,65	0,28	1,67	14,37	-5,4%	-26,9%	44344,4%	-23,5%	-6,8%	100,0%

Sumber: BPKAD Prov. Bali dalam Laporan Perekonomian Bali oleh Bank Indonesia, 2021

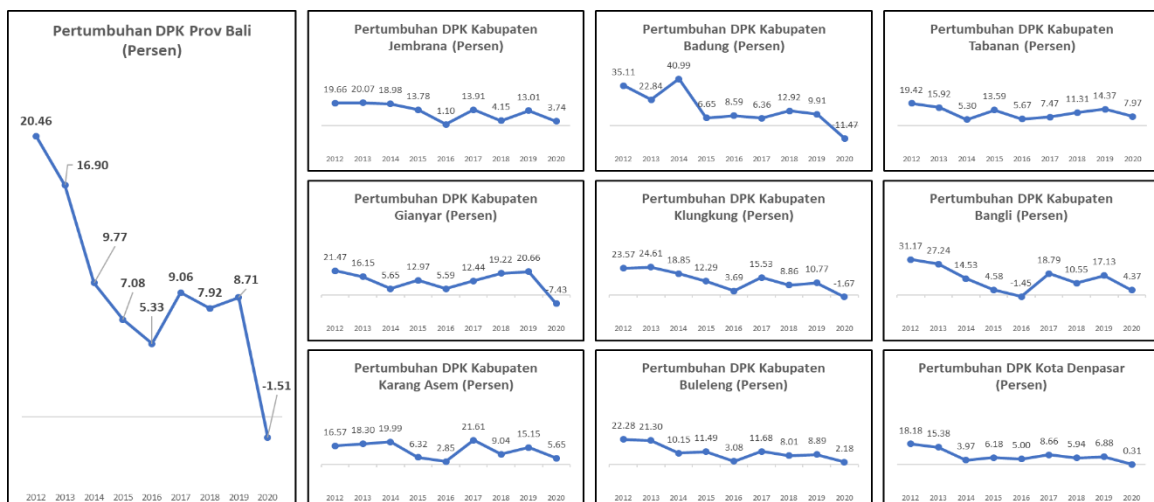
Secara umum pembiayaan perekonomian di Bali berada di atas rata-rata nasional, namun mengalami perlambatan baik dilihat dari penyaluran kredit maupun Dana Pihak Ketiga (DPK) (Gambar 5.25 dan Gambar 5.26). Penghimpunan DPK di Bali pada triwulan II-2021 sudah mengalami pertumbuhan terbatas yaitu sebesar 3,20% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 3,79% (yoy). Peningkatan ini bersumber dari giro dan tabungan serta tetap tumbuh positifnya deposito. Sementara itu, penyaluran kredit mengalami pertumbuhan terbatas, kecuali untuk sektor UMKM yang meningkat tajam pada triwulan II-2021 yaitu sebesar 9,56%, meningkat dibandingkan 2,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan oleh pemerintah. Peningkatan penyaluran kredit UMKM di Bali terutama bersumber dari kredit UMKM LU Perdagangan (pangsa 52,84%), LU Industri (pangsa 8,48%) dan LU Pertanian (pangsa 8,51%). Sementara itu, risiko kredit UMKM pada triwulan II-2021 memburuk dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari 2,60% pada triwulan I-2021 menjadi 2,91% pada triwulan II-2021, meskipun masih di bawah *threshold* 5%.

Gambar 5. 25. Pertumbuhan Kredit Provinsi Bali



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 5. 26. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Provinsi Bali

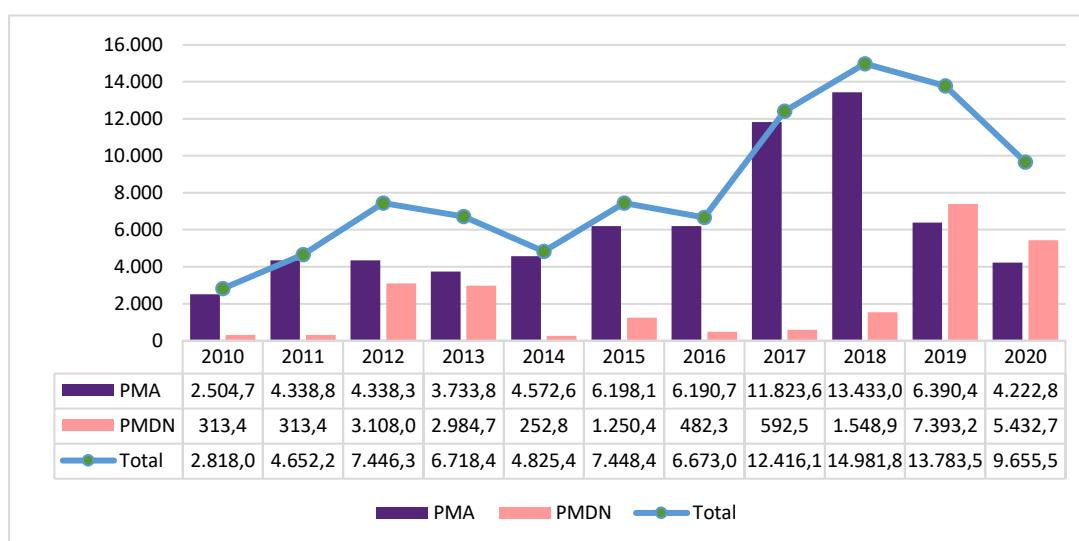


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Upaya pemulihan ekonomi sudah dilakukan antara lain dengan restrukturisasi kredit perbankan, termasuk kredit UMKM dan KUR. Selain itu, pembiayaan alternatif juga telah diinisiasi oleh OJK melalui *Securities Crowdfunding* (SCF)⁴³ yang merupakan sumber pembiayaan dengan pendanaan yang cepat, mudah dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum *bankable* untuk mengembangkan usahanya. Sampai dengan 24 Mei 2021 di Bali terdapat 5 penyelenggara dan 152 penerbit yang melakukan penghimpunan dana melalui SCF senilai Rp 226,7 Miliar.

Realisasi investasi di Provinsi Bali sejak tahun 2010 hingga 2018 didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Namun pada tahun 2019 dan 2020, PMA mengalami penurunan terutama pada sektor penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan akomodasi sedangkan PMDN mengalami kenaikan secara drastis utamanya karena kenaikan investasi di sektor penyediaan akomodasi, telekomunikasi, dan real estat (Gambar 5.27). Dampak pandemi COVID-19 terhadap PMA terlihat mulai triwulan I dan II 2020. Realisasi PMA di Bali pada tahun 2020 utamanya berasal dari Singapura, Hong Kong, Belanda, dan Australia (Gambar 5.28). Realisasi investasi baik PMA maupun PMDN sebagian besar terdapat di Kabupaten Badung (secara rata-rata berperan 65% terhadap total realisasi investasi di Bali). Dari sisi sektoral sejak tahun 2015, realisasi PMA dan PMDN terbesar di Bali adalah sektor Hotel dan Restoran, disusul oleh sektor Telekomunikasi, kemudian Real Estat. Selanjutnya pada tahun 2020, investasi pada sektor Hotel dan Restoran didominasi oleh PMA sebesar 58,5%. Adapun investasi pada sektor Transportasi, Gudang, Telekomunikasi didominasi oleh PMDN sebesar 99,8%. Sedangkan investasi pada sektor Perumahan, kawasan Industri, Perkantoran didominasi oleh PMA sebesar 97,2%.

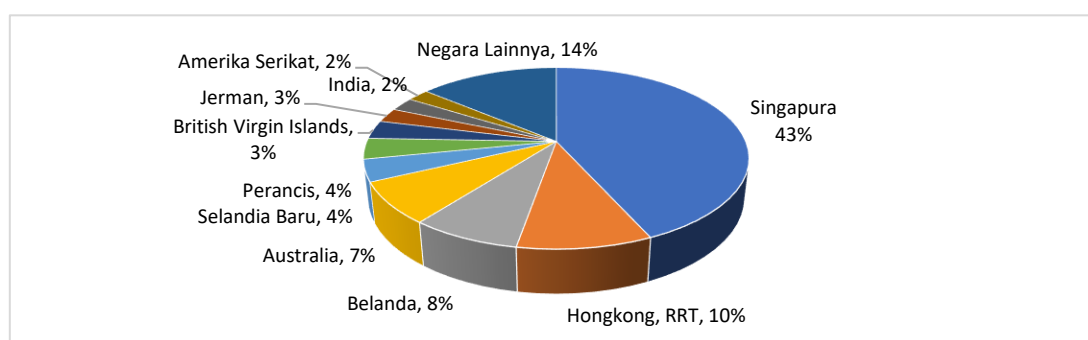
Gambar 5. 27. Realisasi Investasi Tahunan di Bali (Rp Miliar)



Sumber: BKPM (diolah)

⁴³ *Securities Crowdfunding* merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya. SCF telah memiliki payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Peraturan OJK yakni POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding).

Gambar 5. 28. Negara Asal PMA Bali di Tahun 2020



Sumber: BKPM (diolah)

Iklm usaha yang baik sangat dibutuhkan untuk menarik investasi masuk ke Provinsi Bali. Berdasarkan *Doing Business in Indonesia 2012*⁴⁴, dibutuhkan 31 hari untuk memulai usaha di Denpasar, sehingga Denpasar menempati peringkat 9 dari 20 kota di Indonesia yang diteliti. Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga membutuhkan waktu relatif lama sekitar 94 hari dengan 12 prosedur serta registrasi properti sekitar 32 hari. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2016 menemukan masih rendahnya akses dan kepastian hukum atas lahan, masih adanya donasi dan biaya informal kepada Pemda dan kepolisian serta interaksi pemda dengan pelaku usaha yang kurang baik.

Untuk meningkatkan kemudahan berusaha pemerintah telah menerbitkan Inpres 7/2019 tentang Percepatan Berusaha. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) untuk penyederhanaan regulasi di berbagai sektor. Dengan metode *Omnibus Law*, 79 Undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur 18 sektor. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut pada tahun 2021, telah diterbitkan 47 PP dan 4 Perpres. Setelah menerbitkan UUCK pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran OSS 1.1 menjadi *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS RBA). Pada pemutakhiran ini syarat perizinan dibedakan berdasarkan lapangan usaha yang diajukan termasuk risiko rendah, sedang, atau tinggi. Dengan OSS RBA, peran pemerintah utamanya tidak lagi di tahap perizinan tetapi di tahap pengawasan. Selain itu kriteria UMKM juga diperbarui menjadi lebih longgar persyaratannya dalam rangka memberikan insentif bagi UMKM melakukan registrasi usahanya (Tabel 5.5).

Tabel 5. 5. Kriteria UMKM Berdasarkan Modal

Kriteria Usaha	Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Mikro	< Rp 50 Juta	< Rp 1 Miliar
Kecil	Rp 50 – 500 Juta	Rp 1 – 5 Miliar
Menengah	Rp 500 Juta – 10 Miliar	Rp 5 – 10 Miliar
Besar	> Rp 10 Miliar	> Rp 10 Miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008, PP No. 7 Tahun 2021

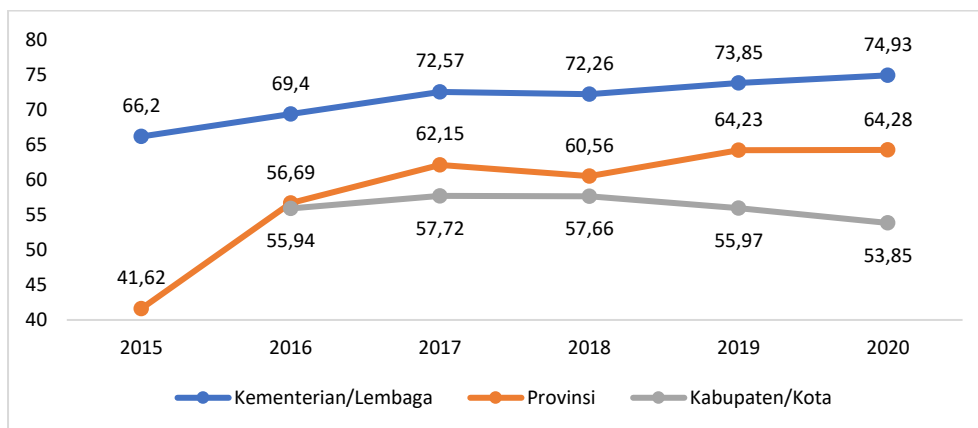
Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur penyelenggaraan penataan ruang di mana pemerintah memberikan kepastian dalam kemudahan perizinan dan pengawasan yang dilakukan dengan tegas melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai acuannya. Terdapat dua fungsi konfirmasi atau persetujuan KKPR yaitu menggantikan izin lokasi dan

⁴⁴ *Doing Business in Indonesia 2012* merupakan laporan subnasional kedua dan terakhir dari seri *Doing Business in Indonesia* di mana di tahun 2012 mensurvei 20 kota di Indonesia.

menggantikan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk membangun dan pengurusan tanah. Pelaku usaha yang di wilayahnya mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka pengajuan perizinan berusaha akan melalui OSS berbasis daring dan penilaian KKPR akan dikerjakan secara menyeluruh oleh sistem tanpa campur tangan OPD terkait. Jika daerah tersebut belum mempunyai RDTR, maka akan diterbitkan persetujuan KKPR melalui penilaian *offline*. Pengecekan Rencana Tata Ruang secara komprehensif dilakukan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota dan aturan di bawahnya, serta melalui pertimbangan teknis pertanahan terlebih dahulu. Turunan UU Cipta Kerja—PP No. 21 Tahun 2021—membantu percepatan penyusunan RDTR salah satunya dengan menetapkan jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR yang dibatasi paling lama 12 bulan, terhitung sejak penyusunan RDTR. Hal ini akan membantu percepatan penyelesaian RDTR di Bali di mana hingga September 2021 baru 4 RDTR dari 59 RDTR yang disusun ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Peningkatan pembangunan di suatu daerah tidak hanya bergantung pada pengelolaan APBD dan pembiayaan, tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan reformasi birokrasi agar penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2010 dan telah mengalami berbagai perubahan hingga saat ini, mulai dari penerapan *rule-based bureaucracy* (2010-2014), *performance-based bureaucracy* (2015-2019), hingga *dynamic governance* (2020-2024). Untuk menilai kinerja birokrasi, diciptakan Indeks Reformasi Birokrasi.⁴⁵ Selama periode 2015-2020 nilai Indeks Reformasi Birokrasi mengalami tren yang meningkat (Gambar 5.29), namun terdapat perbedaan performa reformasi birokrasi di tingkat kementerian/lembaga, Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Berdasarkan tren saat ini, perbaikan kualitas reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota perlu diperkuat.

Gambar 5. 29. Indeks Reformasi Birokrasi 2015-2020

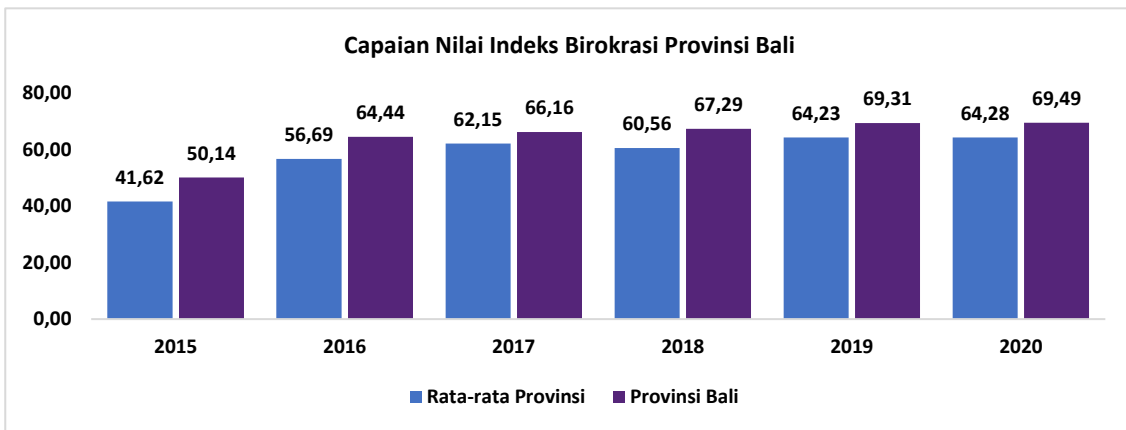


Sumber: Kementerian PANRB (diolah)

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi level Provinsi Bali menunjukkan tren peningkatan sejak pertama kali dilakukan penilaian tahun 2015, dan berada di atas rata-rata capaian Indeks RB di level provinsi secara nasional (Gambar 5.30). Namun capaian Indeks Reformasi Birokrasi level kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, dengan Kabupaten Karangasem yang mendapat nilai terendah, serta Kabupaten Badung yang meraih nilai tertinggi (Gambar 5.31).

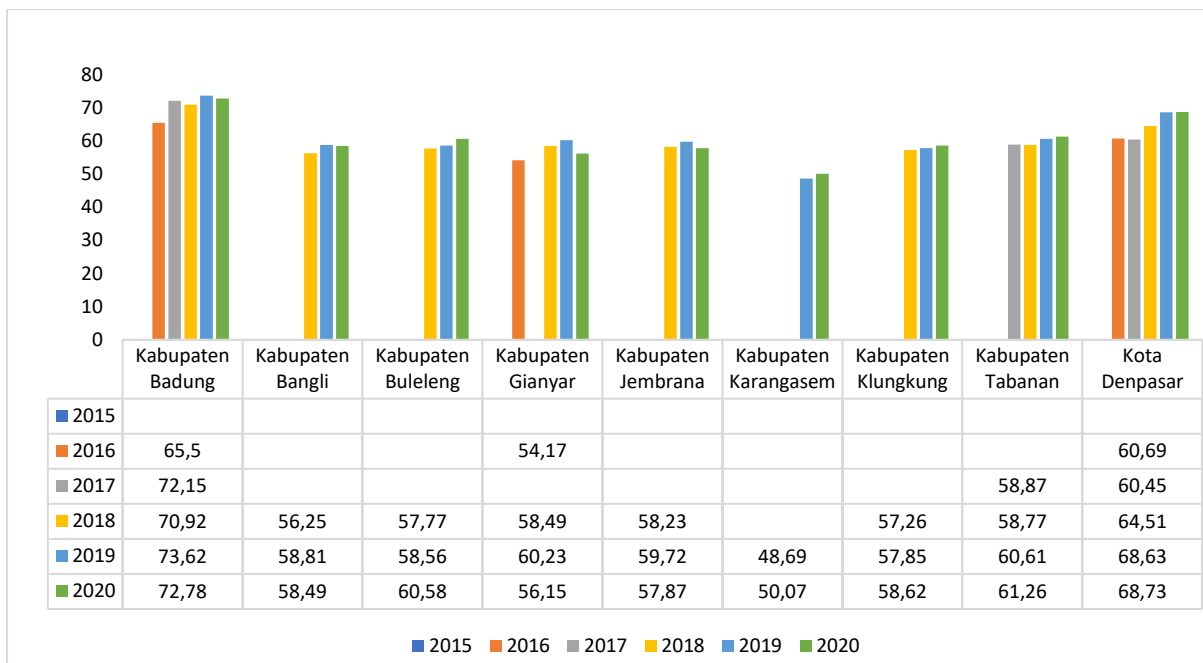
⁴⁵ Kinerja birokrasi dinilai dari delapan Area Perubahan, yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan, (3) penataan organisasi, (4) penataan tatalaksana, (5) sistem manajemen SDM, (6) penguatan akuntabilitas, (7) pengawasan, dan (8) pelayanan publik.

Gambar 5. 30. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Bali



Sumber: Kementerian PANRB (diolah)


Gambar 5. 31. Capaian Nilai Indeks Birokrasi Kabupaten/kota di Provinsi Bali



Sumber: Kementerian PANRB (diolah)

Untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pemerintah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).⁴⁶ Hingga Juni 2021 terdapat 43 MPP yang telah diresmikan di Indonesia di mana rata-rata terdapat 23 instansi yang tergabung dan 220 layanan yang terintegrasi di MPP. Di Bali sendiri baru terdapat 3 MPP, yaitu MPP Kota Denpasar dengan 220 layanan dan 20 instansi, MPP Kabupaten Badung dengan 121 layanan dan 2 instansi, dan MPP Kabupaten Karangasem dengan 166 layanan dan 19 instansi. Untuk menjangkau seluruh lapisan pengguna layanan di Bali diperlukan percepatan pembentukan MPP di kab/kota lainnya dan penguatan pelayanan publik terpadu melalui MPP yang ada.

⁴⁶ MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.




Secara umum berdasarkan capaian aspek tata kelola pemerintahan, Provinsi Bali masih menghadapi tantangan pada sasaran birokrasi yang kapabel. Hal tersebut dilihat dari capaian Bali untuk Indeks Profesionalitas ASN BKN tahun 2020 yang berada pada kualifikasi Rendah dengan nilai 64 dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KemenPANRB tahun 2020 yang berada pada kualifikasi Kurang dengan nilai 1,62. Tren perkembangan Indeks SPBE di level kabupaten/kota di Provinsi Bali cenderung stagnan, dengan Kabupaten Buleleng menunjukkan capaian Indeks SPBE yang paling baik, sementara Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana menunjukkan penurunan capaian Indeks SPBE.

Berikut adalah permasalahan tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali menurut Pergub Bali No. 52/2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023:

1. Tata Laksana
 - a. Belum disusunnya peta proses bisnis sehingga belum dapat menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi lingkungan Pemprov.
 - b. Penyusunan SOP tidak didasarkan atas peta proses bisnis sehingga berdampak pada kaburnya keterkaitan antar unit organisasi.
 - c. Kurangnya pemahaman mengenai penyusunan dan penerapan SOP.
 - d. Belum maksimalnya penerapan *e-government*.
 - e. Belum optimalnya penerapan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Akuntabilitas
 - a. Pimpinan sudah mulai terlibat langsung dalam penyusunan renstra dan perjanjian kinerja, namun perlu melakukan pemantauan berkala terhadap pencapaian kinerja renstra dan perjanjian kinerja.
 - b. Belum terbangunnya budaya kinerja, di mana belum semua perangkat daerah menyusun kontrak kinerja individu.
3. Pengawasan
 - a. Konsep gratifikasi belum sepenuhnya dipahami pegawai.
 - b. Belum optimalnya Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di tingkat Provinsi.
 - c. Pengelolaan resiko belum sepenuhnya diterapkan.
 - d. Belum terbentuknya Kebijakan *Whistle Blowing System* dan Penanganan Benturan Kepentingan.
 - e. Pembangunan zona integritas belum dilakukan secara intensif ke seluruh perangkat daerah.
4. Manajemen SDM Aparatur
 - a. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan.
 - b. Informasi faktor jabatan belum dilakukan dan belum disusun sehingga belum dapat membuat peta jabatan dan evaluasi jabatan yang akurat.
 - c. Penetapan kinerja pegawai agar benar-benar dipastikan mengevaluasi pelaksanaan kerja individu.
 - d. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi perlu ditingkatkan.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018) dan ADB (2018), keterampilan TIK ASN yang bekerja pada bidang-bidang TIK di Bali-Nusa Tenggara masih menunjukkan kelemahan dibanding ASN di Pulau Jawa. Hal tersebut di antaranya diakibatkan oleh ketiadaan kompetensi digital dalam kerangka kompetensi ASN nasional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN di level provinsi pada bidang TIK diperlukan terutama yang sejalan dengan pengalihan jabatan





administrasi ke jabatan fungsional. Peningkatan kompetensi ASN perlu difokuskan untuk membentuk organisasi yang gesit (*agile*), diiringi dengan penguatan kompetensi ASN yang mendukung dinamika kebutuhan keterampilan masa depan dan kebutuhan khas pembangunan Bali.

Pembangunan Bali yang kondusif sangat diperlukan agar transformasi ekonomi Bali berlangsung secara optimal dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang diperlukan termasuk sumber daya lokal Bali. Untuk mencapai Bali yang kondusif, dilaksanakan langkah-langkah untuk: (i) memperkuat keuangan daerah; (ii) meningkatkan dukungan lembaga keuangan dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan; (iii) memperkuat perbaikan kemudahan berusaha; serta (iv) mempercepat reformasi birokrasi dan kelembagaan.

a. Penguatan Keuangan Daerah

Tujuan penguatan keuangan daerah Bali dalam jangka panjang adalah meningkatkan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu instrumen fiskal yang berperan dalam percepatan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini akan tercapai apabila pemerintah daerah secara konsisten melakukan penguatan dalam pengelolaan keuangan daerah di mana dilaksanakan dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah perbaikan dalam pengelolaan APBD yaitu optimalisasi pendapatan daerah dan perbaikan kualitas belanja daerah.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran penguatan keuangan daerah Bali adalah sebagai berikut:

Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui: (i) melaksanakan kebijakan perpajakan daerah yang efektif seperti kebijakan PKB dan BBNKB; (ii) memaksimalkan peran digitalisasi dalam mengoptimalkan penarikan dan pembayaran pajak dan retribusi; (iii) sinkronisasi dan integrasi data; (iv) peningkatan sumber daya aparatur di bidang PAD; serta (v) peningkatan pengelolaan aset daerah.

Perbaikan kualitas belanja daerah dilakukan melalui: (i) meningkatkan alokasi belanja ke sektor unggulan unggulan daerah; (ii) meningkatkan proporsi belanja modal yang produktif, (iii) meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di dalam memanfaatkan belanja daerah; serta (iv) meningkatkan pengawasan penggunaan belanja daerah.


b. Penguatan Dukungan Lembaga Keuangan

Tujuan dukungan Lembaga keuangan daerah Bali dalam jangka panjang adalah meningkatnya akses partisipasi masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal melalui ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah semakin sinerginya OJK dan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembiayaan, semakin besar peran perbankan terhadap pembiayaan sektor riil, semakin kuatnya dukungan pembiayaan untuk UMKM, dan optimalnya pemanfaatan pembiayaan alternatif yang inovatif.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dukungan lembaga keuangan daerah Bali adalah sebagai berikut:

Sinergi OJK dan Pemerintah menjadi kunci penting dalam pembiayaan daerah. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari kerjasama kedua pihak tersebut diharapkan dapat menggerakkan sektor



usaha khususnya sektor UMKM, termasuk juga kebijakan jangka pendek untuk pemulihan ekonomi seperti restrukturisasi kredit/pembiayaan dan pelaksanaan subsidi bunga. Selanjutnya, diharapkan ke depan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat didorong oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali, meningkatkan edukasi keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat, membuka akses keuangan masyarakat, serta memperkuat perlindungan kepentingan masyarakat dari berbagai produk investasi/keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Peran perbankan terhadap sektor riil di Bali diharapkan semakin meningkat. Hal tersebut dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan peran agen bank untuk mampu menjangkau masyarakat dalam memberikan layanan perbankan, penguatan penyaluran kredit sektor produktif, penguatan kerjasama dengan *fintech* di mana dengan teknologi dan inovasi yang dimiliki, dapat berkolaborasi dengan bank dalam menyalurkan pembiayaan terhadap sektor riil, serta meningkatkan inovasi pelayanan perbankan.

Peningkatan pembiayaan UMKM dengan memperkuat pembiayaan yang sudah ada seperti penyaluran KUR, program KUR Cluster UMKM, penyediaan asuransi dan penjaminan. Selain itu, perlu ditingkatkan pembinaan bagi UMKM serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi terkait pembiayaan kepada UMKM.

Pemanfaatan pembiayaan alternatif juga perlu dioptimalkan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan *Fintech*, *green financing*, *blended finance*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, serta inovasi pembiayaan alternatif lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

c. Perbaikan Kemudahan Berusaha

Tujuan perbaikan kemudahan berusaha dalam jangka panjang adalah menjadikan Bali sebagai provinsi yang ramah investasi. Kondisi ini akan terwujud apabila didukung oleh kondusifnya iklim usaha, optimalnya infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung investasi serta komitmen pemerintah.

Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah terciptanya iklim usaha dan investasi yang semakin kondusif sehingga berdampak pada meningkatnya investasi ke Bali.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran n perbaikan kemudahan berusaha adalah sebagai berikut:


Iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha. Hal tersebut dicapai melalui: (i) penguatan digitalisasi pelayanan perizinan usaha; (ii) penerbitan dan pelaksanaan peraturan daerah untuk melaksanakan peraturan turunan UUCK; (iii) percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah kabupaten/kota di Bali untuk memudahkan pengajuan perizinan lokasi usaha; (iv) penguatan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja pelayanan perizinan usaha sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan pidana korupsi dan pemberian pelayanan yang cepat, mudah, dan murah.

Selanjutnya, investasi perlu distimulasi antara lain dengan (i) mengembangkan *hotline center* terkait perizinan usaha dan investasi sebagai salah satu fasilitas komunikasi dengan pelaku usaha; (ii) menerbitkan peta potensi investasi sektor prioritas; (iii) mengembangkan dan memperluas komoditas sektor ekonomi yang dituangkan dalam bentuk *e-katalog* investasi Bali; (iv) mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif dalam hal investasi dan perluasan pasar; dan (v) meningkatkan hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta baik domestik dan internasional.

d. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Tujuan reformasi birokrasi dan kelembagaan dalam jangka panjang adalah (i) terwujudnya pemerintah yang memiliki peran dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mencapai





kepentingan publik serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik; (ii) terwujudnya kelembagaan birokrasi moderen yang saling terhubung berbasis teknologi informasi dan komunikasi; serta (iii) terwujudnya kelembagaan birokrasi andal dan modern yang dijalankan oleh SDM aparatur sipil negara yang profesional, beretos kerja tinggi, produktif, berintegritas, netral, berkomitmen pada nilai publik, berdaya saing, inovatif, serta adaptif dalam mengelola perubahan.

Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas kelembagaan pada pemerintah daerah, meningkatnya kapasitas ASN, optimalnya digitalisasi administrasi internal dan pelayanan publik, dan menguatnya pelayanan publik terpadu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menjangkau seluruh lapisan pengguna layanan.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

Reformasi kelembagaan dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, mengoptimalkan kualitas rancangan produk hukum daerah dan mengoptimalkan penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah.

Perbaikan kapasitas ASN dilaksanakan antara lain: (i) peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan formal dan teknis yang sesuai dengan arah pembangunan wilayah Bali; (ii) memberikan kesempatan dan atau menyediakan beasiswa bagi ASN untuk memperoleh Pendidikan formal yang lebih tinggi; (iii) menugaskan ASN sesuai dengan keahliannya; serta (iv) memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) sesuai kinerja ASN.

Percepatan digitalisasi administrasi internal dan pelayanan publik dilaksanakan antara lain dengan: (i) memperkuat pelaksanaan *e-government*; (ii) melakukan penjabaran kerangka kompetensi digital dan kebutuhan talenta digital; (iii) melakukan pengembangan kompetensi digital melalui berbagai pendekatan (*on-job training*, pelibatan dalam proyek strategis nasional terkait transformasi digital), inisiasi *Digital Academy* untuk ASN; dan (iv) melakukan rekrutmen talenta digital ke dalam sektor publik.

Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu diperkuat antara lain dengan (i) melakukan percepatan pengembangan MPP di kabupaten/kota di Bali yang belum memiliki MPP; (ii) meningkatkan efektivitas MPP yang sudah ada yang didukung dengan penetapan komitmen K/L/pemda di Bali dalam penyelenggaraan MPP dan penguatan sinergi dalam pembagian tugas yang jelas antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) penyelenggara MPP.

6

Penutup

BAB VI. PENUTUP

“Transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari lower productivity ke higher productivity atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor tersebut,”

(Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, 4 Agustus 2021)

Dokumen Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera disusun dalam rangka mewujudkan dengan cepat **pemulihan ekonomi yang mengalami krisis akibat Pandemi COVID-19 sekaligus secara bertahap melakukan transformasi ekonomi Bali untuk mencapai sasaran pembangunan di tahun 2045.**


Kunci keberhasilan pemulihan ekonomi Bali tersebut terletak pada sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menangani Pandemi COVID-19 dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, perekonomian Bali yang bergantung pada sektor pariwisata harus dipersiapkan untuk menghadapi menggeliatnya sektor wisata pada saat pandemi sudah terkendali. Kesiapan sektor wisata Bali untuk menghadapi lonjakan wisatawan akan mempercepat proses pemulihan perekonomian Bali.

Strategi pemulihan ekonomi tersebut selain dapat mempercepat proses pemulihan perekonomian Bali dalam jangka pendek, juga sekaligus meletakkan landasan proses transformasi perekonomian Bali yang bersifat jangka menengah panjang. Transformasi ekonomi tersebut harus dilakukan untuk mengubah struktur perekonomian dari *lower productivity ke higher productivity (between sector/inter sector)* dan/atau meningkatkan produktivitas (*within sector/intra sector*). Strategi transformasi ekonomi Bali juga diarahkan agar Bali menjadi lebih terdiversifikasi dan tidak tergantung kepada sektor pariwisata. Selanjutnya, sejalan dengan visi pemulihan dan transformasi ekonomi Bali, Bali Era baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera, serta tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Indonesia, jalur pembangunan ekonomi yang dibangun adalah yang rendah karbon. Pilihan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang tersebut akan menjadikan perekonomian Bali memiliki daya tahan terhadap krisis dan memiliki produktivitas tinggi sehingga tumbuh tinggi dan berkesinambungan.

Dokumen Peta Jalan ini menjabarkan langkah-langkah pemulihan dan transformasi ekonomi Bali dengan memperhatikan: (i) Langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk mengatasi Pandemi COVID-19 serta dampaknya, terhadap masyarakat, khususnya di Provinsi Bali; (ii) dokumen RPJMD Bali 2018 – 2023 dan Rancangan Perubahan RPJMD Bali 2018 – 2023, (iii) RPJMN 2020 – 2024; (iv) RKP tahun 2022; (v) RKPD Bali 2022; (vi) Renstra berbagai Kementerian/Lembaga 2020 – 2024; dan (vii) Visi Indonesia 2045 dan Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia⁴⁷.

Dokumen Peta Jalan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali beserta segenap OPD Pemerintah Provinsi Bali; Pemerintah Kabupaten/Kota; Kementerian/Lembaga; dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan untuk pemulihan ekonomi jangka pendek, serta pelaksanaan strategi transformasi ekonomi yang berjangka menengah dan panjang.

⁴⁷ Pidato Presiden RI pada 16 Agustus 2019



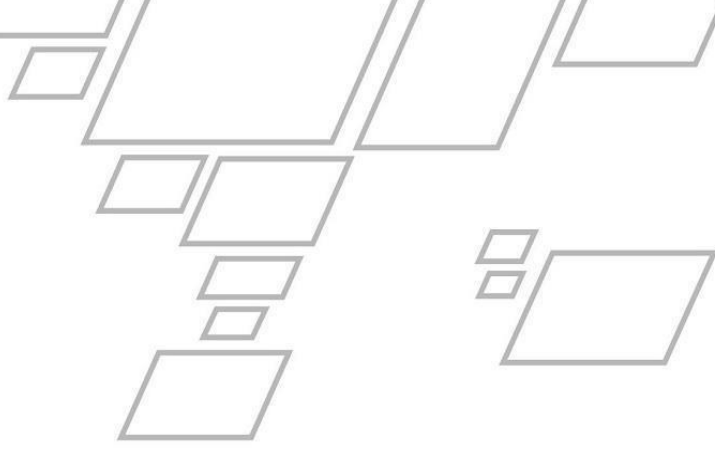
Selain yang diuraikan di atas, dokumen ini juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan di Bali. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan di Bali. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan di Bali ke depan.

Pada akhirnya, pelaksanaan Peta Jalan ini memerlukan orkestrasi lintas sektor, lintas pelaku, lintas wilayah, serta lintas tingkat kewenangan pusat-daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu, **pertama** perlu ada koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan implementasi kebijakan pada seluruh tingkatan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. **Kedua** adalah dukungan pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan yang inovatif, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan. **Ketiga** adalah dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan termasuk reformasi birokrasi yang pada akhirnya menciptakan iklim berusaha dan investasi di Bali yang kondusif dan kompetitif.



Daftar Referensi

- Adiputra, I. B., Hartati, R. S., & Ariastina, W. (2018). *Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca terhadap Konsumsi Energi di Provinsi Bali*. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro.
- BAKTI. (2021). Keterhubungan Bali dengan Fiber Optic Bacbonce. Diakses pada: <https://www.baktikominfo.id/>
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Bali (Februari 2021)*.
- Bappenas. (2014). Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Energi. [http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/admincms/downloads/publications/Pedoman_teknis_penghitungan_baseline_emisi GRK sektor berbasis energi.pdf](http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/admincms/downloads/publications/Pedoman_teknis_penghitungan_baseline_emisi_GRK_sektor_berbasis_energi.pdf)
- Bappenas. (2020). *Policy Brief: Eksplorasi Kebijakan Percepatan Ekspor UMKM Indonesia*. Tim Kajian Direktorat PUKMK Bappenas
- BPS. (2019). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik
- BPS. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi dan Identifikasi Industri Unggulan Provinsi Bali*. Bali (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
- BPS Provinsi Bali. (2016). *Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Bali*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- BPS Provinsi Bali. (2020). *Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Sosial Demografi dan Pelaku Usaha Provinsi Bali*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Dinda, S., & Kurniawan, H. (2020). *1.268 UKM Manfaatkan FTA Center Kemdag*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/701827/1268-ukm-manfaatkan-fta-center-kemdag>
- East Ventures-Digital Competitiveness Index. 2021. *Momentum Akselerasi Transformasi Ekonomi Digital Indonesia*.
- Koster, Wayan (2021). *Ekonomi Kerthi Bali – Membangun Bali Era Baru*
- Nperf. 2021. *Cellular data networks in Indonesia*. Diakses pada: <https://nperf.com/>
- OECD. 2017. *Key issues for Digital Transformation in the G20. Joint G20 German Presidency/OECD Conference*
- Tan, D. (2019). *More SMEs Urged to Register with MATRADE*. <https://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/news-clippings/4752-more-smes-urged-to-register-with-matrade>



Lampiran



Lampiran I – Quick Wins Pemulihan Ekonomi Bali Jangka Pendek

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
Strategi Utama 1. PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 DAN VAKSINASI <i>BALI-WIDE</i>			
a. Adaptasi protokol kesehatan, kebersihan, dan keselamatan dalam aktivitas masyarakat			
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat sosialisasi Program 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilitas). 	Memperkuat protokol kesehatan di masyarakat secara menyeluruh	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Pusat Satgas COVID Provinsi Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan pedoman kesehatan dan keselamatan terbaru yang mengatur operasi (tata kelola) pelaku usaha dan masyarakat 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Pusat Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat sosialisasi dan pelaksanaan pedoman kesehatan dan keselamatan terbaru kepada pemangku adat dan banjar 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Memperluas keterlibatan pemangku adat dan banjar dalam tim relawan untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan edukasi sanitasi yang benar melalui pemasangan iklan layanan masyarakat 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemda

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
b. Pelaksanaan Program Vaksinasi Bali-Wide			
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 	Terciptanya kekebalan imunitas (<i>herd immunity</i>) masyarakat di seluruh Bali	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua hingga mencapai 100% target, termasuk penambahan fasilitas pelayanan kesehatan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pemberian vaksinasi dosis ketiga (<i>booster</i>) untuk tenaga kesehatan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan pemberian vaksinasi dosis ketiga (<i>booster</i>) untuk tenaga kerja pariwisata 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat vaksinasi sebagai syarat utama mobilitas masyarakat 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah tes untuk mempercepat penemuan kasus dan menurunkan <i>positivity rate</i> 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi
c. Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Kesehatan Bali			
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) bagi wisatawan dan/atau warga setempat yang terpapar 	Terkendalnya pandemi COVID-19 dan terciptanya	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi Pemda

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas dan tipe Rumah Sakit yang ada saat ini, terutama Rumah Sakit tipe A dan yang menampung pasien khusus COVID-19, yang mencakup: (i) peningkatan jumlah tempat tidur isolasi COVID-19, (ii) penambahan kapasitas ICU, (iii) ketersediaan ruang rawat inap, dan (iv) persediaan oksigen dan obat-obatan. 	koordinasi yang terintegrasi, efektif, dan efisien.	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan rumah karantina/lokasi isolasi terpusat bagi masyarakat Bali (non-wisatawan) dan wisatawan sesuai dengan dokumen protokol penyiapan fasilitas isolasi kolektif yang dikeluarkan Satgas COVID Nasional 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas tenaga kerja medis termasuk tenaga relawan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Satgas COVID Provinsi Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga relawan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesiapan mendirikan rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan sebagai antisipasi meningkatnya kasus COVID-19 jika diperlukan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemda

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan oksigen melalui penyediaan isotank dengan kapasitas oksigen yang cukup untuk 15-30 hari ke depan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Surveillance Genomic</i> (penelitian virus mutasi terbaru dari pasien baru yang terpapar) untuk peningkatan pengawasan mutasi virus corona. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas laboratorium PCR dan penambahan shift 24 jam terutama bagi laboratorium rujukan COVID-19 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Memperluas penggunaan aplikasi terkait <i>testing-tracing-treatment</i> yang terintegrasi (Peduli Lindungi). 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemkominfo PT Telkom
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelacakan kesehatan dan identifikasi lokasi wisatawan di zona hijau (zona aman) dan oranye (zona kurang aman). 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemkominfo Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Penapisan berita bohong (hoax) atas kasus/informasi COVID-19 dalam kanal berita dan media sosial. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemkominfo Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan database kasus COVID-19 Provinsi Bali yang terkini (<i>Real Time Monitoring and Regular Cloud Update</i>). 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Satgas COVID Pusat Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Memperluas pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi layanan kesehatan (sistem pendaftaran, layanan telemedicine, rekam medik elektronik, sistem pembayaran online, e-resep, dan pengiriman obat melalui jasa kurir) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemkominfo Kementerian Kesehatan

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
Strategi Utama 2. BANTUAN SOSIAL DAN PROGRAM PADAT KARYA			
a. Bantuan Sosial kepada Masyarakat Bali yang berhak			
<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pemutakhiran oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penyaluran program-program perlindungan sosial 	Mempertahankan daya beli masyarakat	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri Pemda Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial Kementerian Keuangan Kementerian Desa PDTT Pemda Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat program Bantuan sosial tunai untuk siswa sekolah swasta tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa dan mahasiswa. Serta program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemda Provinsi/Kab/Kota Kementerian Agama
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kepesertaan kartu Pra-Kerja. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko perekonomian Kementerian Ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
b. Mendorong proyek pembangunan padat karya dan rehabilitasi sarana prasarana desa			
<ul style="list-style-type: none"> ● Percepatan pembangunan proyek infrastruktur seperti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bendungan Sidan dan Tamblang (2022-2023) ○ Pengamanan pantai (Gilimanuk, Sedayu-Kusamba, Tegal Besar) ○ Konservasi pantai (bali beach conservation) ○ Air baku ○ Jalan strategis, Jalan akses simpul transportasi, Jembatan akses simpul transportasi. 	Meningkatkan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat pedesaan	Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan bersifat padat karya (jalan desa, jembatan, desa wisata)*, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Jalan Lingkar Nusa Penida (Berlokasi di 5 Desa, yaitu Desa Sakti, Bunga Mekar, Batumadeg, Batukandik, dan Sekartaji) ○ Pembangunan sarana dan prasarana desa wisata di kab. Jembrana, Tabanan, Klungkung, Buleleng. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Desa PDTT ● Kementerian PUPR
c. Meningkatkan proyek infrastruktur pendukung produktivitas ekonomi			
<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan angkutan massal perkotaan berbasis rel/ART dan jalan (bus/BRT) 	Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Benoa (cruise hub). 		Sedang berjalan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Perhubungan ● PT Pelindo III

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sanur 	terutama masyarakat lokal dan para tenaga kerja yang terdampak akibat terhentinya aktivitas ekonomi	Sedang berjalan	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul 		Sedang berjalan	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan bebas hambatan Gilimanuk-Mengwitani. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Kusamba – Padang Bai 		(Konfirmasi pembebasan lahan)	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan TPS 3R komunal di tingkat kecamatan dan desa. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasan kumuh di Suwung dan Kampung Nelayan Kusamba. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah seperti program air limbah domestik rumah tangga (SANIMAS Reguler) dan Tempat Pengumpulan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R). Perkuatan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus untuk sarana prasarana sanitasi Pemberdayaan masyarakat di daerah Sarbagita untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang memiliki nilai tambah, dan inklusif 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR Pemda Prov/Kab/Kota

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi dan optimalisasi TPS 3R untuk mendukung Pergub Bali no.47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber atau program "Desa bersih tanpa mengotori desa lain" 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR Kementerian LHK Pemda Prov.Kab/Kota/Kelurahan/Desa/Desa Adat
<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pengolahan limbah rumah tangga melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian LHK Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi usaha industri padat karya dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang berorientasi ekspor. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Pemda prov/kab/kota
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan persampahan yang berkelanjutan untuk provinsi Bali 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemda prov/kab/kota
Strategi Utama 3. INSENTIF DAN FASILITASI PELAKU USAHA			
a. Restrukturisasi kredit dan fasilitasi pembiayaan			
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dukungan pendanaan dari sektor finansial bagi para pelaku usaha pariwisata 	Pelaku usaha pariwisata dapat menjalankan dan mengembangkan usaha	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga keuangan bank dan bukan bank di Bali Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan penerapan kebijakan POJK 48/2020 sebagai dasar restrukturisasi kredit bagi UMKM, petani, dan nelayan dengan pinjaman dibawah Rp 10 Miliar, melalui perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok dan bunga bank, fasilitasi kredit, 	Pelaku usaha UMKM, petani, dan nelayan yang melakukan pinjaman	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> OJK Bank Indonesia Kementerian Keuangan

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.	perbankan mendapatkan keringanan		<ul style="list-style-type: none"> ● Lembaga keuangan bank dan bukan bank di Bali ● Pemda
<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan penyaluran kredit dengan suku bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak 	Pelaku usaha yang terdampak dapat menjalankan dan mengembangkan usaha	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Keuangan ● Kemenko Perekonomian ● Bappenas ● Kementerian KUKM
<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan penyaluran kredit melalui Program KUR dan UMi Sistem Klaster dan UMi bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor produktif (sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan pariwisata). 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Keuangan ● Kemenko Perekonomian ● Kementerian KUKM ● Dinas Pertanian Provinsi ● Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi ● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ● Dinas Pariwisata Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan fasilitasi dan penyaluran Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi usaha mikro. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian KUKM ● Dinas KUKM Provinsi ● Dinas Pertanian Provinsi ● Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi ● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan Transformasi Formal Usaha Mikro melalui relawan pendamping UMKM 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian KUKM
b. Insentif perpajakan, bea masuk, dan fasilitas ekspor			
<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan perpanjangan pemberian insentif perpajakan dunia usaha yang terukur dan terarah, seperti PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, dan pengurangan Angsuran PPh 25 dengan merujuk pada Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2022 Kementerian Keuangan. 	Pelaku usaha yang terdampak dapat menjalankan usaha dengan beban biaya yang lebih ringan	Sedang Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan Pemda Dinas KUKM Provinsi Dinas Pertanian Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan kebijakan relaksasi pajak/diskon PBB-P2 terkait lahan/tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi usaha. Mengusulkan pemutihan denda PBB-P2 bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan. Mengusulkan perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan peninjauan kembali kebijakan bea masuk bahan baku impor untuk pelaku usaha yang terdampak (relaksasi atau Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) bagi bahan baku). • Mengusulkan pemberian insentif bahan baku untuk penanganan pandemi dan sektor terdampak pandemi COVID-19 dalam kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) tahun 2022. 	Memberikan keringanan biaya bagi pelaku usaha terdampak dalam memperoleh bahan baku tertentu	Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Parekraf • Dinas Pertanian Provinsi • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
c. Kemudahan Memulai Usaha dan Izin Usaha			
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penerapan UU Ciptaker yang konsisten dalam penyederhanaan proses administrasi/birokrasi pendaftaran dan pengurusan izin usaha. 	Meningkatkan jumlah usaha baru, mempermudah izin usaha, dan melindungi operasional usaha eksisting	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> • BKPM • DPMPTSP Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU Cipta Kerja 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
Strategi Utama 4. PENINGKATAN CITRA BALI SEBAGAI BALI AMAN COVID-19			
a. Membangkitkan citra Bali sebagai destinasi wisata yang sehat dan aman			
<ul style="list-style-type: none"> Mengampanyekan jargon khusus yang mudah diingat dan mampu menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara (Misal: <i>Healthy Bali, Feel Safe at Bali, Bali COVID-Free, Bali Green Tourism</i>, dll.) 	Meningkatnya kepercayaan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui peningkatan dan pengembangan kesiapan sektor pariwisata	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri Dinas Pariwisata Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan secara paripurna dalam setiap aktivitas ekonomi, terutama daerah wisata 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerja sama antara sektor pariwisata dan kesehatan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan wisatawan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri Kemendagri Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Mengekspos pemberitaan positif tentang citra pariwisata dan meningkatkan promosi wisata. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri Kemendagri Kemendagri Satgas COVID Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kemudahan berwisata (Misal: Implementasi e-visa dan mempermudah proses imigrasi). 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri Kemendagri
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keamanan di sejumlah destinasi wisata populer. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri POLRI POLDA

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Berkolaborasi dengan para <i>influencer</i> (misal: selebriti dan <i>content creator</i>) untuk memasarkan pariwisata Bali secara digital. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan diversifikasi jenis pariwisata. Misalnya, wisata <i>SAVE (Scientific, Academic, Voluntarism, dan Educational)</i>, wisata kesehatan dan kebugaran, dan <i>virtual tourism</i> 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf
b. Menjadikan Bali sebagai lokasi <i>remote working</i> berkelas dunia			
<ul style="list-style-type: none"> Mempromosikan pelaksanaan <i>Work From Bali</i> (WFB) untuk instansi Pemerintah/BUMN/perusahaan swasta 	Menjadikan Bali sebagai lokasi <i>remote working</i> terbaik Indonesia; dan lokasi kerja Digital Nomad terbaik di Dunia	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Marves Kemenparekraf Kemkominfo
<ul style="list-style-type: none"> Memperbanyak pertemuan Kementerian/Lembaga di Bali secara hybrid 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Marves Kemenparekraf
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jaringan internet 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemkominfo Operator Telekomunikasi
<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kemudahan khusus dalam hal peraturan (visa, IMEI, aturan izin tinggal karantina, dll.) bagi para <i>remote worker</i> 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Ditjen Imigrasi Kemenkumham Satgas COVID Provinsi Kemkominfo

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
Strategi Utama 5. REAKTIVASI DESTINASI WISATA BALI			
a. Memastikan Kesiapan Destinasi Wisata			
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat penerapan CHSE secara menyeluruh: Menerbitkan panduan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikasi, Mempersingkat waktu penerbitan dan perpanjangan sertifikat CHSE, Memberikan insentif untuk pelaku usaha pemegang sertifikat CHSE, Menyusun skema akreditasi dan sertifikasi CHSE mandiri (SNI CHSE), Memperkuat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CHSE oleh pemerintah Kabupaten/Kota, Memastikan atraksi dan amenitas pariwisata mengikuti standar CHSE, dan Memperluas penerapan CHSE di titik masuk Bali, terutama di pelabuhan dan bandara, terkait kedatangan penumpang mancanegara, domestik, dan pengangkutan barang. 	Menciptakan destinasi wisata yang memenuhi standar protokol kesehatan	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kememparekraf Dinas Pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat pemeriksaan kesehatan dan protokol kesehatan di titik masuk jalur darat, laut, dan udara titik masuk jalur darat: Menambah alat thermo gun dan thermo scanner, serta tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk, Menambah papan petunjuk navigasi bagi pengguna kendaraan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, dan Menyesuaikan standar internasional protokol penerimaan wisatawan cruise dengan peraturan dalam negeri. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi Kantor Kesehatan Pelabuhan PT ASDP PT Pelindo

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Mensyaratkan Asuransi COVID-19 bagi wisatawan mancanegara 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Satgas COVID Provinsi Kantor Kesehatan Pelabuhan PT ASDP PT Pelindo
<ul style="list-style-type: none"> Membuka Bali sebagai pintu masuk internasional untuk essential business dan charter flight untuk wisatawan mancanegara. 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenhub Kemenkumham Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Memperketat penapisan wisatawan yang berasal dari negara dan daerah dengan tingkat kasus positif COVID-19 yang tinggi (termasuk varian baru). 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kememparekraf Dinas Pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan Bali sebagai tuan rumah KTT G20 2022, meliputi panitia nasional penyelenggaraan, persiapan infrastruktur, dan lain-lain 	Proses kedatangan wisatawan berjalan dengan baik dan mengikuti standar protokol kesehatan yang baik	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> KKP Kementerian Kesehatan
b. Pembukaan Bali yang aman untuk Wisatawan			
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tes PCR bagi wisatawan yang berkunjung ke dan dari Bali (berupa penawaran paket <i>bundling</i> dengan akomodasi/penurunan harga/subsidi) 	Meningkatkan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemda Kementerian Kesehatan Kememparekraf

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong kerja sama dengan Airline, Travel, Pengusaha Hotel & Restoran Program diskon kunjungan ke Bali di atas 5 (lima) Hari atau rentang waktu tertentu yang paling efektif 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf
<ul style="list-style-type: none"> Memberikan Insentif bagi pelaku usaha hotel yang mempekerjakan kembali tenaga kerja kontrak (pemberlakuan jam kerja penuh). Misal: pemberian uang makan/transportasi bagi tenaga kerja. 	Membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja pariwisata yang sempat terkena PHK	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kemenkeu Pemda Prov/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Mempromosikan pelaku usaha hotel dan akomodasi lain yang mendukung konsep <i>zero waste</i> dan <i>circular economy</i> 	Meningkatkan pariwisata ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Dinas Pariwisata Provinsi
c. Kerja sama Bilateral dan Multilateral untuk pembukaan pariwisata			
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait untuk melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dalam upaya percepatan pembukaan pariwisata Melakukan negosiasi dengan negara-negara mitra agar dapat bekerja sama untuk meningkatkan arus wisatawan kedua belah pihak. 	Membuka kembali pariwisata Indonesia dengan sejumlah negara mitra	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkomarves Kemenparekraf Kemenlu Kemenkumham

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
Strategi Utama 6. REAKTIVASI EKONOMI NON-PARIWISATA			
a. Meningkatkan aktivitas Ekonomi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Industri			
<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan infrastruktur pertanian: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangunan jalan usaha tani ○ Rehabilitasi jaringan irigasi tersier termasuk optimalisasi Subak ○ Pembangunan embung pertanian ○ Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) 	Memberi dukungan dan peluang kerja bagi masyarakat terutama masyarakat lokal dan eks pekerja sektor pariwisata yang beralih profesi ke sektor pertanian, perikanan dan industri	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Pertanian ● Kementerian PUPR ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan usaha desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Pertanian ● Kementerian PUPR ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan sarana dan prasarana perikanan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembuatan tambak/kolam ikan/keramba ○ Rehabilitasi sarana dan prasarana konservasi Nusa Penida ○ Pengelolaan dan pemeliharaan terumbu karang ○ Pengelolaan dan pemeliharaan mangrove ● Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), <i>Cold Storage</i> 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Kelautan dan Perikanan ● Kementerian PUPR ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota ● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan usaha perikanan melalui: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemberdayaan nelayan tangkap ikan ○ Pemberdayaan budidaya ikan (udang dan nila) ● Pengelolaan dan pemeliharaan terumbu karang 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Kelautan dan Perikanan ● Kementerian PUPR ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan budidaya Mangrove (program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM)): <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan kompetensi penerima program PKPM dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan budidaya mangrove ○ Pemanfaatan dan pengolahan hasil tanaman budidaya mangrove yang berpotensi menjadi bahan pangan dan menjadi kawasan objek wisata ○ Peningkatan produktivitas tambak yang berkelanjutan dalam kawasan mangrove ○ Pengoptimalan keberadaan Persemaian Permanen di Suwung melalui (i) pemetaan lokasi penanaman dan kelompok masyarakat penerima; (ii) penyediaan dan distribusi bibit sesuai dengan lokasi penanaman; dan (iii) pendampingan untuk meningkatkan keberhasilan penanaman dalam peningkatan tutupan hutan dan kesejahteraan masyarakat 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Lingkungan Hidup ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengoptimalan keberadaan Persemaian Permanen di Suwung melalui (i) pemetaan lokasi penanaman dan kelompok masyarakat penerima; (ii) penyediaan dan distribusi bibit sesuai dengan lokasi penanaman; dan (iii) pendampingan untuk meningkatkan keberhasilan penanaman dalam peningkatan tutupan hutan dan kesejahteraan masyarakat 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Lingkungan Hidup ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya hutan dan danau bagi masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)* ○ Penguatan Pelaksanaan Perhutanan Sosial (Reguler**) ○ Penguatan Pengelolaan Danau Prioritas Nasional (Danau Batur) (Reguler**) 		Semester II 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian LHK ● Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan pelaksanaan reforma agraria: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan Penguasaan dan Pemilihan TORA (termasuk pelepasan Kawasan Hutan) ○ Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian ATR/BPN ● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan sarana dan prasarana peternakan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangunan kandang peternakan hewan ○ Pembangunan kandang peternakan unggas ○ Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas ○ Sarana bidang kesehatan hewan 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Pertanian ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kualitas Sapi Bali melalui inisiasi <i>triple helix</i>: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hijau pakan ternak 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Pertanian ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan dan pemeliharaan tanaman perkebunan dan hortikultura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemeliharaan kebun sumber benih/peremajaan/perluasan/intensifikasi ○ Prasarana perbenihan hortikultura ○ Kawasan hortikultura dan florikultura ○ Sarana pascapanen tanaman perkebunan ○ Sarana pengolahan tanaman perkebunan ○ Sarana pengolahan hortikultura ○ Prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan ○ Area penanganan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman pada Tanaman Perkebunan ○ Penerapan Pengendalian hama Terpadu (PHT) hortikultura 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Pertanian ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas tanaman perkebunan <ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitasi pembinaan kelembagaan pengawasan benih ○ Fasilitasi pembinaan kelembagaan usaha produksi 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Pertanian ● Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM yang mencakup sarana dan prasarana produksi. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Perindustrian ● Disperindag Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kapasitas UKM melalui : (i) Sertifikasi UKM, (ii) Pelatihan meningkatkan kapasitas bisnis UKM/Startup, (iii) Peningkatan kompetensi bidang usaha produktif pada UKM, (iv) Pelatihan pada usaha mikro berbasis kompetensi 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian KUKM ● Dinas KUKM Bali
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan usaha ekonomi desa terintegrasi dengan BUMDes 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Desa dan PDTT
<ul style="list-style-type: none"> ● Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar melalui realisasi Dana Alokasi Khusus Pasar Tematik Pariwisata. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Perdagangan
b. Penyediaan tenaga kerja yang berkualitas			
<ul style="list-style-type: none"> ● Perluasan kegiatan diklat dan sertifikasi tenaga kerja industri pengolahan 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Perindustrian ● Disperindag Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ● Perluasan Pelatihan Kewirausahaan 		Semester II 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Perindustrian ● Kemnaker

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> Disperindag Provinsi/Kab/Kota Disnaker Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Pelatihan-Sertifikasi-Penempatan (Diklat 3-in-1). 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian Kemenparekraf
<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan pemagangan di Perusahaan Dalam Negeri. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian Kemenparekraf
<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Pengembangan BLK Komunitas 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemnaker
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi proses percepatan proses administrasi visa dan izin tinggal bagi tenaga ahli asing yang terlibat langsung dengan proyek hibah atau kerja sama luar negeri yang sedang berjalan 	Mempercepat proyek pembangunan dengan skema hibah atau kerja sama luar negeri	Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kemnaker
c. Reaktivasi ekonomi kreatif			
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi peningkatan kualitas desain kemasan produk melalui: <ul style="list-style-type: none"> Untuk produk kuliner difokuskan agar tahan lama, higienis, dan siap untuk pengiriman jarak jauh Untuk produk kriya difokuskan agar produk berdimensi kecil dan ringan (<i>non bulky</i>) dengan penambahan nilai melalui desain yang berestetika tinggi, mengadopsi tema terkini, dan mengekspos kearifan lokal Bali 	Memperkuat permintaan produk/jasa dan meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kemendag

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ekspor bumbu Bali program "Indonesia Spice Up The World" 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kemenkomarves
<ul style="list-style-type: none"> Mempermudah proses sertifikasi produk kuliner Bali (utamanya Sertifikat BPOM, sertifikat Halal MUI, dll) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kementerian KUKM BPOM
<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan fasilitas kepada para pelaku seni untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan secara virtual 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pemberian order/pesanan pentas virtual atau atraksi langsung dari pemerintah pusat/daerah/ BUMN/swasta kepada para pelaku seni pertunjukan dan musik, serta produk ekonomi kreatif lainnya (seperti ayam betutu kaleng, kopi kintamani, sambal bali, kain bali, kerajinan perak & kayu, dll) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk bekerja sama dengan <i>e-commerce</i> melalui skema Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mengadakan <i>special flash sale</i> produk ekraf Bali 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kemenkomarves
<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Bekraf Denpasar Dinas Pariwisata Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas dan pameran pelaku ekraf melalui kegiatan Kreasi Indonesia 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas pelaku ekraf melalui bimbingan teknis, pendampingan dan Inkubasi bisnis 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kememparekraf
d. Pembangunan Infrastruktur dan Adopsi Teknologi Digital (<i>Bali-wide 100% Digital Coverage</i>)			
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur TIK 	<p>Tercapainya cakupan infrastruktur digital 100% di Bali (<i>Bali-wide 100% digital infrastructure coverage</i> dan berkualitas)</p>	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemkominfo
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan fasilitas (tanah, bangunan) dan / atau infrastruktur pasif untuk pembangunan infrastruktur TIK (misal: gorong-gorong) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan perizinan dan / atau dukungan sarana / prasarana pendukung pembangunan infrastruktur TIK (misal pasokan daya listrik) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan keringanan sewa Sarana jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) untuk mendukung pembangunan infrastruktur TIK 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian hak perlintasan (<i>Right of Way/RoW</i>) untuk jaringan internet / serat optik (misal: jalan / rel kereta api) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan akses terhadap gedung dan kawasan untuk pembangunan infrastruktur TIK (misal: bandara, pelabuhan, pemukiman) 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan terhadap biaya retribusi sesuai aturan yang berlaku 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi/Kab/Kota

Strategi Utama/Sub Strategi Utama/Kegiatan	Sasaran	Jadwal Mulai Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan tarif sewa dan / atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku atau harga yang wajar 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pembinaan dan optimalisasi usaha kecil di Bali dalam memasarkan produk usaha melalui <i>digital marketing</i> dan <i>e-marketplace</i> (melalui media sosial, <i>content marketing</i>, <i>Google search engine position</i>, <i>e-marketing</i>, dll.) 	Tercapainya adopsi teknologi untuk pengembangan desain produk, kemasan dan penampilan, pemasaran, dan penjualan produk barang dan jasa UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata	Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kemkominfo Kementerian KUKM
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong perkuatan <i>aggregator</i> atau <i>online trading house</i> untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan ekspor 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kemkominfo Kemendag Kementerian KUKM
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penguatan pemasaran digital / branding produk Bali (Bangga Buatan Indonesia) di <i>platform e-commerce</i> 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian KUKM emkominfo Kemenparekraf
<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi sektor pertanian peningkatan produktivitas 		Semester II 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Perkuatan data dan Informasi terkait ekspor dalam bentuk penyediaan referensi produk ekspor dan informasi dari <i>market intelligence</i> 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> ITPC Kemendag
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses permodalan bagi <i>start up</i>. 		Semester I 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kemenparekraf Kemkominfo

Keterangan:

*) Kegiatan RHL mangrove difokuskan untuk penanaman sementara pengelolaan dan pemeliharaan sudah diakomodasi dalam usulan yang dipetakan oleh Dit. IPEK. Kegiatan ini berupaya untuk membantu perekonomian nelayan pada masa pandemi. Penanaman mangrove dilakukan secara padat karya oleh para nelayan pada zona tradisional dengan binaan dari BPDASHL Unda Anyar

dan Balai Taman Nasional Bali Barat (BTNBB). Melalui tinjauan lapangan teridentifikasi bahwa kelompok nelayan telah menanam mangrove seluas 8 ha dengan jenis *Rhizophora* spp. di Teluk Terima dan Karangsewu serta di Desa Budeng seluas 20 ha melalui PKPM.

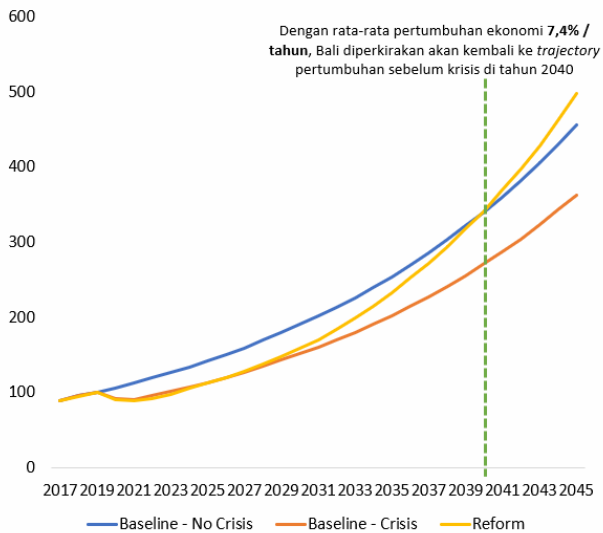
***) Merupakan kegiatan rutin KLHK sehingga kegiatan sudah terlaksana sejak tahun 2021

Lampiran II – Skenario Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang Provinsi Bali

Skenario Pertumbuhan Ekonomi:

Exercise Dampak Jangka Menengah – Panjang Prov. Bali

Dampak Krisis Covid-19 terhadap Trajectory Growth Bali PDB Riil (2019 = 100)



Sumber: Bappenas (2021)

Butuh effort yang luar biasa (extraordinary) untuk memulihkan PDB Bali ke tingkat sebelum krisis

	2019	2020	2021	2022-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
Skenario Pertumbuhan Ekonomi								
1. Baseline - Tanpa Krisis	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2. Baseline - Krisis	5,6	-9,3	-1,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Reform	5,6	-9,3	-2,0	6,1	7,0	8,1	8,0	7,8
Skenario PDB Riil (2019 = 100)								
1. Baseline - Tanpa Krisis	100,0	106	112	130	169	227	304	406
2. Baseline - Krisis	100,0	91	90	104	135	181	242	324
3. Reform	100,0	91	89	102	138	200	295	431

Kontribusi Bali terhadap Perekonomian Nasional (% per 34 Provinsi)

	2019	2020	Baseline					
			2021	2022-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
Peranan Bali terhadap Nasional (% per 34 Prov)								
1. Baseline tanpa krisis	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
2. Baseline - Krisis	1,6	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
3. Reform	1,6	1,4	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9

Lampiran III – Pagu Alokasi DAK Fisik Provinsi Bali TA 2022

Jenis/ Tematik/ Bidang/ Sub- Bidang DAK 2022	Kab. Badung	Kab. Bangli	Kab. Buleleng	Kab. Gianyar	Kab. Jembrana	Kab. Karangasem	Kab Klungkung	Kab. Tabanan	Kota Denpasar	Provinsi Bali	Grand Total
01-Reguler	19.648.727.000	111.442.549.000	68.380.245.000	54.105.637.000	68.512.926.000	42.662.081.000	42.617.427.000	59.149.062.000	40.913.582.000	50.304.265.000	557.736.501.000
01-Pendidikan	8.304.925.000	39.093.893.000	45.515.544.000	28.812.153.000	17.301.210.000	11.969.633.000	14.288.899.000	27.753.410.000	5.554.457.000	35.731.180.000	234.325.304.000
PAUD	1.126.929.000	1.054.815.000	1.703.944.000	438.547.000	384.821.000	331.426.000	511.368.000	-	-	-	5.551.850.000
Perpustakaan	252.322.000	-	270.750.000	9.499.738.000	-	114.000.000	4.500.000.000	-	-	-	14.636.810.000
SD	1.927.154.000	23.473.544.000	33.616.181.000	16.790.574.000	11.797.979.000	8.343.091.000	5.014.670.000	18.812.371.000	1.540.446.000	-	121.316.010.000
SKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.189.918.000	5.189.918.000
SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.295.220.000	14.295.220.000
SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.246.042.000	16.246.042.000
SMP	4.998.520.000	14.565.534.000	9.924.669.000	2.083.294.000	5.118.410.000	3.181.116.000	4.262.861.000	8.941.039.000	4.014.011.000	-	57.089.454.000
02-Kesehatan dan KB	7.295.296.000	32.927.206.000	4.629.911.000	7.700.083.000	12.595.857.000	14.008.910.000	12.689.464.000	12.978.277.000	4.486.767.000	4.867.033.000	114.178.804.000
Kefarmasian	3.325.192.000	3.582.943.000	3.371.164.000	2.821.974.000	3.390.861.000	3.850.952.000	4.820.489.000	2.859.919.000	2.450.373.000	1.439.030.000	31.912.897.000
Keluarga Berencana	207.000.000	703.057.000	749.948.000	308.632.000	251.092.000	741.000.000	489.796.000	1.567.500.000	1.432.267.000	-	6.450.292.000
Pengendalian Penyakit	1.943.785.000	984.029.000	-	410.736.000	514.948.000	1.162.378.000	809.123.000	1.830.236.000	298.300.000	-	7.953.535.000
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	630.531.000	381.135.000	-	1.530.130.000	7.379.042.000	-	4.540.274.000	553.844.000	-	-	15.014.956.000
Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	621.699.000	-	-	152.170.000	335.938.000	1.275.152.000	318.292.000	3.840.569.000	92.251.000	3.428.003.000	10.064.074.000

Jenis/ Tematik/ Bidang/ Sub- Bidang DAK 2022	Kab. Badung	Kab. Bangli	Kab. Buleleng	Kab. Gianyar	Kab. Jembrana	Kab. Karangasem	Kab Klungkung	Kab. Tabanan	Kota Denpasar	Provinsi Bali	Grand Total
Penguatan Sistem Kesehatan	567.089.000	27.276.042.000	508.799.000	2.476.441.000	723.976.000	6.979.428.000	1.711.490.000	2.326.209.000	213.576.000	-	42.783.050.000
03-Jalan	3.411.803.000	23.593.298.000	5.881.912.000	9.037.114.000	31.244.864.000	9.592.370.000	6.579.251.000	7.601.691.000	24.608.347.000	9.706.052.000	131.256.702.000
Jalan Reguler	3.411.803.000	23.593.298.000	5.881.912.000	9.037.114.000	31.244.864.000	9.592.370.000	6.579.251.000	7.601.691.000	24.608.347.000	9.706.052.000	131.256.702.000
04-Air Minum	-	7.981.156.000	5.531.280.000	5.908.796.000	7.370.995.000	4.491.168.000	4.519.615.000	7.307.888.000	3.598.086.000	-	46.708.984.000
Air Minum	-	7.981.156.000	5.531.280.000	5.908.796.000	7.370.995.000	4.491.168.000	4.519.615.000	7.307.888.000	3.598.086.000	-	46.708.984.000
05-Sanitasi	636.703.000	5.532.365.000	4.829.257.000	2.647.491.000	-	2.600.000.000	4.207.866.000	3.507.796.000	2.665.925.000	-	26.627.403.000
Sanitasi	636.703.000	5.532.365.000	4.829.257.000	2.647.491.000	-	2.600.000.000	4.207.866.000	3.507.796.000	2.665.925.000	-	26.627.403.000
06-Perumahan dan Permukiman	-	2.314.631.000	1.992.341.000	-	-	-	332.332.000	-	-	-	4.639.304.000
Perumahan dan Permukiman	-	2.314.631.000	1.992.341.000	-	-	-	332.332.000	-	-	-	4.639.304.000
02-Penugasan	11.340.973.000	-	27.168.987.000	99.920.903.000	39.254.610.000	20.223.206.000	21.658.838.000	44.581.850.000	-	32.628.997.000	296.778.364.000
03-Jalan	6.557.950.000	-	9.464.471.000	6.759.675.000	13.977.000.000	11.808.334.000	5.915.038.000	15.980.865.000	-	19.167.940.000	89.631.273.000
Jalan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	-	-	-	11.808.334.000	-	8.940.865.000	-	9.358.189.000	30.107.388.000
Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM	6.557.950.000	-	9.464.471.000	6.759.675.000	13.977.000.000	-	5.915.038.000	7.040.000.000	-	9.809.751.000	59.523.885.000
08-Irigasi	-	-	-	-	-	1.764.676.000	-	4.510.251.000	-	7.142.620.000	13.417.547.000
Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	-	-	-	1.764.676.000	-	4.510.251.000	-	7.142.620.000	13.417.547.000
09-Pertanian	-	-	-	-	-	1.672.147.000	-	2.969.483.000	-	-	4.641.630.000

Jenis/ Tematik/ Bidang/ Sub- Bidang DAK 2022	Kab. Badung	Kab. Bangli	Kab. Buleleng	Kab. Gianyar	Kab. Jembrana	Kab. Karangasem	Kab Klungkung	Kab. Tabanan	Kota Denpasar	Provinsi Bali	Grand Total
Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	-	-	-	1.672.147.000	-	2.969.483.000	-	-	4.641.630.000
10-Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	721.057.000	-	-	-	1.145.000.000	1.866.057.000
Kelautan dan Perikanan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	-	-	-	721.057.000	-	-	-	1.145.000.000	1.866.057.000
11- Perdagangan	-	-	-	75.000.000.000	-	-	-	-	-	-	75.000.000.000
Perdagangan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM	-	-	-	75.000.000.000	-	-	-	-	-	-	75.000.000.000
12-Industri Kecil dan Menengah	911.023.000	-	754.000.000	9.822.587.000	16.196.858.000	-	-	20.337.251.000	-	-	48.021.719.000
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM	911.023.000	-	754.000.000	9.822.587.000	16.196.858.000	-	-	20.337.251.000	-	-	48.021.719.000
13-Pariwisata	-	-	4.943.866.000	2.822.916.000	4.518.000.000	3.249.992.000	5.971.425.000	-	-	-	21.506.199.000

Jenis/ Tematik/ Bidang/ Sub- Bidang DAK 2022	Kab. Badung	Kab. Bangli	Kab. Buleleng	Kab. Gianyar	Kab. Jembrana	Kab. Karangasem	Kab Klungkung	Kab. Tabanan	Kota Denpasar	Provinsi Bali	Grand Total
Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM	-	-	4.943.866.000	2.822.916.000	4.518.000.000	3.249.992.000	5.971.425.000	-	-	-	21.506.199.000
14- Lingkungan Hidup	3.872.000.000	-	3.601.000.000	1.600.750.000	-	1.007.000.000	1.656.000.000	784.000.000	-	-	12.520.750.000
Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	-	-	-	219.000.000	-	-	-	-	219.000.000
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan DPP dan SIKM	3.872.000.000	-	3.601.000.000	1.600.750.000	-	788.000.000	1.656.000.000	784.000.000	-	-	12.301.750.000
15- Transportasi Perairan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportasi Perairan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16- Transportasi Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportasi Perdesaan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.173.437.000	5.173.437.000

Jenis/ Tematik/ Bidang/ Sub- Bidang DAK 2022	Kab. Badung	Kab. Bangli	Kab. Buleleng	Kab. Gianyar	Kab. Jembrana	Kab. Karangasem	Kab Klungkung	Kab. Tabanan	Kota Denpasar	Provinsi Bali	Grand Total
Kehutanan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.173.437.000	5.173.437.000
18-Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	8.405.650.000	3.914.975.000	4.562.752.000	-	8.116.375.000	-	-	-	24.999.752.000
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan DPP dan SIKM	-	-	8.405.650.000	3.914.975.000	4.562.752.000	-	8.116.375.000	-	-	-	24.999.752.000
Grand Total	30.989.700.000	111.442.549.000	95.549.232.000	154.026.540.000	107.767.536.000	62.885.287.000	64.276.265.000	103.730.912.000	40.913.582.000	82.933.262.000	854.514.865.000

